

**SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 - 1949)
DAERAH JAWA TIMUR**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991**

**Koreksi Naskah :
Soejanto**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945 - 1949) DAERAH JAWA TIMUR

**Tim Penulis :
Heru Sukadri K.
Soewarno
Ny. Umiati RA.**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1991**



Cetakan Pertama : Tahun 1984
Cetakan Kedua : Tahun 1991
Penerbit : Proyek IDSN
Pencetak : CV. Tumaritis

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

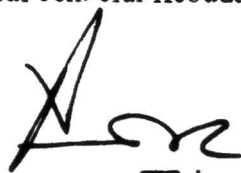
Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Desember 1991
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) di Daerah Jawa Timur adalah salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1984 sebagai cetakan pertama.

Buku ini di samping memuat uraian peristiwa-peristiwa penting dalam masa perjuangan kemerdekaan yang menggambarkan semangat heroisme dan patriotisme para pejuang, juga memuat uraian yang mencerminkan rasa kesetiakawanan sosial seluruh eksponen pejuang, yakni tentara dan rakyat, dalam usaha mempertahankan kemerdekaan khususnya di Daerah Jawa Timur.

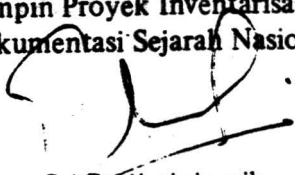
Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara insidental.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan pada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebaran buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ke-sejarahan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Desember 1991

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**



**Dra. Sri Butjatiningsih
NIP. 130 422 397**

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar Cetakan Kedua	v
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Tujuan	3
1.2 Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penulisan	5
 Bab II Keadaan di Daerah pada Masa Pendudukan Jepang (1942 -- 1945)	 8
2.1 Pemerintahan	8
2.2 Sosial Ekonomi	20
2.3 Sosial Budaya	25
2.4 Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Organisasi Politik Sosial dan Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional	32

Bab III	Keadaan di Daerah Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	58
3.1	Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan atau pun yang Merupakan Awal dari Proses Revolusi Kemerdekaan	58
3.2	Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia di Daerah	75
3.3	Pembentukan Organisasi Kemiliteran di Daerah	84
3.4	Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara NICA	105
Bab IV	Perjuangan di Daerah	123
4.1	Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I	123
4.2	Masa Aksi Militer Belanda I	130
4.3	Masa Aksi Militer Belanda II	148
4.4	Interaksi di Daerah dengan Berbagai Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional	169
4.5	Perjuangan Masyarakat pada Berbagai Bidang Kegiatan Kehidupan	208
Bab V	Keadaan di Daerah Menjelang Akhir Revolusi Kemerdekaan	246
5.1	Masa Menjelang Persetujuan KMB	246
5.2	Negara Madura	249
5.3	Sikap Masyarakat dan Pemerintahan Daerah dengan Adanya Konferensi Antar Indonesia ...	251
5.4	Sikap Masyarakat terhadap Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia	256
5.5	Madura Kembali ke Wilayah Provinsi Jawa Timur	260
5.6	Kegiatan masyarakat pada Berbagai Bidang Kehidupan	263
5.7	Pelaksanaan Hasil KMB di Daerah	270

Bab VI Penutup	272
Daftar Sumber	305
Glosarium	316

BAB I PENDAHULUAN

Pada mulanya pemerintahan Hindia Belanda mengenal pemerintahan lokal administratif saja, ini pun hanya pemerintahan lokal administratif jenis umum, sedang jawatan-jawatan pusat masih sangat sedikit jumlahnya. Pemerintahan lokal dilakukan oleh pegawai-pegawai *pangreh praja* secara bertingkat sehingga terdapat tingkat-tingkat daerah pemerintahan *pangreh praja*. Menjelang Perang Dunia II tingkat-tingkat daerah pemerintahan *pangreh praja* ini adalah sebagai berikut:

Di Jawa dan Madura dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan *pangreh praja*, yang tertinggi disebut dengan nama *gewest* atau dapat juga disebut *provincie* atau *gubernuran*. *gewest* ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar *gouvernour* (gubernur). *Gewest* meliputi beberapa *residensi* (keresidenan) yang dipimpin oleh seorang *resident* (residen). Karesidenan dibagi menjadi beberapa *afdeling* yang dipimpin oleh seorang *regent* (bupati) dan dibantu oleh seorang *patih*. Kabupaten dibagi lagi menjadi *district* (kewedanaan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang *wedana*. Tiap-tiap *district* dibagi atas beberapa *onderdistrict* (kecamatan) yang dipimpin oleh seorang asisten *wedana* (camat). Masing-masing *onderdistrict* meliputi beberapa desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Selain pemerintahan pangreh praja yang tumbuh bersama Pemerintah Hindia Belanda tersebut, pada tahun 1903 dengan dikeluarkannya *Decentralisatiewet* (Ind. Stb. 1903 No. 329) oleh Pemerintah Hindia Belanda dibentuk pula pemerintah-pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri di beberapa daerah. *Decentralisatiewet* (Undang-undang Desentralisasi) ini rupanya dianggap kurang sempurna sehingga diadakan perubahan dengan *Bestuurs hervormingswet* tahun 1922 (nd. Stb 1922 No. 216).

Berdasarkan *Bestuurs hervormingswet* 1922 itu di Jawa dan Madura kemudian dibentuk pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri yaitu *provincie* dan *regentschap* dengan daerah-daerah yang sama luasnya dengan daerah pemerintah pangreh praja yaitu *gewest (baru)* dan kabupaten yang bersangkutan. Provinsi diatur lebih lanjut didalam *provincie-ordonantie* (Ind. Stb. 1924 no. 78, perubahan terakhir Ind. Stb. 1940 No. 226, 251) sedangkan untuk *regentschap* daitur lebih lanjut dalam *Regentschap-ordonantie* (Ind. Stb. 1924 No. 79, perubahan terakhir Ind. Stb. 1940 No. 226).¹

Kemudian dalam tahun 1925 muncul *Residentie - Nieuwe Stijl* (residensi gaya baru Stb. 1925 No. 1925 jo. 1928 No. 145 206 dan 207) yang membagi Provinsi Jawa Timur menjadi 15 daerah administrasi yaitu: Surabaya, Mojokerto, Gresik, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Kediri, Blitar, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Bangkalan, dan Pameksan.²

Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur dalam zaman Hindia Belanda yang pernah memimpin Provinsi Jawa Timur antara lain: W.Ch. Handerman (1928 - - 1931), C.H. De Man (1931 - - 1933), J.H.B. Kuneman (1933 - - 1936), CH. O. van der Plas (1936 - - 1941), dan Mr. Ch. Hartevelt (1941 - - 1942).³

Selanjutnya ketika Jepang berkuasa di Indonesia, dalam dekonsentrasi pemerintahannya sebagian besar masih mengikuti susunan pemerintahan Hindia Belanda. Hanya pembagian administrasi menurut provinsi (*gewest*) dihapuskan. Sejak 8 Agustus 1942 Pulau Jawa dibagi dalam 17 *syuu* (semacam *residentie*), sedangkan di bekas daerah Provinsi Jawa Timur pada waktu itu muncul *syuu-syuu*: Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura.⁴ Setiap *syuu* tersebut dipimpin oleh seorang *syuucokan* yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur. *Syuu* Surabaya, misalnya dipimpin oleh *syuucokan* Yasuoka Masaomi.⁵

Dalam organisasi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga gubernur dihidupkan kembali. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan pada 19 Agustus telah memutuskan bahwa untuk sementara waktu dibentuk delapan provinsi dengan gubernur sebagai kepala pemerintahannya. Provinsi Jawa Timur pada waktu itu meliputi keresidenan-keresidenan: Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Besuki, Malang, dan Madura, sehingga sudah sewajarnya apabila pembahasan tulisan ini nanti akan meliputi daerah-daerah keresidenan tersebut.

1.1 Tujuan

Pelestarian warisan budaya bangsa merupakan salah satu unsur penunjang lajunya derap pembangunan dewasa ini. Ruang lingkup kebudayaan secara keseluruhan jangkauannya sebenarnya cukup luas. Hal dimaksud garis besarnya secara jelas dapat diikuti antara lain pada Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR-No.IV/MPR/1978 Bab IV sub D).

Sejalan dengan hal tersebut, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K tahun 1979/1980, atas bantuan Tim Peneliti Daerah Jawa Timur mengerjakan lima aspek kebudayaan daerah Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah aspek

Sejarah Daerah Jawa Timur dengan mengemukakan tema, "Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Pisik) 1945 -- 1949".

Berdasarkan tujuan semula, yakni untuk melengkapi perbendaharaan data dan informasi kebudayaan khususnya tentang Sejarah Daerah Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Pisik), maka penulisan naskah ini masih bersifat eksploratif, berupa inventarisasi data, observasi atau *preliminary research*. Namun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang lengkap walaupun sebagian besar berupa data sekunder.

1.2 Masalah

Jawa Timur sebenarnya merupakan suatu daerah yang memiliki aneka ragam peristiwa sejarah, khususnya masa perjuangan kemerdekaan nasional yang sering dikenal dengan istilah Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Pisik); karena itu di dalam menyusun naskah ini akan dituangkan materi-materi yang cukup memadai. Keterbatasan waktu serta biaya menyebabkan hasil akhir penulisan naskah ini belum sesuai dengan harapan pimpinan di pusat.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, bumi Nusantara berada dalam dekapan penjajahan bangsa asing dari satu tangan ke tangan lain. Ciri khas sistem penjajahan antara lain ialah terjadinya tekanan-tekanan terhadap yang dijajah. Tekanan-tekanan ini sangat terasa di segala bidang, baik ekonomi, sosial budaya maupun politik yang semakin lama semakin terasa bagi sebagian besar masyarakat. Dalam situasi demikian sebagian masyarakat akan bangkit dan bergerak untuk memperjuangkan nasib bangsa serta negaranya. Masa-masa inilah yang sering dikenal dengan sebutan masa perjuangan.

Masa perjuangan kemerdekaan mengalami beberapa fase. Satu fase di antaranya adalah Masa Revolusi Pisik (Revolusi Kemerdekaan). Masa ini di Jawa Timur ditandai dengan serentatan pe-

istiwa sejarah yang sangat penting. Di dalam naskah ini akan dikemukakan peristiwa-peristiwa sejarah mulai dari masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942 - - 1945) hingga menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).

Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang di daerah Jawa Timur ditandai dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang cukup penting beserta ruang lingkupnya, antara lain peristiwa Peta Blitar yang merupakan salah satu bukti kegigihan perjuangan masyarakat dalam merebut kemerdekaan. Hal ini merupakan pendorong atau simbul untuk perjuangan lebih lanjut, baik dari anggota-anggota atau kelompok-kelompok (*daidan-daidan*) Peta maupun kelompok-kelompok pejuang lainnya.

Perlu dikemukakan bahwa organisasi-organisasi baik kemiliteran, semi militer maupun kepemudaan serta organisasi-organisasi yang lain, akhirnya bukan menyokong pemerintahan pendudukan, tetapi justru menambah kecakapan masyarakat guna menentang serta menghancurkan kekuasaan penjajah.

Setelah kemerdekaan tercapai, perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Timur masih dihadapkan pada masa-masa krisis penjajah yang harus dipertahankan dengan segenap kekuatan. Untuk itu dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) di bawah pimpinan Doel Arnowo, Badan Keamanan Rakyat (BKR) di bawah pimpinan Sungkono, Dr. Mustopo, Atmaji, dan lain-lain. Bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, secara lengkap dapat kita simak dalam uraian selanjutnya.

1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penulisan

Penyusunan naskah ini dilaksanakan oleh suatu tim kerja sama antara pihak Bidang Permuseuman Sejarah dan Kerpurbakalaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur dengan FKIS Jurusan Sejarah IKIP Negeri Surabaya. Setiap anggota tim diberi tugas untuk menyelesaikan laporan dari bab-bab tertentu, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam

TOR (*Terms of Reference*). Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian antara lain berupa studi kepustakaan (*library reserach*), wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Sesuai dengan pengarahan pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, maka penelitian ini masih bersifat eksploratif menjurus ke arah *preliminary research* atau penelitian permulaan yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Karena itu apabila ditinjau dari segi metodologi sejarah masih dalam tahap heuristik. Namun demikian, karena pihak pimpinan proyek menghendaki agar supaya naskah laporan berbentuk kisah sejarah, maka data sejarah yang ada secara diskriptif disusun dalam bentuk kisah sejarah.

Sidang Panitia Kemerdekaan Republik Indonesia 19 Agustus 1945 telah memutuskan bahwa daerah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur provinsi Jawa Timur yang pertama adalah RMT. Surio. Keresidenan yang pertamakali dibentuk adalah Keresidenan Surabaya, kemudian Bojonegoro, Kediri, Malang, Madiun. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1948 khusus untuk Pulau Madura dibentuk Negara Madura. Dengan demikian di Jawa Timur saat itu memiliki tujuh keresidenan, yakni Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Bondowoso dan Madura.

Laporan penelitian ini kami bagi menjadi lima bab. Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai tujuan penelitian, masalah, ruang lingkup, dan pertanggungjawaban ilmiah prosedur penelitian. Bab II, keadaan di Daerah pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942 - - 1945), memuat uraian mengenai bidang pemerintahan, sosial ekonomi, sosial budaya dan interaksi di daerah dengan kegiatan organisasi politik/sosial dan kejadian bersejarah tingkat nasional. Bab III, keadaan di Daerah Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, memuat uraian mengenai kegiatan masyarakat yang relevan dengan ataupun yang merupakan awal dari proses Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah, pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di

daerah, pembentukan organisasi kemiliteran (perjuangan bersenjata) di daerah dan kedatangan tentara Sekutu serta tentara Nica di daerah. Bab IV, perjuangan di Daerah, memuat uraian mengenai masa sebelum Aksi Militer Belanda I, masa Aksi Militer Belanda I, masa Aksi Militer Belanda II, periode Perang Gerilya, interaksi di daerah dengan berbagai kejadian bersejarah tingkat nasional, dan perjuangan masyarakat pada berbagai bidang kegiatan/kehidupan. Bab V, keadaan di Daerah Menjelang Akhir Revolusi Kemerdekaan, memuat uraian mengenai keadaan Jawa Timur menjelang Persetujuan KMB, sikap masyarakat Jawa Timur terhadap cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia, kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, dan pelaksanaan hasil KMB di Jawa Timur.

BAB II KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

2.1 Pemerintahan

Bumi Nusantara cukup menarik bagi bangsa-bangsa di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya bangsa lain yang ingin menginjak atau menduduki Indonesia. Sifat masing-masing penjajah juga berbeda, tetapi pada umumnya mereka semua ingin menguras habis kekayaan alam yang terkandung di bumi Nusantara. Karena itu bangsa-bangsa penjajah saling berebut cara untuk merebut simpati bangsa Indonesia pada masa-masa lampau. Demikian juga halnya dengan Jepang. Pada waktu Indonesia masih tersekap dalam penjajah Belanda, radio Tokyo sering memperdengarkan lagu Indonesia Raya¹. Hal ini jelas mempunyai tujuan untuk menarik perhatian dan simpati rakyat Indonesia.

Pada 1 Maret 1942 mulailah pasukan-pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di pulau Jawa yaitu Banten, dekat Kota Indramayu, antara Tayu dan Juana, Kranggan, dan antara Rembang dan Tuban.² Selanjutnya daerah-daerah lain secara berangsur-angsur dimasuki pula oleh pasukan-pasukan Jepang.

Agar tidak terlihat adanya perubahan secara radikal di dalam tata pemerintahan, Jepang masih melangsungkan tata pemerintahan masa Belanda. Sebagai contoh ialah dikeluarkannya

istiwa sejarah yang sangat penting. Di dalam naskah ini akan dikemukakan peristiwa-peristiwa sejarah mulai dari masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942 - - 1945) hingga menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).

Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang di daerah Jawa Timur ditandai dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang cukup penting beserta ruang lingkupnya, antara lain peristiwa Peta Blitar yang merupakan salah satu bukti kegigihan perjuangan masyarakat dalam merebut kemerdekaan. Hal ini merupakan pendorong atau simbul untuk perjuangan lebih lanjut, baik dari anggota-anggota atau kelompok-kelompok (*daidan-daidan*) Peta maupun kelompok-kelompok pejuang lainnya.

Perlu dikemukakan bahwa organisasi-organisasi baik kemiliteran, semi militer maupun kepemudaan serta organisasi-organisasi yang lain, akhirnya bukan menyokong pemerintahan pendudukan, tetapi justru menambah kecakapan masyarakat guna menentang serta menghancurkan kekuasaan penjajah.

Setelah kemerdekaan tercapai, perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Timur masih dihadapkan pada masa-masa krisis penjajah yang harus dipertahankan dengan segenap kekuatan. Untuk itu dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) di bawah pimpinan Doel Arnowo, Badan Keamanan Rakyat (BKR) di bawah pimpinan Sungkono, Dr. Mustopo, Atmaji, dan lain-lain. Bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, secara lengkap dapat kita simak dalam uraian selanjutnya.

1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penulisan

Penyusunan naskah ini dilaksanakan oleh suatu tim kerja sama antara pihak Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur dengan FKIS Jurusan Sejarah IKIP Negeri Surabaya. Setiap anggota tim diberi tugas untuk menyelesaikan laporan dari bab-bab tertentu, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam

TOR (*Terms of Reference*). Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian antara lain berupa studi kepustakaan (*library reserach*), wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Sesuai dengan pengarahan pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, maka penelitian ini masih bersifat eksploratif menjurus ke arah *preliminary research* atau penelitian permulaan yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Karena itu apabila ditinjau dari segi metodologi sejarah masih dalam tahap heuristik. Namun demikian, karena pihak pimpinan proyek menghendaki agar supaya naskah laporan berbentuk kisah sejarah, maka data sejarah yang ada secara diskriptif disusun dalam bentuk kisah sejarah.

Sidang Panitia Kemerdekaan Republik Indonesia 19 Agustus 1945 telah memutuskan bahwa daerah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur provinsi Jawa Timur yang pertama adalah RMT. Surio. Keresidenan yang pertamakali dibentuk adalah Keresidenan Surabaya, kemudian Bojonegoro, Kediri, Malang, Madiun. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1948 khusus untuk Pulau Madura dibentuk Negara Madura. Dengan demikian di Jawa Timur saat itu memiliki tujuh keresidenan, yakni Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Bondowoso dan Madura.

Laporan penelitian ini kami bagi menjadi lima bab. Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai tujuan penelitian, masalah, ruang lingkup, dan pertanggungjawaban ilmiah prosedur penelitian. Bab II, keadaan di Daerah pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942 - - 1945), memuat uraian mengenai bidang pemerintahan, sosial ekonomi, sosial budaya dan interaksi di daerah dengan kegiatan organisasi politik/sosial dan kejadian bersejarah tingkat nasional. Bab III, keadaan di Daerah Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, memuat uraian mengenai kegiatan masyarakat yang relevan dengan ataupun yang merupakan awal dari proses Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah, pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di

daerah, pembentukan organisasi kemiliteran (perjuangan bersenjata) di daerah dan kedatangan tentara Sekutu serta tentara Nica di daerah. Bab IV, perjuangan di Daerah, memuat uraian mengenai masa sebelum Aksi Militer Belanda I, masa Aksi Militer Belanda I, masa Aksi Militer Belanda II, periode Perang Gerilya, interaksi di daerah dengan berbagai kejadian bersejarah tingkat nasional, dan perjuangan masyarakat pada berbagai bidang kegiatan/kehidupan. Bab V, keadaan di Daerah Menjelang Akhir Revolusi Kemerdekaan, memuat uraian mengenai keadaan Jawa Timur menjelang Persetujuan KMB, sikap masyarakat Jawa Timur terhadap cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia, kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, dan pelaksanaan hasil KMB di Jawa Timur.

BAB II KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942 - - 1945)

2.1 Pemerintahan

Bumi Nusantara cukup menarik bagi bangsa-bangsa di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya bangsa lain yang ingin menginjak atau menduduki Indonesia. Sifat masing-masing penjajah juga berbeda, tetapi pada umumnya mereka semua ingin menguras habis kekayaan alam yang terkandung di bumi Nusantara. Karena itu bangsa-bangsa penjajah saling berebut cara untuk merebut simpati bangsa Indonesia pada masa-masa lampau. Demikian juga halnya dengan Jepang. Pada waktu Indonesia masih tersekap dalam penjajah Belanda, radio Tokyo sering memperdengarkan lagu Indonesia Raya¹ Hal ini jelas mempunyai tujuan untuk menarik perhatian dan simpati rakyat Indonesia.

Pada 1 Maret 1942 mulailah pasukan-pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di pulau Jawa yaitu Banten, dekat Kota Indramayu, antara Tayu dan Juana, Kranggan, dan antara Rembang dan Tuban.² Selanjutnya daerah-daerah lain secara berangsur-angsur dimasuki pula oleh pasukan-pasukan Jepang.

Agar tidak terlihat adanya perubahan secara radikal di dalam tata pemerintahan, Jepang masih melangsungkan tata pemerintahan masa Belanda. Sebagai contoh ialah dikeluarkannya

Undang-undang Nomor 1, 7 Maret 1942, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1: "Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera".
- Pasal 2: "Pembesar balatentara memegang kekuasaan Pemerintahan Militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal".
- Pasal 3: "Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer".
- Pasal 4: "Balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang, begitu juga jiwa, harta yang sah dan agama sekalian rakyat yang tidak berdosa".³

Undang-undang tersebut, pada awalnya dilaksanakan sebagaimana bunyi setiap pasal.:

Misalnya pasal 1 dan 2, guna menjaga keamanan terhadap negara yang baru saja dikuasainya secara hukum internasional, Jepang mengarahkan kekuasaan satu-satunya bagi Indonesia dipusatkan di bawah satu komando yakni dari panglima besar untuk Asia Tenggara: *Nanpoo Gun*, yang berkedudukan di Saigon. Dari Saigon kemudian baru berhubungan dengan Tokyo⁴. Untuk memperlancar jalannya arus komando pemerintah Militer Jepang di Indonesia masih dibagi lagi menjadi tiga pemerintahan yaitu:

- 1) Tentara Keenam belas untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kemudian dinamakan Jakarta),

- 2) Tentara Kedua puluh lima untuk wilayah pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, dan
- 3) Armada Selatan Kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar.⁵

Selanjutnya khusus untuk Jawa masih diadakan lagi pendelegasian dari Pemerintahan Militer yang disebut *gunseibu*, meliputi:

- 1) Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung;
- 2) Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang, dan
- 3) Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya.⁶

Di samping itu untuk wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi ditempatkan opsir-opsir Jepang. Antara lain daerah Tulung

Agung dibawah Kapten *Kawatani*⁷. Dengan demikian jelas bahwa keamanan daerah-daerah jajahan sangat diutamakan atau diperhatikan sekali.

Pasal 3 tentang pemerintahan misalnya, susunannya tetap seperti masa pemerintahan sebelumnya, hanya saja istilahnya diganti dengan istilah Jepang. Susunan pemerintahan yang berlaku sebagai berikut:

Pemerintahan pusat yaitu gubernur jenderal disebut seikosikan.

Gubernur (propinsi)	=	gunseikanbu,	gubernur	=	gunseikan
Karesidenan	si, residen	=	sityo		
Kabupaten	ken, bupati	=	kentyo		
Kawedanaan	gun, wedana	=	guntyo		
Kecamatan	son, camat	=	sontyo		
Kelurahan	ku, lurah	=	kutyo		
Rukun Tetangga	= Tonari Gumi, kepala rukun tetangga	=	tonari gumityo	=	

Dengan tidak berubahnya susunan pemerintahan diharapkan untuk sementara waktu pemerintahan tetap berjalan, sebab untuk

mengubah secara radikal dalam tempo singkat bagi Jepang terlalu sulit.

Pasal 4 tentang kedudukan dan kekuasaan pegawai yang setia tetap dihormati, seperti misalnya; Bupati Magetan tetap dipegang oleh R.M.T.A. Suryo⁹ Bupati Madiun tetap dipegang oleh R.M.T.A. Kusnendar.¹⁰

Dengan demikian jelas bahwa undang-undang tersebut merupakan satu-satunya undang-undang mengenai pokok-pokok ketatanegaraan waktu itu.

Demikian pula mengenai susunan pengadilan Jepang juga hanya meneruskan sistem pengadilan zaman Belanda dengan sedikit perbedaan. Jelasnya sebagai berikut:

Pada zaman Belanda ada beberapa lembaga pengadilan yaitu:

- 1) *Raad van Justitie* : pengadilan untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- 2) *Landraad* : majelis bagi orang-orang Indonesia dan yang disamakan dengan mereka.
- 3) *Residentie-gerecht* : yang dijabat oleh ketua *Landraad* : mengadili perkara-perkara perdata yang nilainya kurang dari 1.500 gulden dan yang tergugatnya orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- 4) *Landgerecht* : dijabat oleh seorang hakim; mengadili perkara-perkara pidana kecil yang jumlahnya agak banyak, pengadilan ini untuk orang-orang dari segala bangsa.

Lembaga lembaga yang telah ada tersebut masa pendudukan Jepang ditambah dengan:

- 1) Pengadilan Negeri – *Tihoo Hooing* merupakan kelanjutan dari landraad.
- 2) Pengadilan Kepolisian – *Keizai Hooing*: sebagai lanjutan dari landgerecht¹¹

Mengenai pengawasan terhadap kantor Pengadilan Negeri dilakukan langsung oleh pembesar-pembesar pengadilan yaitu op-sir-opsir Jepang yang ahli dibidang hukum. Pusat kedudukan pengawas di Madiun. Kepala pengawas dijabat oleh Ikeda. Secara tidak langsung pengawasan dilakukan oleh pembesar-pembesar dari Surabaya. Khusus untuk pengawas Pengadilan Negeri Malang ia harus juga mengawasi semua Pengadilan Negeri di Karesidenan Malang dan Besuki diketuai oleh Kawaci kemudian diganti oleh Takayangi.¹²

Tata pemerintahan sementara tersebut dapat berjalan dengan baik, tetapi rupanya pemerintah pendudukan Jepang belum merasa puas sebab belum menguasai secara mutlak bumi Indonesia. Hal ini disebabkan bendera Merah Putih masih tetap berkibar. Sedangkan untuk melarang secara tegas Jepang masih ragu-ragu. Untuk itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 yang isinya juga tidak jelas, antara lain sebagai berikut :

... "Kegembiraan rakyat dan ucapan selamat datang terhadap Balatentara Nippon waktu mendarat di pulau ini telah terbukti dengan pemakaian bendera Nippon terbuat dari kertas kecil-kecil. Akan tetapi sayang sekali banyak orang yang berbuat tidak senonoh mempergunakan bendera Nippon untuk keuntungannya sendiri, sehingga pemerintah Balatentara Nippon terpaksa melarang memakai bendera Nippon atau tanda Matahari Terbit

Rakyat buat sementara waktu hanya boleh pakai bendera Nippon saja, sedang berupa macam bendera yang belum diakui oleh Pembesar Balatentara Nippon belum boleh dipakai Bendera atau soal memakai bendera itu amat penting, maka

dari itu buat sementara waktu kami harus berhati-hati, apalagi dalam waktu perang. Janganlah kita membuat salah terhadap bendera yang sulit ini”¹³

Larangan pengibarann bendera Merah Putih tersebut jelas merupakan perampasan terhadap hati bangsa Indonesia. Tetapi rupanya Jepang tidak menyadari hal itu. Atau mungkin memang suatu tindakan kesengajaan karena Jepang ingin menguasai Indonesia secara mutlak, buktinya selanjutnya bahkan tindakan Jepang lebih keras lagi baik terhadap bangsa Indonesia maupun bangsa Eropa. Hal ini terbukti dari adanya larangan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan yang boleh diperdengarkan hanya lagu Kebangsaan Jepang yakni *Kimigayo*.¹⁴

Orang-orang Eropa (Belanda) yang masih menduduki jabatan penting sangat mengkhawatirkan bagi Jepang. Karena itu pejabat-pejabat tersebut kemudian diganti sebagian oleh Jepang dan sebagian lagi oleh orang-orang Indonesia.

Pejabat-pejabat yang diganti antara lain:

Burgermester tetakir Mr. W.A.H. Fuchter diganti Rajamin Nasution.¹⁵

gubernur Jawa Timur Mr. Ch. Hartevelt diganti *Yasouka Masami*.¹⁶

Residen Bojonegoro diganti oleh : R.M.T.A. Suryo.¹⁷

Departemen Urusan Umum = *Somobu* Ir. Sukarno.

Departemen Urusan

Departemen Urusan Dalam Negeri = *Naimubu*: dr. Abdul Rasjid

Departemen Kehakiman = *Syihobu*: Prof. Dr. Mr. Supomo.

Departemen Lalulintas = *Kotsubu* : Mochtar bin Prabu Mangkunegoro.

Departemen Propaganda = *Sendenbu* : Mr. Muh. Yamin.

Departemen Ekonomi = *Sangyobu* : Prawoto Sumodilogo.¹⁸

Dengan digantinya beberapa pejabat bangsa Belanda maka banyak orang Belanda yang melarikan diri ke luar negeri. Seba-

gian yang masih tinggal di Indonesia ada yang ditangkap dan ada yang disuruh mendaftarkan diri. Untuk itu pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 7, yang isinya antara lain: Semua bangsa asing laki-laki perempuan yang umurnya lebih dari 17 tahun, kecuali rakyat Jepang dan rakyat Indonesia, diharuskan mendaftarkan diri menurut aturan yang tertentu. Semua orang yang hendak mendaftarkan diri diwajibkan membayar upah pendaftaran sebagai berikut :

- 1) bangsa Eropa, laki-laki 150 rupiah perorang, perempuan 80 rupiah perorang.
- 2) bangsa Cina dan lain-lain bangsa Asia (Arab, India dan lain-lain bangsa bukan Eropa), laki-laki 100 rupiah perorang dan perempuan 50 rupiah perorang.

Pada waktu mendaftar mereka harus menyatakan sumpah setia kepada tentara Jepang. Mereka yang tidak mendaftarkan diri dan tidak menyatakan sumpah setia, tidak akan mendapat perlindungan dalam hidupnya.¹⁹

Taktik penjajahan Jepang rupanya berbeda dengan taktik penjajahan Belanda. Jepang secara cepat bertindak untuk kepentingannya sendiri. Hal ini terbukti setelah orang-orang bangsa Eropa ditekan, maka untuk untuk mengambil hati bangsa Indonesia penduduk pribumi mulai didekati. Hal ini dilakukan sebenarnya untuk kepentingan sendiri yakni dalam rangka perluasan jajahan untuk menguasai Asia Timur Raya. Untuk itu maka pada tanggal 29 April 1942 didirikan gerakan Tiga A, yang semboyannya adalah: Jepang pemimpin Asia; Jepang pelindung Asia dan Jepang cahaya Asia.

Sebagai pimpinan gerakan tersebut Jepang sengaja tidak memilih tokoh nasionalis sebab Jepang membayangkan bahayanya. Untuk itu dipilih Mr. Raden Samsudin. Dengan didirikannya gerakan tersebut Jepang berharap agar lapisan masyarakat dapat masuk, sehingga tenaganya dapat dikerahkan untuk Perang Asia Timur Raya.²⁰ Khusus untuk barisan pemudanya dibentuk lagi organisasi tersendiri yakni: Pemuda Asia Raya yang dipimpin oleh Sukardjo Wirjopranoto.²¹

Rupanya gerakan-gerakan tersebut tidak menimbulkan simpati rakyat. Untuk itu atas usul kaum nasionalis Indonesia yang diwakili oleh Ir. Sukarno dibentuk suatu gerakan baru yakni "Pusat Tenaga Rakyat" disingkat Putera. Sebagai pemimpinnya dipercayakan kepada empat tokoh nasionalis yang kemudian dikenal dengan sebutan "Empat Serangkai". Keempat tokoh tersebut ialah: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mansur, dan Ki Hadjar Dewantara.²²

Gerakan yang dipimpin oleh kaum nasionalis tersebut mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, bahkan merupakan tempat terbentuknya tenaga baru yang bersifat nasional. Tentu saja hal ini tidak disenangi Jepang, bahkan lama kelamaan Jepang merasa takut, karena itu akhirnya Putera dibubarkan. Dengan bubarnya Putera, Jepang masih merasa perlu untuk mendirikan organisasi baru. Apalagi kekuatan Jepang diluar Indonesia saat itu mulai menurun. Untuk itu pada tanggal 1 Maret 1944 didirikanlah organisasi baru yakni "Perhimpunan Kebaktian Rakyat" atau dikenal dengan istilah Jepang "Djawa Hokokai". Organisasi ini langsung dipimpin oleh *gunseikan*, kepala pemerintahan militer Jepang.²³

Walaupun organisasi tersebut telah dipimpin langsung oleh *gunseikan*, namun Jepang masih merasa khawatir terhadap gerakan kaum nasionalis. Dilain pihak Jepang sangat memerlukan bantuan rakyat Indonesia untuk menyokong dirinya yang sudah mulai lumpuh akibat serangan balasan Amerika Serikat. Untuk itu, agar dapat memperoleh bantuan dari rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari".

Untuk meyakinkan kaum nasionalis Indonesia maka pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan", yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah dr. Radjiman Wediodiningrat dan R. Pandji Suroso sebagai wakilnya. Badan tersebut beranggotakan 59 (limapuluh sembilan) orang, yang antara lain terdiri dari: Sukarno, Hatta dan kaum nasionalis lainnya dan ditambah sembilan orang bangsa

Jepang. Kemudian pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 badan ini mengadakan sidang pleno. Pada sidang pleno tersebut disampaikan beberapa pidato antara lain Ir. Sukarno yang mencetuskan filsafat Indonesia merdeka sebagai berikut:

- Dasar pertama : Nasionalisme.
- Dasar kedua : Internasionalisme atau Sosio Nasionalisme.
- Dasar ketiga : Demokrasi (*Consent*)
- Dasar keempat : Keadilan Sosial atau Sosio Demokrasi.
- Dasar kelima : Percaya kepada satu Tuhan – Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima dasar filsafat Indonesia merdeka ini oleh Ir. Sukarno diuraikan secara panjang lebar. Perlu ditambahkan bahwa pidato Ir. Sukarno tersebut tidak ditulis terlebih dahulu (konsep) melainkan ditulis dengan stenopada saat pertemuan itu.²⁴

Janji Jepang tersebut bagi rakyat Surabaya masih merupakan kesangsian (keragu-raguan). Hal ini terjadi mengingat kekejamannya Jepang yang telah dilakukan terhadap rakyat Jawa Timur. Misalnya terhadap Pamuji, A. Rahum, Sukayat dan lain-lain, yang telah meninggal dunia akibat siksaan *Kempetei* Jepang. Disamping itu, Cak Dul Arnowo selama setahun dijebloskan dalam sel gelap. Demikian juga Ir. Darmawan Mangunkusumo selama beberapa minggu ditahan. Rakyat Surabaya setiap malam mendengar anjing-anjing menggonggong dan menyerang para tahanan, diselingi dengan teriakan dan rintihan mereka yang disiksa.²⁵ Disamping itu masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh rakyat Jawa Timur antara lain di Malang, para pimpinan Parindra dijeblokan di penjara Lowokwaru selama kurang lebih enam bulan. Mereka ini antara lain Poeger, Soerjatmodjo, Wartono, Supangkat, Suhendro dan lain-lain.

Karena itu ketika tentara militer Jepang meminta kesanggupan para pemuda Indonesia untuk membantu Jepang, apabila tentara Sekutu mendarat di Jawa tidak mendapat tanggapan baik. Pemuda-pemuda antara lain Kustur dan Subiantoro bahkan mengajukan tuntutan, kalau Indonesia merdeka seka-

rang, pemuda-pemuda mau memanggul senjata melawan Sekutu.²⁶ Tuntutan pemuda-pemuda tersebut tentu tidak akan dipenuhi Jepang.

Memang sebenarnya Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya satu dokumen ialah *Osamu Shudan, Java no Kizoku ni Konsuru Iken* (*Osamu Command* usul mengenai Jawa yang akan datang), yang ditemukan di Institut *Ohkuma*, Universitas Waseda. Pokok isinya ialah bahwa Jawa akan diberikan otonomi tingkat tinggi, bukan kemerdekaan.²⁷ Dengan demikian jelas bahwa Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tetapi hanya akan menjadikan daerah otonomi. Janji Jepang akan memberikan kemerdekaan dikelak kemudian hari ternyata hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu, guna tetap mempertahankan kekuasaannya di Asia Timur Raya.

Rupanya pemuda-pemuda Indonesia tidak mudah termakan oleh bujuk-rayu Jepang karena itu begitu mendengar berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu, kaum nasionalis langsung mengadakan pertemuan pada 15 Agustus 1945 pukul 8 malam. Pertemuan diadakan di ruang belakang *Bacteriologisch Laboratorium* Pegangsaan Timur. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Chairul Saleh, Darwis, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abubakar, Eri Sudewa, Wikana dan Armansyah. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa: "Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang atau kerajaan lain. Untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah sanggup merdeka dan sudah tiba saatnya merdeka baik menurut keadaan atau kodrat maupun historis, maka jalan satu-satunya yaitu: dengan proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa asing, bangsa apapun juga."²⁸

Pada saat Jepang menyerah pada Sekutu dan Sekutu belum datang di Indonesia, maka untuk sementara waktu Indonesia

mengalami kekosongan. Pada saat itulah para pemuda mende-sak kepada Ir. Sukarno dan Hatta agar secepatnya memprokla-masikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Ir. Sukarno dan Hatta masih menanti adanya berita yang resmi, walaupun kemerdekaan jelas sudah dipersiapkan.²⁹

Rupanya para pemuda sudah tidak sabar lagi menanti be-rita resmi. Akhirnya pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 Ir. Sukarno beserta keluarga dan Hatta dibawa keluar kota yakni ke Rengas Dengklok. Alasan para pemuda keadaan kota sangat genting, sehingga keamanan Sukarno – Hatta terancam. Untuk itu mereka dibawa ke Rengas Dengklok tempat asrama tentara Pembela Tanah Air, yang dianggap sudah menjadi daerah Re-publik Yang akan dilahirkan.³⁰

Kemudian sore hari 16 Agustus 1945 Mr. Subardjo datang menjemput Sukarno – Hatta dari Rengas Dengklok. Bersama mereka ikut juga Sutardjo dan Sukarni. Malam itu juga segera dimaklumkan bahwa Proklamasi Indonesia Merdeka hanya ditandatangani oleh Sukarno – Hatta atas nama bangsa Indo-nesia dan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.³¹

Jadi jelas bahwa Kemerdekaan Indonesia itu buatan bangsa Indonesia sendiri. Bahkan satu jam setelah Proklamasi Kemer-dekaan tersebut datang utusan Jepang, yang ingin bertemu dengan Bung Karno. Mereka disuruh *gunseikan* (Kepala Peme-rintahan Militer) untuk melarang Bung Karno mengucapkan Proklamasi. Tetapi Bung Karno sudah mengucapkannya satu jam yang lalu.³²

Berita Proklamasi Kemerdekaan tersebut segera tersiar ke seluruh rakyat Indonesia. Di Surabaya anak-anak sekolah pun ikut mempercepat penyebaran berita kemerdekaan tersebut. Antara lain dengan cara menempel bendera Merah Putih yang diberi huruf hitam cetakan berbunyi "Milik Republik Indonesia" Penempelan sengaja diletakkan pada tempat-tempat yang jelas dan mudah dilihat misalnya ditoko-toko, kantor-kantor, juga di mobil-mobil. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan benda-

benda tersebut, sebab sangat dikhawatirkan karena bencinya rakyat Indonesia terhadap Jepang, maka benda-benda tersebut akan dihancurkan.³³

Bagi negara yang baru merdeka wajar bila sering terjadi kesimpang siuran pendapat. Ada sementara yang mengatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia diberikan oleh Jepang. Tetapi syukur alhamdulillah sumber berita tersebut segera diketahui yakni: adanya surat dari *Van Der Plas* (Wakil Pemerintah Belanda pada pimpinan tentara Sekutu di Asia Tenggara) kepada Letnan Gubernur Jendral *van Mook* di Australia tertanggal 18 Agustus 1945. Salah satu lembarannya menyebutkan adanya orang-orang Jepang yang menjabat di departemen-departemen penting. Hal ini dinyatakan untuk membuktikan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah buatan Jepang.

Dengan telah terbongkarnya berita tersebut pemuda-pemuda Indonesia berusaha meningkatkan kewaspadaan, demi kelangsungan Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu pemuda-pemuda Indonesia tampil ke depan dan mengambil tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Berita Proklamasi dikumandangkan ke seluruh pelosok tanah air dan ke segenap penjuru dunia oleh pemuda-pemuda yang bekerja di Kantor Berita dan PTT serta instansi lainnya.
- 2) Pemuda-pemuda yang bekerja di jawatan-jawatan mengambil alih jawatan-jawatan dari tangan Jepang dengan atau tanpa kekerasan.
- 3) Pemuda-pemuda bekas PETA, *HEIHO* dan *KNIL* (tentara Hindia Belanda) bergabung menjadi Barisan Keamanan Rakyat.
- 4) Milik Pemerintah Jepang seperti gedung, mobil dan lain-lain dinyatakan "milik RI".
- 5) Slogan-slogan dan semboyan-semboyan perjuangan ditempelkan atau ditulis dengan cat pada tembok-tembok dan dinding-dinding kereta api/trem dan lain-lain.³⁴

2.2 Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daerah, baik yang menyangkut masalah pemerintahan/politik maupun ekonomi. Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, cukup mengacaukan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, walaupun pada mulanya Jepang mengumandangkan semboyan sebagai saudara tua, Jepang Indonesia sama-sama. Tetapi kenyataannya sifat *fascis* militeris Jepang yang mempunyai tujuan untuk menguasai Asia Timur Raya tidak dapat disembunyikan lagi. Seluruh lapisan masyarakat harus berlatih kemiliteran bahkan sampai kepada isteri-isteri pamong praja, tetapi kegiatannya diutamakan kepada kaum muda. Semua kegiatan pemuda yang pada masa pemerintahan Belanda diperbolehkan ada wadahnya pada masa Jepang dilarang, kecuali wadah khusus yang ditentukan oleh Jepang. Sampai pada rapat-rapat saja awal mula pendudukan Jepang sudah melarangnya, bahkan dikeluarkan undang-undang. Undang-undang dimaksud ialah undang-undang nomor 3 tanggal 20 Maret 1942, yang isinya antara lain sebagai berikut : "Dilarang segala macam perbincangan, pergerakan dan anjuran propaganda perihal peraturan dan susunan negara". Undang-undang ini diberi penjelasan antara lain sebagai berikut: "Maksud undang-undang itu ialah supaya rakyat umum tinggal tetap dan tenang hatinya dan tidak berkobar-kobar kepada harapan yang bukan-bukan. Maka dari itu janganlah merasa kecewa atau kuatir karena aturan yang baru ini. Peraturan ini hanya buat sementara waktu saja untuk mencegah kekalutan atau kekeruhan dalam udara Politik di negeri ini. Sekarang baru saja kami dapat melenyapkan kekuasaan musuh kita dan baru kami mulai membuat perhubungan dengan teman-teman dan saudara-saudara muda kami. Dalam hal yang demikian rakyat hendaklah memikirkan sedalam-dalamnya bagaimana jalannya untuk bekerja sama yang paling berfaedah. Sebagai telah diterangkan oleh pemerintah Nippon, kami tidak mengandung niatan akan memperbudak rakyat Indonesia seperti dilakukan oleh bangsa Belanda. Berulang-ulang kami ucapkan, bahwa mak-

sud kami ialah menyadarkan atau menghidupkan kembali ke-makmuran rakyat”³⁵

Dengan demikian jelas bahwa pada saat itu aktivitas masyarakat sangat ditekan. Dari segi sosial masyarakat sangat tergantung dari kelonggaran Jepang. Untuk menjaga agar prasarana ekonomi tetap terpelihara dengan baik Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor Istimewa dikeluarkan pada 2 Maret 1942 yang isinya antara lain sebagai berikut: Mengancam dengan hukuman mati atau hukuman berat lainnya menurut hukum militer Jepang terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang itu. Antara lain barang siapa yang melanggar atau menjadi musuh kepada tentara Jepang, siapa yang merusak atau menghancurkan pabrik-pabrik minyak tanah, parit-parit, onderneming-onderneming dan sumber-sumber, jalan-jalan kereta api, alat-alat telepon dan telegram, dan sebagainya. Hal itu ditegaskan sehubungan dengan adanya usaha bumi hangus dari barisan-barisan perusak Hindia Belanda seperti yang pernah mereka lakukan terhadap pabrik minyak di Cepu.³⁶

Dengan adanya peraturan tersebut, sarana ekonomi dapat di pelihara dengan baik dan Jepang tinggal mengembangkannya. Tetapi kenyataannya masyarakat Indonesia tetap tidak dapat ikut mengenyam hasilnya. Seperti misalnya empat buah pabrik gula di Madiun juga tidak mengalami kerusakan, sehingga jalan terus. Hanya saja pada awal pemerintahan Jepang, karena belum mempunyai tenaga ahli, maka untuk sementara waktu tenaga ahli Belanda masih dipertahankan.³⁷

Disamping itu Jepang juga membentuk bagian khusus perekonomian (*keizaibu*) yang bertugas merancang aturan-aturan untuk memperkuat keadaan ekonomi di daerahnya dengan mengingat petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh *gunseikanbu*. Pada permulaannya *keizaibu* hanya mengeluarkan anjuran-anjuran, tetapi kemudian berubah menjadi peraturan-peraturan yang memaksa. Misalnya mengenai penanaman bahan makan dipekarangan-pekarangan. Kemudian disusul dengan anjuran-anjuran bahan pakaian seperti kapas, kapuk randu, rami nanas

dan sebagainya. Selanjutnya dimulai dengan pendaftaran pohon kelapa, sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam, bebek, entok, Pohon dan hewan yang telah didaftar ini akhirnya dibeli Jepang dengan harga pemerintah.³⁸

Harga yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut biasanya lebih murah dari harga pasar. Dengan banyaknya barang yang harus dijual pada pemerintah akibatnya tidak banyak barang yang beredar di pasar. Dengan demikian harga swasta cenderung naik terus. Semula kenaikan harga ini ditekan bahkan ditindak tegas oleh tentara Jepang namun pada akhirnya tidak bisa dikendalikan. Hal ini disebabkan karena tindakan Jepang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Contoh yang pernah terjadi di Tulungagung, ada seorang penjual tetes (cairan untuk campuran minuman kuda) yang menaikkan harga kemudian dilaporkan kepada tentara pendudukan. Penjual tersebut dijemur di panas matahari dan siapa saja yang lewat boleh memukul dengan apa saja yang ada. Hal ini menunjukkan adanya propaganda kejam dari pemerintah Jepang.³⁹

Selanjutnya mengenai hasil jerih payah dalam penanaman padi, rakyat sangat ditekan yakni:

- 40% : menjadi milik rakyat.
- 30% : harus disetor kepada Pemerintah melalui *Beikoku Seimeigyo Kumisi* (kumisi penggilingan padi), yang dibeli dengan harga pemerintah.
- 30% : disediakan untuk bibit dan harus disetor ke lumbung desa⁴⁰

Jadi jelas bahwa hasil jerih payah rakyat sendiri hanya sedikit saja yang dapat dinikmati. Lagi pula harga yang ditentukan oleh pemerintah tersebut sangat rendah. Karena itu secara diam-diam rakyat menjual padinya kepada swasta. Akibatnya pemerintah merasa kekurangan bahan pangan.

Terhadap kekurangan beras ini pihak Jepang bertindak dengan keras, namun demikian pemerintah Jepang tidak dapat menanggulangi, jadi masih merasa harus menekan rakyat, untuk itu akhirnya minta nasehat kepada *Sanyo Kaigi* (Dewan Penasehat).

yang anggotanya terdiri dari: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Oto Iskandardinata, Dr. Buntaran Martoadmodjo, Prawoto Sumidilogo, Mr. R. Sartono, Sukardjo Wirjopranoto, R.P. Suroso dan lain-lain. untuk memecahkan masalah beras tersebut *Saiko Syikikan* menanyakan pada Sidang *Cuo Sangi In*, bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengumpulan padi. Untuk itu diadakan sidang pada 8 Januari 1945, *Sanyo Kaigi* menyimpulkan: Bahwa cara-cara pengumpulan padi kurang sempurna disebabkan oleh:

- 1) Musim kemarau yang panjang pada tahun 1944, mengakibatkan panen tidak dapat diharapkan,
- 2) Cara memberikan penerangan mengenai penyeteran padi kepada pemerintah kurang jelas bagi rakyat, bahkan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa padinya dibawa keluar karesidenan, sampai keluar Jawa.
- 3) Struktur masyarakat dan kondisi sosial pada umumnya belum teratur dan masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang, hal ini dapat dibuktikan dengan:
 - a) perlengkapan pemimpin desa masih kurang berkembang untuk dapat menyelesaikan masalah pengumpulan padi, b) solidaritas sosial masih cukup tinggi pada semua lapisan masyarakat desa, khususnya diantara mereka yang berpengaruh; c) adanya pasar gelap merupakan rintangan bagi kelancaran penyeteran padi dan d) pelbagai kecurangan yang timbul, melemahkan gairah petani untuk menyeter padinya.
- 4) kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemindahan padi mulai dari tangan para pedagang sampai menjadi beras di tangan pemerintah.⁴¹

Dalam hal penyeteran padi sebetulnya memang merupakan tekanan pada rakyat kaum tani, sebab dipandang dari sudut harganya saja sudah terlalu jauh bedanya. Misalnya untuk daerah Bojonegoro harga pemerintah ditentukan 10 sen, sedangkan harga pasaran gelap mencapai f 1,20. Dengan kenyataan seperti tersebut akibatnya rakyat petani tidak cukup makan, bahkan untuk benihpun tidak cukup. Sehingga masyarakat pedesaan

hanya makan sekali sehari, itupun tidak dapat kenyang. Bahkan umumnya mereka hanya makan ubi atau singkong. Pakaian, mereka juga jarang yang punya, kecuali berupa bagor sekedar penutup badannya.⁴²

Di samping padi masih ada lagi hasil bumi lain yang dipandang perlu untuk ditingkatkan. Untuk itu diadakan wajib tanam kapas. Sebab sandang dianggap perlu, maka penanaman kapas mulai digalakkan. Untuk Jawa Timur daerah yang dipilih sebagai tempat percobaan ialah daerah Malang, Kediri dan Besuki.⁴³

Untuk jenis-jenis tanaman tertentu rupanya *Gunseikan* juga ikut menentukan. Hal ini terbukti dari jenis tanaman karet. Untuk Jawa Timur semua perkebunan karet dinyatakan bekerja terus, sebab tanaman karet adalah tanaman yang ditunjuk oleh *Gunseikan*.⁴⁴ Jadi jelas bahwa hampir seluruh hasil bumi menjadi perhatian pemerintah Jepang dan semuanya itu sebenarnya adalah untuk kepentingan pemerintah Jepang.

Rupanya perhatian pemerintah Jepang memang sangat menyeluruh sehingga tidak hanya kaum tani saja, kaum nelayan pun tidak luput dari perhatiannya. Di daerah perikanan antara lain di Madura, Jepang mendirikan *Gyogyoo Kumiai*. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar dapat membeli ikan dengan harga murah. Sedangkan jaminan terhadap para nelayan tidak ada. Apabila para nelayan akan memperbaiki perahu mereka yang rusak, mereka tidak diberi bahan. Dengan demikian tindakan pemerintah Jepang menyulitkan para nelayan. Menghadapi hal itu kaum nelayan tidak berani mengungkapkan pendapat sebab dilarang oleh Jepang.⁴⁵

Mengenai sistem peredaran uang, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 yang isinya antara lain ditentukan bahwa untuk keperluan jual beli dan pembayaran lainnya, mata uang yang berlaku ialah uang kertas militer Jepang dan uang rupiah Hindia Belanda. Pemakaian mata uang lain dilarang keras.⁴⁶ Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketengahkan bahwa masalah perekonomian seakan-akan hanya untuk kepentingan pemerintah Jepang.

2.3 Sosial Budaya

2.3.1 Pendidikan

Pada masa pemerintahan pendudukan tentara Jepang, bidang pendidikan seperti halnya bidang yang lain mendapat wadah tersendiri yakni di bawah naungan Departemen Dalam Negeri (Naimubu) atau khususnya Biro Pendidikan (*Bunkyo-yoku*). Biro Pendidikan tersebut kegiatannya antara lain menerbitkan brosur-brosur yang merupakan bahan bacaan bagi setiap seinendan. Termasuk juga buku pelajaran seperti berbaris dapat dipelajari dalam buku "Cara mengajar *Kyoren* untuk Jawa Seinendan"⁴⁷ Jadi brosur-brosur atau buku-buku dimaksud sebagian besar berisi masalah-masalah atau usaha-usaha indoktrinasi bagi angkatan muda atau pemuda.

Ciri khas sifat pemerintahan Jepang ialah militer, maka demi penguasaan Asia Timur Raya, sebagian besar penduduk wilayah jajahannya diarahkan kepada tehnik kemiliteran demikian juga halnya dengan sistim pengajaran dan susunan kurikulumnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengadakan latihan bagi guru-guru di Jakarta, untuk mengindoktrinasi mereka dalam *Hakko Iciu* (kemakmuran bersama). Para peserta latihan diambil dari tiap-tiap daerah/kabupaten. Sesudah selesai latihan mereka harus kembali ke daerah masing-masing, kemudian mengadakan latihan untuk meneruskan hasil-hasil yang diperoleh selama latihan tersebut.
- 2) Sekolah Umum terdiri atas :
 - (a) Sekolah Rakyat 5 tahun (*kokumin gakko*), disamping itu masih ada lagi sekolah desa atau sekolah pertama.
 - (b) Sekolah menengah 3 tahun.
 - (c) Sekolah menengah tinggi 3 tahun.
- 3) Sekolah Guru terdiri dari :
 - (a) Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto syihan gakko*).
 - (b) Sekolah Guru 4 tahun (*Guto syihan gakko*)
 - (c) Sekolah Guru 6 tahun (*Kota syihan gakko*)

Mengenai mata pelajaran, secara keseluruhan pelajaran bahasa

Jepang diutamakan. Kalau masa pemerintahan Belanda, bahasa Belanda hanya diberikan kepada lapisan masyarakat tertentu, maka masa pendudukan Jepang justru sebaliknya. Bahasa Jepang harus dikuasai oleh sebanyak mungkin masyarakat Indonesia.

Khusus mengenai pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak, Jepang sangat memperhatikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jepang bahwa: "Yang paling sulit di antara semua alat yang ada untuk propaganda ialah pengajaran dan pendidikan. Ia dapat dicipta dan diubah sekehendak hati menurut garis politik yang hendak dipropagandakan. Sejak kecil anak dapat disuruh mengasimilasi pelajaran-pelajaran yang menumbuhkan suatu perasaan loyalitas dan membangunkan kesadaran nasional".⁴⁸ Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem penanaman nasionalisme Jepang sudah dimulai sejak masih kanak-kanak. Hal ini dapat dipahami karena orang dewasa sudah mempunyai pendirian yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan sendiri. Karena itu penanaman nasionalisme Jepang terhadap orang-orang dewasa sangat sulit kecuali dengan paksa.

Akhirnya Jepang merasa perlu untuk mengkoordinasi pembentukan sekolah-sekolah. Di Jawa Timur pembukaan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi diawali pada bulan Desember tahun 1942 antara lain Jember.⁴⁹ Kemudian tahun 1943 didirikan Fakultas Kedokteran dan Sekolah Hakim di Jakarta. Fakultas-fakultas itu sifatnya hanya setengah-setengah sebab pelajaran yang diberikan masing-masing hannya 3 tahun untuk fakultas kedokteran dan satu tahun untuk sekolah hakim. Waktu yang singkat itupun sebagian masih dipergunakan untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Jepang.⁵⁰

Mengenai hak mengajar bagi para guru pada masa pendudukan Jepang ada sedikit perbedaan dengan masa penjajahan Belanda. Perbedaan dimaksud sebagai berikut:

Masa Belanda	Masa Jepang
--------------	-------------

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Tidak semua guru boleh | 1. Tidak ada perbedaan je- |
|---------------------------|----------------------------|

- | | |
|--|--|
| mengajar anak priyayi | nis sekolah sehingga para guru bebas mengajar. |
| 2. Khusus mengajar sekolah dasar untuk anak-anak kalangan bawah. | 2. Boleh mengajar anak-anak kalangan atas. |
| 3. Khusus mengajar sekolah dasar untuk anak-anak priyayi. | 3. Harus mengajar di sekolah menengah. |

51

Adanya sedikit kebebasan mengajar bagi para guru tersebut cukup menggembirakan, baik bagi para pengajar (guru), maupun bagi para siswa dan masyarakat. Tetapi sayang rupanya situasi semacam ini tidak berlangsung lama. Sebab tidak lama kemudian Jepang sangat membutuhkan bantuan masyarakat untuk tujuan perang Asia Timur Raya atau menghadapi Sekutu. Untuk itu Jepang mengerahkan sebagian besar rakyat Indonesia dari anak-anak, pemuda, dewasa, laki-laki atau perempuan diarahkan untuk peperangan. Dengan demikian pada akhir pemerintahan pendudukan Jepang, keadaan pendidikan kurang menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, Jawa Timur khususnya.

2.3.2 *Seni Budaya*

Dalam hal kebudayaan, Jepang juga berusaha menjeptangkan Indonesia, atau membatasi gerak langkah kebudayaan Indonesia. Untuk itu pada 20 Maret 1942 dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua perkumpulan-perkumpulan. Tetapi kemudian pada 15 Juli 1942 peraturan agak diperlonggar yakni diperbolehkan mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya hiburan misalnya: perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan mengadakan plesir dan senang-senang, gerak badan, kesenian, drama dan sebagainya. Sebelum mengadakan perkumpulan-perkumpulan tersebut, pemimpinnya terlebih dahulu harus

bersumpah tidak akan menjalankan aksi-aksi politik.⁵² Dengan demikian jelas bahwa gerak kaum nasionalis Indonesia dalam bentuk apapun sangat dibatasi.

Tindakan Jepang dalam kaitannya dengan politik tidak tanggung-tanggung walaupun lewat kebudayaan. Suatu contoh Cak Durasim tokoh ludruk Surabaya, karena di dalam ucapannya tidak menguntungkan Jepang, maka Cak Durasim ditangkap dan dianiaya oleh *Kempeitai Jepang* hingga meninggal dunia. Ucapan-ucapan Cak Durasim tersebut antara lain sebagai berikut:

Pegupon omahe doru
*Melok Nipponn tambah soro.*⁵³

Maksud dari kata-kata tersebut ialah: Pegupon rumahnya burung dara, ikut Nipon tambah sengsara. Kata-kata tersebut oleh Jepang dianggap kurang benar sebab tidak merupakan propaganda Jepang. Perlu dikemukakan di sini bahwa Cak Durasim pada tahun 1976 diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional yang berhak mendapatkan hadiah seni. Tetapi usul dimaksud sampai saat ini belum memperoleh jawaban.⁵⁴ Namun demikian pada tahun 1970 ia mendapat Anugerah Seni dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mashuri S.H.).

Selanjutnya dalam jenis-jenis sandiwara, Jepang mengawasi secara langsung, bahkan artis-artis Jepang sebagian masuk ke dalamnya. Sandiwara yang ada di Surabaya antara lain "*Bintang Surabaya*".⁵⁵ Dengan masuknya sebagian dari artis-artis Jepang tersebut ternyata justru menguntungkan bagi perkumpulan sandiwara, sebab peraturan-peraturannya kemudian diperlonggar.

Namun mengenai kehidupan kebudayaan yang lain belum seperti yang diharapkan misalnya mengenai kehidupan sastra, Jepang masih melakukan sensor secara ketat. Karya sastra dapat muncul hanya melalui saluran-saluran resmi Jepang. Keadaan itu membuat para sastrawan merasa tidak ada kesempatan untuk menyiarkan hasil sastranya atau menuangkan

perasaannya. Sehingga akibatnya api terus menyala secara diam-diam atau menjalar dibawah tanah.⁵⁶

Disamping itu untuk lebih menjepangkan Indonesia, Jepang berusaha menanamkan semangat *busyido* (semangat kesatria Jepang), semangat *samurai* (kepahlawanan, masa lampau kaum samurai ialah golongan tentara yang merupakan tulang punggung kekuatan para *syogun*, kedewasaan dan keagungan *Tenno Haika*, penanaman unsur *Konfusionisme*, agama *Syinto* dan sebagainya.⁵⁷ Dengan demikian unsur kebudayaan Jepang betul-betul dituangkan pada masyarakat Indonesia. Hal ini jelas bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar hubungan antara Jepang dan Indonesia.

Selanjutnya untuk menghilangkan sisa-sisa kebudayaan penjajahan Belanda, nama-nama kota pun harus diganti dengan bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Kesemuanya itulah sebenarnya yang dinamakan imperialisme kebudayaan.⁵⁸ Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu kebudayaan Indonesia banyak dialiri oleh unsur-unsur kebudayaan Jepang, walaupun mungkin kurang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

2.3.3 Komunikasi Masa

Setiap penjajah pada awal tindakan tentu mengadakan komunikasi terhadap masyarakat, baik komunikasi secara langsung (saling berhadapan) maupun komunikasi secara tidak langsung (dengan media). Di dalam komunikasi dimaksud biasanya terdapat dua saluran yakni saluran dari penjajah yang bertujuan untuk mengadakan propaganda kepada masyarakat dan saluran dari masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Demikian juga halnya dengan sistim yang dilontarkan oleh Jepang.

Untuk tujuan dimaksud khususnya dalam melancarkan propaganda, Jepang cukup berhati-hati. Jepang merasa akan

lebih berhasil apabila mempergunakan tenaga-tenaga pribumi Jepang kemudian memperhatikan kondisi pribumi, yaitu dengan mendekati tokoh-tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat saat itu. Tokoh yang disegani masyarakat saat itu ialah para ulama, para guru dan para pamong praja. Mereka inilah yang pertama-tama dipengaruhi unsur-unsur Jepang.⁵⁹ Dengan mempengaruhi orang-orang tersebut Jepang mengharapkan akan lebih mudah untuk mengembangkan kepada yang lain. Dengan demikian jelas bahwa Jepang cukup matang dalam menjalankan taktik propaganda.

Selain itu demi menghadapi masa depan yang sangat menentukan jalannya roda pemerintahan, Jepang merasa sangat perlu untuk mendekati para pemuda. Selanjutnya, para pemuda lah yang kemudian mendapat giliran untuk dipengaruhi unsur-unsur Jepang.⁶⁰ Dalam hal tersebut rupanya Jepang mengalami kesulitan sebab baik kelompok orang yang disegani maupun para pemuda tidak semudah yang diharapkan Jepang. Akhirnya Jepang melakukan tindakan kekerasan.

Pertama-tama Jepang menyegel radio dengan tujuan agar rakyat tidak dapat mendengarkan siaran-siaran radio sekutu. Rakyat hanya diperbolehkan mendengarkan siaran berita resmi dari pemerintah. Surat kabar yang ada juga dilarang terbit, sambil menunggu penerbitan dari pemerintah.⁶¹ Dengan adanya larangan tersebut maka pemuda Indonesia terpaksa menyebarkan berita secara diam-diam, sebab kalau diketahui *Kempeitai* niscaya jiwa mereka sebagai taruhannya.⁶²

Di Surabaya semua surat kabar juga dilarang terbit. Kemudian pemerintah Jepang menerbitkan surat kabar *Soeara Asia* di bawah pimpinan R. Tutul Surohadinoto⁶³ Surat kabar tersebut di Surabaya beredar mencapai 23.000 (dua puluh tiga ribu) oplag.⁶⁴ Suatu peredaran surat kabar yang cukup luas untuk ukuran waktu itu.

Untuk mengendalikan isi, bentuk serta jumlah surat kabar yang beredar di Jawa', Jepang mengadakan badan

perserikatan (gabungan) surat kabar yang diberi nama *Jawa Shinbun Kai*. Badan ini bertugas sebagai pengawas terhadap pelaksanaan penerbitan surat-surat kabar yang ada. Jepang kemudian mengangkat dan menempatkan beberapa orang wartawan bangsa Jepang yang diberi kedudukan sebagai penasihat (*Syidobuco*) pada *Jawa Shibun Kai*.⁶⁵ Badan penasihat tersebut kenyataannya tidak melancarkan jalannya penerbitan tetapi justru sebaliknya yakni menghambat jalannya penerbitan.

Disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam hal penerbitan surat-surat kabar, maka beberapa orang mahasiswa dari *Kenkoku Gakuin* (Sekolah Pamongpraja) bersama-sama menerbitkan harian Berita Indonesia. Para mahasiswa dimaksud antara lain: S. Tahsin, S. Tasrif, M.S. Sjaaf.⁶⁶ Rupanya jalannya penerbitan surat kabar pemerintah semakin seret, di lain pihak para wartawan Indonesia semakin berkembang dan dapat menguasai persurat kabaran, sehingga beberapa surat kabar dapat dikuasai (diambil alih). Untuk Surabaya, surat kabar *Soeara Asia* diganti dengan surat kabar *Soeara Rakyat*.⁶⁷

Di samping surat kabar, yang diawasi kegiatannya secara langsung ialah radio. Setelah sementara waktu aktivitas radio swasta maupun semi pemerintah dihentikan, maka Jepang mendirikan suatu badan yang mengurus dan menyelenggarakan siaran radio. Badan tersebut diberi nama *Hoso Kanri Kyoku*, untuk Jawa dibawah pimpinan *Tomabeci*. Untuk menjangkau siaran ke daerah-daerah maka dibuka lagi 8 cabang yakni: Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Malang. Cabang-cabang tersebut diberi nama *Hosokyoku*.⁶⁸ Dengan demikian secara keseluruhan sarana komunikasi masa disetir dan diawasi oleh Jepang.

Karena pengawasan terhadap sarana komunikasi sangat ketat, akibatnya para pemuda atau tegasnya kaum nasionalis, secara diam-diam mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat. Seperti yang pernah dilakukan oleh saudara Sunar

di dalam mendorong semangat masyarakat Pasuruan yang mulai putus asa, dia antara lain menyerukan sebagai berikut:

"Dino iki dulur-dulur, jen ono wong mati nang omah ditunggu dulur-dulure, iku wis elek-eleke wong. Apik-apike wong ora ono maneh kejobo sing mati berlumuran darah. Deloken Arjo Djipang, ususe wis brodol isih nglawan".

(Hari ini saudara-saudara, kalau ada orang mati di rumah ditunggu oleh saudara-saudaranya, itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Sebaik-baiknya manusia tidak ada lain kecuali yang mati berlumuran darah. Lihatlah Arjo Djipang ususnya sudah keluar masih melawan).⁶⁹

Dengan seruan tersebut semangat masyarakat Pasuruan dapat timbul kembali tergerak dari keputus-asaan. Keadaan semacam itu tidak hanya terjadi pada masyarakat Pasuruan, tetapi secara keseluruhan pada masyarakat di Jawa Timur, bahkan juga di seluruh Indonesia. Karena itu wajar bila rasa tidak puas masyarakat Indonesia tidak dapat dibendung lagi oleh Jepang, hingga akhirnya mencapai kemerdekaan.

2.4 Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Organisasi Politik Sosial dan Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional

2.4.1 Gerakan Tiga A

Pada awal Jepang memasuki Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, bahkan kaum nasionalis pun ada yang menyambut dengan baik. Karena itu Jepang mengira bahwa propaganda yang dilontarkan sebelumnya dapat berhasil. Selanjutnya Jepang berusaha mendekati kaum nasionalis. Sehingga pada akhir Maret 1942 hubungan kerja sama antara kaum nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang semakin baik.⁷⁰ Kemudian Jepang mulai mengarahkan pandangan kaum Nasional kearah Kebudayaan Jepang.

Sebagai awal mula kampanye terhadap Indonesia antara lain

dengan mengadakan perayaan-perayaan untuk hari-hari nasional Jepang terutama 29 April, Hari tersebut dikenal dengan hari *Tencosetsu* atau hari lahir *Kaisar Hirohito*. Pada upacara perayaan tersebut biasanya digunakan oleh Jepang untuk melontarkan suatu ide (pikiran) baru. Demikian juga halnya dengan perayaan 29 April 1942 diadakan atau dilontarkan adanya suatu gerakan baru yang dikenal dengan Gerakan Tiga A.⁷¹

Gerakan Tiga A tersebut bekerja dengan suatu semboyan yang sebenarnya merupakan doktrin politik pendudukan Jepang. Semboyan dimaksud ialah: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia.

Semboyan itulah yang merupakan trisila politik pendudukan Jepang.⁷²

Untuk memperlancar jalannya gerakan tersebut serta untuk memperoleh hasil sesuai dengan harapan dan cita-citanya, maka Jepang menugaskan Mr. Raden Samsudin untuk memimpin gerakan tersebut. Mr. Raden Samsudin sebenarnya bukan tokoh nasionalis yang utama.⁷³ Oleh karena itu dengan mudah dia dapat menerima pengaruh Jepang. Hal itulah yang menyebabkan kurang adanya kepercayaan dari rakyat. Di samping itu dia juga bukan pemimpin yang pandai mengikat hati rakyat dengan pidato-pidatonya.⁷⁴

Berikut ini sebagian dari keterangan Mr. Raden Samsudin tentang arti semboyan Gerakan Tiga A.

"Telah berabad-abad orang barat menjajah di seluruh bumi Asia Politik dan tipu muslihatnya yang halus yang bertahun-tahun lamanya dijalankan sedikit demi sedikit di negeri-negeri jajahannya dapat mengenyahkan segala kekuatan rakyat Asia, sehingga rakyat jadi tidak berdaya, menyerahkan diri saja kepada takdir alam, dan dengan tidak dirasainya tumbuh keyakinannya, bahwa memang sudah semestinya orang-orang Barat memperbudak mereka itu. Tapi untunglah dari utara memancar cahaya matahari yang membangunkan bangsa-bangsa seluruh Asia. *Nippon Cahaya Asia*. Bangsa-

bangsa Asia yang telah ratusan tahun hidup dalam belenggu dan yang sekarang telah bebas, tentu saja dalam tingkatan permulaan dalam menyusun kekuatannya kembali dan mudah juga kita mengerti bahwa mereka belum kuat membela diri. Dari sebab itu Nippon-lah yang sanggup menjauhkan musuh dari negeri-negeri itu: *Nippon Pelindung Asia*. Dalam hidup kita yang baru ini, dengan penuh cita-cita memajukan tanah air dan menyusun kemakmuran, kita perlu juga kepada seorang pemimpin yang sudah berpengalaman dalam hal itu. Diantara bangsa-bangsa di Asia ini hanya Negeri Nippon sendiri saja yang telah menunjukkan ke dunia luar tentang kecakapannya dalam menjunjung derajat negeri dan rakyat, hingga dapat mencapai kedudukan setaraf dengan negeri-negeri modern di Eropa. *Nippon Pemimpin Asia*.⁷⁵

Gerakan Tiga A tersebut dibentuk secara resmi oleh Jepang, karena itu di daerah-daerah juga dibentuk komite-komite. Pembentukan komite-komite dimaksud belum dapat merata keseluruh daerah Indonesia melainkan baru meliputi Jawa Tengah dan Jawa Barat.⁷⁶ Untuk Jawa Timur belum terlihat aktivitasnya. Hal ini disebabkan karena Gerakan Tiga A belum dapat diterima oleh masyarakat Jawa Timur.

Akhirnya Gerakan Tiga A tidak dapat memenuhi harapan Jepang. Untuk itu Jepang mulai memikirkan untuk membentuk organisasi baru yang dapat melancarkan cita-cita Jepang. Gerakan Tiga A kemudian dibubarkan pada 20 November 1942.⁷⁷

2.4.2 Gerakan Putera

Seperti halnya pendirian organisasi lainnya, Jepang di dalam mendirikan suatu organisasi diusahakan dapat bertepatan dengan hari-hari perayaan atau hari peringatan. Demikian juga pendirian Gerakan Putera. Tepat pada 9 Maret 1943 Jepang mengadakan perayaan pertama jatuhnya Hindia Belanda dan bersamaan dengan perayaan tersebut secara resmi Jepang mengumumkan berdirinya organisasi baru yang disebut *Pusat Tenaga Rakyat* atau disingkat Putera.⁷⁸ Sebagai pemimpinnya

ditunjuk oleh Jepang ialah Ir. Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro dan Kjai Haji Mansur. Empat orang inilah yang dikenal dengan sebutan *Empat Serangkai*.⁷⁹

Dengan mendirikan organisasi gerakan Putera, Jepang berharap agar dapat mengerahkan sebanyak mungkin tenaga rakyat mengingat peperangan sudah semakin mendekati Pulau Jawa. Supaya gerakan Putera lebih berhasil pada upacara pembukaan kantor besar Putera pada 16 April 1943, *Somubutyo* (Kepala Departemen Urusan Umum) menegaskan tentang tugas para pemimpin Putera, antara lain sebagai berikut: "Adapun pada hari yang penting ini saya hendak mengemukakan pesan yang wajib diperhatikan; pertama maksud mengerahkan segala tenaga dan kekuatan rakyat ialah tidak lain memberi bantuan usaha-usaha untuk mencapai kemenangan yang terakhir dalam peperangan Asia Timur Raya; kedua karena segala pekerjaan Pergerakan Pusat Tenaga Rakyat ini sangat erat hubungannya dengan jalannya Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon maka hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin sekalian ialah bahwa para pemimpin harus sadar dan insyaf sedalam-dalamnya akan maksud dan tujuan Bela Tentara Dai Nippon. Pula para pemimpin baik yang ada di pusat pemerintahan maupun yang ada di daerah-daerah lain wajib merapatkan perhubungannya dengan Bala Tentara seerat-eratnya serta menyerahkan segenap tenaganya untuk meluaskan pengetahuan dan memikirkan segala sedalam-dalamnya, agar supaya perhubungan antara Bala Tentara dengan rakyat bertambah kokoh dan sempurna. Hendaknya janganlah sekali-kali menyesatkan rakyat jelata. Saya berharap dengan sangat supaya tuan-tuan Pemimpin sekalian sungguh-sungguh bekerja bersama-sama dengan badan-badan yang mungkin didirikan di kemudian hari menurut hukum yang sesuai dengan Pergerakan Pusat Tenaga Rakyat, serta bersama sekuat-kuatnya untuk mencapai tujuan dan maksud pergerakan ini, lagi pula turut berusaha mendirikan lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya; Pun saya berharap supaya jerih payah tuan-tuan sekalian yang suka hidup dan suka mati bersama-sama, akan berhasil sebaik-baiknya, yaitu dapat mendirikan

Jawa Baru sebagai salah satu keluarga dilingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya.⁸⁰

Menyesuaikan dengan harapan Jepang terhadap Gerakan Putera tersebut, maka pemimpinnya yakni Empat Serangkai berusaha untuk dapat meyakinkan masyarakat tentang bagaimana kehendak Jepang. Karena Empat Serangkai memang tokoh-tokoh nasionalis yang sudah melekat di hati masyarakat Indonesia, maka dengan mudah dapat menarik masyarakat. Pidato-pidatonya cukup mendapat sambutan dari masyarakat. Sedikit cuplikan pidato Ir. Sukarno sebagai berikut: "Marilah kita juga mengadakan kesatuan dari prajurit-prajurit kemerdekaan Asia. Jikalau *Banteng* Indonesia sudah bekerja sama dengan *Sphinx* dari Mesir, dengan Lembu *Nandi* dari India, dengan *Liong Barongsai* dari negeri Tiongkok, dengan kampion-kampion kemerdekaan dari negeri lain, jikalau *Banteng* Indonesia bisa bekerja sama dengan semua musuh-musuh kapitalisme dan internasional imperialisme di seluruh dunia wahai tentunya hari-harinya internasional imperialisme itu segera terbilang."⁸¹

Dengan melihat isi dan cuplikan pidato Ir. Sukarno tersebut jelas bahwa sebenarnya mengandung unsur nasionalisme yang mendalam. Menurut Ir. Sukarno tujuan dari pada gerakan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala apa yang dirobuhkan oleh imperialisme Belanda. Peranan Sukarno dalam membentuk Putera ini menentukan, sekalipun dalam beberapa hal tindakannya terbatas.⁸²

Kenyataannya Putera berkembang dengan baik dan pesat, walaupun masih terbatas. Pergerakan Putera betul-betul diakui oleh masyarakat, yang mengakibatkan perkembangannya dapat menyeluruh, tidak hanya terbatas di Jawa. Untuk Jawa Timur juga tidak ketinggalan, tetapi data mengenai organisasi tersebut masih perlu adanya pendalaman dan penjajagan. Perkembangan ini rupanya tidak disukai oleh Jepang, bahkan membahayakan sebab nasionalisme justru lebih berkembang, karena itu organisasi Putera tersebut tidak dapat bertahan lama. Akhir tahun

1943 Jepang sudah mulai memikirkan adanya organisasi baru. Untuk itu mulai bulan Januari 1944 Jepang sudah mulai membentuk suatu panitia untuk mempersiapkan organisasi dimaksud.⁸³ Dengan demikian jelas bahwa pada awal tahun 1944 perhatian Jepang terhadap gerakan Putera sudah luntur, perhatian sudah mulai diarahkan kepada organisasi yang baru.

2.4.3 Jawa Hokokai

Sesudah gerakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibubarkan tepatnya 1 Maret 1944, secara resmi oleh *Jenderal Kumakici Harada Panglima Tentara Keenambelas* diumumkan berdirinya organisasi baru yakni: Gerakan Kebaktian Rakyat Jawa atau dalam bahasa Jepang di sebut: *Jawa Hokokai*. Menjabat sebagai pemimpinnya langsung dibawah *Gunseikan*, sedangkan Ir. Sukarno hanya menjabat sebagai *komon* atau penasihat.⁸⁴

Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Jepang yakni menuju kearah Perang Asia Timur Raya, maka untuk menarik simpati masyarakat, *gunseikanbu* mengumumkan maksud serta pengertian didirikannya organisasi tersebut. Pengumuman dimaksud antara lain sebagai berikut: "Oleh karena badan baru itu (*Jawa Hokokai*) melingkungi seluruh penduduk, maka badan badan lain sebagai badan kebaktian yang ada dibawah pimpinan pembesar-pembesar Balatentara harus bermaksud menginsyafkan penduduk semuanya akan usaha dan tindakan-tindakan Pemerintah Balatentara, maka badan-badan susunan masyarakat bagian bawah harus diatur dengan sempurna dan diatur hubungannya dengan Rukun Tetangga. Demikianlah diputuskan mendirikan satu badan yang siap sewaktu-waktu untuk menjalankan perang mati-matian dengan jalan menggabungkan balatentara, pemerintah dan rakyat. Sehingga menjadi suatu susunan yang teguh dan kukuh dan yang memberi keputusan sepenuh-penuhnya kepada pemerintah maupun kepada rakyat. Penduduk sekalian diharap dengan sungguh-sungguh supaya membuang segala halangan dan rintangan dan pengaruh-pengaruh adat kolot dan cara penghidupan lama dengan tiada bertanggguh-tanggguh

lagi dan supaya membaharui ketetapan hatinya dengan gagah berani untuk mengabdikan dan mengorbankan dirinya bagi kepentingan umum dan terutama untuk menyelesaikan perang suci ini dengan sempurna.⁸⁵

Dengan melihat sepintas pengumuman tersebut jelas bahwa Jepang sangat membutuhkan bantuan dari seluruh rakyat atau masyarakat guna menyelesaikan perang suci untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Perang suci dimaksud adalah untuk menghadapi Sekutu (Inggris dan Amerika). Karena itu masyarakat berduyun-duyun mau membantu Jepang, sampai akhirnya ada semboyan "Inggris kita linggis, Amerika kita seterika". Sehubungan dengan hal tersebut sewaktu pertama kali diadakan rapat Samudra di Jakarta, sekaligus diadakan penurunan Patung Jan Pieters Zoon Coen yang menjadi lambang kota Jakarta dan lambang kekuasaan kolonial Belanda (Jan Pieters Zoon Coen adalah pendiri Kota Bataviaa = Jakarta)⁸⁶. Dengan demikian rakyat yang benci kepada pemerintahan kolonial Belanda, merasa lega dapat membalas dendam menurunkan arca tersebut.

Rupanya *Jawa Hokokai* atau gerakan Kebaktian Rakyat Jawa tersebut merupakan organisasi utama yang terdiri dari peleburan organisasi-organisasi yang lain. Sebagai organisasi resmi Jawa Hokokai mempunyai peraturan-peraturan dasar yang meliputi:

- a. melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
- b. memimpin segenap rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga, berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa;

- c. memperkokoh pembelaan tanah air;
- d. memperteguh kehidupan dimasa perang.⁸⁷

Dengan melihat peraturan-peraturan dasar tersebut jelas bahwa lingkup kegiatan *Jawa Hokokai* bukan semata-mata pengerahan tenaga saja, tetapi menyeluruh sampai kepada kegiatan ekonomi, hingga sampai dengan pertengahan tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan sampai pada segi sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai jumlah yang telah ditentukan dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya dimobilisasi melalui *Jawa Hokokai*.⁸⁸

Rupanya peranan organisasi ini di mata masyarakat tidak jauh berbeda dengan organisasi sebelumnya yakni adanya dua pandangan yang berbeda antara yang percaya atau setuju terhadap janji-janji serta tindakan Jepang. Untuk Jawa Timur propaganda kaum pemimpin *Jawa Hokokai* sebagian dapat diterima oleh masyarakat, sebagian justru merupakan tekanan (tidak dapat diterima). Akibatnya menimbulkan kecurigaan bagi Jepang terhadap tokoh-tokoh Jawa Timur hingga akhirnya beberapa Tokoh Jawa Timur dikebloskan di penjara. Lowokwaru antara lain: Poeger, Soerjatmodjo, Wartono, Supangkat, Suhendro.⁸⁹ Dengan demikian jelas bahwa pada dasarnya Organisasi Kebaktian Rakyat Jawa (*Jawa Hokokai*), hanyalah untuk memenuhi kepentingan jepang sendiri, bukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat Indonesia seperti yang dicangkan pada mulanya.

2.4.4. *Cuo Sangi In/Cuo Sangi Kai*

Cuo Sangi In atau Badan Pertimbangan Pusat di Jakarta, sedangkan *Cuo Sangi Kai* atau Badan Pertimbangan di tiap karesidenan dan Kotapraja Jakarta Raya. *Cuo Sangi Kai* yang dibentuk pada 5 September 1943 dengan *Osamu Seirei* Nomor 37 dimaksudkan sebagai badan "untuk meminta usul dan jawaban mengenai urusan pemerintahan daerah agar Pemerintah Balatentara dapat dijalankan dengan pesat dan tepat."⁹⁰ Badan tersebut langsung dibawah pengawasan *Saiko Sikikan*. Tugasnya

hanya untuk mengajukan pertimbangan yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *Saiko Sikikan* atau *Syuty* serta memberikan anjuran-anjuran yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Jadi jelas kekuasaan badan tersebut sangat terbatas.

Mengenai keanggotaan *Cuo Sangi In* berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang terdiri dari: 23 (duapuluh tiga) orang diangkat oleh *Saiko Sikikan*, 18 (delapan belas) orang merupakan utusan dari tiap karesidenan dan Kotapraja Jakarta Raya, 2 (dua) orang dari utusan daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta.⁹¹ Dari jumlah anggota tersebut dari golongan Islam diwakili oleh 6 (enam) orang. Wakil dari Jawa Timur ialah Sdr. Fatchurrachman yang menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah.⁹²

Walaupun kekuasaan yang diberikan oleh Jepang kepada *Cuo Sangi In* tersebut sangat kecil atau bahkan dapat dikatakan nihil, namun demikian Jepang tetap merasa was-was atau khawatir terhadap kegiatan yang ada didalamnya. Hal ini disebabkan sebagian besar atau keseluruhan anggota tersebut telah berpengalaman dalam Volksraad. Sedangkan didalam Volksraad, pembicaraan langsung secara bebas, bermacam-macam tentang tindakan pemerintah kolonial, atau tentang politik seseorang atau pihak lawan.⁹³

Untuk itulah maka pada pembukaan sidang pertama yang diadakan pada 16 – 20 Oktober 1943, *Saiko Sikikan* dan *Gunseikan* masing-masing memberikan pidato-pidato yang berisi nasehat (peringatan) kepada para anggota tentang cara dan sikap mereka selama bersidang dan sifat dari jawaban yang harus diberikan atas pertanyaan yang diajukan pada sidang pertama itu.⁹⁴ Tetapi rupanya dugaan Jepang meleset sebab kenyataannya anggota *Cuo Sangi In* cukup berbaik hati, langkah kerjanya cukup meyakinkan pihak Jepang, Hal ini terbukti dari hasil sidang tersebut yang telah disepakati bersama antara lain untuk:

- 1) Memperkuat dan melindungi para prajurit *Peta dan Heiho*;
- 2) Menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang,

- 3) Meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang, dan
- 4) Memperbanyak hasil produksi pangan.⁹⁵

Rupanya hasil sidang tersebut cukup memuaskan Jepang, sebab hasilnya sesuai dengan harapan Jepang. Karena itu, Kepala Urusan Politik (*Kikahukatyō*) Departemen Urusan Umum berkata dalam pidatonya baik sekali. Isi pidato tersebut antara lain sebagai berikut:

"Mula-mula dikhawatirkan bahwa melakukan *Cuo Sangi In*, dikira akan agak sukar, akan tetapi syukurlah sekalian *Giin* (anggota) di bawah pimpinan Pemerintah Balatentara menjalankan perundingan baik dan lancar sekali, dengan tiada kekeliruan atau kesalahan apapun."⁹⁶

Akhirnya disebabkan wewenang Organisasi/Badan tersebut sangat terbatas yakni hanya memberikan nasehat kalau ditanyai oleh Pemerintah pendudukan Jepang dan jawabannya harus menguntungkan usaha peperangan Jepang, maka Organisasi/Badan tersebut seolah-olah tidak berfungsi.⁹⁷ Dengan demikian aktivitas Badan tersebut, di daerah tidak begitu kelihatan.

2.4.5 *Dokuritzu Jumbi Coosakai*

Pada saat-saat akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, kekuatan Jepang diluar Indonesia rupanya sudah mulai runtuh. Tetapi ambisi Jepang untuk dapat menguasai Asia Timur Raya masih menyala-nyala. Kekuatan Jepang yang dirasanya masih ada hanyalah di Indonesia. Untuk itu tidak segan-segan Jepang menghimbau bangsa Indonesia agar dapat memperoleh bantuan, guna mempertahankan kekuasaannya di Asia Timur Raya.

Satu-satunya senjata yang mungkin masih mempan terhadap bangsa Indonesia, khususnya kaum nasionalis ialah suatu harapan atau janji yang berharga. Janji yang dimaksud adalah: kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari.⁹⁸ Guna merealisasikan janji tersebut perlu adanya persiapan yang masak. Karena itu,

Saiko Sikikan Kumakici Harada pada 1 Maret 1945 membentuk suatu panitia penyelidikan untuk menyelidiki persoalan-persoalan pokok dan kondisi-kondisi lainnya dalam mempersiapkan kemerdekaan dimaksud. Panitia dimaksud dalam bahasa Jepang disebut "*Dokuritzu Jumbi Coosakai*". Diangkat sebagai ketuanya ialah K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (dahulu menjadi anggota Budi Utomo).⁹⁹

Badan tersebut beranggota 60 (enampuluh orang) termasuk di dalamnya (empat) orang golongan Cina dan golongan Arab, seorang golongan peranakan Belanda dan 7 (tujuh) orang anggota Jepang. Anggota tersebut duduk sebagai anggota dan pengurus istimewa yang bertugas menghadiri setiap sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara.¹⁰⁰

Perlu diketahui bahwa seorang tokoh nasionalis Ir. Sukarno hanya menjadi anggota biasa. Hal ini bertujuan agar lebih mempunyai kemungkinan untuk dapat turut aktif dalam diskusi-diskusi.¹⁰¹

Setelah susunan anggota Badan tersebut dibentuk maka mulailah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat tersebut antara lain menghasilkan beberapa rumusan antara lain dasar negara *Panca Sila*. Di samping itu panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang yakni: Sukarno, Hatta, Marais, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim dan Muh. Yamin, membuat naskah yang dikenal dengan nama *Piagam Jakarta* atau *Jakarta Charter*. Isi naskah tersebut sebagai berikut:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong -

kan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan-nya. Kemudian dari itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : ke Tuhan-an, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".¹⁰²

Dengan melihat isi naskah tersebut jelas kiranya bahwa disusun naskah tersebut dengan tujuan untuk memberi ketegasan kepada Jepang agar Jepang memenuhi janjinya yakni memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi sifatnya cukup mengesampingkan Jepang dan menunjukkan ingin berdiri dengan kekuatan sendiri. Naskah tersebut secara resmi dibentuk tanggal 22 Juni 1945.

Kegiatan selanjutnya, Badan tersebut melaksanakan sidang tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang ini membentuk 3 (tiga) panitia yakni:

- 1) Panitia Perancang Undang-undang Dasar, diketuai oleh Sukarno;
- 2) Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso;
- 3) Panitia Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Hatta.¹⁰³

Panitia tersebut rupanya bekerja dengan cepat dan sempurna, hasilnya kemudian dilaporkan kepada pucuk pimpinan *Bala-tentara Dai Nippon* diseluruh wilayah Selatan yang disebut *Nanpoo Gun* yakni Jendral *Terauchi*. Rupanya tugas dari Badan Penyelidik Kemerdekaan telah selesai. Oleh sebab itu diusulkan untuk kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan. Per-

lu diketahui bahwa kegiatan Badan tersebut adalah kegiatan di pusat, sehingga dari daerah hanya diambil wakil-wakil saja. Oleh karena itu kegiatan di daerah tidak begitu kelihatan.

2.4.6 Gerakan Rakyat Baru

Jawa Hokokai rupanya tidak memberikan kepuasan kepada pihak Jepang. Sementara itu *Dai Nippon* semakin terdesak dalam mempertahankan Asia Timur Raya. Oleh karena itu *Saiko Syikikan* yang baru Letnan Jendral Y. Nagano pada tanggal 2 Juli 1945 di dalam suatu pertemuan mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Gerakan Baru¹⁰⁴. Kemudian didalam sidang *Cuo Sangi In* yang ke 8, mengusulkan berdirinya/dibentuknya gerakan baru yang bertujuan untuk mengobarkan semangat cinta kepada tanah air dan semangat perang. Gerakan baru dimaksud kemudian disusun yaitu: *Gerakan Rakyat Baru* yang pendiriannya diresmikan pada tanggal 28 Juli 1945.¹⁰⁵

Menjelang peresmian organisasi baru tersebut, tanggal 6 Juli 1945 Panitia Peresmian Gerakan Baru mengadakan rapat pertama di *Gedung Cuo Sangi In* Jl. Pejambon 2. Hasil rapat antara lain: diangkat sebagai ketua: Sukarno, sebagai Sekretaris B.M. Diah Anggota para pemuda antara lain: Wikana, B.M. Diah, Sukarni, Chairul Saleh, Chalid Rasyidi, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Sk. Trimurti, Harsono, *Tjokroaminoto*, Asmarahadi dan Muwardi.¹⁰⁶ Dengan melihat susunan pengurus dan anggotanya, maka jelas bahwa Gerakan Rakyat Baru merupakan organisasi gabungan antara golongan tua dan golongan muda. Karena bercampurnya golongan tersebut sangat mungkin mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi juga sangat mungkin merupakan suatu kekuatan yang utuh, yang akhirnya mendorong mempercepat suatu kekuatan yang utuh, yang akhirnya mendorong mempercepat tercapainya kemerdekaan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

2.4.7 *Keimin Bunka Syidosyo*

Dengan dikeluarkannya peraturan pada tanggal 15 Juli 1942 tentang diperbolehkannya mendirikan perkumpulan-perkumpulan bersifat hiburan misalnya perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan mengadakan plesir dan senang-senang, gerak badan, kesenian, drama dan sebagainya, maka untuk membatasi gerak langkah kegiatan-kegiatan tersebut, Jepang mendirikan Badan Pusat Kebudayaan, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan nama *Keimin Bunka Syidosyo*, pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta.¹⁰⁷ Badan ini bertujuan untuk mengarahkan para budayawan agar supaya di dalam menghasilkan karya-karyanya tidak menyimpang dari kehendak Jepang. Walaupun sebetulnya sebelum para budayawan berkarya, pimpinannya terlebih dahulu harus bersumpah setia kepada Jepang bahwa tidak akan menjalankan aksi-aksi politik.

Memang Jepang di dalam menjalankan pemerintahannya secara keseluruhan cukup berhati-hati. Sehubungan dengan berdirinya Badan Pusat Kebudayaan tersebut sampai sempat menimbulkan kekaguman sarjana Belanda yang mengatakan: bahwa dengan didirikannya Badan Pusat Kebudayaan ini membuktikan betapa sempurnanya Jepang dalam usahanya untuk menghapuskan kemungkinan-kemungkinan bagi tiap tiap pernyataan berterang-terang perihal kebudayaan.¹⁰⁸

Agar supaya didalam melaksanakan pengendalian dalam hal kebudayaan dapat mencakup secara keseluruhan, maka Badan Pusat Kebudayaan juga membagi menjadi beberapa bagian jenis kegiatan antara lain: bagian musik, bagian sandiwaranya, bagian seni-tari dan bagian seni-lukis¹⁰⁹ Dengan demikian masing-masing kegiatan jenis kebudayaan ada sendiri bagian pengawasannya. Oleh karena itu pada waktu Cak Durasim didalam sandiwaranya terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Jepang, secepatnya dapat diketahui oleh *Kempeitai* Jepang. Kemudian Cak Durasim ditangkap dan dianiaya sampai meninggal dunia. Itulah antara lain contoh kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia yang dianggap bersalah oleh Jepang. Akibatnya bagi

Jawa Timur khususnya dan daerah lain pada umumnya, kehidupan kebudayaan berjalan secara sembunyi-sembunyi, kalau tidak mau mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh Jepang.

2.4.8 Organisasi Kepemudaan

Seperti biasanya untuk mencetuskan sesuatu yang baru, Jepang selalu mengambil hari-hari besar Jepang. Demikian juga pada hari *Tentyosetsu* (hari lahir Kaisar Jepang) 29 April 1943, oleh Jepang dipergunakan untuk mengadakan pelantikan serta penyerahan panji *Jawa Seinendan* di depan 3.500 (tiga ribu lima ratus) pemuda dari seluruh Jawa. Kemudian satu setengah bulan berikutnya yakni tanggal 19 Juni 1943 diadakan upacara pembukaan latihan *Seinendan*.¹¹⁰

Sehubungan dengan dibentuknya *Jawa Seinendan*, maka Jepang juga memberikan peraturan-peraturan, antara lain bab X pasal I tentang garis-garis besar susunan *Jawa Seinendan*. Oleh Jepang dikemukakan keterangan dan tujuan dibentuknya *Jawa Seinendan* sebagai berikut:

'Jawa Seinendan adalah badan yang disusun antara pemuda penduduk Indonesia di Jawa dengan maksud melatih jasmani dan rohani pemuda-pemuda itu sungguh-sungguh dengan cara bergolongan-golongan yang teratur, supaya semangat bersama-sama dilatih dan semangat persatuan serta bekerja bersama-sama dapat diperteguh, lagi pula mengajarkan kepada mereka itu pengetahuan teknik yang berguna dalam penghidupannya sehari-hari. Cara tersebut diatas gunanya yaitu supaya dapat memberikan sumbangan kepada peperangan suci yang dianjurkan oleh Balatentara Dai Nippon, yang maksudnya tidak lain ialah membangunkan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Sedangkan tujuannya ialah agar penduduk tanah Jawa ikut berusaha untuk mempercepat tercapainya kemenangan yang terakhir didalam peperangan (*Dai Toa*) dewasa ini Seinendan inilah suatu perkumpulan pemuda-pemuda yang berusaha dengan segiat-giatnya untuk memajukan perusahaan-perusahaan di Jawa seperti pemuda-pemuda Nippon yang masih belum maju ke medan perang, yang memajukan perusahaan-perusahaan di negeri. Selanjutnya *Jawa Seinendan* juga bertujuan untuk mendidik semangat pemuda-pemuda guna menjaga dan mempertahankan tanah air kekuatan dan usaha sendiri, tidak dengan pertolongan dan bantuan pihak lain Menjaga rumah, jalan, jalan kereta api, termasuk juga dalam kewajiban barisan pemuda, misalnya jika ada kebakaran, kekacauan atau malapetaka lainnya. Pendek kata *Seinen-*

dan, adalah perkumpulan yang memberi latihan lahir-batin kepada pemuda-pemuda untuk dimasak supaya dapat memberi bantuan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan demikian tanah Jawa dapat menyumbangkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam peperangan Asia Timur Raya.¹¹¹

Dengan melihat garis besar dasar atau maksud serta tujuan *Jawa Seinendan*, cukup berat sebab bukan hanya mencakup segi kemiliteran saja tetapi juga mencakup segi sosial ekonomi. Karena beban para *Seinendan* tersebut dirasa cukup berat, maka agar para anggota *Seinendan* dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, Jepang mengharuskan mengucapkan sumpah *Seinendan* bersama-sama. Sumpah dimaksud berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kami pemuda maju kedepan berani untuk menyempurnakan pembangunan dan kesejahteraan Asia Timur Raya dibawah pimpinan *Dai Nippon*;
- 2) Kami pemuda mementingkan budi pekerti dan menjunjung tinggi peraturan *Seinendan*;
- 3) Kami pemuda berusaha sekuat-kuatnya dalam pekerjaan kami masing-masing dan maju terus memperbanyak hasil usaha;
- 4) Kami pemuda mempertahankan Tanah Air Kami dengan sekuat tenaga sambil bekerja bersama-sama sepenuh-penuhnya;
- 5) Kami pemuda menghargai semangat yang bersahaja dan teguh, bersumpah akan melatih jasmani dan rokhani, menuju cita-cita yang tinggi.¹¹²

Selanjutnya mengenai pengawasan/kepemimpinan *Jawa Seinendan* langsung dibawah pimpinan *Gunseikan*. Sebagai pembinanya adalah *Naimubu Bunkyo kyoku* (Departemen Urusan Dalam Negeri bagian pengajaran, olahraga dan *Seinendan* pemuda). Tempat latihan pemimpin *Seinendan* di pusat latihan *Seinendan* (*Guo Seien Kunrensyo*). Selanjutnya mereka yang telah mendapat latihan dipusat latihan ini mengembangkan kepandaianya di daerah masing-masing. Dengan demikian per-

kembangan *Seinendan* tersebut berjalan dengan cepat. Syarat menjadi anggota *Seinendan* tidak sulit yakni asal pemuda-pemuda Asia yang telah mencapai umur 15 – 25 tahun (kemudian diubah menjadi 14 – 22 tahun).¹¹³ Mengingat syarat yang begitu mudah, maka tidak mengherankan apabila perkembangan *Seinendan* sangat cepat.

Sementara itu untuk lebih menambah kekuatan maka para pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas juga dihimpun dalam suatu organisasi yang disebut *Gokutotai*. Mengenai sumpah yang diucapkan sama dengan sumpah *Jawa Seinendan*, hanya sebutannya menjadi "*Sumpah Pelajar Jawa Baru*". Mereka juga mendapat latihan baris-berbaris, *taiso* dan gerak badan semi militer dengan memanggul *mokuyu* (bedil kayu), menjalankan *kinroohoshi* (kerja bakti) berupa membersihkan asrama tentara (Jepang), mengikuti kayu-kayu atau bahan makanan untuk para serdadu, membatat alang-alang di lapangan terbang, menanam pohon jarak dan memeliharanya, membuat lobang perlindungan dan sebagainya.¹¹⁴ Kegiatan-kegiatan ini baik *Seinendan* maupun *Gokutotai* merata sampai ke daerah-daerah. Dengan demikian para pemuda, para pelajar semuanya terkerah untuk kepentingan balatentara Pemerintahan Jepang, yang dikatakanya untuk tujuan perang suci.

2.4.9 Organisasi Kemiliteran/Semi Militer

Seperti telah diketahui bahwa kedatangan Jepang di Indonesia menimbulkan dua pendapat yang berbeda di kalangan kaum nasionalis. Sebagian merasa bahwa Jepang akan menolong bangsa Indonesia untuk merdeka bebas dari cengkeraman penjajah. Sebagian lagi pagi-pagi sudah mengemukakan bahwa Jepang dengan sifatnya yang fasis tidak mungkin akan membebaskan Indonesia. Dengan adanya pendapat yang kedua (belakangan) inilah maka pendidikan militer bagi pemuda Indonesia justru diterima dengan baik, dengan maksud untuk persiapan di masa mendatang. Oleh karena rasa ingin mempersiapkan diri untuk segera dapat membebaskan diri dari cengkeraman penja-

jah, maka pada tanggal 7 September 1943 Gatot Mangunpraja mengirim surat kepada *Gunseikan* dengan maksud agar dapatnya dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air.

Isi surat tersebut antara lain sebagai berikut:

"Sekarang bangsa Indonesia belum ada kecakapan dan ketangkasan buat turut berjuang di garis muka medan perang. Akan tetapi hamba yakin dan percaya bahwa dengan pimpinan Balatentara Dai Nippon, bangsa Indonesia bisa memperlihatkan kecakapan dan ketangkasan untuk menjaga dan membela Pulau Jawa Bahwa menurut pertimbangan hamba, rakyat Indonesia jikalau betul dan sesungguhnya hendak dipandang cakap buat turut campur dalam pemerintahan dalam negeri, wajib mempersembahkan pekerjaan-pekerjaan yang nyata dan tiada hanya tinggal dalam keinginan saja. Menurut pendapat hamba, mewujudkan suatu barisan pembela juga satu pekerjaan akan mewujudkan kemauan yang betul-betul dan kelak tentu akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Tinggi. 115

Permohonan Gatot Mangunpraja tersebut kemudian disusul dengan permohonan yang lain yakni tanggal 13 September 1943, permohonan disampaikan oleh sepuluh orang alim ulama terkemuka. Kemudian tanggal 29 September 1943 disusul juga permohonan yang disampaikan Empat Serangkai.¹¹⁶ Dengan adanya permohonan-permohonan itu, maka pada tanggal 3 Oktober 1943 Panglima kedua Tentara Keenambelas Letnan Jendral Kumakici Harada memaklumkan/mengumumkan *Osamu Seirei* nomor 44, yang mengatur tentang pembentukan Peta. Pada bulan itu juga dilatih puluhan calon perwira Indonesia di *Jawa Beei Giygun Kanbu Renseitai* (Korp Latihan Perwira Tentara Sukarela Tanah Air).¹¹⁷

Bersamaan dengan pembentukan Peta dibentuk pula *daidan-daidan* (batalyon). Untuk itu di Jawa Timur di tiap-tiap keresidenan dibentuk lebih dari satu *daidan*. *Daidan-daidan* dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Keresidenan Surabaya
 - a) *Daidan* Surabaya
 - b) *Daidan* Sidoarjo
 - c) *Daidan* Mojokerto
 - d) *Daidan* Gresik.

- 2) Keresidenan Bojonegoro
 - a) Daidan Tuban
 - b) Daidan Bojonegoro
 - c) Daidan Babat
- 3) Keresidenan Madiun
 - a) Daidan Madiun
 - b) Daidan Pacitan
 - c) Daidan Ponorogo
- 4) Keresidenan Besuki
 - a) Daidan Bondowoso
 - b) Daidan Jember (Kencong)
 - c) Daidan Banyuwangi (Benculuk)
 - d) Daidan Jember (Kota)
 - e) Daidan Banyuwangi (Kota)
- 5) Keresidenan Malang
 - a) Daidan Malang (Gondanglegi)
 - b) Daidan Lumajang/Pasirian
 - c) Daidan Malang
 - d) Daidan Probolinggo
- 6) Keresidenan Kediri
 - a) Daidan Tulungagung
 - b) Daidan Blitar
 - c) Daidan Kediri

7) Keresidenan Madura

- a) Daidan Pamekasan
- b) Daidan Bangkalan
- c) Daidan Batang-batang
- d) Daidan Ambunten
- e) Daidan Ketapang.¹¹⁸

Setelah dikeluarkan maklumat pembentukan Peta beserta *Daidan*-nya kemudian diumumkan syarat-syarat penerimaan yang cukup ringan. Di Blitar terdiri atas: guru, pegawai, pamongpraja, polisi, pemuda petani, pedagang, pelajar dan lain-lain. Umur tidak dipentingkan, kecuali untuk letnan I dan letnan II harus berumur di bawah 30 tahun sedangkan untuk calon bintara dan prajurit harus dibawah 25 tahun dan kalau dapat yang belum mempunyai anak.¹¹⁹ Akan tetapi syarat untuk penerimaan menjadi anggota Peta tersebut rupanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini terbukti untuk daerah Kediri berbeda dengan daerah Blitar. Daerah Kediri (kabupaten dan kotapraja) yang diterima menjadi calon perwira hanya orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam suatu daerah, baik disebabkan oleh keturunan atau termasuk anggota dari satu golongan tertentu maupun oleh karena pendidikan. Di samping itu, calon-calon perwira tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang yang lebih mempunyai kesadaran nasional.¹²⁰ Di samping itu juga di daerah Tuban, syarat menjadi anggota Peta tidak terlalu berat, rupanya unsur pendidikan dan keturunan akan mempermudah masuk Peta. Hal ini terbukti dari pengalaman Sutjitno. Sujitno putra dari R.M.T.A. Koesoemobroto (bupati Tuban tahun 1927 – 1942), lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 1942, kemudian masuk tentara Peta di Tuban, diangkat menjadi *Sjodanco*, kemudian meningkat menjadi *opsi*.¹²¹ Dengan demikian syarat penerimaan anggota Peta secara keseluruhan tidak begitu sulit. Oleh karena itu masyarakat Jawa Timur berduyun-duyun masuk Tentara Peta.

Setelah daidan-daidan dibentuk dan anggota tentara sudah cukup banyak, maka mulailah diadakan latihan-latihan. Latihan latihan dimaksud diadakan di daerah masing-masing atas bimbingan para perwira yang telah mendapat latihan di pusat Latihan. Rupanya himbauan Jepang untuk mencapai Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya harus dengan mengorbankan rakyat Indonesia, yang semua tidak diduga oleh anggota Peta. Dengan adanya latihan-latihan di daerah, baru para anggota Peta menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan masyarakat setempat yang kenyataannya sangat menderita. Lebih-lebih perlakuan tentara Jepang yang merendahkan martabat tentara Peta.^{1 2 2}

Kenyataan itu menimbulkan kemarahan para anggota Peta bahkan kemudian memuncak menjadi pemberontakan. Di Jawa Timur pemberontakan yang cukup menggugah semangat juang bangsa Indonesia adalah pemberontakan Peta Blitar. Sebagai pemrakarsa pemberontakan ini adalah Suprijadi dan Dr. Ismail. Motif-motif pemberontakan pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai kemerdekaan sepenuhnya
- 2) Menghentikan penindasan terhadap rakyat yang sudah jatuh kejurang kesengsaraan yang sedalam-dalamnya.^{1 2 3}

Untuk persiapan pemberontakan dilaksanakan enam kali rapat rahasia. Rapat terakhir dilaksanakan pada 13 Februari 1945. Hasilnya memutuskan bahwa pada malam itu juga, pemberontakan harus dilaksanakan sebab dirasa rencana tersebut sudah bocor. Di dalam pemberontakan diperintahkan agar membunuh semua orang Jepang, jangan sampai membunuh bangsanya sendiri.^{1 2 4}

Sesuai dengan instruksi tersebut, maka di dalam mengawali pemberontakan, sasarannya pertama-tama adalah tempat-tempat tinggal orang Jepang. Dalam hal ini pertama-tama adalah *Hotel Sakura*, kemudian tempat-tempat menginap *opsir-opsir Jepang*, *rumah-rumah para Syidokan* dan markas *kempeitai* di daerah Blitar. Baru kemudian melanjutkan kegiatannya sesuai dengan

rencana.¹²⁵ Dengan demikian jelas bahwa meluapnya amarah para anggota Peta Blitar terhadap Jepang sungguh tidak dapat dibendung lagi, walaupun kekuatan yang ada sebetulnya sangat terbatas, mengingat hanya satu daerah.

Langkah selanjutnya, pemberontakan diarahkan untuk membagi diri menjadi empat kolone yaitu:

- 1) Rombongan ke utara dipimpin oleh Soenardjo *Syodanco*,
- 2) Rombongan ke timur dipimpin oleh Soenarto *Syodanco*,
- 3) Rombongan ke barat dipimpin oleh Moeradi *Syodanco* dan S. Djono *Syodanco*,
- 4) Rombongan ke selatan dipimpin oleh Dasrip *Syodanco*, Imam Bahri Budanco dan Termudi *Budanco*.¹²⁶

Dari empat kolone tersebut yang paling lama dapat bertahan adalah rombongan ke arah barat, yang dipimpin oleh Moeradi Cs. Rombongan ini bertahan di lereng Gunung Kelud. Dengan mental yang teguh rombongan tersebut tidak mempan oleh bujukan-bujukan Jepang. Akhirnya karena kelicikan Kolonel Katagiri (komandan salah satu resimen pengepung) Moeradi bersedia diajak berunding. Di dalam perundingan itu, Moeradi mau kembali ke Blitar asal dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mereka tidak dilucuti, melainkan kembali dengan bebas, dan dengan senjata di tangan, dengan kendaraan-kendaraan mereka sendiri dan tanpa kawan pihak pengejar,
- 2) Mereka tidak akan dituntut di depan pengadilan,
- 3) Pihak Jepang harus segera mengambil tindakan dan jika perlu menghukum petugas-petugasnya yang berbuat kejam terhadap rakyat,
- 4) Martabat prajurit tentara Peta dan para perwira-perwiranya, harus ditingkatkan sederajat dengan prajurit dan opsir-opsir Jepang.

Syarat-syarat tersebut disetujui oleh Jepang. Bahkan sebagai tanda akan menepati janjinya, Kolonel Katagiri menanggalkan pedangnya dan menyerahkannya kepada Moeradi. Hal ini meru-

pakan tindakan yang luar biasa bagi seorang opsir Jepang, sebab pedang samurai adalah dianggap keramat. Penyerahan senjata tersebut merupakan lambang penyerahan diri.¹²⁷

Rupanya janji Jepang tersebut tidak ditepatinya, sebab kenyataannya mereka tetap tidak luput dari sel dan siksaan. Dengan demikian pemberontakan Peta Blitar dapat ditumpas oleh Jepang. Namun demikian ada suatu peristiwa sejarah yang patut mendapat penghargaan atau tidak harus dilupakan begitu saja, yaitu peristiwa pengibaran bendera Merah Putih yang pertama sekali selama dalam penjajahan Jepang. Pengibaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1945 sekitar pukul 04.00 di depan *Daidan* Blitar oleh seorang *syodanco* yang bernama Partohardjono.¹²⁸

Dengan telah ditumpasnya pemberontakan Peta Blitar, bukan berarti berhentinya semangat juang bangsa Indonesia tetapi justru sebaliknya. Kemudian timbul pemberontakan-pemberontakan Peta di tempat lain, hingga akhirnya tercapailah cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Merdeka seutuhnya.

2.4.10 *Pengerahan Romusha*

Sesuai dengan situasi Asia pada saat Jepang menjajah Indonesia yakni terjadinya peperangan terus menerus, sedangkan Jepang mempunyai ambisi yang sangat besar untuk dapat menguasai Asia Timur Raya, maka Jepang berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada, baik dari daerah Jepang sendiri, maupun jajahannya. Demikian juga halnya dengan wilayah Indonesia. Semula tenaga yang diperlukan terutama diarahkan untuk menjadi tentara/militer, tetapi kemudian untuk keperluan perang, ternyata sangat memerlukan tenaga besar walaupun tidak dipekerjakan langsung dengan tentara. Tenaga kasar tersebut dikenal dengan istilah Jepang *Romusha*.

Untuk dapat mengerahkan *romusha*, *Naimubu* (Departemen Urusan Dalam Negeri) merasa perlu untuk mendirikan jawatan tersendiri. Untuk itu maka didirikanlah apa yang disebut dalam

bahasa Jepang dengan *romukyoku*. *Romukyoku* tersebut menggariskan asas-asas tertentu dengan tujuan agar tidak terjadi perlakuan-perlakuan yang kejam terhadap tenaga-tenaga pekerja yang dikerahkan tersebut.¹²⁹

Karena pekerjaan para *romusya* adalah bekerja kasar (kuli) maka tenaga-tenaga yang diperlukan hanya memerlukan syarat yang ringan, yakni: berbadan sehat serta tegap dan umur antara 16 – 45 tahun.

Sedangkan badan atau orang yang memerlukan *romusha* harus mengisi formulir yang menyebutkan antara lain: tempat *romusha* akan dipekerjakan; jumlah *romusha* yang dikehendaki dari kedua jenis kelamin dan jangka waktu *romusha* akan dipekerjakan.¹³⁰

Untuk mengetahui bagaimana pengerahan *romusha* di daerah, maka setiap bulan semua pemerintah daerah harus melaporkan hal tersebut kepada *Romukyoku*. Dengan demikian pengerahan *romusha* pada awalnya dapat dikontrol dengan baik.

Tetapi rupanya perlakuan terhadap para *romusha* seperti tersebut diatas tidak berlangsung lama. *Romusha* kemudian diperlakukan sangat kejam, bahkan jumlah permintaanpun tidak terbatas. Karena diperlakukan dengan kejam akhirnya rakyat merasa takut untuk masuk *romusha*. Untuk itu Jepang mulai melancarkan kampanye (propaganda). Suatu contoh dapat dikemukakan mengenai keterangan *Somubutyo* pada sidang *Cup Sangi In*, waktu menjawab pertanyaan *Saiko Sikikan tentang romusha* sebagai berikut:

'*Romusha-romusha* itu sesungguhnya adalah juara-juara rakyat dan prajurit pemuka di belakang garis depan peperangan. Mereka itu harus dihormati juga sebagai Pembela Tanah Air dan *Heiho*, karena merekalah prajurit yang memegang palu dan cangkul di tangannya sebagai pengganti senapan Oleh karena itu bersama-sama tuan (anggota *Cuo Sangi In*) sekalian, Pemerintah hendak memberi kehormatan besar kepada *Romusha-romusha* itu sebagai prajurit pekerja serta hendak menganjur-anjurkan hal itu. . . . Seluruh penduduk (Pulau Jawa) yang lima puluh juta dengan serentak dan seia-sekata harus maju terus dalam kebaktian bekerja'¹³¹

Walaupun keterangan Sombutyo tersebut sangat menarik, tetapi kenyataannya hanyalah merupakan propaganda Kosong tanpa ditepati. Hal ini terbukti dari cara pengerahan *Romusha* yang dikerahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan obyek militer tanpa bayaran. Beribu-ribu *Romusha* dikerahkan untuk tujuan tersebut, bahkan sebagian dikirim keluar Jawa dan biasanya kalau sudah dikirim keluar Jawa biasanya tidak akan kembali, walaupun kembali tinggal kulit pembalut tulang saja. Mereka yang mati di tengah perjalanan atau di tempat kerja tidak diketahui di mana kuburnya.¹³²

Akibat dari perlakuan Jepang terhadap para *Romusha* seperti itu, maka rakyat (terutama rakyat kecil) Indonesia saat itu merasa takut, ngeri, was-was dan dongkol serta dendam. Seperti nasib yang dialami oleh *Waknatu* (dia pengasuh Pak Said waktu kecil) penduduk dari Bojonegoro. *Waknatu* mempunyai anak satu (tunggal) yang menjadi *romusha*, kenyataannya hilang tak kembali lagi. Oleh karena itu semangat *Waknatu* untuk menjadi pejuang kemerdekaan semakin menggelora, tetapi sayang fisik *Waknatu* sudah tidak mampu, karena sudah cukup tua. Akhirnya, dia hanya mampu menampung dan melindungi kaum pejuang untuk merebut kemerdekaan di daerah Bojonegoro.¹³³ Demikianlah gambaran rakyat kecil Jawa Timur secara keseluruhan mengalami naib yang hampir sama dengan *Waknatu*.

2.4.1 Organisasi Kewanitaan

Seperti telah diketahui bahwa pada masa penjajahan Jepang semua kegiatan organisasi, perkumpulan, rapat dan sebagainya dilarang, kecuali yang dikehendaki oleh Jepang. Demikian juga semua organisasi wanita dibubarkan, kemudian Jepang membentuk organisasi khusus yang diberi nama *Fujin Kai*, pada Agustus 1943. Keanggotaan organisasi ini tidak terbatas pada kaum remaja-wanita saja, sebab umur minimum ditetapkan 15 tahun, sedangkan umur maksimum tidak terbatas.¹³⁴ Disamping itu karena pembentukan *Fujin Kai* atas perintah dari

atas, maka keanggotaannya juga mencakup semua istri para pembesar dan pemangku jabatan penting, terutama istri pamong praja baik cakap maupun tidak cakap, harus bekerja demi kepentingan pertahanan.¹³⁵

Sesuai dengan peranan wanita, organisasi *Fujin Kai* mempunyai tugas yang mencakup lima lapangan yaitu:

- 1) Mengutamakan kesederhanaan dan berusaha saling melatih sambil mempertinggi derajat kesusilaan wanita di Jawa;
- 2) Mengadakan *Zigyobu* (bagian usaha) yang permanen atau darurat, untuk menjalankan pekerjaan yang perlu dalam lapangan memperbaiki kehidupan di belakang garis peperangan dan dalam lapangan usaha menabung, pendidikan, keselamatan umum dan kesehatan.
- 3) Memajukan kesehatan tubuh dengan jalan mengadakan pidato-pidato pada rapat-rapat tentang ilmu tubuh manusia, kesehatan dan makanan.
- 4) Menanam keinsyafan kewajiban wanita dalam usaha penjagaan negeri diwaktu peperangan, terutama tentang memberi penerangan pertolongan pertama dengan jalan mengadakan pidato-pidato atau mendirikan kursus-kursus serta merapatkan perhubungan dengan *Seinendan dan Keibodan*;
- 5) Mengadakan hubungan yang erat dengan sekolah-sekolah dan menegaskan pidato-pidato dan latihan tentang pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak dan murid diluar sekolah dan dalam rumah tangga.¹³⁶

Dalam jenis kegiatan usaha misalnya mengumpulkan perhiasan emas, katanya untuk *Fonds Kemakmuran* (ternyata tidak meninggalkan bekas) menanam kapas dan lain-lain.¹³⁷ Dengan dibentuknya dapur umum di Surabaya, ibu-ibu yang semula aktif di berbagai organisasi ikut aktif dalam dapur umum tersebut seperti ibu Sudirman sambil mendampingi suaminya yang wafat di Ngoro 1949.¹³⁸

BAB III KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

3.1 Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan ataupun yang merupakan awal dari Proses Revolusi Kemerde- kaan.

3.1.1 Berita Proklamasi Kemerdekaan.

Menjelang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di Kota Surabaya telah ada gerakan di bawah tanah atau gerakan *illegal* yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Gerakan di bawah tanah itu antara lain berupa kelompok-kelompok pemuda yang bergerak di masing-masing organisasi pemuda-pelajar buatan Jepang dan para pemuda di masing-masing jawatan pemerintah atau swasta Jepang.

Pada waktu itu pemerintah Militer Jepang melarang penduduk untuk mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Namun demikian para anggota kelompok gerakan di bawah tanah tersebut bersembunyi selalu berusaha mengikuti jalannya Perang Pasifik, melalui siaran radio luar negeri. Sehingga Cak Dul Arnowo (ejaan lama : Tjak Doel Arnowo) dan kawan-kawan dapat menangkap siaran luar negeri tentang penyerahan tak bersyarat Pemerintah Jepang kepada Sekutu.

Setelah mengetahui bahwa kedudukan Pemerintah Militer Jepang di Indonesia dalam keadaan lemah, maka Cak Dul

Arnowo bersama-sama dengan Sumarno mengusahakan siaran yang ditujukan keluar negeri, dengan melalui pemancar radio yang dibuat di rumah Wahap di Kapaskrampung Surabaya. Isi siaran tersebut antara lain menyatakan, bahwa kita di Indonesia terutama di Surabaya sudah siap dalam mengadakan persiapan kemerdekaan.^{1a}

Sementara itu P.M. Suzuki dengan melalui pemancar radio Tokio telah mengumumkan berita, bahwa Kerajaan Jepang telah menerima tuntutan *Potsdam* dan takluk kepada Sekutu (tanggal 14 Agustus 1945). Sehari kemudian *Tenno Heika* (kaisar Jepang Hirohito) sendiri dengan melalui corong radio Tokio, memaklumkan penghentian perang dan menyerah kalah tanpa syarat kepada Sekutu.^{1b} Walaupun berita tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu itu sangat dirahasiakan oleh pihak Pemerintah Militer Jepang di Indonesia, namun para pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita *Domei* dan di kantor radio Jakarta ataupun kaum pergerakan di bawah tanah telah dapat mengetahuinya. Sambil menyebarluaskan berita tersebut para pejuang Indonesia di Jakarta mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan mengatur siasat tentang cara penyebar luasan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu.

Demikianlah pada 15 Agustus 1945 Panitia Aksi Pemuda Jakarta telah membentuk satu tim yang bertugas merebut Radio *Hoso Kyoku*. Pada waktu itu Yusuf Ronodipuro (salah seorang penyiar Radio Jakarta - Hoso Kyoku), mendapat tugas untuk merebut gedung siaran radio dan pemancar-pemancarnya dari penguasa Jepang. Juga supaya mengadakan saluran *relay* antara Gedung Pegangsaan Timur 56 dan Gedung Siaran Radio. Karena akan ada pengumuman penting. Namun ketika sore harinya Yusuf Ronodipuro tiba di gedung radio (Hoso Kyodku) Medan Merdeka Barat 4 - 5 Jakarta ternyata gedung tersebut dijaga ketat oleh para anggota *kempeitai* (Polisi Militer Jepang). Karena itu gagallah usaha mereka untuk merebut *Hoso Kyoku* dan usaha menyiarkan berita Proklamasi melalui Stasiun Radio itupun tak dapat dilaksanakan.² Jalan lain harus ditempuh.

Dalam pada itu di kantor berita *Domei* Jakarta secara diam-diam sudah terbentuk suatu tim kecil yang terdiri dari beberapa orang untuk mengatur agar Proklamasi dapat disiarkan melalui *morsecast Domei*. Sehubungan dengan itu pada 16 Agustus 1945 malam hari, petugas khusus markas pemuda *Komite van Aksi* menugaskan Pengulu Lubis, Syakhrudin, Rakhmad Nasution, Asa Bafagih dll. (semuanya pegawai kantor *Domei*) untuk mengatur penyiaran berita Proklamasi melalui *Domei*.³

Pada dinihari 17 Agustus 1945 naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berhasil disepakati oleh wakil-wakil bangsa Indonesia di rumah Laksamana Muda (L) Tadasyi Maeda di *Oranye Boulevard* (Jalan Imam Bonjol No. 1 sekarang). Pagi harinya Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) pukul 12.00 (waktu Tokyo) atau pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10.00 WIB.⁴

Setelah itu diusahakan penyebarannya ke seluruh pelosok Indonesia.

Barisan-barisan yang dikerahkan untuk menyebarkan berita proklamasi itu ternyata mendapat rintangan dari kempetaitai Jepang. Namun dengan penuh keyakinan rakyat selalu membantu penyiaran berita proklamasi tersebut, sehingga seluruh pelosok Kota Jakarta segera mengetahuinya.⁵ Bahkan tidak hanya terbatas pada penduduk Kota Jakarta saja, tetapi meluas ke daerah-daerah luar Jakarta dengan perantaraan kereta api, mobil, kawat dan radio.⁶

Para anggota Bagisan Pelopor disebar ke daerah-daerah, dengan menggunakan kereta api, mereka berangkat ke Bandung, Kedu, Jogja, Solo, Pati dan Kediri.⁷ Begitu pula rombongan Ny. Tri Murti berangkat dengan mobil ke Semarang.⁸ Tim kecil pegawai *Domei* pun telah berhasil menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan itu dengan menggunakan huruf-huruf morse atau *morsecast*.

Berita proklamasi yang disiarkan dengan *morsecast* melalui pemancar radio *Domei* Jakarta tersebut ternyata dapat ditangkap oleh pesawat penerima atau *receivers* radio Kantor Berita Domei Cabang Surabaya. Pada waktu itu Kantor Berita *Domei* Cabang Surabaya berada di Jalan Aloon-Aloon No. 28 (sekarang bernama jalan Pahlawan No. 28 dan dipakai untuk Kantor PELNI Jakarta Loyd) Direktur Kantor Berita *Domei* Cabang Surabaya pada waktu ini seorang Jepang yang bernama Chara. Sedangkan yang menjadi pemimpin redaksi kantor Berita Domei Bagian Indonesia adalah Romo Bintarti, yang antara lain dibantu oleh Sutomo (Bung Tomo), Sumarji Ajiwongsokusumo (Pak Petruk) dan Fakih sebagai anggota redaksinya. Bagian Telkomnya diketuai oleh Hidayat dan dibantu oleh Suyono, Yakup (ejaan lama Jacup), Suwardi, Suwaji, Anwar Idris, Kusnindar, Sudarmo dan Kuntoyo. Dalam melaksanakan pekerjaan, sehari-hari petugas Telkom (markonis) Domei dibagi menjadi empat regu atau empat *ploeg*. *Ploeg* pertama menjalankan tugas dari pukul 05.00 sampai dengan lebih kurang pukul 10.00, *ploeg* kedua berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00, *ploeg* ketiga dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 dan *ploeg* keempat dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 24.00.⁹

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi yang bertugas di bagian Telkom kantor berita *Domei* Cabang Surabaya ialah Yakup dan R. Suwardi, sedangkan yang berada di bagian redaksi Bagian Indonesia antara lain Romo Bintarti dan Sutomo (Bung Tomo). Pada kira-kira pukul 10.00 ketika Yakup sedang bertugas di Bagian markonis ia menangkap berita Proklamasi yang disiarkan melalui pemancar radio kantor berita *Domei* Jakarta. Berita tersebut sesuai dengan teks Proklamasi itu diterima oleh Yakup dalam bentuk huruf-huruf morse. Berita Proklamasi dalam bentuk huruf-huruf *morse* itu oleh Yakup diterima langsung dengan memakai mesin tulis (rangkap satu). Ketika naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu segera diserahkannya sendiri kepada bagian Redaksi, Romo Bintarti dan Bung Tomo. Berita Proklamasi dari Jakarta itu rupanya membuat marah

orang-orang Jepang di Domei, sehingga mereka mengatakan bahwa berita itu tidak benar sama sekali. Walaupun pada waktu itu para pegawai kantor berita *Domei* Cabang Surabaya tidak memberikan komentar apa-apa, namun secara diam-diam mereka menyiarkan berita tersebut dari mulut ke mulut sehingga meluas ke masyarakat Surabaya.¹⁰ Bahkan pada 18 Agustus atau 19 Agustus 1945 di kaca muka kantor berita *Domei* Cabang Surabaya telah terdapat plakat ukuran kecil yang berisi teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.¹¹

Pada hari itu juga berita proklamasi tersebut disampaikan kepada redaksi harian *Suara Asia* (*ejaan lama Soeara Asia*) yang kantornya berdekatan dengan kantor berita *Domei*, yaitu di Jalan Aloon-Aloon No. 30 (sekarang bernama Jalan Pahlawan No. 30 dan dipakai sebagai kantor harian *Surabaya Post*). *Suara Asia* adalah satu-satunya surat kabar untuk Jawa Timur, yang dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Bahkan ruang lingkup penyebarannya sampai ke Kalimantan Timur (Borneo Timur), Sulawesi, (Selebes), Bali dan Maluku.¹²

Setelah menerima berita proklamasi tersebut Muhammad Ali anggota utama staf redaksi *Suara Asia* berniat segera memuat berita tersebut secara lengkap di halaman pertama, tetapi belum sampai diset seluruhnya, tiba-tiba muncul berita bantahan. Hal tersebut menjadikan orang-orang *Suara Asia* bingung. Seorang di antara mereka lalu menelpon ke *Domei* Jakarta, menanyakan bagaimana persoalan yang sebenarnya. Ahmad, redaktur kawat yang sedang bertugas di kantor berita *Domei* Jakarta dengan jelas menjawab: "Teruskan saja, berita itu sudah betul."¹³ Begitulah berita proklamasi itu kemudian dimuat dengan huruf besar dalam *Suara Asia* dengan *kop* merah terbitan 17 Agustus 1945 sore.¹⁴ Selain itu harian *Suara Asia* juga membuat selebaran berita tersebut, bahkan di depan kantornya juga telah dilekatkan surat selebaran berhuruf besar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehingga tiap orang yang lewat dapat membacanya.¹⁵ Dengan demikian jelaslah bahwa pada 17 Agustus 1945 itu *Suara Asia* telah menyebar-

luaskan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke seluruh Jawa Timur. Penyebaran berita Proklamasi makin meluas setelah disiarkan melalui pemancar radio *Hoso Kjoku* Surabaya.

Rupanya surat selebaran yang berisi teks Proklamasi dari harian Suara Asia ada yang sampai di tangan pegawai radio *Hoso Kyoku* Surabaya yang tergabung dalam "Gerakan Pemuda Kantor". Tetapi dapat disita oleh *kempetai* Surabaya dan Radio *Hoso Kyoku* Surabaya diawasi dengan ketat agar tidak dapat menyiarkan berita tersebut. Namun para pemuda tidak kehilangan akal pada malam harinya mereka dapat menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Madura. Sedang pada sore hari 18 Agustus 1945 dalam ruangan Pancaran Sastra telah dibacakan tulisan R. Sukarjo Wiryopranoto yang dimuat dalam harian "Asia Raya" berjudul "*Pro Patria*", yang menyerukan kewajiban tiap putera Indonesia terhadap negara dan tanah airnya.¹⁶

Dengan demikian penduduk Jawa Timur yang mengerti bahasa Madura dan mendengarkan siaran tersebut akan segera mengetahuinya seperti misalnya rakyat Banyuwangi yang saat itu diharuskan selalu mengikuti siaran radio. Di samping itu Bupati Usman Sumodinoto bersama tokoh-tokoh perjuangan yang lain juga gigih menyebar luaskan berita tersebut.¹⁷ Sedang bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Madura akan mengetahuinya setelah membaca surat kabar Suara Asia yang terbit 17 Agustus 1945 sore. Bahkan mereka juga dapat mengetahui isi Undang-undang Dasar (1945) Negara Republik Indonesia secara lengkap dari harian Suara Asia 20 Agustus 1945.¹⁸

Usaha penyebar luasan berita proklamasi ke daerah-daerah Jawa Timur tidak hanya melalui radio dan surat kabar, tetapi juga melalui pengiriman kurir-kurir. Demikianlah pada 20 Agustus 1945 malam S. Harjadinata (ejaan lama S. Hardjadinata) yang baru datang dari Jakarta pada 19 Agustus 1945, telah berhasil mengumpulkan pemuda-pemuda Jawa Timur di kantor Badan Pembantu Prajurit yang terletak di Jalan *Juliana Boulevard* (sekarang Jalan Cendana Kaliasin) Surabaya. Pada sekitar pukul 22.00 lebih kurang tiga puluh pemuda yang berasal

dari Kediri, Malang, Bojonegoro dan Jember telah diberi penjelasan oleh S. Harjadinata tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu para pemuda tersebut dimintanya untuk kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menyebarkan berita tersebut dan mengusahkan pengibaran Sang Merah Putih.¹⁹

3.1.2 *Pengibaran Bendera Sang Merah Putih*

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih adalah lambang kehormatan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia,²⁰ karena itu untuk mempertahankannya Ir. Sukarno kemudian memerintahkan pada Dr. Rajiman Widyadinigrat untuk membentuk "Barisan Berani Mati" yang bertugas mempertahankan bendera tersebut secara mati-matian.²¹

Seluruh bangsa Indonesia bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka peroleh itu. Selanjutnya untuk mewujudkan kedaulatan negara mereka berusaha mengadakan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang sehubungan dengan itu, rakyat daerah segera melakukan "Gerakan Pengibaran Bendera" yang dengan serempak diikuti usaha pemindahan kekuasaan. Gerakan Pengibaran Bendera atau *Vlaggen Actie* itu merupakan gerakan rakyat daerah yang bertujuan agar di daerahnya hanya berkibar bendera Sang Merah Putih saja, sedangkan bendera asing yang dikibarkan tanpa ijin penguasa Republik Indonesia setempat harus diturunkan.²²

Pada waktu itu secara resmi Jepang sudah menyerah kepada Sekutu (15 Agustus 1945). Secara hukum atau *de jure* Pemerintah Militer Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Namun secara kenyataan atau *de facto* Pemerintah Militer Jepang masih menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal itu disebabkan karena adanya instruksi dari pihak Sekutu, bahwa mereka harus tetap memegang kekuasaan sampai Sekutu datang dan pihak Jepang dilarang menyerahkan kekuasaan serta senjatanya kepada siapapun, kecuali kepada Sekutu. Timbulah perselisihan antara rakyat daerah yang melaksanakan Gerakan Pengibaran

Bendera dengan fihak Jepang dan fihak asing (NICA yang didukung oleh Sekutu), yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Akibatnya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia kita kenal peristiwa-peristiwa bendera, misalnya: peristiwa bendera di Pematang Siantar (tanggal 15 Oktober 1945) dan di Manado (tanggal 14 Februari 1946).²³ Demikian juga di daerah Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan di kota Surabaya pada khususnya sejarah perjuangan untuk mempertahankan dan menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut dimulai dengan Gerakan Pengibaran Bendera.

Demikianlah ketika 21 Agustus 1945 S. Harjadinata bersama-sama dengan tiga orang temannya (antara lain Cak Dul Arnowo dan A. Wahab) berkeliling dengan *jeep* terbuka di Kota Surabaya dan kemudian ke Mojoagung serta Jombang, bendera Sang Merah Putih telah tampak berkibar di kampung-kampung dan di beberapa tempat di kota Pugeran tengah³² Walaupun belum merata, hal itu menunjukkan bahwa rakyat Jawa Timur telah menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Gerakan Pengibaran Bendera, yang sering menimbulkan perselisihan dengan fihak Jepang. Misalnya di Surabaya pernah terjadi peristiwa bendera di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, yaitu sebuah gedung yang mulai dibangun tanggal 29 September 1931, atas dasar gotong royong rakyat di bawah pimpinan Dr. Sutomo dan kemudian mempunyai peranan penting dalam sejarah Pergerakan Nasional Indonesia²⁴ Bagaimana peristiwa itu terjadi, Matu Mona dalam bukunya yang berjudul "Arek Suroboyo" telah menuturkan sebagai berikut:

Kami berlari dari Gang Maspati menuju Bubutan . . . dari jauh kelihatan serombongan Kempei Jepang turun dari atas truck didepan gedung Nasional. Mereka memaksa supaya bendera yang berkibar digedung itu diturunkan. Kebetulan sekali sebuah mobil lewat di Bubutan itu mengibarkan Sang Merah Putih maka Kempei itu menahan mobil tersebut dan menyentak bendera itu lalu diinjakinjaknya. Kami tidak sabar lagi lalu menghampiri, sebelum Kempei itu sempat mengadakan setelling Suradi telah melemparkan granat-granat yang dibawahnya ketengah-tengah Kempei itu. Letusan granat itu memakan 5 orang Jepang, yang tewas ketika itu juga.

Yang lain segera hendak melepaskan tembakan, akan tetapi kepala mereka memberi isyarat supaya jangan menembak dulu karena ia melihat Rakyat semakin banyak berkerumun, masing-masing mengambil sikap akan memusnahkan musuh negara. Kepala Kempeitai menyilakan pihak kita bertemu berhadap-hadapan dengan dia menyelesaikan soal itu, katanya. Maka dengan tiada pikir panjang Suradi dan Jatno tampilah kedepan, dengan tiga orang Pemuda lagi, bekas opsir PETA.²⁵

Sejalan dengan Gerakan Pengibaran Bendera, muncul pula gerakan pemakaian lencana Merah Putih. Gerakan semacam ini antara lain pernah terjadi di dalam Kantor Pembagian Minyak Daerah Jawa Timur Pemerintah Militer Jepang yang pada waktu itu bernama *Sekiyu Haikyū Jimusho Thobu Sisho*, terletak di bekas kantor *Internatio di Jalan Willemplein No. 1* (sekarang Jalan Jayengrono No. 1). Jembatah Merah. Dalam bulan Agustus di kantor tersebut telah terdapat kelompok gerakan dibawah tanah, yang anggotanya terdiri dari para pegawai bangsa Indonesia dan dipimpin oleh A. Kasman. Setelah sebelumnya mereka melakukan gerakan "Pekik Merdeka", yang mereka ucapkan setiap bertemu dengan semua pegawai bangsa Indonesia, maka di bawah pimpinan S. Kasman dilakukan gerakan pemakaian lencana merah putih. Sekelompok pegawai wanita telah membuat lencana merah putih sebesar telunjuk jari, jumlahnya 90 buah. Setelah dibagikan kepada para pegawai bangsa Indonesia, ternyata yang memakai di atas saku kiri hanya 76 orang.²⁶

Demikianlah gambaran sepintas tentang Gerakan Pengibar Bendera di Kota Surabaya dalam bulan Agustus 1945. Walaupun gerakan tersebut semula terjadi setempat-setempat, namun makin lama makin meluas di seluruh kota, bahkan menjalar ke seluruh karesidenan Surabaya. Gerakan tersebut makin diperhebat setelah Pemerintah Republik Indonesia Pusat mengumumkan maklumat, bahwa untuk menyambut peristiwa pelantikan dan sidang pertama Komite Nasional Indonesia (KNPI Pusat) maka diperintahkan agar Bendera Nasional Sang Merah Putih dikibarkan di seluruh Indonesia selama 29 dan 30 Agustus 1945.³⁶ Maklumat tersebut disusul pula dengan maklumat

Pemerintah Republik Indonesia 31 Agustus 1945, bahwa mulai 1 September 1945 diperintahkan untuk mengibarkan terus bendera nasional Sang Merah Putih di seluruh Indonesia. Dalam maklumat tersebut terdapat suatu ketetapan, bahwa mulai 1 September 1945 ditetapkan bagi seluruh bangsa Indonesia waktu bertemu di mana-mana saja saling menghormati dengan ucapan, "MERDEKA"²⁷

Gerakan Pengibaran Bendera tersebut semula (pada bulan Agustus) dilakukan oleh rakyat yang sadar akan kewajibannya untuk mempertahankan dan menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mereka bergerak untuk mewujudkan dan menegakkan kehormatan bangsa Indonesia yang telah merdeka. Mereka bergerak tanpa pamrih dan secara spontan, serta tanpa bimbingan Pemerintah Daerah. Karena pada waktu itu Pemerintah Daerah Karesidenan Surabaya belumberdiri dan pada 28 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Surabaya baru terbentuk. Pada permulaan bulan September 1945 Badan Keamanan Rakyat (BKR) baru tersusun. Sedangkan pada 3 September Pemerintah Daerah Karesidenan Surabaya sedang diproklamasikan.²⁸ Sehari setelah proklamasi berdirinya Pemerintah Karesidenan Surabaya itu (4 September 1945), di kantor karesidenan atau *Syuutcoo* Surabaya (sekarang Gedung Gubernur di Jalan Pahlawan) dikibarkan bendera Sang Merah Putih.²⁹ Tentang bagaimana proses pengibaran bendera Sang Merah Putih di kantor *Syuutcoo* (karesidenan) Surabaya itu, telah dituturkan oleh Bung Tomo dalam bukunya yang ber judul "10 November", sebagai berikut:

"Pemuda-pemuda kantor tersebut telah memasang Sang Dwiwarna di suatu sudut tempat bekerja mereka.

Pembesar-pembesar Nippon marah-marah, seorang pembesar Indonesia di perintahkan untuk memperingatkan pada pemuda agar supaya menurunkan Sang Merah Putih.

Alasan mereka, Pemerintah Balatentara Nippon hanya bertanggung jawab kepada Tentara Sekutu.

Menurut instruksi, segenap kekuasaan beserta alat-alatnya, akan diserahkan kepada Tentara Sekutu.

Dengan kata-kata itu Sang Merah Putih terpaksa diturunkan. Tetapi

pemuda-pemuda Kantor Karesidenan tidak putus asa. Diambilnya sebatang kayu yang agak luar biasanya panjangnya. Dengan kayu yang kemudian dipakai sebagai tiang-bendera itu, dikibarkanlah Sang Merah Putih diatas menara kantor karesidenan yang tertinggi letaknya. Jalan menuju menara tersebut tertutup rapat dan terkunci. Tetapi hasrat untuk mengibarkan Sang Saka cukup memberikan keberanian kepada para pemuda kita guna meremukkan kaca sebuah pintu yang menuju kepuncak itu. Pembesar-pembesar Nippon kelihatan segan untuk ikut mendaki tangan menara yang tinggi tersebut, sehingga mereka terpaksa membiarkan . . . membiarkan Sang Dwiwarna melambai-lambai dengan megahnya, sebagai lambang dikuasainya seluruh Daerah Surabaya oleh Pemerintah Republik Indonesia".³⁰

Walaupun Sang Merah Putih telah berhasil dikibarkan di atas gedung karesidenan Surabaya, namun pada 9 September 1945 bendera tersebut tidak berkibar lagi.³¹ Apa sebabnya terjadi demikian, data penjelasan belum ada. Data yang ada menjelaskan, bahwa pada waktu itu gedung tersebut dipakai sebagai kantor *Syutcookan* dan kantor Residen Surabaya.³²

Selanjutnya pada 10 September 1945, terjadi Gerakan Pengibaran Bendera di gedung *Internatio*, Pelaku peristiwa tersebut adalah para anggota gerakan di bawah tanah Pegawai Kantor Pembagian Minyak Daerah Jawa Timur, yang terdiri dari delapan orang pemuda dan seorang pemudi di bawah pimpinan S. Kasman. Pada pukul 9.00 dengan didahului S. Kasman delapan orang tersebut satu persatu keluar dari kantor. Kemudian disusul oleh seorang pemudi yang membawa bungkusan, berisi bendera Sang Merah Putih. Setelah semuanya berada di luar kantor, S. Kasman mengibarkan bendera tersebut di atas pintu besar tingkat satu. Karena ternyata tidak ada reaksi yang membahayakan dari pihak Jepang, keesokan harinya kibaran bendera Sang Merah Putih tersebut ditambah satu, yaitu di atas gedung kantor tingkat ketiga.³³

Rakyat Surabaya secara spontan bergerak terus untuk mewujudkan dan menegakkan kehormatan bangsa Indonesia yang telah merdeka, walaupun dalam pelaksanaannya masih dilakukan gerakan setempat. Radio umum di kampung-kampung, memperdengarkan suara Pemerintah Republik Indonesia Pusat yang menjelaskan tentang kedudukan bangsa Indonesia yang te-

lah, menyatakan kemerdekaannya dan menekankan betapa pentingnya menggalang persatuan dalam perjuangan.³⁴ Barisan Pemuda Surabaya kemudian menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Tambaksari (sekarang lapangan Gelora 10 Nopember Surabaya). Pada 11 September 1945 sore hari para pemuda berduyun-duyun datang ke lapangan Tambaksari dengan membawa Sang Merah Putih, dari segala penjuru Surabaya. Sehingga waktu itu lapangan Tambaksari penuh lambaian bendera Sang Merah Putih, baik yang berasal dari bendera para hadirin maupun dari bendera yang berada di puncak tiang-tiang. Pekik perjuangan nasional "MERDEKA" mendengung di angkasa. Dalam kesempatan itu hadir beberapa tokoh pemuda Sumarsono (pemimpin suatu barisan pemuda), Sudirman (Residen Republik Indonesia Surabaya), Cak Dul Arnowo (Ketua KNI Daerah Surabaya) untuk menyampaikan pidato yang isinya memberi beberapa petunjuk pada para pemuda.³⁵ Rapat di Tambaksari itu kemudian disusul dengan rapat Samodra untuk memperingati sebulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di lapangan sepakbola Pasar Turi, pada 17 September 1945. Walaupun fihak kempeitai melarang diadakannya rapat tersebut, namun mereka tak berdaya menghadapi massa rakyat yang semangatnya dengan menggelora itu.³⁶ Ketika aksi-aksi pengibaran bendera yang disertai dengan semangat perjuangan itu sedang berlangsung muncullah persoalan baru yang membawa akibat makin memuncaknya Gerakan Pengibaran Bendera di kota Surabaya.

Pada waktu itu orang-orang interniran Belanda berhasil meninggalkan kamp-kamp tawanan yang berada di Gubeng, Darmo, Sawahan dan lain-lainnya. Mereka kebanyakan berlagak sebagai pemenang perang. Mereka menghubungi fihak Jepang untuk meminta kembali rumah-rumah, toko-toko dan perusahaannya. Bahkan ada juga yang meminta senjata kepada fihak Jepang yang akan dipakai untuk memukul Pemerintah Republik Indonesia yang baru disusun. Mereka merasa semakin kuat, ketika ada kapal udara Belanda dari Balikpapan menyebarkan surat selebaran yang berisi perintah agar mereka bersiap-siap menerima kedatangan tentara Sekutu dan Belanda datang waktu

yang dekat. Surat selebaran itu dihias dengan bendera Belanda Merah Putih Biru (Triwarna) dengan gambar Sri Ratu Wihelmina.³⁷

Sementara itu telah datang pula di Surabaya opsir-opsir Sekutu dan opsir-opsir Belanda dari *Allied Command* (Utusan Sekutu) bersamaan rombongan Palang Merah Internasional (*Intercross*) dari Jakarta. Rombongan Utusan Sekutu itu ditempatkan di hotel *Yamato* zaman Belanda bernama Oranye Hotel, zaman RI menjadi hotel L.M.S. dan sekarang bernama Hotel *Majapahit*) di Jalan Tunjungan, sedangkan rombongan *Intercross* ditempatkan di Gedung Setan di Jalan Tunjungan 80 Surabaya.

Karena merasa kedudukannya kuat, sekelompok orang Belanda Indo dan totok, di bawah pimpinan *Mr. Ploegman* pada sore hari 18 September 1945 mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru), tanpa izin Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya. Bendera tersebut dikibarkan pada tiang di tingkat teratas hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, 19 September 1945, orang-orang Belanda melanjutkan aksinya. Secara demonstratif mereka berdiri di atas atap dengan sikap menantang sambil bertingkah laku gagah-gagahan siap menjaga dan mempertahankan kibaran bendera mereka. Bahkan di antara mereka ada yang berani menyobek lencana Merah Putih yang dipasang di baju orang-orang yang sedang lewat di muka hotel tersebut. Sudah barang tentu perbuatan itu memancing kemarahan "Arek-arek Suroboyo. (Yang disebut "Arek-Arek Suroboyo" adalah bangsa Indonesia dari pelbagai suku yang pada tahun 1945 bertempat tinggal di Surabaya).³⁸

Secara beranting kabar tentang kejadian di hotel Yamato itu tersebar luas di kota Surabaya. Pada waktu itu pemuda-pemuda Surabaya khususnya dan bangsa Indonesia umumnya beranggapan, bahwa bendera Triwarna (Merah Putih Biru) itu adalah lambang penjajah Belanda. Sehingga pada waktu itu mudah timbul anggapan bahwa pengibaran bendera Belanda di atas hotel Yamato tentunya mengandung arti Belanda sudah menguasai kembali udara negeri bekas jajahannya (Indonesia)³⁹

Hal itu bertentangan dengan tujuan Gerakan Pengibaran Bendera yang sedang berlangsung di Surabaya. Oleh karena itu begitu berita tersebut tersiar, sebentar saja Jalan Tunjungan dibanjiri oleh massa rakyat. Mereka itu antara lain terdiri dari pemuda kampung, bekas PETA, bekas HEIHO, bekas *Seinendan*, bekas Barisan *Jibakutai* (Barisan Berani Mati), kelompok Mahasiswa, *Ika Daigaku* (Fakultas Kedokteran Gigi), *Senmin Kogyoo Gakkoo* (Sekolah Menengah Tinggi Teknik), *Kogyoo Gakkoo* (Sekolah Teknik Negeri), pelajar-pelajar dari *Cuu Gakkoo* (Sekolah Menengah Pertama), bahkan kemudian datang pula pemuda PNKA dan orang-orang hukuman yang baru keluar dari penjara. Pendek kata dari pelajar-pelajar yang berumur belasan tahun sampai para pemuda dewasa, semuanya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan.⁴⁰

Sementara itu, Sutomo atau Bung Tomo, seorang wartawan kantor berita "Indonesia" (kemudian menjadi ANTARA), telah menyuruh beberapa orang untuk pergi menanyakan duduk perkara yang sebenarnya ke kantor Komite Nasional dan kantor Karesidenan RI Daerah Surabaya. Dari ketua kantor tersebut mendapat jawaban, bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui hal itu.⁴¹ Jelas bahwa pengibaran bendera tersebut tanpa izin Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya. Dalam keadaan genting itu datanglah Residen Surabaya Sudirman, yang meminta kepada perwakilan Sekutu agar bendera Belanda Triwarna tersebut cepat-cepat diturunkan. Wakil Sekutu yang agaknya seorang Belanda menolaknya, bahkan dengan ancaman revolver Residen Sudirman dipaksa pergi dan membiarkan bendera Belanda tetap berkibar. Para pemuda yang tidak rela pemimpinnya dihina, kemudian menyerbu dan terjadilah perkelahian di ruang muka Hotel Yamato. Di antara para pemuda ada yang berebut naik ke atap hotel, dengan tujuan untuk menurunkan bendera Belanda itu. Akhirnya dua orang pemuda berhasil menurunkan bendera Merah Putih Biru tersebut dan setelah bagian birunya dirobek kemudian dinaikkan kembali.⁴²

Bendera Triwarna, sebagai lambang kehormatan dan kedaulatan Negara Belanda telah diganti dengan Sang Dwiwarna, lambang kehormatan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Sampai di sini, secara praktis peristiwa perobekan bendera Triwarna telah selesai. Namun demikian masih banyak pula rakyat yang belum mau meninggalkan tempat di sekitar Hotel Yamato itu. Baru setelah Residen Sudirman yang didampingi oleh Sekretarisnya, Sutaji, datang dan memberikan jaminan bahwa pengibaran bendera Triwarna tidak akan terulang lagi, rakyat menjadi tenang. Kemudian mereka beranjak dari tempat tersebut sesudah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di bawah pimpinan Bung Tomo dengan hikmat dan penuh kebanggaan.⁴³ Ternyata korban di pihak pemuda pada hari itu ada empat orang dan Mr. Ploegman meninggal karena mendapat tusukan senjata tajam dan bambu runcing (take yari).

Setelah peristiwa perobekan bendera Triwarna di Jalan Tunjungan itu, ada sebagian pemuda yang menuju kantor Karesidenan (Kantor Gubernur sekarang). Di sana wakil pemuda meminta kepada *Syuucookan* (Jepang) dan Residen Surabaya (Sudirman) supaya bendera Nasional Sang Merah Putih dikibarkan di atas Gedung Karesidenan. Dengan spontan Residen Sudirman meluluskan permintaan tersebut. Dua orang pemuda (Slamet Utomo dan Ustokhfri) naik ke atas Gedung Karesidenan untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Ketika Sang Merah Putih dengan perlahan-lahan dinaikkan ke atas puncak tiang, para pemuda dan para pegawai karesidenan yang ada di bawah bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.⁴⁴

Berkibarnya Sang Dwiwarna di atas Gedung Karesidenan itu merupakan lambang pengoperan kekuasaan. Bendera Jepang (bendera *Hinomaru/kokki*) di kantor-kantor pemerintahan harus diganti dengan bendera Republik Indonesia Sang Merah Putih, meskipun belum ada perintah resmi dari Jakarta.⁴⁵ Berkat kesigapan para pemuda Surabaya, dengan bantuan para pegawai kantor masing-masing yang tergabung dalam Panitia Angkatan Muda pengibaran bendera dapat diselenggarakan, kecuali di Markas Besar Angkatan Darat Jepang, di Markas Besar Angkatan Laut Jepang (di Embong Wungu), di Gedung Kempeitai dan Markas Militer Jepang lainnya.⁴⁶ Untuk melaksana-

kan tugas selanjutnya, para pemuda Surabaya memandang perlu adanya perlengkapan senjata. Dengan demikian maka persoalan mulai bergeser, dari gerakan pengibaran bendera ke gerakan perlucutan senjata yang menuju ke arah pengoperan kekuasaan.

3.1.3 Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah

Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian disebut Panitia Kemerdekaan saja, dalam sidangnya di Jakarta telah mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) mensahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Ir. Sukarno dipilih sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.
- 3) Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.⁴⁷

Sehubungan dengan itu kemudian dibentuk suatu badan yang disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tugas KNIP adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya pada 22 Agustus 1945 Pemerintah menginstruksikan agar membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah-daerah. Di Surabaya, dengan dimotori oleh Angkatan Mudanya, segera bergerak dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya. Sejalan dengan gerakan "Aksi Pengibaran Bendera", maka pada Selasa 28 Agustus 1945 di Jalan Kaliasin (sekarang Jalan Basuki Rachmat) telah terbentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya, yang terdiri dari 32 orang anggota dan dipimpin oleh Cak Dul Arnowo, sedang Bambang Suparto dan Dwijosewoyo menjadi Wakil I, dan II, serta Roeslan Abdulgani sebagai penulisnya. Adapun yang menjadi anggotanya antara lain: Dr. Siwabessy, Ir. Darmawan Mangunkusumo, Notohamiprojo, Dr. Moh. Suwandhi, Kustur, RM. Tohir, Bakri, dan H.Abdulkarim.⁴⁸

Begitu pula rakyat Bojonegoro. Pada 31 Agustus 1945 datang utusan Komite Nasional Indonesia Pusat (Jakarta) yaitu Gunadi dan Budi Sucitro ke kota Bojonegoro. Kemudian atas petunjuk kedua orang utusan tersebut terbentuklah Komite Nasional Indonesia daerah Bojonegoro yang mempunyai anggota 37 orang. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Bojonegoro itu berlangsung di kamar Permusyawaratan Kantor Karesidenan Bojonegoro, yang dipimpin oleh suatu panitia terdiri dari Moh. Ansar, Kusno Suroatmojo dan Abdul Sukiman. Sejak 2 September 1945 berputarlah roda kegiatan Komite Nasional Indonesia di kabupaten-kabupaten. Kemudian disusul pula dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia di kawedanan-kawedanan dan di kecamatan-kecamatan. Dalam sidangnya pada akhir bulan September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Bojonegoro telah berhasil menyusun pengurus baru yang terdiri dari:

Ketua	: Sutarjo
Sekretaris	: Abdul Sukiman
Ketua Bagian Organisasi	: Dr. Dadi
Ketua Bagian Usaha	: Sudarmadi
Ketua Bagian Penerangan	: Moh. Said
Ketua Bagian Khusus	: Sumantri (Lamorgan) Mr. Budisusetyo.
Pembantu Umum	: Kusumo dan Sudirman ⁴⁹

Ketika rakyat daerah Bojonegoro sedang sibuk mengadakan pembaharuan pengurus Komite Nasionalnya, di kota Malang rakyatnya sedang sibuk menyusun pembentukan Komite Nasional Daerahnya. Sementara itu datang utusan dari Pusat yang memberikan penjelasan tentang situasi pada waktu itu dan keharusan untuk menyusun Komite Nasional Indonesia Daerah Malang. Dengan demikian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah Malang dengan anggota-anggotanya antara lain Mr. Sunarko, Puger dan Imam Sujai. Dalam rapatnya yang pertama pada 21 September 1945 dikeluarkan suatu statement

yang menyatakan, bahwa daerah Malang menjadi daerah Republik Indonesia dan berdiri tegak di belakang Pemerintah Republik Indonesia⁵⁰

Di Kabupaten Madiun juga diusahakan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia tingkat kabupaten. Dalam buku 10 Tahun Kabupaten Madiun antara lain diuraikan sebagai berikut:

"Guna mencukupi syarat-syarat yang tertera dalam peraturan K.N.I. Karesidenan akan terbentuknya K.N.I. Kabupaten perlu diambil dari tiap-tiap K.N.I. Kecamatan 5 orang ditambah 2 atau 3 orang bekas anggota Hokokai sedang Camat dan Wedono tidak dibebaskan dari susunan ini, sehingga anggota-anggota K.N.I. Kabupaten yang ditambah pula dengan Kepala-kepala bagian dari Kantor Kabupaten merupakan jumlah yang agak besar (L.K. 100 orang).

.....
K.N.I. Kabupaten ini berjalan terus sampai penghabisan bulan Februari 1946.⁵¹

Gerakan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Karesidenan tersebut di atas ternyata kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Komite Nasional Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, pada 28 September 1945, dengan Sudirman (Residen Surabaya) sebagai ketua, Dul Arnowo (Ketua KNI Karesidenan dan anggota KNIP) sebagai wakil ketua I dan Mr. Suyadi (di Bondowoso) sebagai wakil ketua II.⁵²

3.2 Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia di Daerah

Setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memilih Ir. Sukarno sebagai presiden, dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden, maka dalam sidangnya 19 Agustus 1945 telah ditetapkan pula adanya 12 kementerian negara dan pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi. Masing-masing provinsi tersebut dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional.⁵³ Adapun nama-nama gubernur yang telah diangkat untuk kedelapan Provinsi dari Republik Indonesia itu ialah:

- 1) Mr. Teuku Mohammad Hassan diangkat sebagai gubernur Sumatera.
- 2) Sutarjo Kartohadikusumo diangkat sebagai gubernur Jawa Barat.
- 3) R. Panji Suroso diangkat sebagai gubernur Jawa Tengah.
- 4) R.A. Suryo diangkat sebagai gubernur Jawa Timur.
- 5) Mr. I. Gusti Ktut Pudja diangkat sebagai gubernur Sunda Kecil.
- 6) Mr. J. Latuharhary diangkat sebagai gubernur Maluku.
- 7) Dr. G.S.S.J. Ratulangie diangkat sebagai gubernur Sulawesi.
- 8) Ir. Pangeran Mohammad Noor diangkat sebagai gubernur Kalimantan.⁵⁴

Pada masa pendudukan Jepang daerah Jawa Timur merupakan daerah setingkat karesidenan yang disebut Syun.⁵⁵ Setelah Indonesia merdeka Jawa Timur merupakan daerah provinsi dengan R.M.R.A. Suryo sebagai gubernurnya. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak segera dapat terbentuk, karena RMTA Suryo yang waktu itu menjabat Syuucookan (Residen) Bojonegoro masih sibuk menjalankan tugasnya di Bojonegoro. Akibatnya pembentukan Pemerintah Daerah di Jawa Timur dimulai dengan gerakan Pembentukan Pemerintahan Daerah Karesidenan.

Demikianlah pada 28 Agustus 1945 Sumera (1945 M) Mr. Budhyarto, atas nama Pemerintah Sementara Republik Indonesia Daerah Besuki mengeluarkan proklamasi, bahwa berdasarkan Proklamasi Indonesia Merdeka diumumkan kepada seluruh penduduk daerah Besuki, bahwa atas nama rakyat Besuki pada hari 24 bulan 8 telah didirikan Pemerintah Sementara Republik Indonesia Daerah Besuki.⁵⁶

Walaupun sejak 28 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Karesidenan Surabaya sudah terbentuk, namun menurut kenyataan Daerah Karesidenan Surabaya belum mempunyai alat kekuasaan, Jepang masih tetap menunjukkan kekuasaan

annya. Peraturan-peraturan militer Jepang juga masih terpakai. Setiap persoalan yang menyangkut bidang pemerintahan masih diurus lewat penguasa-penguasa Jepang atau yang diangkat oleh Pemerintah Militer Jepang. Dengan adanya kenyataan itu maka beberapa anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya, yang terdiri dari: Cak Dul Arnowo, Dr. Angka Nitisastro, Mr. Dwijosewoyo dan S. Harjadinata, mengadakan pertemuan di bekas Kantor Badan Pembantu Prajurit (BPP) yang terletak di *Juliana Boulevard* (sekarang Jalan Cendana) Surabaya. Hasil perundingan berupa keputusan bahwa perlu segera dibentuk aparat pemerintah daerah sesuai dengan bunyi Proklamasi 17 Agustus 1945. Tindakan pertama adalah mengganti *Syuucookan* Jepang dengan seorang residen Indonesia. Daerah Surabaya *Syuu* harus diumumkan menjadi daerah karesidenan Surabaya yang merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Diusahakan agar R. Sudirman mau menandatangani suatu naskah proklamasi tentang berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Karesidenan Surabaya, yang mereka buat, selaku Residen Surabaya.⁵⁷

Untuk melaksanakan keputusan tersebut, mereka menyiapkan teks proklamasi. Sesudah itu S. Harjadinata dengan ditemani oleh tiga orang bekas *Syoodancoo* PETA, berangkat ke rumah R. Sudirman (di Van Sabdickstraat, sekarang Jalan R. Sudirman), yang kemudian disusul oleh Dul Arnowo, Mr. Dwijosewoyo dan dr. Angka Nitisastro. Setelah melalui beberapa pembicaraan, akhirnya R. Sudirman bersedia menandatangani naskah proklamasi 3 September 1945)⁵⁸. Proklamasi tersebut ternyata dimuat dalam surat kabar *Soeara Asia* 4 September 1945, yang isinya antara lain sebagai berikut:

"Berdasarkan atas Proklamasi Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus sebagai sari kebulatan kemauan seluruh bangsa Indonesia, mengikuti perintah dari PYM Presiden Republik Indonesia yang disiarkan dengan radio pada tanggal 23 - 9 - 2605 dan anjuran Pusat Komite Nasional Indonesia di dalam putusan permusyawaratan, di Jakarta pada tanggal 29-8 dengan ini diumumkan, bahwa atas nama rakyat daerah Surabaya mulai hari ini tanggal 3-9-2605 (1945M) bertindak Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya".

Untuk menyebar luaskan berita tersebut S. Harjadinata, Dul Arnowo dan Issa Idris, dengan sebuah mobil tua menyebarkan panflet di beberapa wilayah kota Surabaya. Sedangkan pengumuman penting berdiri Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Surabaya tersebut dilakukan di Kantor Syuu (sekarang gedung Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Timur), pada 4-9-1945. Sejak itu kantor tersebut menjadi kantor karesidenan. Pada waktu itu syuucookan *tidak di kantor yang ada neiseibutyo (sekretaris syuucookan)* dan ia tidak berbuat apa-apa ketika Sang Merah Putih dinaikkan di atas gedung tersebut.⁵⁹

Suatu hal yang menarik adalah sikap penguasa Jepang yang seolah-olah tidak tahu tentang peristiwa tersebut. Memang demikian kenyataannya. Tanggapan bangsa Jepang terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memang berbeda-beda. Perbedaan itu menimbulkan sikap yang tidak menentu, dan instruksi-instruksi dari atasan pun menjadi simpang siur.

Demikianlah pada 16 Agustus 1945, sehari sesudah kapitulasi Jepang, *Gunseikan* (Pemimpin Pemerintah Militer Jepang) Mayor Jendral Yamamoto telah menggariskan, bahwa pejabat-pejabat Jepang harus mempertahankan *statusquo*. Hal itu disetujui oleh Tentara Wilayah Ketujuh maupun oleh Komandan Sekutu, karena sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa. Tetapi dua hari kemudian (18 Agustus 1945), Tentara Wilayah Ketujuh telah memberikan pegangan kepada Tentara Keenam Belas (*Gunseikan*) tentang sikap resmi Jepang terhadap masalah kemerdekaan Indonesia. Pegangan itu berbunyi sebagai berikut:

Sebagai akibat malapetaka yang menimpa Kemaharajaan Jepang, yakni kekalahan dalam perang, amat disesalkan bahwa situasi tidak mengijinkan pelanjutan kebijaksanaan Jepang untuk mendukung perjuangan kemerdekaan dari pada rakyat-rakyat yang diduduki. Harap memberitahukan kepada orang Indonesia yang bersangkutan bahwa angkatan perang Jepang terpaksa mengambil sikap tidak mengikatkan diri kepada persoalan kemerdekaan, segalanya terserah kepada orang Indonsia sendiri, apakah ingin meneruskan perjuangan kemerdekaan, bagaimanapun kondisinya, atau tidak.⁶⁰

Dengan demikian jelaslah, bahwa Tentara Wilayah Ketujuh secara resmi telah mengambil sikap *non-commitment* atau

bersikap netral terhadap perjuangan Indonesia. Namun kemudian pada 15 September 1945 Mayor Jendral Yamamoto Kepala Staf dan *Gunseikan* terakhir Tentara Keenambelas telah mendapat tekanan dari Laksamana Muda W.R. Patterson, pemimpin gugus depan *Allied Forces Netherlands Indies (AFNEI)* bahwa kewajiban pasukan-pasukan Jepang untuk memelihara *status quo*.⁶¹

Adanya instruksi-instruksi yang saling bertentangan itu menimbulkan tiga macam sikap bagi orang-orang Jepang yang bertugas di lapangan. Ada di antara mereka yang memegang teguh instruksi *gunseikan* dan Laksamana Muda W.R. Patterson yang berarti memelihara *status quo* 15 Agustus 1945. Dengan demikian mereka tidak mengakui Republik Indonesia dan hanya mau menyerahkan senjatanya kepada angkatan perang Serikat atau bahkan menggunakannya terhadap orang Indonesia andai-kata hal itu dikehendaki oleh komandan Serikat. Ada pula di antara mereka yang sepenuh hati mengikatkan dirinya pada perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan, karena pemerintah Jepang telah menjanjikan untuk membantu mereka. Akibatnya mereka ikut berjuang dalam perang Kemerdekaan Indonesia. Tetapi ada pula di antara mereka yang mengambil jalan tengah dan berpedoman pada sikap resmi Jepang yang diumumkan oleh Tentara Wilayah Ketujuh. Mereka mengambil jalan yang paling aman dengan menonjolkan sikap netral yang sempurna. Mereka tidak segan-segan menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia dan kemudian memasuki interniran atas kemauannya sendiri.⁶²

Tiga sikap terhadap perjuangan bangsa Indonesia tersebut di atas rupanya berkembang pula di kalangan orang-orang Jepang di Jawa Timur. Maka dari itu tidak mengherankan apabila sekretaris *syuucokan (neiseibutyō)* Surabaya mengambil sikap netral. Namun demikian dalam rangka usaha mengadakan konsolidasi pemerintahan ke dalam, Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya tidak sedikit mendapat rintangan dari orang-orang Jepang yang mempertahankan *status quo* 15 Agustus 1945. Terhadap orang-orang Jepang yang bersikap

demikian ini para pejuang Indonesia di Surabaya terkenal dengan sebutan "Arek-Arek Suroboyo" tidak segan-segan untuk melawannya dengan kekuatan senjata. Terjadilah penyerbuan-penyerbuan terhadap markas *kempetai* di Jalan Pahlawan, tangsi *kaigun* (Angkatan Laut Jepang) di Gubeng, Markas Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu, Markas Angkatan Darat di Darmo dan lain-lainnya. Sedang dari pihak Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya berusaha untuk menyelesaikan sengketa senjata tersebut melalui perundingan atau diplomasi.

Dengan menggunakan siasat perang dan diplomasi itulah akhirnya pada 1 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya telah berhasil memindahkan kekuasaan dari Surabaya *Syuucokan* (Residen Jepang di Surabaya). Sejak itu Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya merupakan satu-satunya penguasa di Karesidenan Surabaya, karena itu wakil-wakil Serikat seharusnya berhubungan langsung dengan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya.⁶³ Untuk melancarkan jalannya pemerintahan Residen Surabaya segera membentuk pembantu yang disebut *Executive Committee*, terdiri dari: Mr. Dwijosewoyo, Dr. Angka, Dul Arnowo, Samsu Harya Udaya, Bambang Suparto dan Sumarsono (ketua PRI).⁶⁴

Peristiwa pemindahan kekuasaan di Surabaya itu rupanya menarik perhatian Pemerintah Republik Indonesia Pusat. Dengan adanya peristiwa tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menguasai daerah Karesidenan Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Di lain pihak Pemerintah Republik Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur belum dapat direalisasi. Sementara utusan Sekutu mulai datang di Surabaya. RMTA. Suryo yang telah diangkat menjadi gubernur Jawa Timur waktu itu masih menyelesaikan tugasnya sebagai Residen Bojonegoro. Sehubungan dengan itu untuk melancarkan jalannya pemerintahan di Jawa Timur akhirnya Presiden Republik Indonesia mengangkat R. Sudirman sebagai wakil gubernur Jawa Timur merangkap Residen Surabaya.⁶⁵

Dengan demikian sejak saat itu (6 Oktober 1945) roda Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Jawa Timur mulai berjalan di bawah pimpinan R. Sudirman. Sedangkan Gubernur RMTA. Suryo baru datang di Surabaya pada 12 Oktober 1945, setelah menyelesaikan tugasnya membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 di Bojonegoro mulai banyak dikibarkan Sang Merah Putih, kecuali di kantor *Syuucco* (karesidenan). Hal itu rupanya mencemaskan hati para pemuda pejuang di Bojonegoro. Akibatnya rakyat Bojonegoro dengan dipelopori oleh angkatan mudanya mengadakan gerakan pengibaran bendera dan gerakan penyitaan kendaraan milik Jepang. Rakyat mendesak Komite Nasional Indonesia Daerah Bojonegoro dan Dewan Pimpinan Pegawai Republik Indonesia (yang dipimpin oleh *Syuucokan* RMTA Suryo), agar Sang Merah Putih segera dikibarkan. Atas desakan itu, maka di rumah *Syuucokan* Bojonegoro berkibirlah Sang Merah Putih. Namun demikian karena sikap para pejabat masih ragu-ragu, maka di kantor-kantor bendera Sang Merah Putih itu dikibarkan berganti-ganti dengan bendera Jepang (*Hinomaru/kokki*), bahkan pernah pula dikibarkan secara berdampingan. Hal itu sangat mengecewakan para pemuda dan menggelisahkan rakyat.

Kegelisahan rakyat makin bertambah setelah datang berita *gunseikabu* pada tanggal 14 September 1945, yang isinya sangat bertentangan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dengan melalui pidato, berita *gunseikanbu* itu disebar luaskan oleh *Syuucokan* (RMTA. Suryo) ke tiga daerah kabupaten, yaitu di Lamongan (16 September). Bojonegoro (17 September) dan di Tuban (19 September). Akibat dari pidato itu banyak rakyat daerah yang tidak mengibarkan bendera Sang Merah Putih, bahkan mengibarkan lagi bendera Jepang (*Hinomaru/kokki*). Hal itu menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga Angkatan Muda segera mendesak Komite Nasional Indonesia Daerah agar mengambil tindakan yang tegas.

Atas desakan tersebut maka pada 22 September 1945 berkumpullah para anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro dan Komite Nasional Indonesia dari tiga daerah kabupaten tersebut untuk berunding. Hasil perundingan melahirkan adanya sebuah mosi yang berisi: "Mendesak *Syuucookan* supaya mencabut pidatonya di tiga daerah dan memproklamasikan Daerah Bojonegoro sebagai Daerah Karesidenan Negara Republik Indonesia." Mosi itu kemudian disampaikan kepada *Syuucookan* Bojonegoro (RMTA. Suryo) pada 23 September 1945. dan atas desakan Komite Nasional Daerah Bojonegoro akhirnya *Syuucookan* menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan mosi tersebut.

Keesokan harinya 24 September 1945 pukul 07.00 halaman rumah karesidenan sudah dibanjiri ratusan pemuda Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang sekali lagi mendesak RMTA. Suryo untuk menandatangani naskah Proklamasi Pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro. Setelah mengibarkan bendera Sang Merah Putih di halaman karesidenan, para pemuda menjemput Residen RMTA. Suryo untuk mengumumkan Proklamasi di depan rapat raksasa di *aloon-aloon*, yang berbunyi sebagai berikut. ⁶⁶

PROKLAMASI

Berdasarkan Proklamasi Indonesia Merdeka oleh PYM. Sukarno dan PYM Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama seluruh Rakyat Daerah Karesidenan Bojonegoro dari segala lapisan, pada hari ini ' Senen Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro, dan terus mengadakan tindakan-tindakan seperlunya.

Kepada seluruh rakyat kami serukan supaya tetap tinggal tenang dan tenteram melakukan kewajibannya masing-masing.

Bojonegoro, 24 September 1945

RMTA – Suryo.

Dengan adanya proklamasi tersebut secara resmi Pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro telah berdiri dengan RMTA Suryo sebagai residennya. Sesudah itu, kemudian disusul dengan tindakan peningkatan gerakan gerakan pengibaran bendera, perebutan senjata dan pemindahan kekuasaan dari Pemerintah Militer Jepang.

Demikianlah revolusi berjalan terus, peristiwa yang satu disusul dengan yang lain dengan cepatnya, hingga berita pengangkatan RMTA. Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur oleh Pemerintah Republik Indonesia Pusat, tersebar di daerah Bojonegoro. Pada waktu itu RMTA. Suryo menanggapi berita tersebut dengan sikap ragu-ragu, karena ia belum menerima instruksi ataupun surat pengangkatan (*besluit*) dari Pemerintah Republik Indonesia Pusat. Maka dari itu atas anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro RMTA. Suryo selaku Gubernur Jawa Timur mengadakan peninjauan ke Surabaya. Selanjutnya pada 11 Oktober 1945 di Bojonegoro berlangsung acara perpisahan dan perletakan jabatan residen oleh RMTA. Suryo yang akan memangku jabatan baru sebagai Gubernur Jawa Timur. Sesudah itu pada 12 Oktober 1945 RMTA. Suryo diantarkan oleh wakil-wakil Komite Nasional Daerah Karesidenan Bojonegoro sampai ke tapal batas Surabaya dan disini pengawasan diserahkan kepada Residen Surabaya.⁶⁷

Dengan kedatangan RMTA. Suryo di Surabaya berarti, roda Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur dapat berjalan semestinya karena telah dipimpin langsung oleh Gubernurnya. Berkat pengalaman di daerah Bojonegoro. RMTA. Suryo tanpa ragu-ragu menyetujui segala tindakan untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang telah dilakukan oleh rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya.

Dengan cepat ia kemudian menyusun staf gubernuran, yang antara lain terdiri dari: Cak Dul Arnomwo, Roeslan Abdulgani, Mr. Dwijosewoyo, Bambang Suparto, Subyantoro dan beberapa tokoh lainnya. Sedang R. Sudirman tetap sebagai wakil gubernur.⁶⁸

3.3 Pembentukan Organisasi Kemiliteran di Daerah

3.3.1 Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Daerah

Menurut penjelasan Residen Surabaya R. Sudirman, sejak terjadinya insiden bendera di Oranje Hotel, rakyat Surabaya bersikap tenang selama seminggu lamanya.⁶⁹ Namun dalam waktu seminggu itu banyak peristiwa dan berita yang dapat membakar semangat perjuangan rakyat.

Pada waktu pertahanan Jepang di Jawa Timur dibawah komando Jendral Iwabe (Iwabu), Panglima Divisi Jepang di Jawa Timur yang markas besarnya berada di Jalan Darmo dan Laksamana (*Vice Admiral*) Syibata *Yaichiro*, Panglima Angkatan Laut (*Kaigun Seiko Shikikan*) di Surabaya, yang bermarkas di Jalan Embong Wungu Surabaya.⁷⁰ Sementara itu pemuda-pemuda rukun kampung dan rukun tetangga telah siap menjaga kampung masing-masing dan saling membantu dalam setiap pertempuran. Pemuda-pemuda di tiap lingkungan itu antara lain di koordinasi oleh BKR dan PRI (Pemuda Republik Indonesia). Begitu juga para pemuda di bidang kelautan telah menyusun kekuatan dalam organisasi KNIPAL (Komite Nasional Indonesia Penataran Angkatan Laut) AMPAL (Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut), BKR-Laut dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia)⁷¹ Pada saat yang demikian itu pada 23 September 1945 datanglah Kapten PM. J.G. Hoyer dari Jakarta membawa tugas dari Laksamana Muda Patterson untuk mengadakan penyelidikan kepelabuhanan Tanjung Perak (Surabaya).⁷²

P.J.G. Hoyer adalah seorang Kapten Angkatan Laut Kerajaan Belanda, setelah tiba di Surabaya ia selalu berhubungan dengan Laksamana Muda Shibata (Panglima Angkatan Laut Jepang), sedangkan temannya berhubungan dengan pembesar-pembesar Jepang bagian sipil, terutama dengan *Hashiki*, kepala pemerintahan sipil bagian urusan peranakan.⁷³ Sebagian pembesar Jepang ternyata ada yang bersikap ramah secara berlebihan terhadap penduduk yang termasuk warganegara Sekutu, sebaliknya penyerahan kekuasaan kepada para pembesar atau pemuka

Republik Indonesia tidak pernah mereka laksanakan.⁷⁴ Situasi itu di satu pihak menimbulkan kebanggaan dan kecongkakan orang-orang Belanda dan Indo yang berada di Surabaya. Di lain pihak menimbulkan kecurigaan para pemuda Indonesia terhadap orang-orang Belanda dan Jepang yang berada di Surabaya pada khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.

Kecurigaan rakyat Surabaya makin meningkat setelah mereka mendengar berita yang tersebar luas di kalangan masyarakat, bahwa di Surabaya telah ada gerakan orang Belanda yang bernama "Anti Indonesia Merdeka" dengan semboyan "*Doed Alle Inlanders*" (Bunuhlah semua bangsa Indonesia). Gerakan tersebut kemudian dibantu oleh orang-orang Jepang anggota "Kipas Hitam" atau "*The Black Fan*"⁷⁵. Kecurigaan rakyat yang makin mendalam itu ternyata mengobarkan semangat juang rakyat Jawa Timur (Surabaya) untuk mengisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apabila emosi sudah tidak dapat dikendalikan maka meletus aksi-aksi yang penuh tekad dan keberanian.

Demikianlah semangat juang rakyat Surabaya (Jawa Timur) makin menggelegak ketika pada 27 September 1945 Balatentara Jepang di Surabaya mengeluarkan peraturan-peraturan yang antara lain berisi larangan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat mengganggu ketenteraman, dan penempelan plakat-plakat di tempat yang mudah dibaca rakyat. Rakyat dan para pemuda Surabaya tidak sabar lagi. Mulai saat itu mereka bergerak serentak melanda hampir seluruh Kota Surabaya. Mereka mengadakan aksi merobek-robek plakat Jepang dan menggantikannya dengan poster-poster serta coret-coret pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api, yang berisi semboyan-semboyan perjuangan untuk menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal yang demikian itu ditanggapi oleh Balatentara Jepang dengan mengadakan penjagaan yang ketat disepanjang jalan Kota Surabaya. Namun demikian rakyat dan para pemuda Surabaya tidak gentar menghadapi mereka. Bahkan dengan keberanian mereka mengadakan

perlucutan senjata terhadap tentara Jepang yang melakukan penjagaan, yang kemudian menyerahkannya kepada BKR (Badan Keamanan Rakyat).⁷⁶

Dengan adanya peristiwa tersebut di atas, rakyat makin sadar akan kemerdekaannya, mereka sukar untuk menerima adanya "kekuasaan bayangan" Jepang di samping Pemerintahan Republik Indonesia. Rakyat makin sadar, bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus diisi sendiri dan dipertahankan sendiri. Dalam hal ini mereka akan berhadapan dengan dua lawan, yaitu militer Jepang dan orang-orang bekas interniran Belanda, yang saling membantu. Pada waktu itu telah banyak senjata milik Jepang yang diserahkan kepada orang-orang Belanda. Satu-satunya kekuatan senjata Republik Indonesia di Surabaya yang masih terhimpun kokoh adalah Pasukan Polisi Istimewa (*tokubetsu Keisatsutai*) yang dipimpin oleh seorang pemuda Sulawesi, Muhammad Yasin.⁷⁷ Para pemuda dan rakyat Surabaya pun sadar, bahwa untuk dapat mempertahankan diri sebaik-baiknya, mereka harus memiliki senjata serta alat-alat perhubungan dan alat-alat untuk bergerak cepat.⁷⁸ Akibatnya terjadilah gerakan secara bergelombang, perebutan kekuasaan di kantor-kantor pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta (*Sakura*) yang kemudian meluas ke markas-markas kesatuan tentara Jepang.

Demikianlah misalnya, "Gerakan Pemuda Kantor Radio Surabaya" (*Surabaya Hosokyoku*) kemudian mengambil alih kekuasaan kantor Radio Surabaya dari penguasa Jepang, sehingga pada tanggal 27 September 1945 pukul 18.00 Radio Surabaya memperkenalkan dirinya sebagai "Radio Republik Indonesia Surabaya."⁷⁸ Pada 1 Oktober 1945 pemuda gerakan bawah tanah di Kantor Pembagian Minyak Daerah Jawa Timur Pemerintahan Militer Jepang (*Sekiyu Haikyū Jimusho Thobu Sisho*) di bawah pimpinan S. Kasman telah berhasil mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang (Kepalanya Bernama Kato), yang disaksikan oleh Residen Sudirman.⁷⁹

Sejalan dengan peristiwa tersebut di atas, di jalan-jalan mobil-mobil Jepang dirampas oleh para pemuda, senjata-senjata milik serdadu dan opsir-opsir Jepang mereka ambil gudang-gudang Jepang mereka serbu dan di mana-mana ditemplei slogan slogan seperti "Milik RI" "Hidup RI" "*Up Republic*" dan sebagainya.⁸⁰ Gerakan pengoperan kekuasaan makin meningkat setelah Pucuk Pemerintahan Karesidenan Daerah Surabaya (R. Sudirman), pada 1 Oktober 1945, menyampaikan pernyataan pengoperan kekuasaan kepada Syuucoogan Surabaya, yang isinya sebagai berikut:

1. Sekarang sudah tiba saatnya bagi kami untuk mengurus Pemerintahan sendiri dengan selengkap-lengkapny; maka karenanya, segala urusan Pemerintahan di dalam negeri ini akan kami urus dan selesaikan dengan tenaga sendiri dan mulai sekarang hanya menjalankan titah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Oleh karena itu, maka mulai sekarang juga segala urusan dengan wakil-wakil negeri-negeri Serikat yang mengenai soal-soal negara, penduduk, harta benda penduduk dan sebagainya, sudah seharusnya dirundingkan dan diselesaikan oleh dan dengan kami sendiri.⁸¹

Surat pernyataan tersebut segera diikuti dengan tindakan, sehingga pada 2 Oktober 1945 seluruh kantor *Syuucoogan* (gubernuran sekarang) di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Surabaya. Selain itu surat pernyataan tersebut juga merupakan komando bagi rakyat dan para pemuda Surabaya untuk mengadakan serangan umum terhadap penguasa-penguasa Jepang.⁸² Dengan menggunakan taktik penyerangan "gelombang manusia",⁸³ rakyat dan pemuda Surabaya di bawah pimpinan BKR, PRI, Polisi Istimewa dan lain-lainnya, dengan serentak mulai menyerang Gedung *Kempetai* pada 1 Oktober 1945. Markas Besar Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu, Markas Angkatan Darat Jepang di Darmo, Gunungsari, Sawahan (gudang senjata dan mesiu di Gedung DONBOSCO), Markas Angkatan Laut (*Kaigun*) Gubeng dan lain-lainnya.⁸⁴ Bahkan perebutan kekuasaan PAL (Pena-taran Angkatan Laut) di Ujung pada 2 Oktober 1945 dapat dilaksanakan dengan damai (tanpa dengan pertempuran).⁸⁵

Ketika sedang hangat-hangatnya pergolakan, fihak Jepang mengajak pemimpin-pemimpin Indonesia untuk berunding (kira-kira 2 Oktober 1945).⁸⁶ Maka Drg. Mustopo (Ketua BKR Jawa Timur) dan Ketua KNI Surabaya Dul Arnowo datang di markas tentara Jepang di gedung HVA (*Handels Vereeniging Amsterdam*); sekarang PNP XX-XXI-XXIV di Jalan Merak 1 Surabaya. *Syuucookan* sebagai juru bicara fihak Jepang, menuntut agar bangsa Indonesia segera menghentikan serbuan-serbuannya, kalau tidak dihentikan Surabaya akan di bom. Tuntutan itu ditolak oleh Ketua BKR Jawa Timur, dengan alasan bahwa fihak Jepang telah pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia tetapi sekarang justru membantu bangsa Barat untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia. Maka dari itu bangsa Indonesia akan membela kemerdekaannya. Jika terlepas tembakan dari pihak Jepang, maka aksi pemberontakan akan membakar seluruh Jawa Timur dan orang-orang Jepang tidak akan terjamin lagi keamanannya.

Setelah mendengar ultimatum tersebut, *Syuucookan* Surabaya memberi instruksi kepada semua koleganya di Jawa Timur untuk berunding dengan BKR guna mengatur ketertiban. Sedangkan Jendral Iwabe Shigewa, Panglima Divisi Jepang di Jawa Timur, memerintahkan tentara Jepang untuk menyerah kepada BKR dengan seluruh senjata dan gudang-gudangnya. Sebaliknya fihak Indonesia menyanggupi untuk menjaga keamanan Jepang.⁸⁷ Peristiwa penyerahan kekuasaan Jendral Iwabe itu kemudian diikuti dengan peristiwa penyerahan kekuasaan Laksamana *Shibata Yaichiro* kepada pemerintah Republik Indonesia. Demikianlah pada 7 Oktober 1945 di Kantor Gubernur Surabaya terjadi peristiwa penandatanganan naskah serah terima pengoperan kekuasaan, yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁸

..... SURAT PENYERAHAN/PENERIMAAN

Kami jang bertanda tangan di bawah ini:

1 MORI TAKSO, Rear Admiral soedah mendapat kekoeasaan dari SHIBATA YAICHIRO, Kaigoen Saikoo Sikikan oentoek menjerahkan kekoeasaan seluas-luasnya serta segala harta benda jang terhitoeang

didalamnja seloeroeh Oedjoeng dalam mana terhitoeang semoea Boetai jang termasuk didalamnja kepada:

Pemerintah Repoebliek Indonesia

dengan perantaraan Padoeka Toean wakil Goebernoer Djawa Timoer, merangkap pekerdjaan Residen Soerabaja, dengan pengharapan soepaja segala oeroesan dengan fihak Negara-negara Serikat dapat dibereskan dengan sebaik-baiknya.

Jang menerima,
Wakil Goebernoer Djawa Timoer
Residen Soerabaya

ttd. Soedirman

ttd. Mori

Saksi-saksi:

KOMITE NASIONAL INDONESIA

1. ttd. B. Soeparto
2. ttd. Moch. Affandi
3. ttd. Moenadji

Untuk toeroenan,
(tak terbatja)

Turunan dari turunan,

ttd.

Tuty Nawangsih.

Penyerahan Kompleks Ujung tersebut diawali serbuan serentak BKR Surabaya, PAL, BKR Laut, Kepolisian (P3) serta badan-badan perjuangan, yang kemudian diserahkan secara resmi oleh Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia. Suatu hal yang menarik perhatian ialah bahwa setiap kali berhasil melakukan pengoperan kekuasaan, selalu diikuti dengan penurunan bendera Jepang (*Hinomaru/kokki*) dan menggantikannya bendera Sang Merah Putih.

Dengan demikian pada 7 Oktober 1945 secara resmi kekuasaan sipil dan militer daerah Karesidenan Surabaya, bahkan se-

luruh Jawa Timur telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Kesemuanya itu berkat kesatu paduan antara rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Rupanya gerakan pengambil alihan kekuasaan itu meluas ke luar batas Karesidenan Surabaya hingga ke Karesidenan Besuki, Malang, Kediri dan Madura.

Di Karesidenan Besuki gerakan pengambil alihan kekuasaan dipimpin oleh Pasukan Polisi Istimewa. Dalam usaha untuk mengakhiri kekuasaan Jepang di Bondowoso (ibukota Karesidenan Besuki), tindakan pertama yang dilakukan oleh pasukan *Tokubetsu Keisatsu Tai* adalah sabotase terhadap kekuasaan Jepang yang pada umumnya ditujukan terhadap pengurusan persediaan makanan. Ketika terdengar berita bahwa Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Republik Indonesia, maka anggota-anggota kepolisian bersama-sama dengan barisan-barisan pemuda mengepung kantor *Syuucookan* (Kantor Karesidenan Jepang). Kemudian Mr. Suryadi (Ketua Pengadilan Bondowoso) dengan beberapa orang pemuda di antaranya Abdul Kahar, R. Sucipto Judodiharjo diutus menghadapi *Syuucookan* (Residen Jepang) dan menuntut agar kekuasaan di Besuki diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Residen Jepang dapat menyetujuinya, sehingga dengan demikian pengambil-alihan kekuasaan berlangsung dengan aman.⁸⁹ Peristiwa tersebut kemudian dilanjutkan dengan gerakan perlucutan senjata Jepang.

Pasukan Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Sucipto Judodiharjo dan dibantu oleh IP. II. Sukri bersama dengan barisan-barisan pemuda melakukan sabotase terhadap kekuasaan Jepang dalam segala lapangan. Berhubung dengan adanya tindakan itu, maka beberapa hari kemudian Jepang menyerahkan seluruh persenjataannya kepada pihak Indonesia dan diterima oleh Residen Besuki Mr. Suryadi, Kepala Polisi Karesidenan Besuki Jen. Mohammad Suryopranoto, Kepala Pasukan Polisi Istimewa Sucipto Yudodiharjo, bekas *Daidanco* Tahirudin dan Suwito. Pengamanan senjata-senjata dari orang-orang Jepang itu dipertanggungjawabkan kepada Kepala Polisi Karesidenan Besuki. Senjata

senjata itu kemudian dibagi-bagikan kepada para anggota kepolisian, pejabat pamongpraja, BKR dan pemuda-pemuda.⁹⁰

Di daerah Malang pada September 1945 telah terbentuk suatu pemerintahan sipil dengan BKR sebagai alat keamanannya. Residen Malang pada waktu itu ialah Mr. Singgih, sedangkan bupatinya ialah R.A.A. Sam. Pada 3 Oktober 1945 telah diadakan perundingan dengan *Syuucookan* Malang tentang penyerahan kekuasaan Pemerintahan Karesidenan Malang dan semuanya berjalan dengan lancar.⁹¹ Kemudian dilanjutkan dengan gerakan perlucutan senjata.

Pada 4 Oktober 1945 di bawah pimpinan perwira BKR dan polisi rakyat Kota Malang beraksi menuntut Jepang untuk menyerahkan gedung-gedung, seperti *Sositeit Concordia* dan gedung *Domei*. Di samping itu suatu delegasi yang terdiri dari Bambang Sumadi dan Kadarman, dikirim ke Surabaya untuk meminta kepada Jendral *Iwabe* agar ia mau membuat surat perintah menyerah, kepada *butaico* setempat (Malang — Besuki). Suasana menjadi panas pemimpin BKR Daerah Karesidenan Malang memberitahukan kepada semua cabangnya, untuk bertindak pada esok harinya, jika diplomasi tidak berhasil. Tanda ketong "tiga kali dengan goyang" adalah isyarat untuk bergerak. Ternyata delegasi yang dikirim ke Surabaya hari itu juga telah kembali dengan membawa surat penting dari Jendral untuk Kolonel Katagiri komandan Malang — Besuki. Pada pagi yang genting itu surat tersebut disampaikannya, yang akibatnya ia segera bersedia melaksanakan penyerahan kepada utusan-utusan Karesidenan Malang, KNI Daerah Malang dan BKR Daerah Malang.⁹²

Dari data tersebut di atas dapat diketahui, bahwa gerakan pengoperan kekuasaan di Daerah Karesidenan Besuki dan Malang dapat berjalan dengan lancar. Lain halnya dengan gerakan perebutan kekuasaan di Karesidenan Kediri. Pihak Jepang di Karesidenan Kediri selalu mengulur waktu untuk menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Republik Indonesia. Namun berkat bantuan pihak polisi yang mengawal aksi massa rakyat

maka tuntutan pihak Indonesia dapat dipenuhi. Jepang kemudian bersedia menyerahkan kekuasaan secara damai kepada pihak Indonesia yang diwakili Residen Republik Indonesia Daerah Kediri, Pratalikrama.⁹³

Hal yang sama terjadi juga di Karesidenan Madura. Setelah berita Proklamasi tersebar luas di Madura, ada keinginan dari rakyat untuk membalas dendam terhadap kekejaman yang pernah dilakukan oleh pihak militer dan pejabat sipil Jepang. Untuk itu Pemerintah Karesidenan Madura mengambil suatu sikap yang tegas, ialah soal keamanan menjadi tanggung jawab BKR, kepolisian dan Badan Perjuangan Rakyat lainnya sedang tentara Jepang diminta untuk tidak ikut campur. Namun dalam pelaksanaannya terjadi insiden-insiden kecil karena tentara Jepang tidak mau memahaminya. Amarah rakyat makin memuncak, sehingga pemerintah perlu "mengamankan" tentara Jepang di penjara agar tidak diserbu rakyat.

Pertahanan Jepang di Madura yang paling kuat ialah di Batuporron, Kecamatan Kamal, yang juga merupakan pusat penyimpanan persenjataan dipimpin oleh seorang kolonel angkatan laut Jepang. Pemerintah Republik Indonesia di Madura kemudian mengirimkan utusan untuk berunding dengan kolonel tersebut, agar ia mau menyerahkan senjata kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Perundingan ternyata mengalami jalan buntu, sehingga utusan kembali ke Pamekasan dengan tangan hampa. Tetapi tidak berapa lama di Batuporron terdengar letusan-letusan selama kurang lebih 30 menit, kemudian diperoleh keterangan bahwa sebagian besar senjata Jepang dibakar habis (dibumi hanguskan) dan komandannya sendiri bunuh diri (*hara kiri*). Sebagian Jepang yang masih hidup dikumpulkan di Kamal dan terus dititipkan di rumah penjara Bangkalan.⁹⁴

Dari uraian tersebut nampak dengan jelas, bahwa di Jawa Timur pada bulan September dan Oktober 1945 sedang berlangsung aksi-aksi pengibaran bendera dan perebutan kekuasaan. Aksi-aksi tersebut pada umumnya dilaksanakan oleh rakyat dan

pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemiliteran dan organisasi perjuangan. Tentang bagaimana pembentukan organisasi-organisasi tersebut, baiklah kita bicarakan.

3.3.2 *Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan*

Pada 19 Agustus 1945 di Jakarta telah berlangsung sidang Badan Pembantu Prajurit (BPP). Badan ini pada masa pendudukan Jepang bertugas memelihara PETA dan HEIHO, kemudian badan ini menjadi Badan Penolong Prajurit (BPP). Sidang tersebut membicarakan masalah-masalah penampungan PETA dan Heiho serta perubahan nama badan tersebut menjadi Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Sidang memutuskan: Untuk menampung PETA dan Heiho serta lain-lainnya akan didirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR)⁹⁵ Tetapi ternyata rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena Jepang telah lebih dahulu mengetahuinya. Akibatnya pada 19 Agustus 1945 itu juga Letnan Jendral Nagano *Yuuichiroo*, Panglima terakhir Tentara Keenam belas di Jawa, telah mengucapkan pidato perpisahan kepada para anggota PETA yang dibubarkan. Tanpa kecuali semua *daidan* terkena pendudukan dan telah dilucuti tanpa mereka ketahui sebelum terlambat.⁹⁴ Begitu pula Heiho mengalami nasib yang sama. Mereka pulang ke daerah asalnya masing-masing tanpa senjata.

Meskipun demikian, dalam sidangnya pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan /Koordinattor memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sidang itu antara lain menetapkan pula, bahwa badan itu adalah satu badan dari "Badan Penolong Keluarga Korban Perang", sebagai induk organisasi yang harus mengerjakan dan memelihara keselamatan masyarakat. Pimpinan Badan Keamanan Rakyat baik pusat maupun di daerah menjadi anggota pengurus harian Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Selanjutnya ditetapkan juga bahwa pimpinan Badan Keamanan Rakyat harus menjalankan pekerjaan dengan suka rela. Putusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan itu kemudian disusul dengan pidato Presiden

Sukarno, 23 Agustus 1945, yang antara lain menegaskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini akan berfungsi sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah; pimpinan pusat BKR tidak diadakan.⁹⁶

Pengumuman tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat tersebut ternyata mendapat dua macam tanggapan di kalangan pemuda Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sebagian di antara pemuda, terutama mereka yang pernah menjadi anggota PETA, Heiho dan KNIL (*Koninklijk Nederlands Indisch Leger*) memutuskan untuk memasuki BKR dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sebagai wahana perjuangan. Sebagian lagi, yang pada zaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik, merasa tidak puas dengan BKR itu. Mereka kecewa karena beranggapan bahwa suatu *tentara nasional* merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara merdeka dan bahwa suatu angkatan perang sangat diperlukan untuk menggetarkan kekuatan-kekuatan asing manapun yang hendak menyerang Republik. Padahal yang akan dibentuk pemerintah RI hanyalah Badan Keselamatan Rakyat, yang merupakan semacam hansip. Para pemuda ini kemudian membentuk apa yang kemudian dikenal secara umum sebagai "badan-badan perjuangan".⁹⁷ Demikian pada masa permulaan perjuangan untuk mengisi Kemerdekaan Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, muncul organisasi BKR dan badan-badan dan perjuangan. Hal yang demikian itu berlaku pula di Jawa Timur.

Demikianlah pada zaman pendudukan Jepang di daerah Ujung Surabaya terdapat suatu kesatuan S.E. 21/24 Butai, yang didalamnya terdapat *Hokodan* (Badan Kebaktian) dan Barisan Sukarela. Pada 22 Agustus 1945 Badan Kebaktian dan Barisan Sukarela S.E. 21/24 Butai telah mengadakan rapat pleno dengan keputusan:

- 1) Nama S.E.21/24 Butai diganti dengan nama Penataran Angkatan Laut (PAL).
- 2) Badan Kebaktian S.E. 21/24 Butai diganti dengan Komite Nasional Indonesia Penataran Angkatan Laut (KNI-PAL).

- 3) Barisan Sukarela S.E. 21/24 Butai diganti dengan Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut (AMPAL).
- 4) Menetapkan wakil ketua Badan Kebaktian S.E. 21/24 Butai sebagai pemimpin umum KNI-PAL dan AMPAL.
- 5) Membulatkan tekad untuk mempertahankan PAL sebagai milik Republik Indonesia.⁹⁸

Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pada 4-10-1945 dibentuk Staf Pimpinan PAL yang dipimpin oleh Moch. Affandi sebagai pemimpin umumnya dan Munaji sebagai wakilnya. Dalam perkembangan selanjutnya PAL akan merupakan suatu organisasi kelautan yang penting karena memiliki perlengkapan serta personalia yang paling banyak.

Di samping PAL pada bulan September 1945 muncul pula Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR-Laut) yang dibentuk oleh para pemuda pelaut dari bekas *Kaigun, Jawa Unko Kaisya dan Akatsuki Butai*. A.R. Aris ditunjuk sebagai pemimpinnya dibantu oleh Sutrisno, Umar Said, Y. Sulamet dan lain-lain. Markas BKR-Laut ini berada di Hotel Ngemplak dan *Moderlust Ujung*. BKR-Laut Surabaya ini mempunyai beberapa pasukan antara lain Pasukan L, Pasukan S, Pasukan Dullah, Pasukan Bibit Ismono dan lain-lainnya.⁹⁹

Selanjutnya di bidang kelautan Surabaya muncul pula organisasi Pemuda Penerbangan Angkatan Laut (PPAL), PPAL ini dibentuk oleh pemuda-pemuda pelajar calon Penerbangan Jepang (*Kaigun Kokusyo*) di bawah pimpinan Suharto. Jumlah pasukan lebih kurang 60 orang yang berasal dari bekas pemuda pelajar *Kaigun Kokusyo*. Dalam perkembangan selanjutnya PPAL menjadi pasukan Polisi Tentara Laut dan lebih dikenal dengan nama Pasukan 0032.

Kegiatan organisasi-organisasi yang beraspek kelautan tersebut mula pertama ditujukan ke arah perebutan kekuasaan di pelabuhan Ujung (Surabaya). Puncak perebutan kekuasaan dan perlucutan senjata dari tangan Jepang terjadi pada 7 Oktober

1945 yaitu timbang terima pangkalan perang Ujung Surabaya dari Laksamana *Syibata* kepada Pemerintah RI. Selanjutnya untuk mengakhiri kekuasaan Jepang yang masih berada di Pulau Nyamukan, maka pada 22 Oktober 1945 dilancarkan operasi laut yang berhasil menawan 419 orang dari Pasukan *Marinier (KKO) Kaigun* Jepang beserta perlengkapannya.¹⁰⁰

Ketika organisasi-organisasi yang beraspek kelautan di Ujung sedang giat melakukan pengambil alihan kekuasaan dan perlucutan senjata Jepang, muncullah organisasi di bidang kelautan yang bernama Marine Keamanan Rakyat (MKR). Inti pasukan MKR ini terdiri dari pemuda-pemuda bekas pelaut zaman Belanda dan Jepang serta pemuda Indonesia lainnya yang cinta laut dan yang memenuhi panggilan lewat radio. MKR Surabaya ini berdiri pada 17 Oktober 1945 dengan Atmaji sebagai pemimpin umumnya dan Gunadi sebagai kepala stafnya. Dalam perkembangan selanjutnya, MKR Surabaya banyak bekerjasama dengan PAL, sehingga posisi Atmadji sebagai pemimpin umum makin kuat. Dalam situasi serba kacau terutama setelah meletus pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, maka perlu adanya tindakan-tindakan cepat. Atmaji dengan staf MKR-nya berhasil mengkoordinasikan semua organisasi yang beraspek kelautan dan membentuk Markas Tertinggi yang secara berturut-turut berkedudukan di Surabaya, Wonocolo dan terakhir di Lawang. Pasukan BKR Laut dan pasukan lainnya kemudian dikoordinasikan dalam Divisi TKR – Laut di bawah pimpinan Kolonel Sutrisno yang sebelumnya memegang wakil pimpinan BKR Laut Surabaya. Sedang A.R. Aris yang sebelumnya memegang pimpinan BKR Laut Surabaya selanjutnya memusatkan kegiatannya di bidang ekspedisi-ekspedisi ALRI ke Sulawesi.¹⁰¹

Pembentukan BKR laut di Surabaya diikuti pula oleh kota-kota pelabuhan di Jawa Timur lainnya seperti di Pasuruan, Probolinggo dan Banyuwangi. Di Pasuruan pembentukan BKR–Laut dipelopori oleh pemuda-pemuda bekas guru dan pelajar Sekolah Pelayaran Rendah Pasuruan dan beberapa tokoh dari kalangan maritim. Pada bulan September 1945 telah terbentuk

BKR-Laut di bawah pimpinan Moh. Ishak, yang dibantu oleh Jaelani, B. Suwandi, Darmaji, Susilo, Mulyono Silam, Sudomo, Subarkah, R. Sumongkar dan lain-lainnya. Tugas pertama yang dilakukan BKR-Laut Pasuruan ialah patroli pantai dengan menggunakan kapal peninggalan Sekolah Pelayaran Rendah.

Pada bulan September 1945 di Probolinggo juga telah dibentuk BKR-Laut atas inisiatif para bekas guru dan pelajar Sekolah Pelayaran Rendah di Probolinggo serta pemuda-pemuda lain yang berjiwa bahari. Sebagai staf pimpinan BKR-Laut Probolinggo ini antara lain ialah Runturambi, Frits Suak, dan Sumantri. Setelah terbentuk maka BKR-Laut Probolinggo segera aktif di laut, dengan menggunakan tiga kapal kayu yang berhasil dikuasai di pelabuhan Probolinggo.

Dalam bulan September 1945 pula di Banyuwangi telah terbentuk BKR-Laut, Pendiri BKR-Laut Banyuwangi adalah para bekas anggota Pasukan Pengawal Pantai dan anak buah kapal Jawatan Pelabuhan. Sebagai ketua BKR-Laut ditetapkan Sriaman dan wakilnya Waroka serta dibantu oleh R. Sunardi. Dengan menggunakan kapal, Jawatan Pelabuhan dan bekas kapal-kapal Pasukan Pengawal Pantai, BKR-Laut Banyuwangi dengan cepat mulai mengadakan latihan-latihan berlayar dan patroli pantai.¹⁰²

Selain BKR-Laut, di Kota Surabaya ternyata muncul pula BKR-Darat. Pada 9 September 1945 para bekas *daidanco*, *chudanco* dan *shudanco* dari seluruh bekas daidan Surabaya dan sekitarnya mengadakan rapat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Rapat itu kemudian mengambil keputusan-keputusan:

- 1) Rapat membentuk BKR Jawa Timur dengan menunjuk dan mengangkat dr. Mustopo, Katamhadi, Mohammad dan Sutopo, masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, bendahara dan penulis. BKR Jawa Timur bermarkas di gedung HVA (*Handels Vereeniging Amsterdam* sekarang PNP XX-XXI-XXIV Jalan Merak No. 1).

- 2) Untuk BKR Karesidenan Surabaya ditetapkan Abdulwahab, RM. Yonosewoyo dan Susilo, masing-masing sebagai ketua, wakil ketua dan penulis BKR Karesidenan Surabaya. Markasnya di Gedung Nasional Indonesia (pavilyunnya), Jalan Bubutan.
- 3) Untuk BKR Kota Surabaya ditunjuk Sungkono, Surachman dan Dawud, masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, dan penulis. Mula-mula BKR Kota Surabaya ini bermarkas di Jalan Jimerto, kemudian pindah ke Jalan Kaliasin No. 123, lalu pindah ke rumah No. 80 (sekarang "DAMRI"), kemudian menempati rumah di Jalan Pregolan No. 4-2.¹⁰³

Dalam rangka gerakan perebutan kekuasaan dan perlucutan senjata Jepang, BKR Jawa Timur mempunyai peranan yang sangat penting. Banyak perlucutan senjata yang berhasil diselesaikan dengan damai. Bahkan pada 16 Oktober 1945 Dr. Mustopo bertindak sebagai menteri pertahanan. Jaksa Agung RI memberikan kuasa kepada Dr. Mustopo untuk menyelenggarakan usaha pertahanan negara.¹⁰⁴ Selanjutnya pimpinan BKR Karesidenan Surabaya 6 Oktober 1945 menghimpun pemuda-pemuda bekas PETA, *Haiho*, *Seinendan* dan pemuda-pemuda Surabaya lainnya untuk menyusun BKR sebagai persiapan menghadapi Tentara Sekutu yang akan datang pada bulan Oktober 1945.¹⁰⁵

Sejak 15 Oktober 1945 markas BKR Kota Surabaya JALAN Pregolan 2 & 4 menjadi markas Kesatuan Komando Pejuang-Pejuang Rakyat dan Pemuda-Pemuda Surabaya dan Jawa Timur.¹⁰⁶

Sementara itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 2-X tentang Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.¹⁰⁷ Untuk melaksanakan perubahan BKR menjadi TKR ini pada 22 Oktober 1945 di Jawa Timur terbentuk 3 (tiga) Devisi TKR. Yaitu Devisi VI, VII dan VIII. Devisi VI meliputi daerah-daerah Karesidenan Madiun dan Kediri, Devisi VII berwilayah Karesidenan Surabaya, Bojonegoro dan Madura, sedangkan Devisi VIII meliputi daerah-daerah Karesidenan Malang.¹⁰⁸

Pembentukan BKR (Darat) di Surabaya rupanya diikuti dengan Pembentukan BKR—BKR di Karesidenan Jawa Timur lainnya, seperti di Kediri, Bojonegoro, Madiun, Malang dan Besuki. Di Kediri pembentukan BKR dipelopori Oleh bekas tentara PETA yang telah dilucuti senjatanya. Adapun susunannya keanggotaannya: R. Surakhmad sebagai ketua, dr. Jokosalamun sebagai kepala stafnya dan anggotanya terdiri dari 600 orang. Dalam menjalankan tugas BKR Karesidenan Kediri bahkan pernah dikirim ke Garut. Tetapi setelah di Surabaya pecah perang 10 Nopember 1945 mereka ditarik kembali ke Surabaya.¹⁰⁹

Begitu pula BKR Karesidenan Bojonegoro tidak mau ketinggalan, aktif membantu perjuangan kawan-kawannya di Surabaya.

Adapun BKR Karesidenan Bojonegoro itu pembentukannya dilaksanakan oleh para pemuda bekas PETA dan Heiho serta pemuda lainnya yang sudah tergabung dalam kelaskaran. BKR Karesidenan Bojonegoro dipimpin oleh Sudirman. Sedangkan BKR Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh Dibyosubroto. BKR Kabupaten Lamongan dipimpin oleh Sukarno dan BKR Kabupaten Tuban dipimpin oleh Suharto. Dari daerah Lamongan dan Tuban ini, BKR-BKR muncul silih berganti dimedan pertempuran Surabaya. Hal yang demikian itu dialami juga oleh BKR Madiun.

Di daerah Madiun gerakan pemuda mendahului pembentukan BKR. Beberapa pemuda bukan PETA kemudian berhasil mengkoordinasinya sehingga terbentuklah BKR Karesidenan Madiun, yang dipimpin oleh Sumantri. Sedangkan BKR Kabupaten Madiun dipimpin oleh Murman Slamet¹¹⁰

Di Malang para pemuda juga berhasil memperoleh senjata dari tangan Jepang. Selanjutnya 27 Agustus 1945 dibentuklah BKR Karesidenan Malang dipimpin Arsid Kromodiharjo, sedangkan BKR Kabupaten Malang dipimpin oleh Hamid Rusdi. Kegiatan BKR Malang ini mula-mula ditujukan ke arah perlucutan senjata Jepang, kemudian meningkat ke arah perebutan kekuasaan terhadap perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik di Kabupaten Malang. Tujuan terakhir dari gerakan BKR Malang

ialah persiapan pertahanan kota dan daerah sekitarnya, sebagai persiapan apabila peristiwa pertempuran Surabaya menjalar ke Malang.¹¹¹

Kalau pembentukan BKR Malang didahului dengan gerakan pemuda, maka pembentukan BKR di Besuki didahului dengan munculnya Barisan Angkatan Muda yang disingkat AM Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena berita tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat sangat lambat dan baru didengar dari para pejuang yang datang dari kota lain. Setelah itu barulah dibentuk BKR Karesidenan Besuki dengan Abdul Kahar sebagai pemimpinnya. Selain itu terbentuk pula BKR Resimen I berada di Bondowoso yang dipimpin oleh Tohirudin Cokroatmojo dan BKR Resimen II di Jember yang dipimpin oleh Suwito. Semua BKR ini dengan giat bergerak serentak untuk tujuan yang sama mempertahankan Negara Proklamasi Kemerdekaan 1945 dengan semboyan "Lebih baik berkarang tanah dari pada dijajah"¹¹²

Demikianlah pada permulaan Revolusi Indonesia di Jawa Timur telah muncul BKR—BKR Laut ataupun Darat. Selain itu muncul pula BKR — Kepolisian yang tidak sedikit sumbangannya terhadap gerakan pengoperan kekuasaan dan perlucutan senjata Jepang, di Jawa Timur. Perlucutan senjata Jepang di Jawa Timur pada umumnya, terutama di Surabaya, dipelopori oleh kesatuan-kesatuan *Tokubetsu Syum Keisatsu Tai* (Pasukan Polisi Perjuangan) di bawah pimpinan Inspektur Polisi Moh. Yasin dan *Tokubetsu Shi Keisatsu Tai* (Polisi Istimewa) dipimpin Sucipto Danukusumo. Kepolisian dengan Badan Polisi Istimewanya (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) merupakan satu-satunya instansi yang masih diijinkan memegang senjata api oleh pemerintah militer Jepang. Maka tidaklah mengherankan apabila rakyat menginginkan perlindungan dari polisi¹¹³

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pelajar sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas di Surabaya masuk sekolah sebagai bangsa yang merdeka. Dengan adanya

desas-desus bahwa orang-orang Belanda bekas tawanan telah bersenjata dan kembali berkuasa, maka para pelajar sekolah lanjutan membentuk Barisan Penjagaan Sekolah, yang bertugas menjaga gedung sekolah agar tidak direbut Belanda. Demikianlah sikap dalam dengan bersenjatakan *mokuyu* (tiruan bedil dari kayu), *slaghout baseball* (*lembing*) *takeyari* (bambu runcing) dan sebagainya para pelajar menjaga sekolah masing-masing dan pada siang harinya bersekolah seperti biasa. Saat itu sering disebut zaman "siap-siapan", karena walaupun para pelajar masuk sekolah biasa namun apabila mereka mendengar ada perlucutan senjata mereka kemudian meninggalkan sekolah dan ikut bergabung dengan massa untuk merebut senjata dari Jepang. Akhirnya sekolah-sekolah menengah di Surabaya berubah menjadi asrama-asrama sebagai tempat berkumpulnya organisasi-organisasi pelajar pejuang.¹¹⁴ Untuk memudahkan komunikasi seluruh organisasi pelajar Surabaya dibagi menjadi empat staf:

- 1) Staf I : terdiri dari pelajar Sekolah Menengah Tinggi (SMT) dan SMP. II, berpusat di Gedung Sus-teran (sekarang Santa Maria) Jalan Darmo No. 49;
- 2) Staf II : terdiri dari para pelajar SMP I Praban dan para pelajar sekitarnya, berpusat di gedung SMP I Praban;
- 3) Staf III : terdiri dari pelajar Sekolah Menengah Teknik Tinggi (SMTT) dan Sekolah Teknik Menengah (STM), berpusat di Gedung Sekolah Teknik Pertama Sawahan.
- 4) Staf IV : bertempat di *Heerenstraat*.

Staf I dipimpin oleh Isman, Staf II dipimpin oleh Anirun, staf III oleh Abdul Sukur dan Sunarto dan staf IV oleh Sutoyo Ismail. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa setiapak demi setiapak terbentuklah kesatuan ketenteraan yang terdiri dari para pelajar, sehingga muncullah BKR Pelajar¹¹⁵ Demikianlah pada 19 Oktober 1945 (sumber lain 29 - 9 - 1945)

(SKN VII), Persatuan Pelajar Pejuang Darmo 49 (Staf I) diresmikan oleh pimpinan BKR Kota Surabaya (Sungkono) sebagai Barisan BKR Pelajar Darmo 49, dengan susunan pengurusnya sebagai berikut:

PIMPINAN UMUM:

Pemimpin : Isman
Wakil I : Mulyosuyono.
Wakil II : Akhmad Wardoyo.

PIMPINAN BARISAN:

Kepala : Pratomo.
Wakil I : Subiyantoro, merangkap pimpinan harian
XIII (sumber lain Barisan XI)¹¹⁶
Wakil II : Sutopo.¹¹⁷

Demikianlah gambaran sepintas tentang munculnya organisasi kemiliteran Badan Keamanan Rakyat di Jawa Timur. BKR ini timbul sebagai kristalisasi dari pemuda-pemuda pejuang yang merasa dirinya mempunyai kewajiban untuk membela tanah air dan bangsanya. Namun demikian BKR bukanlah satu-satunya organisasi tempat penampungan tenaga pejuang yang sadar akan kewajibannya, karena di Jawa Timur masih ada badan-badan kelasykaran bersenjata yang menjadi wahana perjuangan pemuda. Adapun badan-badan kelasykaran bersenjata yang ada di Jawa Timur antara lain: BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia), PRI (Pemuda Republik Indonesia), Hisbullah, Sabilillah, Lasykar Rakyat, Barisan Banteng, API (Angkatan Pemuda Indonesia), LBI (Lasykar Buruh Indonesia) Lasykar Minyak, Lasykar Kereta Api, BRI (Buruh Republik Indonesia), Pemuda Rakyat¹¹⁸

Dalam bulan September 1945 di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan Surabaya, diadakan pertemuan para pemuda yang kemudian menghasilkan suatu keputusan tentang pembentukan organisasi pemuda dengan nama PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Pimpinan PRI pada waktu itu antarlain

Ruslan, Sumarsono, Bambang Kaslan, Krissubanu dan Susilo. PRI semula bermarkas di Jalan *Princesselaari* (sekarang Jalan Widodaren No. 1) kemudian pindah di Gedung *Simpang Club* Sositeit di Jalan Simpang (sekarang Gedung Pemuda di Jalan Pemuda No. 15).¹¹⁸ PRI ini sebenarnya merupakan gabungan dari Angkatan Muda Buruh Minyak, pemuda-pemuda kantor dan pemuda-pemuda kampung-kampung. Dalam perkembangan selanjutnya pertahanan PRI Surabaya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pertahanan PRI Surabaya Utara dipimpin oleh Sidik Arslan, PRI Surabaya Tengah dipimpin oleh Slamet Utomo dan PRI Surabaya Selatan dipimpin oleh Lukito.¹¹⁹ Kemudian pada 12 Oktober 1945 Kota Surabaya diperkaya dengan berdirinya Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI.

Demikianlah pada malam hari 12 Oktober 1945 atas undangan Sutomo (Bung Tomo) datanglah Abdullah, Sumarno, Asmanu dan Amiaji di rumah Jalan Biliton No. 7 (sekarang dipakai Asrama Mahasiswa) untuk menghadiri rapat penyusunan Pucuk Pimpinan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Keesokan harinya tersiarlah pengumuman tentang terbentuknya Pucuk Pimpinan Pemberontakan tersebut, yang antara lain dimuat dalam surat kabar *Suara Rakyat* (*Soeara Rakyat*) Surabaya sebagai berikut:

PIMPINAN PEMBERONTAKAN RAKYAT INDONESIA

Perjuangan diplomasi Pemerintah Republik Indonesia, para pemimpin dan badan resmi menghadapi Serikat, wajib disokong oleh rakyat.

Sampai saat ini, rakyat telah menunjukkan semangat perjuangannya melaksanakan kedaulatan Republik Indonesia.

Nica dan siapapun juga, yang hendak menyinggung kedaulatan Republik Indonesia — pada waktu perjuangan diplomasi sedang dilakukan — akan dihajar oleh rakyat jelata Indonesia.

Untuk memperkokoh semangat rakyat yang kini bersifat ekstrimis itu, pada tanggal 12 Oktober jbl. atas persetujuan pemimpin-pemimpin rakyat jelata (Supir becak, kusir, penjual-

penjual makanan, pemuda-pemuda kampung yang berani mati dll) telah terbentuk Pimpinan Pemberontak Rakyat Indonesia:

Anggauta-anggautanya:

1. Sutomo (sekarang tidak bekerja pada "Antara" dan bukan anggota badan-badan yang resmi).
2. Sumarno (yang telah melawan terang-terangan imperialis Jepang dalam tindakannya yang sewenang-wenang terhadap pegawai onderneming).
3. Asmanu (bekas anggauta pengurus Gerindo dan yang telah memberi komando penyerbuan kepada rakyat untuk merobek-robek bendera imperialis Belanda di Hotel Yamato j.b.l.).
4. Abdullah (Pemberontak pada kapal "Zeven Provincien"
5. Amiadji (tiap-tiap arek bingkil Surabaya tentu mengenalnya).
6. Sudjarwo (bekas anggauta Gerindo, yang telah bertempur dan menandatangani penyerahan Jepang yang hendak menagcaukan keamanan di Pandaan).
7. Suluh Hangsono (pelaajar Sekolah Dokter Tinggi bag. Gigi).

Dibantu oleh pemimpin-pemimpin Sopir Beca, Orang-orang Tua yang berilmu gaib d.l.l.

Badan ini merupakan badan extreem, yang bersama-sama rakyat jelata akan menimbulkan pemberotakan, akan mengalirkan darah, bila kedaulatan Republik tersinggung atau bila kehormatan para pemimpin yang sedang menjalankan diplomasi terancam.

Pasukan penggempur extreem ini tidak sudi berunding dengan siapapun juga kalau mereka sedang berontak, selain dengan pemimpin-pemimpin Pemerintah Republik Indonesia atau badan-badan kebangsaan yang ditunjuk olehnya.

Merekapun mempunyai revolutive-zender, Radio Pemberon-

takan, yang mulai melayang diudara malam nanti jam 7.30 Gelombangnya tidak dapat ditentukan.¹²⁰

Dengan demikian berdirilah sebuah badan kelasykaran. Para pemimpin BPRI kemudian berusaha untuk membentuk cabang-cabang BPRI di seluruh pelosok Kota Surabaya bahkan juga di seluruh Jawa Timur. Sedangkan Bung Tomo pada pukul 19.30, 13 Oktober 1945 itu atas nama Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia telah berpidato untuk pertama kalinya di depan corong Radio Republik Indonesia Surabaya. Setelah itu pucuk Pimpinan Pemberontakan Rakyat mendirikan pemancar Radio Pemberontakan sendiri di Jalan Mawar No. 2. Dari situ semangat rakyat Surabaya, Rakyat Jawa Timur bahkan rakyat seluruh Indonesia dikobarkan untuk membela nusa dan bangsanya.¹²¹

Selain PRI dan BPRI di Surabaya waktu itu telah terbentuk berbagai kesatuan angkatan muda, dengan cabang-cabangnya di tiap-tiap jawatan, seperti kereta api, listrik, radio, perguruan dan sebagainya. Disamping itu juga terbentuk barisan-barisan buruh dengan laskar-laskarnya, barisan ulama Surabaya dengan pemuda-pemudanya. Dengan didampingi kaum ibu dan remaja putri yang menyelenggarakan dapur umum serta pos-pos kesehatan. Saat itu Kota Surabaya benar-benar merupakan suatu kesatuan benteng yang telah siap menghadapi pendaratan Tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA.¹²²

3.4 Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara NICA

3.4.1 Pendaratan Tentara Sekutu dan Nica di Surabaya

Ketika Perang Pasific masih berkecamuk, ada seorang pegawai Pemerintah Militer Inggris, F.S.V. Donnison namanya, yang pernah mengungkapkan suatu pernyataan bahwa menurut rencana Surabaya adalah kunci kedua yang harus diduduki sesudah Singapura. *"Surabaya, Which under the original plan was to have been the second of two key areas to be accupied. . . . as Sourabaya had been the largest Japanese naval base after Singapore."* Apa sebab kota Surabaya harus diduduki? Jawaban-

nya dapat dikaitkan dengan pernyataan Prof. Russel H. Fifield, seorang ahli ilmu politik dan sejarah dari Michigan University Amerika, bahwa letak Kota Surabaya vital sekali dari sudut kepentingan semua kekuatan yang hendak menguasai daerah daerah maritim yang berlingkaran dua, yaitu lingkaran Asia Tenggara dan Barat Daya Pasifik. ". . . in more specific terms the strategic naval base of Sourabaya was of interest to all concerned with the problems of sea power in South East Asia and the South West Pacific"¹²³

Dengan demikian jelaskan bahwa di pandang dari segi strategi militer, dalam Perang Dunia II, posisi geografis Kota Surabaya mempunyai peranan yang sangat penting. Sudah semestinya setelah Jepang bertekuk lutut, pihak Sekutu akan merealisasikan rencana tersebut dengan menduduki Kota Surabaya.

Pada 16 September 1945 Rear Admiral WR. Patterson, wakil Panglima SEAC (*South East Asia Command*) Lord Louis Mounbatten, mendarat di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengaan kapal *Cumberland*. Dalam rombongan itu ikut pula CH. O. van der Plas, Wakil Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. HJ. van Mook.¹²⁵ Laksamana Muda (*Rear Admiral*) WR. Patterson, komandan AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) segera mengirim Kapten Angkatan Laut Belanda PJG. Honyer ke Surabaya. Mula-mula ia diberi tugas untuk mengadakan pemeriksaan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (23 September 1945), kemudian dikirim kembali bersama-sama dengan stafnya (29 September 1945) untuk mempersiapkan pendudukan kembali Kota Surabaya.¹²⁴ Setelah mengetahui tingkah laku PJG. Hoiyer cs. Pemerintah Daerah Surabaya berkesimpulan bahwa sebenarnya mereka bukanlah "Urusan Sekutu", melainkan pelopor dari NICA. Karena itu sejak 6 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia Daerah Surabaya menghentikan segala bantuan dan hubungan dengan mereka. Bahkan pada hari itu juga mereka dikembalikan ke Jakarta dengan kereta api. Akan tetapi malang nasibnya, di tengah jalan antara Jombang – Kertosono

PJG. Huiyer cs. ditangkap oleh rakyat dan dikirim kembali ke Surabaya. Rombongan tersebut semula kemudian ditempatkan di gedung bekas Konsulat Inggris di Jalan Kayoon No. 72 (sekarang Kantor Pusat IKIP Negeri Surabaya) dan kemudian dipindahkan ke penjara Kalisosok.¹²⁵

Tiga belas hari kemudian setelah kedatangan pasukan WR. Patterson, datang pula pasukan Sekutu (Inggris), yang termasuk bagian AFNEI, di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison. Pasukan ini tiba di pelabuhan Tanung Priuk pada 29 September 1945 dan terdiri atas tiga divisi, yaitu:

- 1) Divisi India ke 23 (*23 rd India Division*), di bawah pimpinan Jenderal Mayor DC. Hawthorn, yang ditugaskan untuk daerah Jakarta atau Jawa Barat.
- 2) Divisi India ke 5 (*5 th. India Division*), di bawah pimpinan Jenderal Mayor EC. Mansergh, yang ditugaskan untuk daerah Surabaya atau Jawa Timur.
- 3) Divisi India ke 26 (*26 th India Division*), yang ditugaskan untuk daerah Sumatera (di Padang dan di Medan).

Dalam rombongan tersebut turut membonceng beberapa orang dari markas besar tentara Belanda yang disertai satu kompi serdadu-serdadu Ambon.¹²⁶ Tugas pasukan Sekutu itu antara lain:

- 1) Menerima penyerahan tentara Jepang
- 2) Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu
- 3) Melucuti senjata Jepang dan kemudian memulangkannya ke negerinya.
- 4) Memulihkan dan memelihara keamanan untuk kemudian diserahkan kepada penguasa sipil
- 5) Mengumpulkan keterangan tentang para kriminil perang dan menghadapkan mereka di depan pengadilan.¹²⁷

Sehubungan dengan pendaratan tentara Sekutu di Jawa itu, Presiden Sukarno mengharapakan untuk tidak menyinggung soal kemerdekaan Indonesia.¹²⁸ Mengumumkan agar rakyat ti-

dak menghalangi pendaratan tentara Sekutu. Sedangkan kepada pihak Sekutu Presiden Sukarno mengharapkan untuk tidak menyinggung soal Kemerdekaan Indonesia.¹²⁹ Begitu pula pada 22 Oktober 1945 Menteri Penerangan RI Mr. Amir Syarifuddin dari Jakarta mengirim telegram pada Pemerintah RI Daerah Jawa Timur yang isinya memberitahukan bahwa sekitar 25 Oktober 1945 tentara Inggris atas nama Sekutu akan mendarat di Surabaya. Pemerintah RI Daerah diminta dengan sangat untuk menerima dengan baik dan membantu tentara Inggris dan agar dijaga jangan sampai timbul insiden anti-Serikat.¹³⁰ Pada umumnya rakyat Surabaya mematuhi anjuran pemerintah, walaupun saat itu semangat mereka sedang meluap-luap.

Demikianlah pada 25 Oktober 1945, ketika pemerintah daerah Surabaya sedang mengadakan rapat residen se Jawa Timur di bawah pimpinan RMTA Suryo, tentara Inggris mendarat di Surabaya (Tanjung Perak). Adapun tentara Inggris yang mendarat tersebut terdiri dari Brigade ke-29 dari Divisi India ke-23, dengan 6.000 prajurit yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Para perwiranya kebanyakan orang Inggris, anak buahnya orang Gurkha dari Nepal dan India Utara (Punjab Hyderabad dll.). Mereka bersenjata lengkap dan berpengalaman di medan pertempuran di Birma melawan Jepang. Mereka mengenakan lencana ayam jantan dan terkenal dengan julukan "*the fighting Cock*" (Jago Perang).¹³¹ Sebelum mendarat Brigjen A.W.S. Mallaby telah mengutus Kapten *Donald* dan Letnan *Gordon Smith* untuk mengundang Gubernur Jawa Timur RMTA. Suryo datang ke kapal perang mereka dengan tujuan untuk berkenalan dengan mereka dan juga untuk merundingkan sesuatu. Tetapi undangan tersebut ditolak oleh Gubernur RMTA. Suryo, sehingga kedua utusan tersebut meninggalkan gubernuran dengan cara yang tidak sopan.

Sikap yang tidak sopan itu dilanjutkan oleh Tentara Inggris pada sore harinya, yaitu dengan mendaratkan pasukan-pasukannya di Ujung dan Tanjung Perak tanpa izin Pemerintah RI Daerah Jawa Timur. Walaupun Gubernur RMTA. Suryo telah

mengirimkan utusan yang membawa pesan berupa permintaan supaya mereka jangan mendarat lebih dahulu, namun tanpa mengindahkan permintaan tersebut pasukan-pasukan Inggris pada sore itu juga akan bergerak menuju Kota Surabaya. Hampir-hampir terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dengan BKR dan para pemuda Surabaya yang telah siap siaga di sepanjang jalan, untuk mencegah gerakan mereka.

Untung sekali, pada malam itu juga diadakan perundingan antara Kolonel Pugh dari pihak Inggris dan dr. Mustopo dari pihak RI. Perundingan tersebut diadakan di Gedung HVA. Jalan Merak No. 1 yang merupakan markas besar BKR, menghasilkan kata sepakat, bahwa tentara Inggris akan menghentikan gerakannya sampai 8000 meter terhitung dari garis pesisir Tanjung Perak. Inilah persetujuan pertama kali dengan tentara Inggris. Inggris bersedia menerima persetujuan ini karena mereka melihat bagaimana sikap BKR dan para pemuda Surabaya yang sudah siap menahan gerakan mereka masuk kota.

Esok harinya, yaitu pada 26 Oktober 1945, perundingan antara pemimpin tentara Inggris dengan Pemerintah RI dilanjutkan di Jalan Kayoon. Hasil persetujuan yang kedua ini, terdiri dari tiga pasal dan berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang akan dilucuti senjatanya adalah nya tentara Jepang, dan bukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat, perubahan dari BKR); demikian juga bukan badan-badan perjuangan rakyat lainnya.
- b. Tentara Inggris selaku wakil Sekutu akan membantu kita dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan perdamaian.
- c. Setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka mereka akan diangkut melalui laut.¹³¹

Berdasarkan hasil persetujuan yang ke dua tersebut di atas, maka pada sore itu pihak Inggris melanjutkan pendaratan pasukan-pasukannya. Malam itu juga 26 – 27 Oktober 1945 mereka menduduki penjara Kalisosok dan melepaskan semua tawanan Belanda, termasuk Kapten PJG. Huiyer cs., tanpa izin

Pemerintah RI Daerah Jawa Timur. Pada esok harinya 27 Oktober 1945, sesuai dengan persetujuan, pasukan-pasukan Inggris diperkenankan menuju ke tempat-tempat interniran Belanda dan tempat-tempat tawanan Jepang. Kemudian mereka menempati gedung-gedung yang letaknya strategis, misalnya gedung HBS, BPM, RRI, Internatio, Hotel Brantas dan lain-lainnya.¹³²

3.4.2 *Pertempuran Dua Hari di Surabaya*

Sekonyong-konyong siang hari itu juga beberapa kapal udara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang isinya memerintahkan kepada penduduk Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan Jepang kepada tentara Inggris dengan disertai ancaman, bahwa semua orang yang kelihatan memegang senjata dan yang tidak bersedia menyerahkan pada Sekutu, akan ditembak.

Jelaslah bahwa isi pamflet-pamflet tersebut melanggar persetujuan 26 Oktober 1945. Dr. Mustopo, Residen Sudirman dan lain-lainnya segera mengadakan kontak dengan Brigjen AWS. Mallaby. Walaupun semula Brigjen AWS Mallaby terpeleceh juga, namun ia menegaskan pendiriannya bahwa sekalipun sudah ada persetujuan, selaku militer ia harus mentaati perintah atasannya. Bahkan pada esok harinya, Minggu tanggal 28 Oktober 1945 tentara Inggris mulai mengganggu penduduk Surabaya, mereka merampas mobil-mobil dan senjata milik para pemuda Surabaya.

Ucapan Brigjen AWS Mallaby yang melanggar isi perjanjian 26 Oktober 1945 dan tindakan perampasan-perampasan yang dilakukan oleh tentara Inggris itu dengan sendirinya melukai hati Pemerintah RI Daerah, pemuda-pemuda dan rakyat Surabaya. Pemerintah yang baru saja mengkonsolidasi kekuasaan dan wibawanya tidak dapat menahan amarah pemuda-pemuda dan rakyat Surabaya. Demikian juga di kalangan TKR dan polisi sendiri timbul kesadaran, bahwa demi kehormatan bangsa Indonesia tindakan sewenang-wenang dari Inggris itu tidak dapat dibiarkan.¹³³ Segera pemimpin TKR, dr. Mustopo, menga-

dakan perundingan dengan para pemimpin pemuda (Sumarsono pemimpin PRI dan Sutomo pemimpin BPRI). Pada pukul 16.00 tercapai kesepakatan, bahwa aksi tentara Inggris itu harus dilawan. Setengah jam kemudian Sumarsono dan Bung Tomo memberikan komando kepada pasukan mereka masing-masing dan rakyat Surabaya pada umumnya untuk melawan tentara Inggris. Komando tersebut disiarkan melalui Radio Pemberontak yang didahului dengan lagu Indonesia Raya. Beberapa detik kemudian pecah perang untuk mempertaruhkan kehormatan Republik Indonesia di Surabaya.¹³⁴

Rakyat mulai mengepung daerah-daerah pasukan Inggris, seperti Darmo, Gubeng, Ketabang, Sawahan, Bubutan dan pelabuhan. Bahkan Gedung Radio di muka Rumah Sakit Simping (RRI sekarang) dibakar. Banyak tentara Gurkha terbunuh dalam kepungan itu. Mayatnya ada yang dilemparkan di Kali Mas. Dalam peristiwa tersebut dapat diketahui, bahwa dalam pasukan Inggris terdapat orang-orang Belanda yang menyamar sebagai Gurkha dengan mencat dirinya.¹³⁵ Tidak hanya pos-pos Inggris yang ada di dalam kota saja yang terkepung, tetapi juga di daerah pelabuhan sehingga pihak Inggris terpaksa mundur. Lapangan terbang Morokrembangan pun dapat direbut kembali oleh para pemuda dan rakyat Surabaya dan tentara Inggris terpaksa berlindung di dok-dok pelabuhan. Demikian juga gedung Internatio dekat Jembatan Merah dan gedung Lindeteves dekat Jembatan Semut terkepung sama sekali.

Pihak Inggris sendiri mengakui, bahwa posisi brigadenya di seluruh Kota Surabaya pada waktu itu sangat membahayakan. Sehingga Letkol Doultton dalam bukunya "*The Fighting Cook*", pernah menyatakan bahwa seluruh Brigade ke-49 yang terdiri dari 6.000 tentara bersenjata lengkap itu akan hancur-musnah oleh amarah dan keberanian rakyat Surabaya. Menurut mereka tidak ada seorang pemimpin pun di kota Surabaya yang mampu menenteramkan amarah rakyat saat itu. Harapan terakhir tertuju kepada Sukarno di Jakarta. Presiden Sukarno bersedia untuk esok harinya diterbangkan dengan kapal terbang RAF

(*Royal Air Force*) ke Surabaya. Demikianlah pada esok harinya 29 Oktober 1945 Bung Karno (Presiden RI), Bung Hatta (Wakil Presiden RI) dan Bung Amri Syarifuddin (Menteri Penerangan RI), dengan beberapa opsir Inggris serta wartawan-wartawan luar negeri mendarat di Surabaya. Sedangkan Jendral HC. Hawthorn, Panglima Tentara Inggris untuk seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok, menyusul esok harinya.

Pada sore harinya, 29 Oktober 1945 itu juga diadakan perundingan gencatan senjata antar Pemerintah RI yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dengan pihak Inggris di bawah pimpinan Brigien AWS. Mallaby. Adapun hasil permusyawaratan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian diadakan antara Panglima Tentara Pendudukan Surabaya dengan PYM. Ir. Sukarno, Presiden RI untuk mempertahankan ketenteraman Kota Surabaya.
- 2) Untuk menentramkan, diadakan perdamaian: ialah tembakan-tembakan dari kedua pihak harus diberhentikan.
- 3) Keselamatan segala orang (termasuk orang-orang interniran) akan di jamin oleh ke dua belah pihak.
- 4) Syarat-syarat yang termasuk dalam surat selebaran yang disebar oleh sebuah pesawat terbang tempo hari (yang dimaksud adalah pada 27 Oktober) akan diperundingkan antara PYM. Ir. Sukarno dengan Panglima Tertinggi Tentara Pendudukan seluruh Jawa pada 30 Oktober besok.
- 5) Pada malam itu segala orang akan merdeka bergerak, baik orang Indonesia maupun Inggris.
- 6) Segala pasukan akan masuk ke dalam tangsinya. Orang yang luka-luka dibawa ke rumah sakit, dan dijamin oleh ke dua belah pihak.¹³⁶

Malam itu juga enam pokok persetujuan tersebut disiarkan oleh Presiden Sukarno dan Brigien AWS Mallaby lewat corong Radio Pemberontakan di Jalan Mawar No. 2 Surabaya.¹³⁷

Esok harinya, 30 Oktober Jenderal Hawthorn datang dari

Jakarta. Hari itu diadakan pertemuan di Gedung Gubernur Surabaya, antara pihak RI di bawah pimpinan Presiden Sukarno dengan pihak Inggris di bawah pimpinan Jendral Hawthorn. Setelah terjadi perdebatan sengit, akhirnya dicapai suatu persetujuan, yang isinya sebagai berikut:

- 1) a) Pengumuman yang telah disebarakan melalui pamflet-pamflet dari kapal udara harus dibatalkan; ini berarti perintah untuk melucuti senjata TKR dan para pemuda tidak akan dilaksanakan.
- b) Tentara Sekutu tidak akan menjaga keamanan kota.
- c) Tentara Sekutu akan ditarik kembali dari gedung-gedung seperti gedung HBS (SMA), gedung BPM dan sebagainya; mereka akan ditempatkan di kamp-kamp tawanan perang Darmo dan di Tanjung Perak.
- d) Hubungan dengan TKR dan polisi bersenjata akan tetap diadakan melalui petugas-petugas penghubung.
- e) Daerah pelabuhan akan dijaga oleh tentara Sekutu dan TKR.
- 2) Persetujuan geencatan senjata secara terperinci mengenai insiden Surabaya diputuskan 30 Oktober 1945, diumumkan oleh Menteri Penerangan.
 - a) TKR diakui dan penggunaan senjata olehnya tetap diperbolehkan.
 - b) Sebuah badan penghubung (Kontak Biro) antara Tentara Sekutu dan para penguasa Surabaya akan dibentuk. Badan ini anggota-anggotanya akan terdiri dari orang-orang Indonesia dari beberapa perwira tentara Sekutu.
 - c) (1) Daerah pelabuhan kota-kota Surabaya akan dijaga oleh Tentara Sekutu, TKR dan Polisi RI. Keputusan lebih lanjut mengenai penempatan pasukan dalam kota akan ditetapkan oleh Kontak Biro.
 - (2) Daerah Darmo tempat para kediaman orang-orang Eropa dan kaum interniran akan dijaga oleh Tentara

Sekutu. Markas Besar Tentara Sekutu akan ditempatkan di daerah ini.

- (3) Daerah-daerah di luar kedua daerah ini akan dijaga oleh orang-orang Indonesia.
- d) Hubungan antara daerah pelabuhan dan Darmo harus terjamin.
 - e) Dalam menyelenggarakan pemindahan para penghuni yang perlu dipindahkan dari daerah Darmo ke daerah pelabuhan pada dasarnya tidak ada gangguan apapun.
 - f) Mereka yang menjadi tahanan kedua pihak harus dikembalikan kepada masing-masing pihak.
 - g) Penjagaan akan diselenggarakan dengan sungguh-sungguhnya, sehingga keselamatan jiwa kaum interniran dapat terjamin.
 - h) Anggota-anggota Kontak Biro:
 - Dari pihak Inggris : Brigjen AWS Mallaby, Kolonel LHO Pregh, Mayor M. Hudson, Kapten H. Shaw dan Wing Commander Groom.
 - Dari pihak Indonesia : Residen Sudirman, Dul Arnowo, Atmaji, Muhammad, Sungkono, Suyono, Kusnandar, Roeslan Abdulgani dan TD Kundan.

Perjanjian ini penting sekali,, karena di dalamnya terdapat prinsip pengakuan TKR oleh tentara Sekutu. Pengakuan tercermin pada pengumuman Menteri Luar Negeri RI Mr. Subarjo dari Jakarta, sebagai berikut:

"Menlu Mr. Akhmad Subarjo mengawatkan kepada Markas Besar Tertinggi TKR di Jogja, bahwa Jendral Christison (Panglima Tertinggi Inggris di Jakarta untuk Asia Tenggara) telah mengakui TKR dan tidak akan melucuti senjatanya. Hendaknya uniform disamakan dengan Surabaya." ¹³⁸

Setelah perundingan selesai, pada hari itu pula lebih kurang pukul 13.00 Presiden Sukarno cs. dan Jendral Hawthorn cs. kembali ke Jakarta dengan selamat. Sementara itu para anggota Kontak Biro menjalankan tugas menyempurnakan gencatan senjata dengan mendatangi tempat-tempat yang masih terjadi pertempuran. Demikianlah kurang lebih pukul 17.00 para anggota Kontak Biro dengan delapan mobil berderet-deret menuju ke Gedung *Lindeteves*. Ternyata di situ tembak-menembak sudah berhenti. Dari situ kemudian mereka pergi ke Gedung Internatio di Jembatan Merah. Di situ pada sore hari itu, 30 Oktober 1945, terjadi suatu malapetaka, yang menentukan jalannya sejarah Kota Surabaya dan juga jalannya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Brigjen Mallaby mati terbunuh di dekat Gedung Internatio itu.

3.4.3. *Pertempuran 10 November di Surabaya*

Peristiwa kematian AWS. Mallaby pernah menjadi persoalan. Apakah Brigjen AWS. Mallaby itu benar-benar meninggal dunia atau hanya menghilang secara misterius? Kalau meninggal dunia dimanakah kuburnya dan kalau menghilang ia sekarang di mana? Dan apabila meninggal dunia bagaimana cara meninggalnya?

Tentang dimarta letak kuburan Brigjen AWS. Mallaby itu pernah diteliti oleh Dr. H. Roeslan Abdulgani. Dalam penelitian tersebut telah ditemukan data-data yang memberikan petunjuk adanya fakta bahwa Brigjen AWS. Mallaby benar telah meninggal dunia. Adapun data-data itu sebagai berikut:

- 1) Menurut keterangan TD. Kundan, mayat Jendral AWS. Mallaby untuk beberapa hari telah disiapkan oleh dr. Sugiri di Rumah Sakit Umum dan beberapa hari kemudian diserahkan kembali oleh dr. Sugiri ke pihak Inggris, disaksikan oleh Bhoromal, seorang warga-negara India, pembantu dan masih keluarga Kundan.¹³⁹
- 2) Menurut *War-diary-nya* Brigade ke-49 (di London), maka pada 8 Nopember 1945 mayat Jendral AWS. Mallaby dike-

bumikan di dekat lapangan terbang Tanjung Perak (*by the side of the air field*). Upacara pemakaman itu dihadiri oleh Laksamana Muda AL. Inggris Patterson dan Majen Mansergh.

- 3) Menurut Kundan, makam Jendral tersebut kemudian dipindahkan dari Morokrembangan ke *cereveld* Kembang Kuning.
- 4) Menurut catatan dari *De Nederlandse Gravendienst in Zuid-West-Pacific* tahun 1951 di Amsterdam, maka makam Jendral AWS Mallaby terdaftar di *Kembang Kuning, Dutch War Cemetary British Commonwealth, Section*, dalam daftar urutan No. 46, dengan nomer keterangan 630, dibarisan "*Plot-row*" 2-A, *nomer makam 13*.
- 5) Menurut Dr. H. Roeslan Abdulgani dan Dul Arnowo, pada akhir bulan Agustus 1973 (juga penulis telah menyaksikan sendiri pada tanggal 14 Desember 1975) di *War Cemetery* di Menteng Pulo, Jakarta, pada barisan *grave location*) VG. 2 terdapat batu nisan yang bertuliskan sbb.:

Brigadier A.W.S. Mallaby. CIE. OBE

2nd Punjab Regiment

30th October 1945, age 45

More brave for this that he hath much to love"¹⁴¹

Tentang bagaimana cara meninggalnya Brigjen Mallaby, hingga sekarang masih merupakan persoalan yang menarik Pandangan dari pihak Indonesia (a.l. Dul Arnowo) menyatakan, bahwa Brigjen AWS. Mallaby meninggal di tengah-tengah keributan yang disebabkan oleh tembakan-tembakan yang pertama dilakukan oleh pihak Gurkha. Dalam keributan demikian maka para anggota Kontak Biro lainnya dan rakyat yang berada di lapangan depan gedung Internatio mempunyai resiko yang sama.¹⁴¹ Sedangkan dari pihak Inggris (a.l. Majen RC. Mansergh) berpendapat, bahwa matinya Brigjen AWS Mallaby karena pembunuhan sewenang-wenang ketika sedang menjalankan tugas gencatan senjata yang dilanggar oleh pihak Indonesia.¹⁴²

Bahkan menurut Bernard Dahma, Brigjen AWS Mallaby meninggal dunia karena dihadap dan kemudian ditembak oleh pihak Indonesia.¹⁴³ Tom Driberg berpendapat bahwa Brigjen AWS Mallaby meninggal dalam pertempuran dan boleh jadi karena granat yang dilemparkan oleh seorang opsir tentara Inggris kepada penduduk Indonesia.¹⁴⁴

Bagaimana interpretasi yang telah diberikan, namun kenyataan telah menunjukkan bahwa kematian Brigjen AWS Mallaby adalah penyebab langsung peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Demikianlah kenyataannya setelah kematian Brigjen AWS Mallaby dengan secara diam-diam pihak Inggris mendaratkan pasukan baru dari Divisi ke-5 sejumlah 24.000 orang di pelabuhan Surabaya. Setelah kedudukan mereka merasa kuat, Mayor Jendral EC Mansergh, pengganti Brigjen AWS. Mallaby, pada 9 Nopember 1945 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah RI Daerah dan rakyat Surabaya. Isi ultimatum tersebut antara lain, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk pemimpin-pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi dan petugas Radio Surabaya, harus melaporkan diri di Bataviaweg (sekarang Jl. Jakarta) menjelang pukul 18.00 9 Nopember. Mereka harus mendekat dengan berbaris satu-satu dengan membawa senjata yang dimilikinya. Senjata-senjata ini harus diletakkan dalam jarak 100 yard pada tempat pertemuan dan kemudian semua orang Indonesia harus mendekat dengan kedua tangan diangkat diletakkan di atas kepala, dan semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus bersedia menanda tangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat. Bagi rakyat biasa yang bersenjata, maka tempat melucuti senjata ditentukan di *Westerbuitenweg* (sekarang Jl. Indrapura) dekat mesjid Kemayoran dan di Darmo; pada waktu yang sama yaitu pukul 18.00. Mereka harus membawa bendera putih. Adapun dalam suratnya kepada Gubernur Suryo nomer G. 512-11 lebih lanjut Inggris menjelaskan bahwa senjata yang dilucuti itu ada delapan macam, yaitu: senapan, pistol, meriam, tank, mortir, granat, tombak, pisau (golok), pedang, keris, bambu runcing, sumpit (tulup), panah yang berbisa dan alat tajam yang dapat dilemparkan.¹⁴⁵

Ultimatum Majen EC Mansergh tersebut ternyata mendapat perlawanan yang hebat dari pihak Arek-Arek Suroboyo. Dr. Mustopo, Komandan TKR Jawa Timur langsung mengadakan kontak dengan badan-badan kelasykaran untuk memberikan penjelasan dan komando. Sedangkan Komandan TKR Kota Surabaya (Sungkono), pada pukul 16.30 mengadakan rapat dengan para komandan TKR Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, TKR Laut, TKR Pelajar, TKR Kediri, BPRI, Pilisi Istimewa dan Pesindo di Markas TKR Kota Surabaya (Jl. Pregolan No. 2 - 4). Pada pukul 17.30 rapat tersebut telah mengambil keputusan tekad untuk mempertahankan Kota Surabaya hingga titik darah yang penghabisan dengan mengucapkan ikrar "Merdeka atau Mati". Kemudian dibentuklah Komando Pertahanan Surabaya dan Sungkono Komandan TKR Kota Surabaya diangkat sebagai komandannya.¹⁴⁶ Pada hari itu pula diumumkan agar rakyat terutama perempuan, anak-anak dan laki-laki tua dianjurkan untuk mengungsi. Sedangkan pemuda-pemuda dilarang meninggalkan kota, karena tenaganya diperlukan untuk membantu perjuangan.¹⁴⁷

Pukul 19.30 9 Nopember 1945 itu juga Pemerintah RI Daerah Jawa Timur dengan perantaraan interlokal menghubungi Pemerintah RI Pusat di Jakarta. Dari Presiden RI (Sukarno) mendapat penjelasan, bahwa pada waktu itu Menteri Luar Negeri Mr. Akhmad Subarjo sedang menghubungi pihak pimpinan tertinggi tentara Inggris di Jakarta untuk menghindari terjadinya pertempuran di Surabaya. Mengingat bahwa rakyat Surabaya dan Jawa Timur pada malam itu sudah menunggu akan sikap Pemerintah RI Daerah Jawa Timur, maka pada pukul 20.00 Gubernur Suryo berpidato di depan corong radio, yang pada pokoknya menganjurkan agar dalam menghadapi bahaya yang mengancam itu rakyat bersikap tenang sambil menunggu keputusan Pemerintah RI Pusat di Jakarta.¹⁴⁸

Pukul 22.10 Pemerintah RI Daerah Jatim mendapat penjelasan dari Mr. Akhmad Subarjo, bahwa Menteri Luar Negeri RI

tidak berhasil meobah pendirian Pimpinan Tentara Inggris. Mereka tetap akan menggunakan kekerasan, apabila sampai besok pagi pihak Indonesia di Surabaya tidak menyerah, karena itu Menteri Luar Negeri Mr. Akhmad Subarjo lalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Surabaya.¹⁴⁹

Setelah jelas bahwa Pemerintah RI Pusat menyerahkan segala sesuatunya kepada Pemerintah RI Daerah Jawa Timur di Surabaya, maka pada pukul 23.00 Gubernur Suryo dengan tenang, tegas dan mantap berpidato di depan corong RRI (di Jalan Embong Malang) sebagai berikut:

"Saudara-saudara sekalian".

Pucuk pimpinan kita di jakarta, telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan Negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah Lebih baik hancur dari pada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu.

Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara Pemerintah, Rakyat, TKR, Polisi dan semua Badan-Badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir-batin serta Rakhmat dan Taufik dalam perjuangan.

Selamat berjuang.

Pidato Gubernur Suryo tersebut merupakan jawaban tegas dari Pemerintah RI Daerah Jawa Timur untuk menolak ultima-

tum Majen EC. Mansergh. Maka dari itu setelah pukul 06.00 10 Nopember 1945, Majen EC. Mansergh memerintahkan seluruh angkatan perang Inggris yang ada di Surabaya untuk menyerang Kota Surabaya. Sehingga pada pukul 09.00 tentara Inggris sudah mulai masuk kota dengan tank-tank dan mendapat perlawanan dari rakyat Surabaya. Kira-kira pukul 10.00 dimulai dengan tembakan-tembakan hebat dari laut. Pada saat itulah pecah perang besar di Surabaya, demi untuk membela kehormatan bangsa dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dari seluruh pelosok Jawa Timur, bahkan dari seluruh penjuru tanah air datang mengalir bantuan yang berupa pasukan bersenjata, pasukan palang merah, para kyai, bantuan makanan dan lain-lainnya. Pada waktu itu Radio Pemborntakan Bung Tomo selalu mengobarkan semangat para pejuang dengan semboyan: "Selama banteng-banteng Indonesia masih berdarah merah, yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu tidak akan suka kita membawa bendera putih untuk menyerah kepada siapapun juga."¹⁵⁰ Berkat kekompakan antara pemerintah, militer dan rakyat dan semangat juang bangsa Indonesia yang tinggi, maka pihak Inggris hanya dapat maju sedikit demi sedikit. Akhirnya pada 14 - 11 - 1945 mereka baru dapat menyusup ke Pasarturi di sebelah barat, belakang Kantor Gubernur, di sebelah tengah dan kedalam setasiun Semut di sebelah timur. Bahkan setelah bantuan pasukan sukarelawan dari luar Surabaya datang pada 15 - 11 - 1945 pihak Inggris didesak mundur sampai di sekitar Dupak, di sebelah barat, belakang Gedung Internatio, di sebelah tengah dan Pegirikan di bagian timur.¹⁵¹ Pertempuran semakin menghebat dan pada 23 - 11 - 1945 mencapai puncaknya. Pada tanggal tersebut boleh dikatakan Kota Surabaya sudah berada kembali di tangan Arek-Arek Suroboyo. Akibatnya, untuk menebus kekalahan itu pihak Inggris lalu melakukan pemboman dan serangan-serangan yang makin dahsyat yang ditujukan kepada pertahanan rakyat Surabaya.¹⁵²

Setelah tiga minggu lamanya terjadi pertempuran di Kota Surabaya, pihak Indonesia terpaksa meninggalkan kota Suraba-

ya. Mereka sebelum meninggalkan Kota Surabaya telah melakukan bumihangus, sehingga pihak Inggris ketika menguasai kota tersebut tinggal menemukan puing-puing Kota Surabaya.

Menurut arsip Inggris di London, korban rakyat Indonesia yang diketahui oleh pihak Inggris ada 6.315 orang tentunya ini tidak termasuk korban orang-orang Indonesia yang tidak jatuh ke tangan pihak Inggris.¹⁵³ Sedangkan menurut sumber-sumber luar negeri yang lain, menunjukkan bahwa sampai 22-11-1945 jumlah korban bangsa Indonesia di Surabaya kira-kira 60.000 orang, termasuk di dalamnya 5.000 orang Cina.¹⁵⁴ Tentang sejauh mana korban yang diderita oleh pihak Inggris, hingga kini belum ada data yang menunjukkan secara pasti. Tentunya korban merekapun tidak sedikit hal ini terbukti bahwa mereka menamakan kota Surabaya pada waktu itu sebagai *inferno* atau sebagai neraka (bagi mereka).¹⁵⁵

Dalam buku Sejarah Perang Inggris, peristiwa pertempuran di Surabaya ini tercatat sebagai kenang-kenangan yang pahit, karena peristiwa tersebut telah membawa korban antara lain seorang brigien yang dalam Perang Dunia II pernah menjadi pemenang dalam pertempuran. Betapa beratnya peristiwa di Surabaya itu bagi Inggris, hal itu terbukti dengan adanya usul dari Jendral Dempsey pada 23 - 11 - 1945, selaku panglima Sekutu Asia Tenggara, untuk mengosongkan Surabaya saja. Hal itu perlu dilaksanakan sebab pasukan Inggris tidak akan cukup mempertahankan tempat-tempat lainnya, apabila di tempat-tempat tersebut terjadi pertempuran.¹⁵⁶ Karena itu peristiwa di Surabaya ini mereka anggap sebagai "penutup dari Perang Dunia II."¹⁵⁷

Bagi pihak Indonesia peristiwa pertempuran di Surabaya tersebut dipandang sebagai lambang keberanian dan lambang kebulatan tekad untuk membela tanah air dan kemerdekaan Indonesia.¹⁵⁸ Rakyat dan para pemuda Indonesia dalam pertempuran tersebut menunjukkan kesediaannya berkorban jiwa dan raga untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara. Dengan penuh keberanian mereka menghadapi tentara yang

bersenjata berat dan lengkap. Padahal mereka hanya menggunakan senjata ringan dan bambu runcing. Hanya semangat pahlawanlah yang dapat menimbulkan keberanian itu. Oleh karena itu peristiwa pecahnya perang di Surabaya tanggal 10 Nopember 1945 itu kemudian ditetapkan sebagai HARI PAHLAWAN, yang untuk pertama kalinya dirayakan pada tanggal 10 Nopember 1946.¹⁵⁹

Sedangkan bagi dunia internasional, peristiwa pertempuran Surabaya tersebut menarik perhatian dunia, yang membawa masalah Indonesia menjadi pusat perhatian rakyat seluruh dunia dan perhatian PBB.¹⁶⁰ Pertempuran Surabaya itu juga menyakinkan kaum imperialis dan internasional bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah suatu kenyataan yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan tekad perjuangan dan kemauan berkorban yang tak mengenal batas.¹⁶¹

BAB IV PERJUANGAN DI DAERAH

4.1 Masa sebelum Aksi Militer Belanda I

Peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, ternyata tidak hanya mengobarkan semangat juang bangsa Indonesia tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Pada 7 Februari 1946, sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pertama kalinya membicarakan masalah Indonesia. Pertempuran Surabaya menjadi bahan perdebatan di dalam sidang. Sidang mempersoalkan dapat tidaknya Dewan ikut campur dalam persoalan perang kemerdekaan di Indonesia. Walaupun pada akhirnya Dewan menolak untuk ikut campur dalam persoalan Indonesia, namun bagi Indonesia berkumandangnya peristiwa 10 Nopember 1945 dalam forum internasional, sudah merupakan landasan kuat bagi perjuangan dalam bidang diplomasi.¹ Memang demikianlah kenyataannya, bahwa pada waktu itu Pemerintah RI lebih mengutamakan perjuangannya pada strategi politik (diplomasi) dari pada strategi militer. Sedangkan sasaran pokok pembinaan negara Indonesia pada waktu itu diarahkan pada pembinaan roda pemerintahan, kekuatan bersenjata dan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap negara yang baru berdiri itu.² Maka dari itu sudah sewajarnya kalau dalam rangka usaha menarik simpati dunia internasional Perdana Menteri Syahrir melancarkan politik bantuan beras ke India.

Demikianlah pada 27 Juli 1946 telah terjadi persetujuan antara Sutan Syahrir dengan K.L. Punjabi, setiap usaha departemen urusan penyantun dan persediaan makanan Sekutu, tentang pengiriman beras ke India, yang ketentuannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Yang akan dikirim sebanyak 700.000 ton padi.
- 2) Harga padi per 100 kg. ialah 10 ruppe 13 anna dan 4 pie.
- 3) Padi akan dikirim dari beberapa pelabuhan Republik dan karung untuk memuatnya akan disediakan oleh India.
- 4) Harga padi yang dikirim akan dibayar dengan barang-barang yang akan diserahkan kepada Republik Indonesia.
- 5) Kapal-kapal pengangkut akan disediakan oleh pemerintah India. Ongkos pengangkutan dalam negeri juga akan dibayar oleh pemerintah India, tetapi untuk sementara waktu Republik Indonesia akan membayar semua ongkos yang tersangkut. Ongkos itu dikemudian hari akan dibayar kembali oleh pemerintah India.
- 6) Jika harga beras lebih banyak dari barang-barang yang diberikan oleh India kepada Republik Indonesia, maka kelebihan harga itu akan dibayar (stor) dengan urang rupee dalam bank-bank RI di India. Jika sebaliknya maka India akan meminta uang kembali berupa rupee dari pihak Republik.
- 7) Barang-barang India yang akan dikirim ke Indonesia antara lain tenunan, benang, alat-alat pertanian, ban mobil dan sebagainya.³

Peranan rakyat Jawa Timur dalam mewujudkan usaha perikemanusiaan ini sangat besar. Rakyat dari segala pelosok daerah Jawa Timur menjual padinya pada pemerintah dan mengumpulkannya di beberapa tempat, kemudian dikirim ke pelabuhan Probolinggo atau pelabuhan Banyuwangi dengan truk-truk yang bertulisan *Indian Rice* milik tentara RI.⁴ Demikianlah pada 8 Agustus 1946 kapal India *Empress of Favour* (sumber lain *Empire Favour*) telah membongkar 7.000 karung goni kosong

untuk diisi padi dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Agustus 1946 Wakil Presiden RI Drs. Muh. Hatta dan Perdana Menteri Sutan Syahrir hadir di pelabuhan Probolinggo untuk menyaksikan penyerahan padi yang pertama untuk India. Walaupun dalam perjalanannya selalu mendapat rintangan dari pihak Belanda namun pada akhirnya kapal *Empress of Favour* tersebut dapat mencapai pelabuhan *Cochin Port* (di India) dan menurunkan padi Indonesia yang pertama sebanyak 6.000 ton.⁵

Politik beras itu menimbulkan pertentangan di dalam negeri. Sementara orang berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang sedang berjuangpun kekurangan beras atau makanan. Di lain pihak Belanda juga berusaha keras agar pengiriman padi ke India itu tidak berhasil. Belanda menyadari, apabila hal itu terjadi maka pihak luar negeri secara nyata telah mengakui Republik Indonesia. Maka dari itu Belanda berusaha keras untuk menyabot dan membakar timbunan padi yang dijumpainya. Akibatnya pada akhir tahun 1946 tentara Belanda mulai mengganas di sepanjang pantai Banyuwangi. Gudang-gudang di pelabuhan, tempat penyimpanan padi/beras yang beratus-ratus ton untuk India tidak luput dari serangan-serangannya sehingga Perdana Menteri Sutan Syahrir bersama wakil India yang mengurus pembelian padi itu memerlukan datang ke Banyuwangi untuk memeriksanya.⁶

Sementara itu pusat perhatian rakyat Jawa Timur dalam bidang perjuangan bersenjata tertuju pada pertahanan Kota Surabaya. Setelah Kota Surabaya tidak dapat dipertahankan lagi maka pertahanan pihak Republik Indonesia (RI) pindah ke luar Kota Surabaya. Berbulan-bulan rakyat mengepung Kota Surabaya dari arah selatan (Wonocolo, Waru, Sidoarjo), dari arah barat (Sepanjang Jetis, Mojokerto) dari utara (Gresik Lamongan) dan bahkan sering mengadakan penyusupan.⁷ Sambil menyusun pertahanan dan penyerangan mereka mengadakan pembinaan dalam bidang angkatan bersenjata.

Pada 5 Oktober 1945 telah dikeluarkan maklumat Pemerintah RI, yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang dise-

but Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dengan dasar maklumat pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Besar Umum yang menjadi bagian Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat dan berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian disusul dengan terbentuknya 10 Divisi di Jawa dan 6 Divisi di Sumatra. Sedangkan daerah Jawa Timur pada waktu itu dipertahankan oleh:

1. Divisi VI/Madiun – Kediri yang berkedudukan di Kediri.
2. Divisi VII/Bojonegoro – Surabaya – Madura yang berkedudukan di Mojokerto.
3. Divisi VIII/Malang – Besuki yang berkedudukan di Malang.

Perlu diketahui bahwa di Jawa Timur sebelumnya sudah ada Divisi-Divisi V, VI, VII dan VIII. Setelah terjadi pembentukan seperti tersebut di atas, maka Divisi VII dan VIII digabungkan menjadi satu dan menjadi Divisi VIII. Divisi-Divisi itu diberi nama Divisi V/Ronggolawe, Divisi VI/Narotama dan Divisi VII/Surapati (Untung Surapati).

Pertempuran tetap berlangsung di mana-mana, dalam kesibukan pertempuran itu keluarlah Penetapan Pemerintah No. 2/S.D. 7 Januari 1946 tentang perubahan sebutan Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang singkatannya tetap TKR. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 25 Januari 1946 keluarlah Penetapan Pemerintah RI. No. 4/S.D. yang membawa akibat peleburan Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), yang merupakan satu-satunya organisasi militer Negara Republik Indonesia.⁸

Kenyataan menunjukkan bahwa di samping TRI masih ada organisasi-organisasi kelaskaran, yaitu barisan-barisan bersenjata yang merupakan badan-badan ketentaraan non-pemerintah, yang pada garis besarnya dapat dibedakan dalam:

1. Yang tumbuh sebagai pengejawantahan hasrat rakyat untuk turut serta mengisi dan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kelaskaran yang demikian ini tidak dijiwai oleh se-

suatu edilogi politik. Satu-satunya tujuan yang menggerakkan mereka ialah berjuang untuk menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kelompok ini antara lain: Tentara Genie Pelajar (TGP), Front Pelajar, Corps Mahasiswa, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), dan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).

2. Kelasykaran partai-partai. Laskar-laskar ini tumbuh sehubungan dengan Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai, serta anjuran Pemerintah untuk membentuk laskar-laskar partai. Pada awal Nopember 1945 berdirilah Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang segera membentuk laskarnya yang terkenal dengan nama PESINDO atau Pemuda Sosialis Indonesia. Kemudian bermuncullah laskar-laskar partai lainnya. Muncullah pasukan-pasukan partai bersenjata dengan ideologi masing-masing samping Tentara Negara RI.⁹

Dengan tujuan untuk menertibkan dan menyatukan langkah perjuangan dari badan-badan kelaskaran tersebut, maka tanggal 24 Mei 1946 baik di pusat maupun di daerah-daerah telah didirikan biro-biro perjuangan. Adapun yang tergabung dalam biro perjuangan ini antara lain :

- 1) Semua barisan-barisan laskar-laskar rakyat bersenjata yang tumbuh waktu revolusi.
- 2) Beberapa divisi yang berada di luar organisasi BKR/TKR, misalnya:
 - a) Divisi "Jago" di bawah pimpinan Dr. Mustopo.
 - b) Kru "X" di bawah pimpinan Warrouw.
 - c) Divisi Hisbullah dipimpin oleh Saidu.
 - d) Divisi TRIP (yang berada di Jawa Timur 1 Brigade) dipimpin oleh Isman.
 - e) Corps Pelajar dan Demobilisan.
 - f) Corps Armada Angkatan Laut.

Badan-badan yang dikoordinasikan tersebut secara taktis berada di bawah komando Divisi TKR VI, VII dan VIII; hal

yang demikian itu untuk memudahkan dalam pemberian perintah-perintah gerakan dalam pertempuran dengan musuh.¹⁰

Sementara itu situasi di pihak musuhpun mengalami perubahan. Mulai bulan Maret 1946 Panglima Tentara Inggris mengizinkan pasukan-pasukan Belanda secara berangsur-angsur masuk ke Indonesia untuk menggantikan pasukan-pasukan Inggris.¹¹ Sehingga beberapa hari sebelum 16 Mei 1946 Inggris telah menyerahkan Surabaya kepada pihak Belanda.¹² Bahkan pada 29 Nopember 1946 markas Sekutu untuk Asia Tenggara telah dihapuskan, bulan itu juga tentara Inggris telah meninggalkan Indonesia.¹³ Sejak itu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia berhadapan langsung dengan pihak Belanda (NICA).

Ketika rakyat Jawa Timur sedang mengangkat senjata untuk membela kehormatan bangsa dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pemerintah RI Pusat dalam bidang diplomasi berhasil mencapai suatu persetujuan dengan pihak Belanda. Persetujuan tersebut terkenal dengan sebutan Persetujuan Linggarjati, yang telah ditandatangani oleh delegasi dari kedua belah pihak pada 25 Maret 1947.¹⁴ Dengan adanya Persetujuan tersebut berlaku "gencatan senjata" antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Namun demikian tentara pendudukan Belanda di Kota, Surabaya tidak mau mengindahkannya dan melanggar "gencatan senjata" itu. Hal itu terbukti dengan adanya serangan pihak Belanda atas Krian, Prambon, Tulangan, Sidoarjo dan Mojokerto, yang berhasil mereka duduki.¹⁵

Demikianlah tanggal 21 Januari 1947 dengan dilindungi tembakan-tembakan dari artileri dan pesawat udara pasukan infantri dan kavaleri Belanda menyerbu Krian. Pada waktu itu Kota Krian merupakan garis pertahanan terdepan pihak RI. Kota tersebut dipertahankan oleh batalyon-batalyon yang berada di bawah komando Resimen I dan batalyon-batalyon dari Resimen Madiun serta Bojonegoro. Di samping itu terdapat pula pasukan dari badan-badan kelaksakaran yang datang dari berbagai daerah. Walaupun kota tersebut dengan gigih diperta-

hankan oleh pihak RI, tetapi karena serangan kombinasi dari artileri, pesawat udara, kavaleri dan infantri pasukan Belanda sangat kuat, maka pada hari itu pula Kota Krian dapat diduduki oleh Belanda.

Setelah Kota Krian dapat direbut Belanda melanjutkan serangannya ke Prambon. Pada 23 Januari 1947 Prambon diserang dari dua jurusan oleh pasukan Belanda. Serangan pertama datang dari jurusan jalan raya Krian — Prambon, sedangkan serangan yang ke dua datang dari jurusan Wonoayu — Tulangan — Bulang — Prambon. Belanda yang menyerang dari jurusan Krian sengaja mempergunakan lambang-lambang dan bendera Merah Putih. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan dari serangan-serangan dasyat pihak Indonesia. Pada pukul 11.15 Prambon dapat diduduki dengan mudah. Sedangkan pasukan TRI (Resimen I Divisi Surabaya yang kemudian menjadi Resimen 33, dll) mengundurkan diri ke Mojokerto, Bangsal dan Mlirip, setelah melakukan bumihangus.

Dengan segera RI berusaha mengadakan "Penghentian Tembak-Menembak" dan pada 15 Februari 1947 keluarlah perintah "Penghentian Tembak Menembak" tersebut dan garis demarkasi ditetapkan pada keadaan sebelum 24 Januari 1947. Pihak RI percaya bahwa sesudah adanya kesepakatan itu gerakan-gerakan militer tidak akan terjadi lagi. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Pasukan Belanda tidak ditarik mundur dari garis demarkasi yang telah ditentukan bahkan mengadakan gerakan militer ke Kota Mojokerto dan Sidoarjo. Akibatnya pada 17 Maret 1947 kedua kota tersebut dapat diduduki oleh tentara Belanda.

Waktu itu delegasi RI dan delegasi Belanda sedang sibuk mempersiapkan penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati yang akan diselenggarakan pada 25 Maret 1947 di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan ini delegasi RI mengajukan protes terhadap gerakan-gerakan militer Belanda yang baru dilakukan baik di Mojokerto maupun di tempat-tempat lain. Delegasi RI menuntut agar Belanda mengundurkan pasukannya

sampai di belakang garis demarkasi seperti yang telah ditetapkan pada 24 Januari 1947. Tuntutan tersebut dapat diterima dan kemudian dilaksanakan. Akan tetapi kemudian disusul dengan peristiwa baru, yang terkenal dengan sebutan Aksi Militer Belanda I.

4.2 Masa Aksi Militer Belanda I

Sejak 1 Juli 1946 Inggris telah menyerahkan pemerintahan di Kalimantan dan Timur Besar (*Grote Oost*) kepada Belanda. Sedangkan serah terima pemerintahan di Jawa dan Sumatra baru terjadi pada 30 November 1946. Untuk mempertahankan daerah-daerah yang telah dikuasainya, pemerintah Belanda (*Nederlands*) harus mengeluarkan ongkos pembiayaan pasukannya yang tidak sedikit jumlahnya. Menurut keterangan *Hirschfeld*, (salah seorang ahli ekonomi keuangan Belanda) karena keadaan keuangan negeri Belanda sedemikian buruknya maka meskipun seluruh persediaan emas Javasche Bank dijual, keberadaan pasukan Belanda di Indonesia tetap tidak dapat dipertahankan sampai akhir tahun 1947. Hal itu disebabkan oleh karena tidak adanya kenaikan devisa dan juga karena pinjaman dari Amerika Serikat tidak mungkin dilaksanakan. Maka dari itu satu-satunya jalan untuk dapat bertahan di Indonesia Belanda harus cepat-cepat menguasai daerah perkebunan dan minyak bumi terutama yang ada di Jawa. Jadi Belanda harus segera meluaskan wilayahnya yang waktu itu baru menguasai Jakarta (*Batavia*), Semarang dan Surabaya. Apabila pulau Jawa dapat dikuasainya, sebelum tutup tahun 1947 Belanda akan berhasil memperoleh devisa f. 100 juta (gulden).¹⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa apabila dipandang dari segi situasi ekonomi keuangan Belanda pada waktu itu, *Hirschfeld* sangat setuju dengan adanya aksi militer. Pendapat ini didukung oleh Jendral Spoor yang menambah penjelasan bahwa untuk menduduki Jawa Barat cukup waktu satu minggu dan untuk menduduki Jawa Timur memakan waktu 14 hari lamanya. Bahkan Jendral Spoor menghendaki agar serangan langsung di-

tujukan ke ibukota RI, Yogyakarta. Walaupun pendapat Jendral Spoor itu dipandang dari segi militer dapat dibenarkan, namun perhitungan politik tidak memperbolehkannya, baik berdasarkan alasan politik dalam negeri Belanda maupun berdasarkan alasan politik internasional. Maka dari itu kaum politisi Belanda berpendapat, bahwa apabila mengadakan aksi militer cukup menduduki Jawa Barat dan Jawa Timur karena hal itu sudah berarti menyelamatkan daerah perkebunan. Selanjutnya kaum politisi Belanda (Jonkman) berpendapat bahwa sebelum beranjak ke aksi militer, harus diyakinkan dulu bahwa Republik Indonesia benar-benar sudah tidak mau kerjasama lagi dengan Belanda. Berdasarkan jalan pikiran inilah, maka pemerintah Belanda pada 27 Mei 1947 dengan perantaraan Van Mook menyerahkan nota Komisaris Jenderal kepada RI. Nota tersebut menekankan agar RI mematuhi kehendak Belanda, yaitu menjalankan Perjanjian Linggarjati menurut versi Belanda.

Perjanjian Linggarjati ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga tiap pihak mempunyai tafsiran sendiri-sendiri yang menguntungkan diri sendiri. Terutama mengenai pasal 2 tentang kerjasama antara pemerintah RI dan Belanda terdapat perbedaan interpretasi yang mendasar (prinsipial). Menurut interpretasi Belanda, sebelum Negara Indonesia Serikat terbentuk maka kedaulatan dipegang oleh Nederland. Hal itu berarti, bahwa RI dalam kerjasama itu harus menyerahkan kedaulatannya pada Belanda. Interpretasi inilah yang ditekankan Belanda dalam notanya 27 Mei 1947. Sedangkan bagi RI, pengertian kerjasama itu adalah Belanda dan RI bekerjasama mendirikan Negara Indonesia Serikat dan bertanggung jawab atas dasar sama derajat. Karena telah ada perbedaan penafsiran ini, maka sudah sewajarnya apabila jawaban RI (7 Juni 1947) terhadap nota 27 Mei 1947 tidak memuaskan pihak Belanda. Sehingga pemerintah Belanda 20 Juni 1947 memberi instruksi kepada Van Mook supaya menggunakan kekerasan terhadap RI, dengan catatan hanya meluaskan wilayah di tempat-tempat yang bernilai ekonomi seperti perkebunan dan sumber-sumber minyak. Bahkan pada 18 Juli 1947 Van Mook mendapat kuasa penuh untuk me-

lakukan aksi militer terhadap RI. Demikianlah pada 20 Juli 1947 menjelang tengah malam Van Mook mengirim surat kepada Pemerintah RI yang menyatakan Belanda tidak terikat lagi pada Perjanjian Linggarjati. Dengan demikian sejak 21 Juli 1947 malam pihak Belanda telah melanggar Perjanjian Linggarjati dan mulai melancarkan aksi militernya ke daerah RI.¹⁷

Sesaat sebelum terjadinya penyerangan Belanda Panglima Besar Sudirman telah mengirimkan sebuah nota kepada Pemerintah RI, yang terkenal dengan nama "NOTA PANGLIMA BESAR". Dalam nota tersebut diuraikan pandangan-pandangan tentang kemungkinan adanya serangan Belanda secara besar-besaran. Di dalam nota itu ditegaskan pula pokok-pokok strategi yang berhubungan langsung dengan agresi Belanda tersebut. Selain itu termuat pula usul-usul tentang tindakan-tindakan yang dianggap perlu, apabila agresi itu sampai terjadi. Pandangan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pihak Belanda mempunyai kelebihan tehnik militer dan persenjataan sedangkan TRI masih mempunyai kekurangan dalam segala hal. Dalam jumlah tenaga memang pihak TRI lebih unggul dan bantuan Rakyat untuk semua itu memang dapat diharapkan.

Dengan adanya aksi-aksi militer itu pihak Belanda bermaksud menghancurkan TRI dalam waktu yang singkat. Sedangkan usaha pihak RI pada fase pertama menghindarkan penghancuran penghancuran yang diadakan oleh serangan-serangan Belanda itu. Kemudian barulah dapat disusun pertahanan total yang luas dan tahan lama, dengan menggunakan tenaga yang sudah terlatih sebagai inti pasukan pertahanan rakyat.¹⁸

Di Jawa Timur Aksi Militer Belanda pertama kali ditujukan kepada daerah Karesidenan Surabaya (Gresik, Krian, Mojokerto yang diduduki oleh Belanda pada 21 Juli 1947, daerah Karesidenan Malang (Kota Malang, Pasuruan dan Probolinggo), daerah Karesidenan Besuki (kota-kota Lumajang, Panarukan, Situbondo, Besuki, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), daerah Karesidenan Madura. Ibukota-ibukota daerah karesidenan tersebut diserang lalu dikuasai oleh pihak Belanda.

4.2.1 *Pendudukan Malang*

Dengan jatuhnya Sidoarjo di tangan Belanda, pada 21 Juli 1947, maka dapat dikatakan bahwa nasib Kota Malang tinggal diambang pintu. Gerak pasukan Belanda ternyata sangat cepat, sehingga pada pukul 16.00 telah dapat menduduki Pandaan dan Lawang. Dalam pertempuran yang terjadi di sekitar Lawang, Angkatan Laut RI kehilangan seorang pemimpin yang terkenal cakap dan bijaksana yaitu Letkol. Raden Panji Abdul Latief, yang waktu itu ia menjabat sebagai Kepala Staf Siasat dan pemimpin Pendidikan Angkatan Laut RI se Jawa Timur.

Setelah Lawang dapat direbut, pasukan-pasukan infanteri Belanda di bawah pimpinan Jendral Mayor Baay sekitar pukul 18.00 bergerak ke selatan menuju Malang. Dengan didahului oleh pasukan-pasukan tank dan panser, pasukan infanteri Jendral Mayor Baay dapat memasuki dan menduduki Blimbing yaitu kota Malang bagian utara, yang pada waktu itu dalam keadaan kosong karena telah dibumihanguskan oleh tentara RI. Dari Blimbing inilah pihak Belanda melancarkan mortir-mortir ke pusat kota, sehingga gedung-gedung di sepanjang jalan raya (Ijen) banyak yang hancur.¹⁹

Pada waktu itu pertahanan daerah Jawa Timur diserahkan kepada Divisi VI/Narotama dengan Panglima Divisinya Jendral Mayor Sungkono yang berkedudukan di Kediri dan Divisi VII/Surapati dengan Panglima Divisinya Jendral Mayor Imam Sujai yang berkedudukan di Malang. Divisi VII/Surapati tersebut terdiri dari tiga resimen, yaitu Resimen 38 di bawah pimpinan Letkol. Abdul Rifai, Resimen 39 di bawah pimpinan Letkol. Tahirudin Cokroatmojo dan Resimen 40 yang komandannya belum sempat ditunjuk.

Khusus pertahanan kota Malang dan sekitarnya diserahkan kepada Resimen 38 yang terdiri dari empat batalyon. Masing-masing ialah: batalyon I di bawah pimpinan Mayor Hamid Rusdi, batalyon II di bawah pimpinan Mayor Abdul Manan, batalyon III di bawah pimpinan Mayor Mukhlas dan batalyon IV dibawah pimpinan Mayor Syamsyul Islam. Pada saat Belanda

menyerang daerah Malang tersebut Batalyon I Hamid Rusdi telah mempertahankan dengan gigih.²⁰ Bahkan sebelum pasukan Belanda masuk kota Malang dengan tegas Mayor Hamid Rusdi telah memerintahkan untuk melakukan bumi hangus. Motto yang berlaku pada waktu itu ialah, "Pertahankan semua yang bisa dipertahankan dan hancurkan semua yang bisa dihancurkan agar tidak jatuh ke tangan musuh." "Demikianlah bumi hangus berlaku di mana-mana. Gedung Kotamadya Malang, gedung bersejarah tempat TRIP Darmo 49 berkonperensi bersama-sama dengan Laskar IPI pada bulan Juni 1946, sehingga terbentuklah TRIP Jawa Timur, dilanda kehancuran karena aksi bumi hangus. Juga gedung kebudayaan *Concordia* (Gedung Sarinah sekarang; tempat BPKIP bersidang menghadapi persetujuan Linggarjati) Hotel Splendid yang megah, kantor telepon Malang, gedung DAMRI di Jalan Kawi 24, dan markas BPRI-nya Bung Tomo di Jalan Tangkubanprahu semuanya hancur binasa dile-dakkan dan dibakar²¹ Demikian suasana kota Malang pada waktu itu. Karena perlawanannya dapat dipatahkan oleh Belanda, maka Mayor Hamid Rusdi terpaksa mengundurkan diri ke Bululawang. Dengan demikian maka pukul 05.00 pagi 22 Juli 1947 Kota Malang telah dapat diduduki tentara Belanda. Pada hari itu juga, pos-pos Republik Indonesia yang berada di dalam kota dan markas besar Divisi VII/Surapati diambil alih oleh Belanda.²²

Patut dicatat di sini tentang perlawanan patriotik TRIP Jawa Timur dalam usaha mempertahankan Kota Malang pada 31 Juli 1947. Demikianlah pada 30 Juli 1947 markas Pusat Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur di Jalan Kawi 26 Malang, kedatangan teman-temannya yang mundur dari pertahanan mereka di Pandaan — Tretes — Trawas, sehingga mereka mendapat tambahan tenaga. Pertahanan Kota Malang mereka pusatkan di daerah jalan Salak - Ijen - Guntur - Buring. Pagi hari 31 Juli 1947 pasukan TRIP bersama-sama dengan kesatuan-kesatuan Laskar Gabungan Seberang Lautan telah mengadakan *stelling* di Jalan Salak - Rinjani. Di situ antara lain terdapat Komandan Batalyon 5000 TRIP, Susanto dan lain-lainnya. Di-

tinjau dari keseimbangan kekuatan, maka pertahanan pihak TRIP ini sebenarnya tidak berarti. Pasukan penyerang (Belanda) tidak hanya menggunakan senjata berat, tetapi juga menggunakan tank-tank dan kendaraan berlapis baja *brenccarrier*. Meskipun demikian para pahlawan muda itu pantang menyerah, sehingga komandan batalyon sendiri, yaitu Susanto, gugur bersama-sama dengan 35 orang anak buahnya secara patriotik. Tentang bagaimana gugurnya Komandan Batalyon 5000 TRIP ini, A. Radjab pernah melukiskan sebagai berikut:

Komandan batalyon Susanto terus menembak, hingga *karabijnnya panas magazijnnya*, kemudian menggantikannya dengan *colt - pistol*. Sambil berteriak: "*Er zal een wonder gebeuren*" (akan terjadi satu keajaiban): dengan colt-pistol di tangan kiri, dan granat tangan digigit lepas pin-nya di tangan kanan, Susanto lari melompat ke punggung Sherman tank Belanda ini, ia naik, tetapi tiba-tiba sebuah peluru tajam dari belakang bersarang di punggungnya, hingga ia terjatuh. Tank ini berhenti sejenak lalu mundur dan badan Susanto digilas sebagian oleh gigi-gigit roda laknat ini. Inilah keajaibannya: Susanto komandan Batalyon TRIP 5000 gugur secara heroik - patriotik, konsekwen dengan pidato-pidatonya yang berapi-api sebagai komandan dan Ketua TPI, pelajar SPMA Malang ini.²³

Adapun nama-nama para pahlawan TRIP yang gugur dalam peristiwa pertempuran Jalan Salak (sekarang Jalan Pahlawan TRIP) tersebut ialah: (1) Susanto, komandan Batalyon 5000, (2) B. Polai, (3) Budoyo, (4) Budiono, (5) S. Darmoyo, (6) Jaenudin, (7) Jaenal Dauri, (8) Harsunu, (9) Husin Kartono, (11) Ilham, (12) Kayaman, (13) Harmadi, (14), Kido, (15) Kusaeri, (16) H. Usman, (17) Lukito, (18) M. Marwi, (19) Nurakhim, (20) Puspito, (21) Rayuman, (22) Rukawan, (23) Subandi, (24) Sudibyo, (25) Sugeng, (26) Sukandar, (27) Sukardi, (28) Sukri, (29) S. Sukoprawiro, (30) Sutarman, (31) Sucipto, (32) Tejokece, (33) A. Jais, (34) Kasan, dan (35) Tak dikenal.²⁴ Demikianlah setelah pertempuran menjadi reda, sisa-sisa pasukan TRIP kemudian mengundurkan diri keluar kota untuk melaksanakan siasat perang gerilya.

Peristiwa pertempuran Jalan Salak Malangitu sangat disesalkan oleh Dr. Mustopo. Kejadian itu memberikan inspirasi

bagi dr. Mustopo untuk membentuk satu brigade inteligentsia, untuk tugas-tugas *intelligence* yang namanya tidak dikenal (X) dan akhirnya terkenal dengan sebutan XBI (baca Ex-Bi-Ai): X = tidak dikenal, B = brigade, I intelligentsia/terpelajar.²⁵

Dengan demikian pada 22 Juli 1947 kota Malang yang pernah memegang peranan penting dalam menentukan diterima atau tidaknya perjanjian Linggarjati oleh pihak RI, telah jatuh ke tangan Belanda sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian Linggarjati itu juga.

4.2.2 Pendudukan Besuki

Pada 20 Juli 1947 dari Laut Jawa, tentara Belanda baru-saha mengadakan pendaratan yaitu di pantai Pasir Putih di daerah Kabupaten Penarukan (Situbondo) dan juga di pantai Banyuwangi bagian utara maupun selatan.

Waktu itu pertahanan Karesidenan Besuki berada di bawah komando Resimen 40 dari Divisi VII/Surapati, yang berkedudukan di kota Jember. Komandan Resimen 40/VII pada waktu itu adalah Let. Kol. Prayudi. Resimen 40/VII tersebut terbagi atas empat batalyon tempur, yaitu:

- 1) Batalyon (Bn) IX ANJING LAUT di bawah pimpinan Mayor Rz. E.J. Magenda, yang berkedudukan di daerah Bondowoso.
- 2) Batalyon (Bn) V SEMUT MERAH di bawah pimpinan Mayor Rasadi yang berkedudukan di Situbondo.
- 3) Batalyon (Bn) GARUDA PUTIH di bawah pimpinan Mayor Syafiudi, yang berkedudukan di daerah Jember.
- 4) Batalyon (Bn) IV MACAN PUTIH di bawah pimpinan Mayor Abdul Rifai, yang berkedudukan di daerah Banyuwangi.

Di samping Resimen 40/VII masih ada lagi kesatuan-kesatuan dan laskar perjuangan yang ikut serta dalam mempertahankan daerah Karesidenan Besuki, Misalnya, TLRI, dari Kesatuan 8, ALRI dari Pangkalan X, ALRI Pasukan 0032, artileri, Pasu-

kan Sunda Kecil, TRIP, KRIS, BPRI, HISBULLAH, Laskar Merah, Sabilillah, dan lain sebagainya.²⁶

Ketika Pasir Putih diserang dari laut dan udara, daerah tersebut dipertahankan oleh ALRI Pangkalan X yang dipimpin oleh Mayor Warouw dan Mayor A. Telwe²⁷ Walaupun dengan gigih dipertahankan, tetapi karena kurangnya peralatan perang maka pada 21 Juli 1947 pasukan Belanda dapat melakukan pendaratan secara besar-besaran di pantai tersebut. Dari Pasir Putih pasukan Belanda bergerak menuju dua arah, yaitu sebagian bergerak menuju ke kota Panarukan, Situbondo, Bondowoso, Jember dan sebagian bergerak menuju ke Besuki terus ke Probolinggo.

Pasukan Belanda yang bergerak dari Pasir Putih ke Besuki itu adalah oleh pasukan seksi Sersan Mayor Samaun. Tetapi oleh karena pasukan Belanda lebih unggul dalam soal persenjataan dan peralatan lainnya, maka seksi Samaun terpaksa mengundurkan diri untuk melakukan siasat perang gerilya. Dengan demikian tentara Belanda dapat bergerak ke utara sehingga pada 21 Juli 1947 kira-kira Pukul 16.00 kota Besuki jatuh ke tangan Belanda.²⁸

Sedangkan pasukan Belanda yang menuju Situbondo, mendapat perlawanan gigih dari anak buah Batalyon V/SEMUT ME-RAH di bawah pimpinan Mayor Rasadi dan pasukan-pasukan ALRI serta laskar-laskar lainnya. Hanya dengan mengerahkan pasukan-pasukan tank, panzer dan pasukan udara sajalah maka pertahanan TRI di Kalibagor (Bondowoso) dapat dipatahkan oleh Belanda. Setelah pertahanan Kalibagor dapat dipatahkan Belanda dapat merebut Prajekon pada kira-kira pukul 18.30. Kemudian tentara Belanda bermalam di situ.

Pada keesokan harinya 22 Juli 1947 gerakan tentara Belanda dilanjutkan ke Bondowoso. Di Desa Klabang pasukan-pasukan RI di bawah pimpinan Mayor E.J. Magenda (Komandan Bn. IX/ANJING LAUT) memberikan perlawanan yang hebat terhadap pasukan Belanda. Karena tekanan Belanda sangat berat pasukan RI terpaksa mengundurkan diri ke jurusan Bondowoso.

Gerakan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap itu semakin tidak dapat dibendung, sehingga pada pukul 13.30 Bondowoso jatuh ke tangan Belanda.²⁹

Setelah Bondowoso jatuh, pada hari itu pula pasukan Belanda bergerak menuju Jember, yang pada waktu itu dipertahankan oleh Kompi Sutopo dari Batalyon GARUDA PUTIH/Syarifudin dan pasukan-pasukan dari kesatuan lainnya serta Komando Resimen 40/DAMARWULAN secara bersama-sama. Karena ternyata secara perang frontal mereka tidak mungkin mempertahankan Jember dari serangan Belanda, maka pasukan-pasukan RI tersebut terpaksa meninggalkan kota, untuk melakukan strategi perang gerilya. Dengan demikian maka pada 22 Juli 1947 kira-kira pukul 16.00 Jember telah dikuasai oleh Belanda.³⁰

Komando Resimen 40/DAMARWULAN mengundurkan diri ke daerah sebelah utara Jember, sedang markas Batalyon GARUDA PUTIH dan beberapa pasukan ALRI ke sebelah selatan Jember. Komandan Batalyon IX/ANJING LAUT Mayor E.J. Magenda mengundurkan diri ke desa Gadingsari. Di situ Mayor E.J. Magenda memegang komando atas dua batalyon, yaitu Batalyon IX/ANJING LAUT dan Batalyon V/SEMUT MERAH, karena komandannya, Mayor Rasadi, telah ditangkap Belanda dalam pertempuran di daerah Bondowoso. Mayor E.J. Magenda kemudian membentuk Komando Bersama di desa Gadingsari itu dengan kode Komando Daerah COG IV – INDRA LOKA.

Setelah komando tersebut terbentuk dan kesatuan-kesatuan militer serta badan-badan perjuangan dapat bekerja sama, maka siasat perang gerilya terhadap Belanda mulai berjalan dengan baik. Akibatnya tentara Belanda yang telah menduduki kota Bondowoso dan lain-lainnya mulai merasa tidak tenang, karena selalu mendapat gangguan dari tentara gerilya. Konvoi-konvoi dan pos-pos tentara Belanda sering kali mendapat serangan secara mendadak dari pasukan gerilya. Karena itu pihak Belanda selalu berusaha mencari para gerilyawan dengan jalan mengadakan operasi militer di dalam ataupun di luar kota Bondowoso

dan kota-kota lainnya. Berkat bantuan orang-orang Indonesia yang menjadi kaki-tangan Belanda, banyak para anggota pasukan gerilya yang tertangkap dan ditawan Belanda. Di antara para gerilyawan yang tertangkap itu ada seorang Komandan Ranting Kepolisian RI Saerah Maesan (kota Bondowoso) bernama Kuswari (*Koeswari*; sekarang Inspektur Polisi Purnawirawan).³¹

Setelah ditangkap Belanda, Kuswari dibawa ke kantor VDMB (14-11-1947) di Jalan Jember (sekarang rumah mantan Wakil Residen Besuki Wiryo). Keesokan harinya (15-11-1947) ia dan teman-temannya dipindahkan ke penjara Bondowoso. Setelah tujuh hari di penjara Bondowoso (tanggal 23 Nopember 1947) ia bersama-sama dengan 99 orang tawanan lainnya, mengalami suatu peristiwa yang dalam Sejarah Perjuangan Jawa Timur terkenal dengan sebutan "PERISTIWA GERBONG MAUT BONDOWOSO – SUROBOYO" atau disingkat "PERISTIWA GERBONG MAUT".

Dalam wawancara dengan M. Sukardi 15 September 1974, pengalman Kuswari tentang Peristiwa Gerbong Maut tersebut telah dikisahkan kembali, yang pada garis besarnya isinya dapat dituturkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu 22 Nopember 1947, sesudah makan sore pak Kuswari bersama dengan 99 orang tawanan lainnya telah dipindahkan dari sel mereka masing-masing ke kamar nomor 10. Pada keesokan harinya, hari Minggu 23 Nopember 1947 pukul 05.15 atas perintah Komandan VDMB Van Dorpen, ke 100 orang tawanan tersebut disuruh ke luar dan berbaris empat-empat di muka penjara Bondowoso. Sesudah itu mereka diperintahkan berbaris menuju ke stasiun kereta api Bondowoso. Sambil menunggu datangnya kereta api dari Situbondo, mereka telah dimasukkan ke dalam tiga buah gerbong barang (yang terbuat dari bahan seng), yaitu :

- 1) Gerbong No. GR. 10152 berisi 38 orang (yang kemudian disebut gerbong nomor III, karena ditempatkan di bagian paling belakang).

- 2) Gerbong No. GR. 4416 yang berisi 30 orang (yang kemudian disebut gerbong nomor II, karena ditempatkan di tengah antara tiga gerbong tersebut).
- 3) Gerbong No. 5769 yang berisi 32 orang (yang kemudian disebut gerbong nomor I, karena tempatnya paling depan di antara tiga gerbong tersebut).^{3 2}

Setelah mereka masuk ke dalam gerbong-gerbong tersebut, kemudian gerbong gerbong itu dikunci dari luar oleh anggota KNIL yang mengawal mereka.

Di dalam gerbong keadaannya sangat gelap meskipun hari masih pagi udara mulai terasa panas. Kira-kira pukul 07.00 setelah iringan ketiga gerbong itu digandengkan dengan kereta api yang datang dari Situbondo, mereka diberangkatkan menuju suatu tujuan yang tidak mereka ketahui. Ada juga di antara mereka yang menduga, bahwa mereka akan dipindahkan ke penjara Bubutan di Surabaya.

Kurang lebih 20 menit kemudian sampailah kereta api itu distasiun Tamanan. Pada waktu itu di dalam gerbong nomor II, di mana Kuswari berada, sudah ada orang yang-pingsan. Teriakan minta tolong untuk dibukakan pintu dan teriakan minta air untuk minum, yang berasal dari dalam gerbong ke dua tersebut, tidak dihiarukan oleh anggota KNIL yang mengawal mereka. Hanya ejekan dan cacimaki dari luarlah yang mereka terima. Akibatnya, bagi mereka yang tidak dapat mengatasi derita dahaga dan panasnya udara tidak sedikit yang pingsan, bahkan banyak pulayang meninggal dunia dalam perjalanan.

Pada pukul 19.15 kereta api maut tersebut berhenti di stasiun Wonokromo (Surabaya) dan perjalanan mereka berakhir di situ. Para pengawal mulai membuka pintu ketiga gerbong tersebut. Mereka melihat kenyataan, bahwa 38 orang tawanan yang berada di dalam gerbong paling belakang (No. III) No. GR. 1052 tidak ada satupun yang hidup. Di dalam gerbong tengah (No. II) No. GR. 4416 yang berisi 30 orang ada delapan tawanan yang meninggal dunia. Sedangkan penumpang

gerbong paling depan (No. I) No. GR. 5769, yang jumlahnya 32 orang, masih hidup semua dalam keadaan menyedihkan.

Mereka yang meninggal dunia keadaannya sangat memilukan. Kulit dan daging mereka telah hangus bagaikan terbakar. Apabila disentuh kulitnya mudah terkelupas. Sedangkan yang masih hidup keadaannya juga sangat menyedihkan. Mereka lemah lunglai menahan lapar, dahaga dan kehabisan tenaga. Dalam keadaan yang demikian itu, mereka masih diperintahkan untuk memindahkan teman-temannya yang telah gugur ke lantai peron setasiun. Ternyata yang gugur semuanya ada 46 orang dan yang sakit parah ada delapan orang (termasuk Kuswari). Mereka yang sakit parah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Karang Menjangan.³³ Tawanan yang masih hidup (44 orang) dibawa ke Kamp. BUBUTAN dan ditempatkan di dalam los tersendiri (los nomor 6). Selama satu setengah bulan mereka diasingkan. Mereka tidak boleh berkumpul dengan tawanan lainnya. Jika ada di antara mereka yang berani mendekat pada jarak 10 meter akan ditembak oleh penjaga penjara.³⁴ Demikianlah nasib para tawanan Gerbong Maut yang masih hidup. Sedangkan korban Gerbong Maut yang berjumlah 46 orang itu kemudian di kebumikan di salah satu makam di Sidoarjo (Jatim). Atas prakarsa suatu panitia, pada 10 Nopember 1960, kerangka 46 orang Pahlawan Korban Gerbong Maut tersebut dipindahkan ke makam Taman Makam Pahlawan Bondowoso.³⁵

Peristiwa kejam itu terjadi juga di Banyuwangi pada 20 Juli 1947 sejak pagi hari tentara Belanda sudah mengadakan usaha pendaratan di daerah pantai (Ketapang, Sukowidi, Meneng) dan di pelabuhan Banyuwangi. Tetapi percobaan pendaratan itu dapat digagalkan oleh kesatuan-kesatuan dari batalyon-batalyon MACAN PUTIH/Abdul Rifai, ALRI Pasukan 0032, ALRI Kesatuan 8, ALRI Pangkalan X dan beberapa kelasykaran yang tergabung dalam biro perjuangan yang bertugas di pertahanan Kota Banyuwangi.

Pengalaman 20 Juli 1947 itu memberi dorongan pada Be-

landa untuk mengadakan serangan secara besar-besaran pada kota Banyuwangi. Demikianlah pada 21 Juli 1947 mulai pagi hari kira-kira pukul 06.00 tentara Belanda dengan mengerahkan segala kekuatan menyerang Banyuwangi. Tiga belas kapal Belanda besar dan kecil yang berada di laut, tak henti-hentinya melepaskan tembakan. Kapal udara Belanda dari angkasan menembaki daratan Banyuwangi. Kesemuanya itu dengan tujuan satu yaitu untuk melindungi pendaratan tentara Belanda di pantai-pantai Ketapang, Sukowodi dan pelabuhan Banyuwangi. Pendaratan pasukan Belanda ini mendapat perlawanan yang sengit dari pihak Republik Indonesia.

Di Ketapang Mayor Abdul Rifai, komandan Batalyon MACAN PUTIH, melepaskan tembakan kanon 7,5. Tetapi kemudian dalam pertempuran itu Mayor Abdul Rifai mendapat luka parah sehingga pertahanan RI di Ketapang dapat dipatahkan pasukan Belanda. Siang harinya pasukan Belanda masuk kota Banyuwangi dan terus menyerang pelabuhan Banyuwangi. Pada waktu itu pelabuhan Banyuwangi dipertahankan oleh Pasukan 0032 ALRI (pasukan Polisi Tentara Laut dari Malang ex. siswa Latihan Polisi Tentara Kementerian Pertahanan Yogyakarta. Pasukan tersebut lebih terkenal dengan sebutan Pasukan 0032, yaitu nama semasa dalam latihan L.P.T.—K.P.) yang berkekuatan dua regu dengan perlengkapan sepucuk senjata anti pesawat terbang, empat buah senapan mesin (mitraliur), lima belas pucuk *karabijn* Jepang dan dipimpin oleh Letnan Suleman

Pada waktu itu kedudukan Pasukan 0032 terjepit, karena adanya serangan Belanda dari dua jurusan, yaitu serangan dari arah laut dan dari darat. Pada siang hari itu (kira-kira pukul 11.00) pasukan Belanda "Gajah Merah" telah sampai di Ketapang + 10 km sebelah utara Banyuwangi. Pada pukul 13.00 Belanda berhasil menyerang pertahanan kota dan mulai menyerang pelabuhan. Bendera Merah Putih yang berkibar di situ mereka tembaki sampai compang camping. Walaupun demikian Pasukan 0032 ALRI pantang menyerah dan mempertahankan pelabuhan dengan mati-matian. Tentara Belanda yang mampu-

nyai senjata dan alat perang yang serba lengkap itu kemudian menghujani pelabuhan dengan peluru-peluru yang berasal dari laut dan udara. Karena kekuatan senjatanya memang tidak seimbang dan Pasukan 0032 ALRI kehabisan peluru, maka pada sore harinya tentara Belanda "Gajah Merah" dapat menerobos pertahanan di pelabuhan dan menawan para anggota Pasukan 0032 ALRI yang masih hidup. Mereka semuanya berjumlah 23 orang. Setelah tangan mereka diikat (ke belakang) kemudian digiring ke selatan di tepi pantai Banyuwangi. Di situ mereka disuruh tidur terlentang berjejer dalam sebuah lubang pasir pantai. Sesudah itu mereka ditembak dan diberondong dengan senjata otomatis oleh kira-kira dua regu pasukan Belanda.

Belanda menyangka bahwa mereka sudah mati semua, karena itu mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut. Tetapi kenyataan telah membuktikan bahwa yang gugur 17 orang, sedangkan enam orang lainnya hanya luka parah dan tidak sadarkan diri. Kira-kira pukul 22.00, mereka mulai sadarkan diri. Dengan bertiarap ke enam orang prajurit RI yang masih hidup itu berusaha meloloskan diri keluar dari lubang maut menuju ke arah selatan. Setelah dua kilo meter merangkak, akhirnya pada pagi hari mereka sampai di desa Sobo dan kemudian mendapat pertolongan serta perawatan dari pak Salan. Menurut keterangan Pak Turmudi mereka berenam hingga sekarang masih hidup. Adapun nama-nama mereka yang masih hidup adalah:

- 1) Turmudi (sekarang menjadi pegawai PUSKESMAS/juru rawat Rumah Sakit di Banyuwangi);
- 2) Sukimun (dulu menjadi polisi pamongpraja di Kanigoro — Madiun).
- 3) Mohammad Sahal (sekarang anggota/Veteran di Sumberporong Lawang).
- 4) Karjono (sekarang purnawirawan yang bekerja di Translog-Kediri).

- 5) Sucipto dan 6). Sugandi (keduanya mungkin di Surabaya).³⁷

Sedangkan nama-nama para pahlawan pasukan 0032 ALRI yang gugur pada waktu itu, telah terukir pada Monumen Perahu di Taman Makam Pahlawan Pantai, yaitu Suleman, Aspangkat, Pujiraharjo, Wasito, Y.S. Basri, Akhmad Aji, Sirus, Suparman, Sujarwo, Mokh. Wahid, Abd. Manap, Marjanin, Makali, Sujono, Guntarum dan dua pahalawan lagi tak dikenal.³⁸

Sesudah Banyuwangi diduduki tentara Belanda, pasukan RI mengundurkan diri keluar kota untuk bergerilya. Markas komando gerilya pada waktu itu berada di Pasanggrihan dan sekitarnya yang dipimpin oleh Kapten Sudirman.³⁹

Dengan jatuhnya Banyuwangi dalam bulan Juli 1947 Belanda telah menguasai kota-kota pantai yang penting untuk perhubungan keluar lewat laut dan juga Belanda telah menguasai kota-kota *surplus* di daerah Jawa Timur. Tetapi rencana Belanda untuk menghancurkan tentara RI ternyata menemui kegagalan karena TRI telah mengubah strategi perangnya, yaitu dari perang *frontal* ke perang gerilya. Pihak Belanda kemudian melaksanakan *blokade* ekonomi dan politik isolasi terhadap daerah RI. Untuk menyempurnakan siasat tersebut, Belanda memandang perlu untuk menguasai pulau Madura. Sehingga dalam bulan Agustus 1947 daerah Madura mendapat serangan.

4.2.3 Pendudukan Madura

Belanda telah lama mengadakan blokade ekonomi terhadap Pulau Madura. Setiap ada kapal atau perahu yang menuju ke pantai Madura selalu dicegat dan isinya dirampas. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Madura selalu berusaha untuk mencari bantuan makanan dari Pulau Jawa dengan menerobos blokade tersebut. Demikianlan pada 5 Oktober 1946 Pemerintah Daerah Madura mengirimkan delegasi ke Jawa untuk mencari bahan makanan dan melaporkan kepada atasan tentang situasi di daerah Madura. Delegasi itu menaiki kapal Kangean menuju ke Probolinggo. Di tengah lautan, kapal Kangean ditembaki dari

udara oleh Belanda, sehingga kapal tersebut dengan penumpang-penumpangannya tenggelam. Yang dapat menyelamatkan diri hanya dua orang.⁴⁰

Blokade ekonomi oleh Belanda terhadap pulau Madura, rupanya dipandang belum cukup. Karena itu pada 4 Agustus 1947 tentara Belanda, yang terdiri dari pasukan-pasukan *Marine* (Angkatan Laut Belanda), regu-regu dari batalyon-batalyon Resimen Yuliana, Barisan Cakra dan Baret Merah (Ambon), mengadakan pendaratan di Madura melalui pantai selatan Madura dan di sebelah timur Kamal. Di Tanjungan satu peleton dari Batalyon Yuliana ditinggalkan untuk mengadakan pembersihan, sedangkan pasukan lainnya bergerak terus untuk menduduki kota-kota lainnya, seperti, Bangkalan, Beliga, Sampang dan Pamekasan. Pada 23 Agustus 1947 beberapa kota lagi telah diduduki Belanda. Kota-kota tersebut antara lain, Arosbaya, Omben dan Ketapang.

Pada waktu itu TRI yang berada di Madura adalah bagian dari Resimen 35 Surabaya (Resimen Jokotole) yang dipimpin oleh Let. Kol. Chandra Hasan. Dengan dibantu oleh kesatuan-kesatuan dari badan perjuangan lainnya seperti: BPRI, PRI, Sabilillah dan Hisbullah. Mereka bersama-sama dengan anak buah Chandra Hassan mempertahankan kota demi kota.⁴¹ Untuk mengadakan koordinasi dan sinkronisasi antara TRI dengan kesatuan-kesatuan dan badan-badan pejuang lainnya, maka Let. Kol. Chandra Hassan membentuk Komando Pertahanan dan Pertempuran (*COPP*) yang ia pimpin sendiri. Setelah terbentuk *COPP* tersebut serangan pembalasan dapat dimulai. Kota Pamekasan yang diduduki oleh Belanda dapat direbut kembali walaupun harus setengah hari. Laskar-rakyat yang bergabung dalam Barisan Sabilillah terkenal dengan serangan-serangan yang sangat berani.

Karena tentara Belanda makin lama makin diperkuat dengan bantuan dari Surabaya dan tekanan ekonomi rakyat makin berat, maka sejak bulan Nopember 1947 para pejuang RI terpaksa mengadakan gerakan mundur untuk konsolidasi dan

mempersatukan kembali. Usaha ini rupanya tidak banyak hasilnya, sehingga pada 25 Nopember 1947 komandan COPP telah mengeluarkan instruksi sebagai berikut:

- 1) Untuk sementara Resimen 35 COPP dibubarkan.
- 2) Semua anggota *slagorde* segera berusaha menyelamatkan diri menjelma menjadi rakyat biasa.
- 3) Yang dapat mencari jalan keuar supaya *hijrah* ke Jawa.
- 4) Selamatkan keluarga masing-masing.
- 5) Senjata dan alat-alat penting diamankan untuk kemungkinan dapat digunakan lagi.
- 6) Berjuang terus sesuai dengan keadaan dan kemampuan.

Setelah perintah itu dikeluarkan, masing-masing anggota COPP mencari jalan sendiri-sendiri. Sejumlah anggota ada yang meloloskan diri ke Jawa dan sejumlah lagi ada yang tertangkap kemudian ditawan Belanda, serta ada pula yang melanjutkan perjuangan dengan mengadakan gerakan di bawah tanah.⁴²

Sedangkan Let. Kol. Chandra Hassan sendiri dengan enam orang anak buah dapat lolos ke Probolinggo dengan perahu Segigir. (Perahu tersebut sekarang berada di Museum Brawijaya di Malang).⁴³ Setelah pertahanan RI di Madura dipatahkan, Madura dikuasai oleh tentara pendudukan Belanda di bawah Komandan Letnan Baron van de Line.⁴⁴

Dengan jatuhnya Madura, Belanda dapat lebih memperkuat blokade ekonomi dan isolasi terhadap RI. Kota-kota penting di daerah Karesidenan Surabaya, Malang, Besuki, dan Madura telah mereka kuasai. Meskipun demikian para pejuang RI di luar kota-kota pendudukan masih berkuasa. Dengan siasat perang gerilya mereka sering mengadakan serangan kedaerah pendudukan.

Ketika para pejuang di Jawa Timur sedang mempertahankan kemerdekaan mereka, Pemerintah Pusat berusaha berjuang melalui diplomasi. Diplomasi itu melahirkan Persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Akibat

langsung yang dirasakan oleh Daerah Jawa Timur dari pelaksanaan Persetujuan Renville tersebut antara lain:

- 1) Daerah Jawa Timur dibatasi dengan *Garis Status Quo*, yang memanjang dari daerah BUNGAH (Karesidenan Surabaya) hingga KALIGLIDIK (Karesidenan Malang). Dengan demikian ada daerah yang dikuasai RI (yang biasanya disebut Daerah Pedalaman Madiun, Kediri dan Bojonegoro) dan ada daerah yang dikuasai Belanda (yang biasanya disebut Daerah Pendudukan (Surabaya, Malang, Besuki dan Madura).
- 2) Akibat ditariknya pasukan-pasukan RI dari daerah-daerah kantong ke daerah RI, maka daerah RI di Jawa Timur penuh dengan pasukan TRI/TNI. Hal ini mempengaruhi soal perekonomian di daerah pedalaman.⁴⁵

Sedangkan bagi daerah RI pada umumnya, Persetujuan Renville menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat yang membawa akibat meletusnya Pemberontakan PKI Madiun (bulan September 1947);

Pemberontakan PKI di Madiun tersebut ternyata memperlemah posisi Pemerintah RI Pusat dan Pemerintah RI Daerah Propinsi Jawa Timur. Posisi Pemerintah RI Daerah Propinsi Jawa Timur makin diperlemah dengan munculnya Negara-Negara (Boneka) buatan Belanda di daerah pendudukan, seperti: Negara Jawa Timur (1-12-1948) dan Negara Madura (20-2-1948). Keadaan semacam itu oleh Belanda dianggap sebagai saat yang tepat untuk meruntuhkan RI. Jendral Spoor dan Wakil Tinggi Mahkota Dr. Beel, rupanya tidak dapat menahan selera untuk menyerbu ibu kota Negara RI di Yogyakarta. Karena itu pada 18 Desember 1948 tengah malam Dr. Beel melalui suatu pidato radio menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville, sebab pihak RI dianggapnya tidak mentaati isi Persetujuan tersebut. Pernyataan Dr. Beel itu kemudian diikuti dengan penyerbuan ibu kota Negara RI di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Dengan demikian maka Aksi Militer Belanda II telah dimulai.⁴⁶

4.3 Masa Aksi Militer Belanda II

Meskipun pihak Republik Indonesia dan pihak Belanda pada 5 Agustus 1947 sudah memerintahkan *cease-fire* (gencatan senjata) kepada pasukan masing-masing, namun baru pada 17 Januari 1948 tercapai persetujuan *cease-fire* dan persetujuan politik di kapal Renville. Karena itu persetujuan itu dinamakan *Persetujuan Renville*. Persetujuan ini hanya memuat pokok-pokok masalah saja yang harus dibicarakan lebih lanjut, sehingga dari bulan Januari sampai Desember 1948 diadakan perundingan untuk melaksanakannya namun tanpa hasil sedikitpun. Karena ternyata dalam perundingan itu Belanda bermaksud untuk melemahkan dan akhirnya memusnahkan Republik Indonesia.⁴⁷ Dalam hal ini pihak Belanda tidak menghendaki RI masuk ke dalam Negara Indonesia Serikat, sebelum melepaskan atau membubarkan dua atributnya, yaitu: angkatan perang dan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan pihak RI beranggapan bahwa pada saat Uni dan Federasi itu terbentuk RI akan masuk ke dalamnya tanpa harus membubarkan tentara dan hubungannya dengan luar negeri. Perbedaan pendirian tersebut ternyata tidak dapat dipertemukan, maka pada 11 September 1948 pihak Belanda menyatakan kepada Komisi Tiga Negara (*Committee of Good Office* = Panitia Jasa-jasa Baik) bahwa tidak ada gunanya lagi berunding dengan RI dibawah pengawasan KTN. Bahkan pada 19 Desember 1948 pukul 00.00 Belanda mulai melancarkan Aksi Militer II untuk menghancurkan Republik Indonesia.⁴⁸

Demikianlah pada 19 Desember 1948 ibukota RI Yogyakarta berhasil direbut dan diduduki tentara Belanda. Presiden dan wakil Presiden serta sejumlah pembesar negara ditawan tentara Belanda. Sedang Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral Sudirman mengundurkan diri ke luar ibukota Yogyakarta dan berkelana di daerah Jawa Timur dengan menggunakan nama samaran "Pak De" kemudian "Abdullah Lelono-putro" untuk memimpin perang gerilya secara total terhadap tentara Belanda. Dalam saat-saat yang gelap bagi perjuangan

bangsa, Sudirman merupakan obor yang memancarkan sinar ke sekelilingnya. Adapun *route-perjalanan* Jendral Sudirman selama memimpin perang gerilya dimulai dari rumah tempat kediaman beliau di Bintara Wetan (sekarang Museum Angkatan Darat Yogyakarta) pada 19 Desember 1948 lewat Kadipaten ke desa Kretek (Parang Tritis) – desa Panggang (20 - 12 - 1948) - desa Palihan - desa Playen (21 - 12 - 1948) - desa Semanu - Pracimantoro - Wonogiri (22 - 12 - 1948). Pada 23 - 12 - 1948 ke Ponorogo (Jawa Timur) - desa Bendo (24 km dari Tulungagung) - kota Kediri (24 - 12 - 1948) - desa Sukorame - desa Karangnongko, (di kaki gunung Wilis (25 - 12 - 1948) - desa Guwo Liman (di lereng G. Wilis 27 - 12 - 1948) - Bajulan (di Nganjuk 28 - 12 - 1948) - desa Salamjudek (6 - 1 - 1949) - desa Ngliman (lereng G. Wilis - 7 - 1 - 1949) - desa Jambu (daerah Madiun 9 - 1 - 1949) - desa Wayang (10 - 1 - 1949) - desa Banyutowo (11 - 1 - 1949) - desa Sedayu (18 - 1 - 1949) - desa Jambu (21 - 1 - 1949) - desa Warungbung (24 - 1 - 1949) - desa Ngindong (25 - 1 - 1949) - Tumpak Pelem (27 - 1 - 1949) - desa Longsor (5 km dari Trenggalek - 28 - 1 - 1949) - desa Suruh Wetan (29 - 1 - 1949) - desa Dongko (30 - 1 - 1949) - Badak (31 - 1 - 1949) desa Nogosari (Pacitan 15 - 2 - 1949) - desa Sobo (daerah Pakis, kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan: 18 - 2 - 1949) - desa Ngambarsari - (17 - 3 - 1949) - desa Sobo (daerah Pakis, kec. Nawangan kab. Pacitan: 1 - 4 - 1949). Desa Sobo inilah desa yang paling lama didiami Pak Dirman selama bergerilya, sampai kembali ke ibukota Yogyakarta.⁵⁰

Ketika para politisi sedang bersitegang mempertahankan pendirian mereka masing-masing, di daerah pendudukan Jawa Timur tentara Belanda juga memperkuat diri untuk melancarkan agresinya ke daerah pedalaman. Misalnya di kota Surabaya pada 1 Desember 1948 telah datang satu *Batalyon Koninklijke Leger* (Tentara Mahkota) dari negeri Belanda, bahkan pada 17 Desember 1948 datang pula dua batalyon "GAJAH ME-RAH" beserta 38 kanon besar/kecil dan 72 buah tank/panser. Juga diadakan latihan-latihan terjun (*dropping*) di Balongbendo-

Krian).⁵⁰ Di pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam bulan Desember 1948 juga mengadakan konsolidasi baik dalam lapangan militer dan sipil. Dengan keputusan Menteri Pertahanan RI. No. A/532/42 tanggal 25 Oktober 1948 Staf Pertahanan Jawa Timur dihaspuskan dan Komando Divisi I dibentuk. Adapun susunan Staf Divisi I/Jawa Timur itu sebagai berikut:

- 1) Panglima Divisi : Kolonel Sungkono.
- 2) Kepala Staf Divisi : Letnan Kolonel Dr. Suwondo.
- 3) Kelapa Staf I : Kapten Adianto.
- 4) Kepala Staf II : Mayor Kadin Prawirodirjo
- 5) Kepala Staf III : Kapten Subiyono
- 6) Kepala Staf IV : Kapten Sunyoto
- 7) Pa. Menengah Terr : Mayor Ciptoharsono.
- 8) Sekretaris : Kapten Usman Suryosubrojo.

Komando Divisi I Jawa Timur tersebut mempunyai brigade-brigade dan batalyon-batalyon yang susunannya sebagai berikut:

- 1) Brigade I (Bojonegoro) dipimpin oleh Latnan Kolonel, Sudirman dengan batalyon-batalyonnya :
 - a) Batalyon 15 : Mayor Ch. Sudono
 - b) Batalyon 16 : Mayor Basuki Rakhmad
 - c) Batalyon 17 : Mayor Abdullah
- 2) Brigade II (Kediri) dipimpin oleh Letnan Kolonel Surakhmad dengan batalyon:
 - a) Batalyon 20 : Mayor Majayin
 - b) Batalyon 21 : Mayor Sobiran.
 - c) Batalyon 22 : Mayor Banurejo.
 - d) Batalyon 131 : Mayor Sudarsono
 - e) Batalyon 38 : Mayor Sabarudin.
 - f) Batalyon 41 : Mayor Sunariyadi
 - g) Batalyon 35 : Mayor Bambang Yuwono
 - h) Batalyon 119 : Mayor Sunandar.

- 3) Brigade III (Besuki) : Mokh. Sruji dengan batalyon-batalyonnya :
 - a) Batalyon 25 : Mayor Syafiuddin.
 - b) Batalyon 26 : Mayor E.Y. Magenda.
 - c) Batalyon 27 : Kapten Sudarmin.
 - d) Batalyon Depot : Mayor Darsan Iru.
 - Kompi Bintoro : Kapten Bintoro.
- 4) Brigade IB (Malang) : Letnan Kolonel Dr. Sujono dengan batalyon-batalyonnya:
 - a) Batalyon 30 : Mayor Hamid Rusdi.
 - b) Batalyon 31 : Mayor Suprpto.
 - c) Batalyon 32 : Mayor Abdul Manan.
 - d) Batalyon 33 : Mayor Samsul Islam.
 - e) Batalyon Depot : Kapten Nalun Haman.
- 5) Brigade "AS" (Madiun) : Mayor Suwido dengan batalyon-batalyonnya :
 - a) Batalyon 36 : Mayor Sumarsono.
 - b) Batalyon 37 : Mayor Budiono.
 - c) Batalyon 40 : Mayor Suprpto Sukowati.
- 6) Kesatuan Joko Tole, dipimpin oleh Mayor Abu Jamal.
- 7) Pasukan Pengawal Komando Divisi I:
 - a) Kompi 45 : Kapten Sampurno.
 - b) Kompi 46 : Letnan Satu Matosin.

Selain itu waktu itu Jawa Timur juga terbagi atas 7 Sub Territorium Militer (STM), yaitu:

- 1) STM Bojonegoro : Letnan Kolonel Umar Jo'i.
- 2) STM Madiun : Letnan Kolonel Mariyadi.
- 3) STM Kediri : Letnan Kolonel Surakhmad (merangkap batalyon Territorial):
 - Batalyon HM : Mayor Haji Makhfud.
 - Batalyon Zainal : Mayor Zainal Fanani.
 - Batalyon Seno : Mayor Seno.

- 4) STM Surabaya : Letnan Kolonel Kretarto dengan batalyon.
 Batalyon 18 : Mayor Jarot Subiyantoro.
 Batalyon 1 : Mayor Sucipto.
 Batalyon 108 : Mayor Darmosugondo.
 Batalyon 110 : Mayor Isa Edris.
 Batalyon 42 : Mayor Mansyur Solikhin.
- 5) STM Malang : Letnan Kolonel Dr. Sujono (dirangkap dengan Kompi-Kompi Territorial).
- 6) STM Besuki : Mayor Surojo.
- 7) STM Madura : Persiapan.

Demikianlah pada 17 Desember 1948 pukul 08.00 dengan diikuti oleh semua pasukan yang berada di Jawa Timur (setiap batalyon mengirimkan satu seksi) diresmikanlah berdirinya TNI Divisi I di lapangan Kowak Kediri yang dihadiri pembesar-pembesar militer dan sipil antara lain hadir pula Panglima Tentara dan Territorial Jawa, Kolonel AH. Nasution. Upacara ini ditutup dengan penuh khidmat dan kesanggupan Divisi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan memperkosakan kemerdekaan tanah air dan bangsa.⁵¹

Penyerbuan Belanda terhadap ibukota RI Yogyakarta, bagi para pejuang RI di Jawa Timur merupakan komando untuk mengangkat senjata kembali. Pejuang-pejuang *Hijrah* RI dengan serentak bergerak kembali menuju ke masing-masing daerah kantong mereka. Di sana para pemuda mulai mengadakan aksi gerilya bersama dengan pasukan RI yang baru tiba dari tempat *hijrah*. Para pemuda-pemudi kota yang berjiwa republikanpun tidak mau ketinggalan. Mereka ikut berjuang dan bergerilya dengan cara mereka masing-masing. Ada yang segera keluar kota untuk bergabung dengan kaum gerilyawan, ada pula yang tetap di dalam kota sebagai pasukan pengintai atau berusaha menyelundupkan obat-obatan dan lain-lain bahan yang dibutuhkan

oleh para gerilyawan.⁵² Di beberapa daerah telah dibentuk *Barisan-Barisan Maling dan Barisan-Barisan Kere* (pengemis) Mereka itu menyerbu ke kota-kota (seperti Surabaya), sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap tentara Belanda.⁵³ Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Aksi Militernya II tentara Belanda tidak hanya berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia dan kesatuan-kesatuan militer RI, tetapi juga berhadapan dengan rakyat (daerah Jawa Timur) yang bersedia berkorban jiwa raga untuk keselamatan tanah air dan bangsa. Perang total yang bersandarkan pada kekuatan rakyat inilah yang memberikan ketabahan dan keuletan siasat untuk menghadapi tentara Belanda yang mempunyai persenjataan dan alat-alat perang yang serba moderen itu. Maka dari itu gerakan-gerakan militer Belanda di daerah Jawa Timur mendapat sambutan yang hebat dari pasukan-pasukan pejuang RI.

Untuk menghadapi serangan tentara Belanda di Jawa Timur itu maka pada 19 Desember 1948 pukul 20.00 melalui RRI Kediri Panglima TNI Divisi I/Jawa Timur memerintahkan kepada pasukannya untuk melaksanakan Perintah Siasat No. 1/GMUDT/48 tertanggal 20 Nopember 1948. Adapun persiapan fase pertama Komando Divisi I/Jawa Timur itu sebagai berikut:

1) Membagi Pimpinan Komando Divisi I dalam tiga komando:

- | | | |
|-------------|---|--|
| Komando I | : | terdiri atas Panglima Divisi, Sekretaris Divisi dan Staf I serta memimpin langsung Brigade I, Brigade II dan Brigade "AS" |
| Komando II | : | terdiri dari Kepala Staf Divisi, Staf III, Staf IV dan PMT serta langsung memimpin Brigade IV. |
| Komando III | : | terdiri dari Kepala Staf II dan beberapa anggota Staf I serta memimpin langsung <i>wingate</i> Komando Divisi I HAYAM WURUK dan Kesatuan Jokotole. |

- 2) Senjata bantuan dan jawatan-jawatan memencar dalam jarak perjalanan *straat* 6 jam dengan Sko. I.
- 3) Staf Sipil Gubernur Militer/I juga memencar dalam jarak yang sama.
- 4) Brigade I dengan batalyon-batalyonnya sebagai sayap kiri menghadapi gerakan musuh yang datang dari jurusan Surabaya dan Jawa Tengah. Selanjutnya untuk *Werhkreise* di Karesidenan Bojonegoro.
- 5) Brigade II dengan kesatuan-kesatuannya menghadapi *front* Surabaya dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari Malang dan pantai selatan. Selanjutnya untuk *Werhkreise* di Karesidenan Kediri.
- 6) Brigade III dengan kesatuan-kesatuannya *wingate* untuk menghadapi *front* Jember dengan memperhatikan jurusan Lumajang – Klakah – Jember – Banyuwangi.
- 7) Brigade IV dengan kesatuan-kesatuannya untuk menghadapi *front* Malang dengan memperhatikan jurusan Malang – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Turen – Lumajang.
- 8) Brigadi "AS" dengan batalyon-batalyon untuk menghadapi *front* Surabaya dan selanjutnya *Werhkreise* di sebelah kiri kali Brantas guna melindungi jurusan Caruban – Klino – Bojonegoro.
- 9) Komando Brawijaya/STM Surabaya beserta batalyon-batalyonnya menghadapi *front* Surabaya.
- 10) Komando Hayam Wuruk dengan kesatuan-kesatuannya menghadapi *front* Surabaya dari sebelah kanan kali Brantas dengan menitik beratkan tekanan atas Brantas – Delta dengan Kota Surabaya.
- 11) Kesatuan Jokotole menghadapi *front* Surabaya sebagai batu loncatan ke arah *front* Madura.
- 12) Brigade XVI dengan dua batalyonnya di Malang Barat di daerah Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Arjuna sampai menghubungi Kdo Hayam Wuruk.⁵⁴

Pengaturan siasat tersebut di atas untuk menghadapi serangan pihak Belanda di Jawa Timur yang menurut laporan terkahir (bulan Oktober 1948) mempunyai kekuatan sebagai berikut:

- 1) "A" Divisi di bawah pimpinan Jen. May. *WJK. Baay*, dengan kekuatan lebih kurang 16.000 orang dan berkedudukan di Surabaya.
- 2) "X" Brigade, di bawah pimpinan Kol. *Jr. Kraan* dengan kekuatan lebih kurang 4.000 orang dan berkedudukan di Malang. Organisasi "X" Brigade terdiri atas beberapa Kesatuan dengan *dislokasi* sebagai berikut:

- a) II. 5 R.I. : Mojokerto Kmd. Letkol. Rademakers
- b) II. 10 R.I. : Pasuruan Kmd. Letkol Climis
- c) I 2 R.I. : Malang (dulu Gresik) Kmd. Let. Kol. B.H. Ernst
- d) III. 5 R.I. : Batu – Punten
- e) I 5 R.I. : Lawang – Singosari – Blimbing – Karangploso Kmd. May. Grending.

II 10 R.I. :)

II. 5 R.I. :) O.V.W. = Oorlogs Vrijwilligers

I. 2 R.I. :)

- 3) *Ive Garde Brigade* : dengan dislokasi sebagai berikut:

- a) Bagian Infanteri *Jagers* di Madura.
- b) Bagian Infanteri *Grenadiers* di Gresik – Cerme dengan Kmd. Letkol. *Wierda*.
- c) Bagian Infanteri *Prinses Irene* di Gedangan – Perning – Jetis. Brangkal dengan Kmd. Letkol. *Herkema*. Berita yang terakhir menerangkan bahwa dengan kedatangan tenaga tenaga baru dari Negeri Belanda Batalyon *Prinses Irene* ini telah menjelma menjadi *Regiment*.

- 4) KNIL (= *Keninklijke Nederlandsch Indische Leger*) dan Staf KL. (*Koninklijke Leger*) dengan kekuatan lebih kurang

1.000 orang dan berpusat di Surabaya untuk menjalankan tugas antara lain:

- a) NEFIS = *Nederlands Forces Intelligence Service.*
- b) MID = *Militaire Inlichtingen Dienst.*
- c) MVD = *Militaire Veiligheids Dienst.*
- 5) *Bewakings Batalyon Surabaya (BBS)* dengan kekuatan lebih kurang 800 orang Batalyon semacam ini mungkin setelah penarikan Tentara Indonesia (*Hijrah*) telah tersusun pula di daerah Madura, Malang dan Besuki. Terdiri dari penduduk.
- 6) *Marbrig (= Marine Brigade)* di bawah Komandan Kol. J.H. De Bruin dengan kekuatan lebih kurang 4.500 orang, berpusat di Surabaya.
- 7) *MLD Squadron (= Marine Luchthvaarts Dienst)* berpusat di Morokrembangan Surabaya dengan kekuatan tenaga sebagai berikut:
 - a) 10 buah *Fire fly*
 - b) 5 buah *dakota.*
 - c) 5 buah *Mosquito.*
 - d) 2 buah *pippercub* (guna pengintaian).
 - e) 10 buah *caclalina*

Kesemuanya itu ditempatkan di Surabaya dan Malang.

- 8) *Lain-lain dislokasi:*
 - a) Jember — XXIII infanteri
 - b) Bondowoso — 1 batalyon
 - c) Lumajang — 1 batalyon
 - d) Probolinggo — 1 batalyon
 - e) Bangkalan — Cie Marbrig — cakra : Kapten Moch. Moechni.

Dengan kekuatan seperti tersebut di atas pada 19 Desember 1948 tentara Belanda di Jawa Timur melancarkan serangannya ke daerah-daerah pedalaman yang masih dikuasai Angkatan

Perang Republik Indonesia dengan tujuan:

- 1) Politik : merebut dan menguasai daerah Jawa Timur seluruhnya untuk selanjutnya mengadakan tekanan (*Pressie*) terhadap Pemerintah RI Pusat (Yogyakarta) dari jurusan timur.
- 2) Ekonomi : merebut sumber ekonomi (Cepu – Mendalan) dan daerah ekonomi RI (Kediri – Solo) dalam keadaan utuh.^{5 5}

Demikianlah pada 21 Desember 1948 dengan mengerahkan kekuatan pasukan infanteri dan angkatan udaranya tentara Belanda mengadakan serangan umum terhadap TNI yang mempertahankan Pusat Pembangkit Tenaga Listrik di Mendalan (termasuk Kecamatan Kasembon Batu, Malang; batas Karesidenan Kediri dan Malang). Tenaga listrik Mendalan ini merupakan satu-satunya sumber tenaga listrik yang terbesar di seluruh daerah Jawa Timur dan memberikan aliran listrik ke seluruh Karesidenan Surabaya, Malang serta Kediri. Ketika tentara Inggris pada tahun 1945 menduduki Kota Surabaya, aliran listrik yang menuju ke kota itu diputuskan oleh pihak RI. Sejak itu sumber tenaga listrik ini dikemudikan oleh para ahli bangsa Indonesia. Ketika Belanda menduduki daerah Karesidenan Surabaya dan Malang (1946 -- 1947) aliran listrik yang menuju ke daerah-daerah pendudukan tersebut diputus. Maka dari itu ketika Aksi Militer Belanda II dimulai. Mendalan merupakan daerah *vital* yang harus mereka duduki. Sebaliknya pihak RI yang menyadari bahwa Mendalan adalah sebuah tempat yang vital dan strategis, telah diperkuat pertahanannya dan telah mempersiapkan alat-alat untuk membumihanguskan instalasi Pembangkit Tenaga Listrik tersebut. Pimpinan daerah Mendalan diserahkan kepada Letnan Satu (LTS) Sumardi (komandan kompi III dari Batalyon Sunandar).

Pada saat itu Belanda secara frontal menyerang TNI, sedangkan pasukan TNI pun mempertahankan dengan gagah berani. Tidak ketinggalan ratusan pemuda desa ikut bertempur di ba-

wah pimpinan kepala kampungnya, yang bernama Wongso Astro. Pertempuran berlangsung dengan seru, terutama penembakan dan pemboman dari pesawat terbang Belanda yang dapat mematahkan pertahanan pasukan-pasukan RI. Setelah desa Mendalan tidak mungkin dipertahankan lagi Lts. Sumardi memerintahkan agar instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Mendalan dibumihangus. Demikianlah pada pukul 11.00 (21 - 12 - 1948) perintah bumihangus dilaksanakan dan sesudah itu pasukan RI meninggalkan Mendalan untuk kembali lagi pada tanggal 25 Desember 1948.

Pada tanggal 25 Desember 1948 pukul 24.00 Lts. Sumardi memimpin serangan umum terhadap tentara Belanda di Mendalan. Pukul 03.00 Lts. Sumardi yang diikuti oleh Seksi Sudiarto telah memasuki daerah Pabrik Mendalan. Sedangkan pasukan lainnya tidak dapat memasuki tempat tersebut. Akibatnya terjadilah perang seorang lawan seorang yang mengakibatkan Lts. Sudiarto dan Wongso Arto gugur. Korban pihak pejuang RI 30 orang. Sedangkan Lts. Sumardi dengan beberapa prajuritnya dapat meloloskan diri. Rupanya kekalahan dalam bulan Desember 1948 selalu menjadi kenangan bagi Lts. Sumardi, sehingga dengan pasukan yang lebih kuat pada bulan Mei 1949 ia kembali ke Mendalan untuk menebus kekalahannya.

Demikianlah pada bulan Mei 1949 atas inisiatif Letnan Sumardi yang disetujui oleh Mayor Prawirodiharjo, Mendalan diserang kembali. Serangan umum tersebut dilakukan pada siang hari dan dipimpin oleh Mayor Kadim Prawirodiharjo. Pada waktu itu Kompi Lts. Sumardi telah berhasil memasuki gudang perbekalan Belanda di Mendalan, bahkan mereka telah dapat merebut isinya. Karena tekanan yang amat berat itu, sebenarnya pihak Belanda sudah panik dan di antara mereka banyak yang menjadi korban. Sebagian dari mereka tetap melawan dari dalam kubu-kubu mereka. Sesungguhnya pada waktu itu merupakan saat yang baik sekali untuk menyerbu kubu-kubu Belanda tersebut. Hanya sayangnya bantuan dari pasukan-pasukan lainnya tidak segera datang, karena kesulitan perhubungan. Akhir-

nya pada pukul 17.30 kapal terbang Belanda datang untuk membombardir dan memuntahkan peluru mitra-liurnya kepada pasukan-pasukan pejuang RI. Karena tekanan serangan angkatan udara Belanda sangat berat, maka para pasukan pejuang RI terpaksa mengundurkan diri dari Mendalan.⁵⁶

Dalam Aksi Militer Belanda II ini ternyata sasaran serangannya tidak hanya tertuju pada daerah-daerah RI yang vital dalam bidang ekonomi tetapi juga tertuju pada tempat-tempat strategis dalam bidang politik, maka dari itu tidaklah mengherankan apabila serangan Belanda itu diarahkan ke kota Blitar, yang pada waktu itu menjadi tempat kegiatan Pemerintah RI Daerah Propinsi Jawa Timur. Demikianlah pada 22 Desember 1948 pukul 06.00 pagi setelah melalui Kesamben, Binangun dan Lodoyo tentara Belanda menyerang Kota Blitar. Pada waktu itu daerah Blitar dipertahankan oleh Batalyon 20 Brigade II Divisi I yang kemudian terkenal dengan nama Batalyon (Bn). Branjangan (di bawah Komandan Mayor Mujayin), Komando Distrik Militer IV (KDM IV) Blitar (di bawah Komandan Mayor Frieslan Suryoatmojo) dan Staf Gabungan Angkatan Perang (SGAP) yang dipimpin oleh Komandan Letkol. Seruji (dari Divisi Damarwulan). Adapun kesatuan tempur yang tergabung dalam SGAP itu antara lain: Bn. Hijrah Damarwulan, Bn. Hijrah Warraw, Bn. ALRI Abdullah, Bn. TRIP (Brigade 17: di bawah Komandan Mayor Isman), Bn. Hisbullah dan Kesatuan KDM. Namun demikian karena kekuatan tentara Belanda sangat besar maka Kota Blitar terpaksa ditinggalkan oleh pasukan RI beserta *aparatur* pemerintahannya, setelah melakukan bumihangus.⁵⁷

Dalam rangka mempertahankan daerah Blitar ternyata pasukan TRIP mempunyai peranan yang tidak kecil. Pasukan TRIP Jawa Timur di bawah pimpinan Mayor Mas Isman setelah pertempuran di Jalan Salak Malang (sekarang Jalan Pahlawan TRIP) pada 31 Juli 1947, lalu mengundurkan diri ke daerah Blitar (di desa Gabru, desa Wlingi dan kota Blitar) dan ada yang berada di Kota Madiun. Pada waktu itu markas pusat TRIP Jawa Timur berada di Gabru. Setelah kota Blitar diduduki pasukan Belanda, markas gerilya TRIP Jawa Timur pindah ke

Bedengan di atas Bagru di Gunung Kawi. Dari situ pasukan TRIP Jawa Timur bersama-sama dengan pasukan-pasukan pejuang RI lainnya dan dengan bantuan rakyat setempat melakukan tekanan terhadap pasukan Belanda yang berada di Kota Blitar dan Wlingi dengan jalan melancarkan serangan umum. Tekanan terhadap pasukan Belanda di Blitar makin berat, setelah pasukan TRIP Jawa Timur bersama-sama dengan Batalyon Artilleri C. Rai I di bawah pimpinan Lts. Satrio Sasono berhasil membawa kanon "Banteng Blorok" atau "Satriyo - Keriting" dari Trenggalek lewat Blitar Selatan dengan menyeberangi Kali Brantas ke Blitar Utara, yang terkenal dengan peristiwa "Penyeberangan". Dengan adanya kanon "Banteng Blorok" yang berkaliber 75 mm itu maka pihak RI dapat melansir bombardemen dan *kanonade* ke kota Blitar dan Wlingi, sehingga menggetarkan hati prajurit-prajurit Belanda yang pada umumnya masih berusia muda-muda itu. Dengan demikian pihak Belanda terpaksa hanya mampu menguasai Kota Blitar dan Wlingi saja dan tak dapat melebarkan sayapnya.⁵⁸

Setelah Belanda dapat menduduki Mendalan dan Blitar, maka serangan selanjutnya ditujukan ke Kota Kediri, yang pada waktu itu menjadi markas Pusat Komando Divisi I/Jawa Timur. Demikianlah pada 25 Desember 1948, dengan kekuatan lebih kurang dua batalyon bersenjata lengkap tentara Belanda secara mendadak menyerang Kota Kediri. Karena pada waktu itu pasukan TNI di Kota Kediri hanya ada satu kompi, maka Kota Kediri terpaksa ditinggalkan dan tidak sempat melaksanakan "bumihangus" terhadap kota serta pabrik Ngadirejo. Namun demikian pengrusakan jalan-jalan dan pemasangan rintangan-rintangan segera diperhebat dengan mengerahkan tenaga rakyat yang dilindungi oleh pasukan TNI. Dengan demikian, maka gerakan tentara Belanda untuk menduduki kota-kota lainnya sangat terlambat, sehingga baru dalam pertengahan bulan Januari 1949 mereka dapat menduduki kota Tulungagung, Nganjuk, Pare dan Kertosono. Tiap menduduki suatu kota Belanda selalu

berusaha membuka jalan untuk mengadakan perhubungan dengan kota-kota lainnya, tetapi pihak RI selalu berusaha menutup dan merintangi perhubungan mereka. Maka terjadilah di mana-mana serangan penghadangan terhadap konvoi tentara Belanda.

Pihak TNI yang bertugas di daerah Kediri waktu itu ialah pasukan Batalyon 22 (Bn. Sriti) Brigade II Divisi I di bawah pimpinan Surakhman dan yang bertugas di daerah Kediri dan sekitarnya adalah Batalyon 23 (Bn. Sikatan) di bawah pimpinan Sabirin. Apabila mereka pada mulanya menggunakan siasat mempertahankan (*deffensief*), maka sejak bulan Maret 1949 mereka berganti siasat menyerang (*offensief*). Akibat pergantian siasat ini maka para prajurit bertambah semangat tempurnya, sehingga makin gencarlah penyerangan TNI kepada kedudukan-kedudukan musuh (Belanda) yang tempatnya terbatas di kota-kota saja. Dengan demikian kedudukan Belanda makin terjepit, sehingga seakan-akan mereka sukar untuk mengadakan hubungan dari daerah satu dengan daerah yang lain, sedangkan kedudukan pasukan RI makin teratur dan makin kuat.⁵⁹

Apabila Kota Kediri baru jatuh ke tangan Belanda pada 25 Desember 1948, maka kota Madiun yang pada waktu itu dipertahankan oleh pasukan TNI Batalyon 40/Brigade "AS" (Mayor Suprpto Sukowati) telah dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948. Demikianlah pada tanggal tersebut pukul 16.00 kota Madiun diserang oleh tentara Belanda dan setelah diadakan pembumihangusan pada obyek-obyek vital serta jembatan-jembatan, pasukan RI meninggalkan kota tersebut. Namun demikian pada 29 Desember 1948 pasukan RI mengadakan serangan balasan atas kota-kota Magetan, Ngawi dan pada 3 Januari 1949 pukul 06.00 kota Madiun mendapat serangan juga.

Untuk mengatasi kekuatan nyata (*rieel*) satu Batalyon, Mayor Suprpto Sukowati membentuk Pasukan Gerilya SS. (Suprpto Sukowati) di tiap-tiap karesidenan mendarat republik. Sedangkan Batalyon 40 mengadakan gerakan mobil di seluruh Kreesidenan Madiun. Batalyon ini bertugas memberikan

serangan pancingan atas suatu daerah yang kemudian mengadakan tekanan atas daerah lainnya serta memberikan semangat juang (*fighting-spirit*). Keberhasilan batalyon ini membuat lawan yang lebih besar kekuatannya merasa segan. Tidak sedikit bantuan rakyat kepada kesatuan-kesatuan di daerah ini, sehingga dalam waktu yang pendek praktis pertahanan rakyat makin kuat. Berkat perlawanan TNI dan rakyat yang pantang menyerah. Belanda baru berhasil dapat menduduki kota-kota seluruh Karesidenan pada pertengahan Pebruari 1949. Selanjutnya pejuang-pejuang RI melakukan siasat *penyanggongan* (pengadangan) yang berhasil dengan memuaskan, seperti pengadangan dari TGP di Saradan. Akibatnya kedudukan Belanda di kota-kota tidak pernah merasa tenang karena gangguan dari pihak RI yang terus-menerus.⁶⁰

Pada 19 Desember 1948 pukul 16.30 Komandan (Komando Onder Distrik Militer/Gedelegeerde Tambakboyoy) Letnan II B.K. Nadi menerima laporan bahwa di laut sebelah utara Glondong (± 10 Km) ada tiga kapal besar dan tujuh kapal kecil, yang perlahan-lahan bergerak menuju ke pantai Glondong (± 20 Km sebelah barat Tuban). Setelah diadakan peninjauan ternyata berita tersebut benar.⁶¹ Itu suatu pertanda bahwa penyerangan Belanda terhadap Karesidenan Bojonegoro yang berada di bawah Komando Brigade I/Ronggolawe Let. Kol. Sudirman akan dimulai.

Pada waktu itu situasi Brigade I/Ronggolawe sangat tidak menguntungkan karena adanya keputusan dari MBKD (Markas Besar Komando Djawa) yang menetapkan bahwa Batalyon Sukowati dan Batalyon 15/CH Sudono dimasukkan di bawah Komando GM II (Gubernur Militer II Jawa Tengah) yang harus beroperasi di daerah Pati. Dengan demikian, secara teoritis, Brigade I/Ronggolawe hanya mempunyai kekuatan dua batalyon untuk mempertahankan daerah Bojonegoro. Menurut rencana Batalyon 17/Abdullah mempertahankan daerah utara Bojonegoro (Tuban) sedangkan Batalyon 16/Basuki Rakhmad mempertahankan daerah selatan (termasuk Kota Bojonegoro).

Namun demikian pada waktu itu Batalyon 17/Abdullah masih bertugas di daerah Rembang, sehingga secara praktis daerah Bojonegoro hanya dipertahankan oleh Batalyon 16/Basuki Rakhmad saja. Sehingga ketika pasukan Belanda masuk ke Kota Tuban tidak ada perlawanan dari pihak RI.

Pada pukul 20.00 19 Desember 1948, tentara Belanda mulai mendarat di desa Glondong/Tambakboyo. Malam itu sebuah convoi pasukan Belanda yang terdiri dari 44 kendaraan (yang berupa truck, jeep, sedan dan panser) telah bergerak dari desa Glondong menuju ke arah barat, dengan tujuan menduduki pabrik minyak Banyuwirip dan Cepu.⁶² Namun demikian ketika pasukan Belanda tiba di Cepu, mereka menjumpai reruntuhan pabrik minyak, karena telah dibumihanguskan oleh kesatuan Batalyon 15/Sudono, Batalyon ini kemudian bergerak ke barat daerah Blora.⁶³ Dua batalyon Marinir Belanda baru didaratkan pada 20 Desember 1948 pukul 06.00. Satu Convoi kendaraan bergerak ke selatan menuju Bojonegoro dan satu batalyon lainnya bergerak ke barat menuju Tuban. Setelah Tuban dapat mereka duduki, sebagian dari pasukan Belanda dengan cepat bergerak ke Babat, dengan tujuan untuk menguasai jembatan *Cincin* (Babat) yang pada waktu itu tidak sempat dibumihanguskan oleh pihak RI.

Setelah tiga batalyon Belanda tersebut bergerak, Belanda masih terus mendaratkan pasukan-pasukan cakra dan perlengkapan-perengkapan yang berupa tank, kendaraan dan lain sebagainya dan baru pada hari yang kesepuluh mereka meninggalkan desa Glondong dan Tambakboyo.⁶⁴ Sedangkan Tentara Belanda yang terdiri *Corps Marinir Brigade Baret Merah* dengan jumlah satu batalyon di bawah komando Kolonel *Rykers*, yang bergerak ke selatan tertahan di desa Glondong (Kecamatan Bojonegoro) oleh pasukan-pasukan pejuang RI di bawah komando Lts. Suyitno.⁶⁵

Pada waktu itu Markas Komando Brigade I/Letkol Sudirman dan Markas Komando Batalyon 16/Mayor Basuki Rakhmad berada di Bojonegoro. Tetapi pasukan Batalyon 16 yang

berada di dalam kota hanyalah Kompi IV/Lts. Bambang Sumantri, karena Kompi II/Lts. Fakhur Ismail bertugas di daerah Bojonegoro selatan, Kompi I/Lts. Atrum di daerah Bojonegoro Timur dan Kompi III/Lts. Teko berada di seberang utara Bengawan Solo untuk memperlambat jalannya pasukan Belanda yang akan masuk Bojonegoro. Namun demikian pertahanan Bojonegoro dapat diperkuat dengan adanya satu seksi/pembantu Letnan Suwelo dari Kompi Sukardi Bn. 15/Sudono, satu regu Korps Polisi Militer dari Karesidenan Basuki yang dipimpin oleh Lts. SPM. Mulyadi, dua regu senjata bantuan Kompi IV Bn. 16, satu seksi campuran dari TRIP dan Mobil Brigade Polisi. Kesemuanya itu berada di bawah Komando Lts. Suyitno, perwira operasi batalyon 16 yang bertanggung jawab atas pertahanan Bojonegoro.

Karena kekuatan ternyata tidak seimbang, maka taktik bumi hangus terhadap obyek-obyek vital, termasuk perahu-perahu tambangan di desa Glendeng dan di desa Banjarsari serta Jembatan Kaliketek Jurusan Cepu, dilaksanakan oleh Pasukan *Genie Pionir* bersama-sama dengan TGP (Tentara Genie Pelajar). Sehingga ketika pasukan Belanda berhasil menduduki Bojonegoro mereka menjumpai timbunan puing-puing.⁶⁶

Demikian pada 15 Januari 1949 satuan *Corps Marinir Brigade* Baret Merah Belanda dengan dibayang-bayangi oleh 7 buah pesawat udaranya bergerak dari desa Glendeng ke barat menuju Bojonegoro. Pada pukul 14.00 pasukan Belanda tersebut telah tiba di dukuh Ngangkatan desa Mulyoagung, yang mendapat perlawanan gigih dari pasukan pejuang RI di bawah pimpinan Lts. Suyitno. Pada akhir pertempuran itu Lts. Suyitno gugur beserta beberapa anak buahnya. Sedangkan tentara Belanda untuk kesekian kalinya kembali ke posnya di dukuh Glendeng. Tetapi kemudian pada 16 Januari 1949 sekitar pukul 13.00 tentara Belanda dapat memasuki kota Bojonegoro tanpa perlawanan sebab kesatuan-kesatuan TNI dan kesatuan-kesatuan lainnya telah memindahkan posisinya di selatan kota Bojonegoro, untuk melanjutkan perlawanan dengan perang gerilya.

Dalam hubungan ini sebagian Staf Komando Brigade I dan Staf Komando Batalyon 16 tetap tinggal di garis depan dan menempatkan markas pertempurannya di desa Mojoranu dan Bendo (Kecamatan Kapas). Dari situ komando pertempuran dilancarkan, sehingga selama dua bulan pasukan Belanda tidak dapat bergerak dari kota. Baru pada 19 Pebruari 1949 pihak Belanda mengadakan operasi militer ke luar kota yang berlangsung sampai 23 Pebruari 1949 dan berhasil membuat pos tetap di komplek pemandian Dander.⁶⁷

Sejak peristiwa operasi militer Belanda itu para pejuang RI mengubah siasatnya dari perlawanan *frontal* menjadi perlawanan *total* dengan taktik perang gerilya dan gerakan main kucing-kucingan. Sedangkan Komando Brigade I/Ronggolawe, Komando Batalyon 16 dan Komando Markas KOMPI mulai memusatkan diri di desa Temayang, dukuh Kalibutuh dan desa Kedungsari. Sejak itu desa Temayang, (di ujung sebelah selatan kota Bojonegoro, dan sekitarnya menjadi pusat kegiatan gerilya RI. Selain satuan-satuan staf operasi dan pasukan tempur, di situ juga terdapat satuan-satuan *territorium* yang pada waktu itu disebut komando daerah militer (KDM) di bawah pimpinan Kapten Mufti Ismail (di desa Kedung Sumber), satuan-satuan logistik yang disebut Staf *Territorium* Militer (STM) dipimpin oleh Let. Kol. Umar Ja'i (di desa Deling), Pemerintahan sipil yang dikemudikan oleh Residen Bojonegoro Mr. Tandiyonomanu (di desa Deling) dan Bupati Bojonegoro Surowiyono (di desa Jari Kecamatan Bubulan), serta terdapat pula Organisasi Pertahanan Rakyat (PERA) yang di bawah komando langsung Bupati Bojonegoro Surowiyono.⁶⁸

Di pihak Belanda setelah berhasil membuat pos di komplek pemandian Dander, membuka kembali jalan yang menghubungkan antara Bojonegoro dan Kecamatan Dander. Begitu pula kereta api mulai berjalan sebagaimana biasa. Kantor-kantor pemerintahan sipil yang menurut istilah pada waktu itu Pemerintahan Federal juga mulai dibuka. Untuk menarik para pegawai RI agar mau bekerja sama dengan mereka maka gaji peg-

wai Federal diperbesar. Dengan melalui kaki tangannya pihak Belanda berusaha terus melancarkan *infiltrasi* semacam perang urat syaraf dengan melalui masa media atau ancaman-ancaman (pembunuhan atau pembakaran rumah) terhadap penduduk yang secara langsung atau tidak langsung membantu pihak RI. Di samping itu sebagai usaha untuk menghancurkan moril gerilyawan RI, pihak Belanda menyebarkan pamflet-pamflet melalui pesawat udara di sekitar desa Temayang, Kedungsari, Waduk Tretes dan desa-desa lain yang diduga menjadi pusat kegiatan kaum gerilyawan. Isi pamflet tersebut antara lain menganjurkan agar TNI mau menyerah kepada pos-pos Belanda terdekat, dengan jarak sekian meter senjata ditaruh di tanah, kedua tangan diangkat setinggi kepala sambil membawa bendera putih. Seiring dengan itu penembakan-penembakan peluru roket dari udara terus-menerus dilancarkan dengan sasaran desa-desa yang dianggap sebagai markas gerilya RI.⁶⁹

Sebagai suatu imbalan dan sekaligus merupakan jawaban atas segala tantangan tersebut, maka SS TROEPS (*Corps Intelligent*) Brigade I/Ronggolawe telah menggerakkan korps pelajar yang tergabung dalam Gerilya Liar (GL) di bawah pimpinan Hartono dan Adnan. Korps Pelajar Gerilya Liar ini diberi tugas untuk mengadakan gerakan di dalam kota di bidang kegiatan *Intelligent/Security*) serta perang urat syaraf terhadap kedudukan Belanda dan pengikut-pengikutnya. Bentuk perang urat syaraf pada waktu itu berupa penyebaran pamflet-pamflet gelap dalam kota dan penyebaran infiltrasi. Berkat kegiatan Korps Pelajar Gerilya Liar ini sendi-sendi Pemerintah Federal buatan Belanda mulai goyah.

Selain itu TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) yang merupakan pasukan *stoot* - troeps pelajar di bawah pimpinan Wahyudi telah melakukan gerakan penyusupan ke dalam kota. Di situ mereka melakukan penculikan, penembakan dan pembunuhan terhadap pegawai Federal dan orang-orang swasta lainnya yang dianggap kaki tangan tentara Belanda. Dengan demikian maka timbullah kegelisahan-kegelisahan dan tidak ada ke-

tenangan kehidupan di kota lebih-lebih bagi mereka yang merasa berkhianat terhadap RI.

Tidak ketinggalan satuan Korps Pelajar yang tergabung dalam *Tentara Genie Pelajar* (TGP) di bawah pimpinan Rusmin dan Margono. Bersama-sama dengan Seksi Letnan Nurcahyo dan Letnan Dihar mereka bergerak di daerah Kedungpring, mengadakan pengadangan terhadap convoi kendaraan tentara Belanda dari jurusan Jombang. Di samping ketiga satuan pelajar tersebut, masih ada satu kesatuan pelajar yang tergabung dalam *Mobilisasi Pelajar* di bawah pimpinan Sugeng dan Muktiyo. Ruang gerak mereka ialah ikut membantu kegiatan pemerintahan sipil dan militer di bidang administrasi dan pemerintahan umum.

Untuk memudahkan koordinasi pada 2 Maret 1949 dilangsungkan rapat tingkat puncak antara pemerintahan sipil dan pemerintahan militer dengan mengambil tempat di Desa Gondang Kecamatan Bubulan yang berlangsung selama dua hari. Hadir dalam rapat tersebut antara lain: Letkol. Sudirman, Letkol. Umar Jo'i, Mayor Basuki Rakhmad, Mayor Rukminto, Kapten Siswadi, Residen Bojonegoro Mr. Tandionomanu, Bupati Bojonegoro Surowiyono dengan beberapa Staf perwira dan beberapa pemerintahan sipil lainnya.

Hasil rapat koordinasi tersebut sekaligus telah membawa perubahan-perubahan besar antara lain dalam bidang kewibawaan dan kelancaran jalannya roda pemerintahan sipil. Semenjak itu lumbung-lumbung perjuangan sebagai persediaan bahan makanan untuk kesatuan-kesatuan tempur mulai terisi dan terbentuk di masing-masing desa. Sementara itu unsur-unsur teritorial di bawah pimpinan Letkol Umar Jo'i mulai dari STM (Staf Teritorial Militer), PDM (Perwira Distrik Militer), KODIM (Komando Order Distrik Militer), CP (Comando Pos) mulai ditingkatkan kegiatannya. Di samping itu dengan prakarsa Pemerintah Sipil, maka Organisasi Pertahanan Rakyat (PERA) pada waktu itu mulai terbentuk sampai ke desa-desa langsung di bawah komando Bupati Bojonegoro Surowiyono. Dengan

persiapan-persiapan inilah, maka perang total sebagai kelanjutan dari perang gerilya mendapat dukungan penuh dari rakyat yang berarti pula sekaligus akan membantu kelancaran gerakan mobilitas pasukan-pasukan RI di segala sektor.⁷⁰

Dari uraian tersebut di atas jelaskah bahwa Desa Temayang dan daerah sekitarnya merupakan basis komando kaum gerilyawan RI. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pada waktu itu gerakan operasi Militer Belanda selalu diarahkan ke Desa Temayang dan sekitarnya. Namun demikian berkat adanya dukungan dari segenap rakyat, pemuda-pemuda pelajar, para karyawan pemerintah yang selalu bahu-membahu dengan TNI, setiap serangan Belanda dapat digagalkan. Sampai *cease fire order* Komando Brigade I/Ronggolawe masih tetap berada di desa Temayang dan sekitarnya.⁷¹

Demikianlah pada 7 Mei 1949 perjuangan dalam bidang diplomasi telah menghasilkan suatu persetujuan Indonesia – Belanda yang biasanya dikenal dengan nama *Roem-Royen Statements* (R – R – Statements). Sebagai tindak lanjut (*follow up*) dari persetujuan itu, pada 8 Agustus 1949 ke luarlah perintah penghentian tembak-menembak (*Cease Fire Order*), yang untuk daerah Jawa mulai berlaku pada 10 Agustus 1949 tengah malam.

Untuk menjelaskan pelaksanaan tersebut, maka pada 8 Agustus 1949 datanglah Jendral Mayor Suharto, utusan Pemerintah RI Pusat, di Nganjuk. Setelah mendapat penjelasan itu, pada tanggal 13 Agustus 1949 Komandan Divisi I TNI mengadakan pertemuan dengan Komandan "A" Divisi Belanda di Trowulan (Mojokerto). Pertemuan tersebut bermaksud untuk membicarakan pelaksanaan *cease fire* (gencatan senjata), tetapi pertemuan itu ternyata tidak membawa sesuatu hasil. Karena itu pada 22 Agustus diadakan lagi pertemuan di Kediri. Sebagai kelanjutannya pada 1 September 1949 dibentuklah *Local Joint Committee* (LJC) yang mempunyai tugas sebagai penghubung antara pihak RI dan tentara Belanda, serta untuk membicarakan penjagaan keamanan dan pelepasan kembali daerah-daerah yang dikuasai Belanda.⁷²

Sementara itu, sebagai kelanjutan *R-R Statements*, di *Den Haag* (23 Agustus sampai dengan 2 Nopember 1949) telah berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) antara delegasi-delegasi dari Pemerintah RI, BFO (*Bijeenkomst Federal Overleg*). Kerajaan Belanda dan UNCI (*United Nation Commission For Indonesia*) sebagai perantara. Hasil KMB yang pokok ialah tercapainya Piagam Penyerahan Kedaulatan (istilah KMB) dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang harus dilaksanakan sebelum 1 Januari 1950.⁷³ Ternyata pelaksanaan Pengakuan Kedaulatan (visi Indonesia) atas Indonesia tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949. Dengan demikian maka perselisihan bersenjata antara Republik Indonesia dengan Belanda berakhir, dan berakhir pula sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Timur.

4.4 Interaksi di Daerah dengan Berbagai Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional

4.4.1 Ratifikasi Persetujuan Linggarjati di Kota Malang (5 Maret 1947)

Pada bulan pertama tahun 1946 rupanya di kalangan kaum politisi Indonesia terdapat dua pendapat yang berbeda tentang strategi perjuangan mempertahankan Negara Republik Indonesia di bidang diplomasi. Di satu pihak berpendapat bahwa perundingan dengan Belanda dapat dilakukan apabila berdasarkan pengakuan kemerdekaan Indonesia 100%, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa perundingan dengan Belanda baru dapat dilaksanakan apabila Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 100% terlebih dahulu. Pendapat yang pertama dilaksanakan oleh kaum politisi yang pada waktu itu sedang menjalankan *beleid* (kebijaksanaan) pemerintah *Kabinet* (Dewan Menteri) dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir sebagai pelopornya. Sedangkan pendapat yang kedua didukung oleh kaum oposisi terhadap kebijaksanaan pemerintahan Kabinet St. Syahrir, dengan Tan Malaka sebagai pemukanya.

Demikianlah untuk memperkuat barisan oposisinya, Tan

Malaka berusaha menggalang solidaritas nasional dengan mengundang rapat 300 delegasi dari organisasi partai politik dan militer RI di Purwokerto (Banyumas) pada 4 dan 5 Januari 1946. Rapat tersebut kemudian berhasil membentuk *wadah* persatuan kaum oposisi nama Persatuan Perjuangan atau dalam bahasa asingnya disebut *Volksfront*. Musyawarah Persatuan Perjuangan dilanjutkan pada 15 Januari 1946 di Surakarta. Musyawarah itu menghasilkan *program* minimum yang terdiri dari tujuh pokok yakni:

- 1) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%,
- 2) Pemerintah Rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat),
- 3) Tentara Rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat),
- 4) Melucuti tentara Jepang,
- 5) Mengurus tawanan bangsa Eropa,
- 6) Menyita dan menyelenggarakan perkebunan (musuh),
- 7) Menyita dan menyelenggarakan perindustrian (musuh: pabrik, bengkel, tambang dan lain-lainnya).

Program minimum Persatuan Perjuangan itu berhasil mengikat organisasi-organisasi yang sefaham, sehingga dalam beberapa bulan saja anggotanya meliputi 141 organisasi (data lain: 143).⁷⁴ Program minimum tersebut kemudian disodorkan sebagai tuntutan revolusi rakyat Indonesia kepada Pemerintah RI (Kabinet St. Syahrir), yang menurut penglihatan Persatuan Perjuangan terlalu banyak memberikan *konsesi* kepada pihak Belanda dalam rundingan-rundingan yang telah dilakukannya. Akibatnya di dalam sidang KNIP di Solo (28 Pebruari – 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijaksanaan St. Syahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu Kabinet Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Tetapi kemudian Presiden menunjuk kembali St. Syahrir sebagai formatur kabinet dan kemudian ia menjabat sebagai Perdana Menteri (Kabinet Syahrir II) 12 Maret 1946).⁷⁵

Dengan terbentuknya Kabinet Syahrir II itu berarti suatu

kekalahan golongan Persatuan Perjuangan, maka dari itu pihak Persatuan Perjuangan berusaha meningkatkan oposisinya dengan mengadakan rapat raksasa di Madiun pada pertengahan bulan Maret 1946. Tetapi pihak Pemerintah tidak tinggal diam, sehingga pada 17 Maret 1946 Tan Malaka dan 6 orang pemimpin Persatuan Perjuangan lainnya (Abikusno Cokrosuyoso, Khairul Saleh, Sukarni, Suprpto, Mohammad Yamin dan Wondoamiseno) ditangkap dan ditawan di Tawangmangu.⁷⁶

Sementara itu perundingan dengan pihak Belanda terus berlangsung, dan pada 14 – 25 April 1946 telah berlangsung perundingan antara delegasi RI dan Belanda dengan *Sir Archibald Clark Kerr* sebagai perantaranya. Perundingan tersebut diadakan di Hooge Veluwe (Negeri Belanda) dan ternyata mengalami kegagalan. Pada waktu itu Belanda hanya bersedia mengakui RI *defacto* di Jawa dan Madura, sedangkan RI menuntut pengakuan *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatra.⁷⁷ Tuntutan Pemerintah RI itu rupanya tidak memuaskan golongan Persatuan Perjuangan, sehingga meningkatkan aksinya yang memuncak dalam peristiwa 3 Juli 1946. Pada waktu itu golongan Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sudarsono (sekarang Kolonel Polisi Purnawirawan), Panglima Divisi X Yogyakarta, mencoba memaksa Presiden, agar Presiden menandatangani konsep susunan pimpinan pemerintahan baru. Karena hal itu oleh pihak pemerintahan RI dipandang sebagai perebutan kekuasaan (*coup d'etat*) maka usaha mereka digagalkan dan tokoh-tokoh pelakunya banyak yang ditawan.⁷⁸

Pada 2 Oktober 1946 kabinet Syahrir III dilantik, karena Kabinet Syahrir II telah jatuh pada bulan Juni 1946 (27 Juni St. Syahrir diculik). Kabinet ini melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda. Setelah beberapa kali berlangsung perundingan dengan pihak Belanda di Jakarta, maka pada 10 Nopember 1946 berlangsunglah puncak perundingan RI – Belanda di desa Linggajati, yang letaknya 22 km dari Cirebon, di lereng

gunung Cerme, di daerah yang dikuasai RI; dengan maksud agar perundingan itu dapat dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Perundingan telah dimulai pukul 15.00 sore bertempat di tempat penginapan *Lord Killearn* dan perundingan diketuainya sendiri. Sang merah putih berkibar dengan jayanya di samping *Union Jack* (bendera Inggris) di tempat kediaman *Lord Killearn*.⁷⁹

Di dalam perundingan ini hadir pihak-pihak:

- 1) Inggris, sebagai pihak penengah Lord Killearn.
- 2) Republik Indonesia, dengan wakil-wakilnya: St. Syahrir (ketua), dari Partai Sosialis, Drs. Susanto Tirtoprojo SH (anggota) dari PNI, Drs. Adnan Kapau (AK) Gani (anggota) dari PNI, Moh. Rum SH. (anggota) dari Masyumi, Dr. Sudarsono (anggota) dan Dr. Leimena (anggota).
- 3) Belanda, dengan wakil-wakil: Prof. W. Schermerhorn (ketua), D. De Boer, Max Van Poll dan Dr. Huber tus van Mook (anggota).⁸⁰

Pada 12 Nopember 1946 persetujuan tercapai dan diparaf di Jakarta pada 15 Nopember 1946 oleh RI (diparaf oleh St. Syahrir) dan dari pihak Belanda (Prof. *Schermerhorn*). Persetujuan inilah yang kemudian terkenal dengan nama "Persetujuan Linggajati". Naskah persetujuan ini terdiri atas 17 pasal, yang isi pokoknya antara lain:

- 1) Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah RI *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra. Daerah-daerah yang *de facto* diduduki Belanda dengan berangsur-angsur dan kerjasama di antara kedua belah pihak, akan dimasukkan ke daerah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
- 2) Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda akan bekerja sama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, Negara Indonesia Serikat itu akan terdiri dari: RI, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukannya supaya sebelum 1 Januari 1949.

- 3) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan bekerja sama untuk membentuk Uni Nederland – Indonesia dengan Raja Belanda sebagai Kepala Uni.⁸¹

Naskah tersebut walaupun sudah diparaf oleh ketua delegasi masing-masing, namun belum dianggap sah karena harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen masing-masing. Masih ada waktu beberapa bulan untuk merundingkan, menolak atau menerima naskah itu.

Di negeri Belanda (Nederland) masalah pro dan kontra terhadap Naskah Persetujuan Linggajati itu tidak seberapa hebat dan segera dapat disetujui Parlemen mereka. Hal itu disebabkan karena Jonkman pandai membuat interpretasi yang dapat memuaskan rakyat Nederland. Tetapi interpretasi Jonkman itu menjadi bibit pertentangan di kalangan Indonesia, karena tafsiran pihak Indonesia jauh berbeda dengan tafsiran JA Jonkman. (Menteri Urusan Daerah Seberang Lautan Belanda. 20-12-1946 Tweede Kamer – Balai Rendah Belanda mengesahkan Naskah Linggajati).

Pro dan kontra persetujuan Linggajati di pihak Indonesia berjalan sangat seru. Partai-partai, organisasi-organisasi dan golongan-golongan di daerah pedalaman RI menjadi tegang dan kemudian timbul blok pro dan blok kontra Persetujuan Linggajati. Kelompok yang mendukung kebijaksanaan pemerintah RI tentang Persetujuan Linggajati ini membentuk suatu persatuan yang menamakan dirinya Sayap Kiri (Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh dan Partai Komunis). Mereka disokong oleh beberapa partai, organisasi dan golongan lainnya, seperti, Serikat Buruh Minyak, Partai Katolik Republik Indonesia, Pengurus Besar Partai Rakyat, Barisan Buruh Listrik dan Gas, Partai Tani, Markas Besar Partai Rakyat, Markas Besar Angkatan Muda Katolik (AMKRI), Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, Sarekat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Yogyakarta, Serikat Buruh Gula, dan Persatuan Buruh Indonesia. Alasan menyetujui rencana Persetujuan Linggajati yang dikemukaikan oleh partai-partai atau gerakan-

gerakan rakyat tersebut berbeda-beda rumusannya, namun jiwa-nya sama. Mereka menganggap bahwa penerimaan rencana Persetujuan Linggajati adalah suatu syarat perjuangan untuk memperoleh dasar perjuangan baru dalam menyelesaikan revolusi nasional, mengingat suasana politik di luar dan dalam negeri. Perjuangan baru sampai pada tahap pertama. Kemerdekaan 100% harus dicapai tahap demi tahap.⁸²

Sedangkan partai-partai organisasi-organisasi dan golongan-golongan yang menolak Persetujuan Linggajati, pada 8 Desember 1946 membentuk persatuan dengan nama Benteng Republik Indonesia. Dasarnya ialah mempertahankan kemerdekaan 100%; tujuannya membatalkan rencana Persetujuan Linggajati dan berjuang sebagai konsekuensinya. Ketua Dewan Pimpinan Benteng Republik Indonesia ialah Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), anggotanya antara lain: Masyumi, PNI, Angkatan Muda Guru, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Wanita Rakyat, Partai Rakyat, Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) dan Angkatan Komunis Muda (AKOMA). Dewan Politik terdiri dari: PNI, Masyumi, Partai Wanita Rakyat, KRIS dan Partai Rakyat. Dewan Pembelaan terdiri dari: Dewan Mobilisasi Pemuda Islam. Barisan Banteng, BPRI, Laskar Rakyat Jawa Barat dan KRIS. Dewan Politik berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan Dewan Pembelaan di Malang.⁸³

Pada 21 Nopember 1946 Badan Pekerja KNIP di bawah pimpinan Mr. Assaat, telah membicarakan soal pengesahan rencana Persetujuan Linggajati tersebut. Tetapi sidang itu tidak mengambil suatu keputusan, hanya menyetujui bahwa yang mengadakan ratifikasi (pengesahan) itu pleno (rapat paripurna) KNIP. Suasana politik makin tegang ketika pada 29 Desember 1946 Presiden RI mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 6/1946, yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Peraturan Presiden Nomor 6 ini berisi tentang pembebasan para pejabat negara untuk melakukan tugas sebagai anggota KNIP. Seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua

kali lipat jumlah perwakilan mereka dalam KNIP. Penambahan wakil-wakil daerah di luar Jawa dan Madura. Adapun gambaran perbandingan antara anggota KNIP yang lama dengan yang baru itu antara lain sebagai berikut.⁸⁴

Para Wakil dari:		KNIP Lama	KNIP Baru
Partai	PNI	45	45
	Masyumi	35	60
	Sosialis	35	35
	Buruh	6	35
	PKI	2	35
	Kristen	4	8
	Katolik	2	4
		129	222
Golongan	Buruh	0	40
	Tani	0	40
		0	80
Daerah	Sumatra	1	50
	Borneo (Kalimantan)	4	8
	Sulawesi	5	10
	Maluku	2	5
	Sunda Kecil	2	5
		14	78
Minoritas	Cina	5	7
	Arab	2	3
	Belanda	1	3
		8	13
Perseorangan, partai-partai Kecil dan organisasi Militer		49	121
Jumlah Keseluruhan:		200	514

Dari gambaran tersebut nampak bahwa pihak oposisi banyak dirugikan apabila Peraturan Presiden Nomor 6/1946 itu dilaksanakan, maka dari itu sudah sewajarnya jika PNI dan

Masyumi, yang pada waktu itu merupakan dua partai politik besar, menentanginya. Kedua partai ini berpendapat bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sah, karena setelah ada kabinet parlementer, Presiden tidak boleh melakukan tindakan yang wetgevend. Juga dalam membuat peraturan itu Badan Pekerja KNIP tidak diajak berunding. Hal ini dianggap pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat. Namun partai pemerintah khususnya Partai Sosialis menyatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut yang berdasarkan hak Prerogatif Presiden adalah sah. Tetapi Badan Pekerja KNIP sendiri dalam sidang plennya pada 17 Januari 1947 tidak menyetujuinya dan membatalkan Peraturan Presiden Nomor 6/1946 itu.⁸⁵ Perselisihan pendapat itu akhirnya diselesaikan dalam sidang pleno KNIP yang diselenggarakan di kota Malang (Jawa Timur) pada 25 Pebruari sampai dengan 5 Maret 1947.

Demikianlah pada 25 Pebruari 1947 pukul 10.00 pagi di Gedung Rakyat (sekarang Gedung "Sarinah") di kota Malang dibuka sidang pleno ke-5 KNIP, yang membahas dua masalah, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 6/1946 dan Naskah Persetujuan Linggajati. Tiga hari yang pertama dipergunakan untuk membahas Peraturan Presiden Nomor 6/1946 yang menyangkut hak prerogatif Presiden dan penambahan anggota-anggota baru dalam KNIP. Perdebatan mengenai Peraturan Presiden Nomor 6/1946 itu sangat hangat.

Pihak oposisi menafsirkan Peraturan Presiden Nomor 6/1946 sebagai usaha Pemerintah untuk mendapatkan tambahan sokongan dalam pemungutan suara mengenai Persetujuan Linggajati, sehingga Naskah tersebut dapat diartifikasikan (disahkan). Hal ini antara lain nampak dari pandangan Abu Hanifah (ketua Fraksi Masyumi) sebagai berikut:

Dekrit Presiden 29 Desember 1946 itu, menyebabkan jumlah anggota bertambah dari 200 sampai 514 orang. Dari 514 anggota itu, umumnya terpilih dari golongan yang pro Pemerintah. Partai politik juga mendapat tambahan, tetapi jumlahnya tidak berarti sebagai kekuatan politik. PNI mem-

punyai 45 kursi, Masyumi 60 kursi. Sedangkan Partai Buruh naik dari 6 kursi menjadi 35 kursi, PKI dari 2 kursi menjadi 35 kursi. Sedangkan misalnya barisan buruh dan barisan tani mendapat masing-masing 40 kursi. Padahal sebelumnya tidak ada memiliki kursi.

Pendek kata, partai-partai yang menentang Linggajati akan kalah suara mutlak, karena sikap pihak yang berkuasa. Kabinet Syahrir dapat membulldoser suara-suara di KNIP.⁸⁶

Terjadilah perdebatan yang sengit di antara para anggota KNIP yang terdiri dari 200 anggota itu. Setelah dua hari lamanya mereka berdebat, terjadilah suara yang seimbang di antara mereka yang menerima dan yang menolak keputusan Badan Pekerja KNIP tentang pembatalan Peraturan Presiden Nomor 6/1946.⁸⁷ Pada waktu suasana makin tegang, maka pada 27 Februari 1946 Wakil Presiden Moh. Hatta angkat bicara, yang menyatakan bahwa penambahan anggota menurut Peraturan Presiden Nomor 6 itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari imbalan antara pro dan kontra rencana Persetujuan Linggajati, maka dari itu apabila para pendukung Keputusan Badan Pekerja KNIP menolak Peraturan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden akan mengundurkan diri.

Tuduhan semacam itu adalah yang terberat yang ditujukan kepada Kepala Negara. Hendaknya diketahui bahwa dengan susunan Komite Nasional lama Naskah Linggajati itu sudah gool: karena imbalan kontra dan pro sedikit-dikitnya 104 melawan 151. Teranglah bahwa tindakan Presiden itu ialah untuk menyempurnakan dan mendekati Badan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, sehingga dalam menghadapi soal tersebut rakyat di belakang Pemerintah. Beberapa pembicara mengajukan kompromi tentang peraturan tersebut. Hendaknya dengan jujur dikemukakan setuju atau tidak. Menerima atau menolak peraturan tersebut dengan tiada kompromi. Bilamana tak puas dengan pimpinan Presiden dan Wakil Presiden, hendaklah mencari Presiden dan Wakil Presiden yang baru.⁸⁸

Akibat dari pidato Wakil Presiden tersebut, maka Mr. Assaat

(ketua BP. KNIP) mengumumkan penarikan kembali usul Badan Pekerja KNIP untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 6. Oleh karena yang diharapkan hanya penolakan atau penerimaan Peraturan Presiden seluruhnya, maka tidak ada soal usul kompromi. Semua usul baru disingkirkan. Akhirnya Peraturan Presiden Nomor 6/1946 pada hari itu diterima dan pada 28 Pebruari 1947, dilantiklah sejumlah 232 anggota baru KNIP. Pada malam harinya rencana Persetujuan Linggajati mulai mendapat giliran pembahasannya, sampai dengan tanggal 5 Maret 1947.

Pada 5 Maret 1947 sidang Komite Nasional telah memberikan kesempatan kepada para pemimpin fraksi untuk berunding. Hasil dari perundingan itu melahirkan dua mosi, yang satu berasal dari Manai Sophian dan lainnya dari Dr. A. Halim. Mosi Manai Sophian menghendaki agar Pemerintah Republik berjuang demi kemerdekaan daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Irian, supaya secepat mungkin dapat bergabung dengan Republik Indonesia. Sedangkan Mosi Dr. A. Halim menyambut secara langsung naskah Persetujuan Linggajati yang isinya:

- 1) Pada umumnya menyetujui *beleid* Pemerintah, pada khususnya membenarkan pendirian Pemerintah menerima naskah Indonesia – Belanda sebagaimana telah diparaf oleh Delegasi Indonesia dan Komisi Jendral pada 15 Nopember 1946 di Linggajati, menolak naskah Indonesia – Belanda menurut tafsiran mosi Romme dan keterangan Jonkman.
- 2) Memberi kepercayaan penuh kepada Pemerintah serta mengajukan syarat-syarat yang bermaksud menguatkan dan menegaskan usaha Pemerintah dengan jalan terutama:
 - a) Mengusahakan penarikan kembali tentara pendudukan Belanda dari seluruh kepulauan Indonesia.
 - b) Mengusahakan terlaksananya hak-hak demokrasi di daerah-daerah kepulauan yang belum masuk daerah *de facto* Republik Indonesia.
 - c) Menyusun dan menyelenggarakan program Pemerintah

di segala lapangan masyarakat untuk waktu yang tertentu.

Sebelum dilakukan pemungutan suara terhadap mosi Dr. A. Halim maka Fraksi Partai Nasional Indonesia, Masyumi dan Partai Wanita Rakyat menyampaikan pendiriannya yang berupa penolakan, lalu meninggalkan sidang. Mereka tidak turut menentukan mosi. Demikianlah boleh dikatakan mosi Dr. A. Halim secara bulat dengan mendapat suara 284 lawan 2. Yang tidak setuju ialah Ki Hajar Dewantara dan Sukarjo Wiryopranoto. Hal itu berarti bahwa pihak Pemerintah telah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi naskah Persetujuan Linggajati.⁸⁹

Akhirnya pada 25 Maret 1947 pukul 17.30 ditandatangani Naskah Persetujuan Linggajati itu oleh kedua belah pihak (St. Syahrir dari pihak Indonesia dan Prof. Schermerhorn dari pihak Belanda) di dalam suatu upacara di *Paleis Rijswijk* (sekarang Istana Merdeka) di Jakarta.⁹⁰

Dengan demikian sengketa tentang ratifikasi (pengesahan) Naskah Persetujuan Linggajati telah selesai. Kemudian timbul lagi sengketa baru antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Belanda tentang penafsiran pasal-pasal Persetujuan Linggajati. Sengketa dalam bidang diplomasi itu ternyata diputuskan dengan sengketa kekuatan senjata yang berupa Aksi Militer Belanda I (21 Juli 1947 s/d 17 Januari 1948) yang kemudian ditutup dengan penandatanganan Persetujuan Renville 17 Januari 1948. Bagi daerah RI pada umumnya, Persetujuan Renville tersebut menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, sedangkan bagi daerah Jawa Timur membawa akibat terjadinya peristiwa Pemberontakan PKI Madiun.

4.4.2 Pemberontakan PKI Madiun 1948

Dalam tahun 1948 di daerah pedalaman Republik Indonesia terjadi ketegangan-ketegangan dalam bidang politik, militer dan ekonomi yang menimbulkan suasana pertentangan dalam masyarakat. Puncak dari segala pertentangan tersebut membawa

akibat timbulnya peristiwa pemberontakan untuk merebut kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Madiun dengan kekerasan. Perebutan kekuasaan itu ternyata digerakkan oleh golongan Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan golongan Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Muso.

Ketegangan tersebut di atas dimulai dengan adanya peristiwa penandatanganan Persetujuan Renville (17 - 1 - 1948) oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dari pihak RI dan oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo dari pihak Belanda. Karena Persetujuan Renville ini dipandang sangat merugikan pihak Indonesia, maka banyak golongan dan partai politik yang menentangnya. Di dalam naskah itu ditetapkan supaya RI menarik tentara gerilyanya dari daerah kantong. Penarikan ini berarti bahwa daerah yang sangat strategis bagi perjuangan bersenjata dikosongkan dan diserahkan mentah-mentah kepada kekuasaan Belanda. Karena itu pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya banyak yang tidak setuju terhadap Persetujuan Renville itu, tetapi demi kesetiaan mereka terhadap Pemerintah RI, terpaksa daerah-daerah yang strategis itu mereka tinggalkan.

Demikianlah akibat Persetujuan Renville menimbulkan situasi politik dalam negeri RI yang mengandung pertentangan-pertentangan. Akhirnya Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tidak setuju dengan isi Persetujuan tersebut, menarik para anggotanya dari Kabinet. Hal ini mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Untuk mengatasi situasi yang sulit ini, Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk Kabinet Presidentil. Maksud Moh. Hatta akan membentuk Pemerintahan Nasional, yang terdiri dari wakil-wakil seluruh partai (Kabinet Koalisi). Namun usahanya terbentur pada kenyataan adanya pertentangan antara Masyumi dan PNI di satu pihak dengan sayap kiri di pihak lain, yang tidak dapat dimainkan. Di samping itu tuntutan sayap kiri yang sedikitnya menghendaki empat kursi termasuk menteri pertahanan, tidak dapat diterima oleh Moh. Hatta.⁹¹

Akhirnya pada 29 Pebruari 1948 terbentuklah Kabinet Presidensial Moh. Hatta tanpa mengikutsertakan kelompok Amir Syarifuddin, yang tergabung dalam sayap kiri (Partai Sosialis, Amir Syarifuddin, PKI, Partai Buruh dan Pesindo). Dalam Kabinet itu duduk tokoh-tokoh dari Masyumi dan PNI Kabinet Hatta ini mempunyai program yang terdiri atas empat pokok:

- 1) pelaksanaan Persetujuan Renville dan selanjutnya perundingan dengan dasar yang telah dicapai.
- 2) mempercepat dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).
- 3) melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri.
- 4) pembangunan.⁹²

Dengan demikian, maka golongan Sayap Kiri merupakan golongan oposisi yang menentang tindakan Kabinet Hatta. Dalam sebuah pertemuan di Solo (26 Pebruari 1948) mereka membentuk *Front Demokrasi Rakyat (FDR)* yang terdiri dari Partai Sosialis (grup Amir Syarifuddin)⁹³ Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Buruh, PKI dan Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Pada permulaannya FDR itu menuntut, "Pergantian bentuk Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parleментар dan menyetujui pelaksanaan ketentuan dari Persetujuan Renville". Hal yang terakhir ini sesuai dengan tugas Kabinet Presidensiil, untuk melaksanakan Persetujuan Renville. Beberapa minggu kemudian FDR mengadakan perubahan strategi yang menuntut agar pemerintah membatalkan segala perjanjian dengan Belanda (Linggajati dan Renville) dan berunding atas dasar pengakuan kedaulatan, mengadakan nasionalisasi perubahan-perubahan asing serta merumuskan program yang mirip dengan program Persatuan Perjuangan Tan Malaka.⁹⁴

Tindakan lebih lanjut dari FDR ialah dengan menggunakan kekuatan yang berpusat pada tentara, laskar dan buruh,⁹⁵ mereka berusaha menjatuhkan Kabinet Hatta dengan melancarkan aksi-aksi yang makin lama makin meningkat. Moh. Hatta yang menyadari bahwa sangat berbahaya apabila Angkatan Perang dikuasai oleh suatu golongan politik tertentu, kemudian melaksanakan kebijaksanaan *reorganisasi dan rasionalisasi TNI*.⁹⁶

Aspek politik dari kebijaksanaan ini ialah memotong garis Amir Syarifuddin di kalangan tentara dan lasykar-lasykar bersenjata.⁹⁷ Tindakan-tindakan Pemerintah ini mendapat tentangan hebat dari FDR, sedangkan pasukan-pasukan yang bersangkutan membangkang dan menentang rasionalisasi yang hendak dikenakan terhadap mereka.

Dari uraian di atas nampak adanya peristiwa kontradiksi yang sangat menarik. Persetujuan Renville diciptakan oleh Amir Syarifuddin dan diterima oleh Sayap Kiri. Setelah menjadi FDR Sayap Kiri menentang pelaksanaan persetujuan yang diciptakannya sendiri. PNI dan Masyumi semula bersikap menolak Persetujuan Renville, kemudian mereka ikut duduk dalam kabinet yang bertugas melaksanakan persetujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu keadaan politik dalam negeri RI sangat ruwet, sikap partai-partai pun menjadi ruwet. Keruwetan sikap partai dan keruwetan politik itu dengan sendirinya menimbulkan keruwetan sikap partai dan keruwetan politik itu dengan sendirinya menimbulkan keruwetan suasana. Keruwetan suasana dengan sendirinya memberikan kesempatan baik untuk pertumbuhan anarkhi atau kekacauan. Kekacauan suasana itu diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri, oleh pertentangan politik dalam kalangan sendiri.

Pertentangan politik itu diperhebat dengan kedatangan Muso dari luar negeri pada 11 Agustus 1948. Ia datang ke Jawa menyamar sebagai sekretaris Suripno, wakil RI di Praha (Cekoslowakia) dan memakai nama samaran Suparto. Muso adalah seorang PKI kawakan yang pernah menggerakkan pemberontakan PKI tahun 1926 dan juga pernah mendirikan organisasi atau gerakan di bawah tanah (illegal PKI) di Surabaya (1935). Maka dari itu kedatangannya diterima dengan baik sebagai anggota PKI, bahkan secara aklamasi dipilih sebagai sekretaris partai untuk menggantikan Sarjono.⁹⁸ Dengan segera Muso mengadakan perubahan-perubahan di kalangan PKI. Bahkan pada akhir bulan Agustus (24 - 8 - 1948) politboro PKI telah mene-

rima konsep strategi perjuangan Muso yang disebut "*Jalan Baru untuk Republik Indonesia*". Kosepsi tersebut memuat "Koreksi Besar" terhadap politik organisasi dan strategi perjuangan kaum Komunis⁹⁹. Sebagai koreksi kesalahan dalam organisasi CC. PKI antara lain diusulkan supaya di antara tiga partai anggota Front Demokrasi Rakyat, yakni PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia, diadakan fusi sehingga menjadi partai klas buruh di bawah nama bersejarah Partai Komunis Indonesia.¹⁰⁰ Konsepsi ini rupanya dapat diterima oleh. Partai Buruh. Indonesia dan Partai Sosialis (grup Amir Syarifuddin) sehingga kedua partai ini berturut-turut (tanggal 27 dan 29 Agustus 1948) meleburkan diri dalam Partai Komunis Indonesia. Terbentuklah PKI Baru dengan suatu Politbiro baru, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin PKI dan FDR yang diumumkan dalam surat kabar resmi PKI "Suara Ibu Kota" pada 1 September 1948¹⁰¹ Karena Muso merupakan tokoh utama dari sekretaris umum, maka PKI Baru ini biasanya juga disebut PKI Muso. Sedangkan dalam bidang politik seharusnya kaum Komunis memegang pimpinan pemerintahan. Dalam strategi perjuangan kaum Komunis seharusnya segera membentuk Front Nasional yang didukung oleh partai-partai dan orang-orang yang progresif dan anti-imperialis.¹⁰² Di situ dijelaskan pula, bahwa dunia ini telah terpecah dua, yaitu blok Kapitalis – Imperialis di bawahh pimpinan Amerika Serikat dan blok Anti – Imperialis di bawah Rusia. Karena perjuangan Indonesia Anti– Imperialis maka dengan sendirinya Indonesia belanda di fihak Rusia.¹⁰³.

Bagaimana tanggapan Pemerintah RI terhadap Konsepsi Muso tersebut pernah dikemukakan oleh Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RI di muka sidang istimewa Badan Pekerja KNIP, pada 7 September 1948 yang antara lain dinyatakan sebagai berikut :

Pemerintah berpendapat, bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya Republik jangan menjadi Obyek dalam pertaruhan politik Internasional, melainkan harus tetap menjadi Subjek yang hendak menentukan, berhak menentukan, sikap sendiri dan berhak memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu manusia merdeka seluruhnya.¹⁰⁴

Garis politik Pemerintah RI tersebut dijelaskan pula oleh Moh. Hatta pada 16 September 1948, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut :

Garis politik kita ditentukan oleh dua perkara : pertama : tujuan kita sendiri; kedua : kedudukan kita di tengah-tengah dunia internasional yang masih dilindungi oleh negara-negara kapitalis dan masih digencet oleh kapitalis-kapitalis internasional.¹⁰⁵

Pada waktu itu kelihatan, bahwa di kalangan politik Indonesia telah terjadi perpecahan tajam antara kelompok Pemerintah di bawah pimpinan Moh. Hatta yang ingin tetap bertahan atas dasar politik bebas aktif dan kelompok PKI—Muso yang ingin RI masuk blok Komunis yang pada waktu itu ada dibawah pimpinan Uni Sovyet, Di samping itu ada pula kelompok Tan Malaka yang anti PKI—Muso. Tan Malaka adalah seorang nasionalis yang berorientasi komunis, dan yang tidak menyetujui Muso mengadakan pemberontakan PKI tahun 1926. Kelompok Tan Malaka ini pada permulaan bulan Juni 1948 telah membentuk suatu partai baru dengan nama *Gerakan Revolusi Rakyat* (GRR) yang merupakan federasi dari beberapa kelompok yang pro Tan Malaka dan di bawah pimpinan Dr. Muwardi (Ketua) Syamsu Harya Udaya (Wakil Ketua) dan Khairul Saleh (Sekretaris).¹⁰⁶ Kelompok Tan Malaka ini oleh pihak PKI dituduh sebagai kaum *Trotskyist* dan pengkhianat partai Komunis, sebaliknya golongan yang disalahkan itu menuduh PKI Alimin adalah PKI Vender Plas, karena berasal dari pelarian *Brisbane* (Australia) dan PKI — Muso dituduhnya sebagai Titoisme.¹⁰⁷

Sesuai dengan garis yang telah ditentukan Moskow, PKI—Muso kemudiana merencanakan suatu pemberontakan. Menurut

Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat RI (tahun 1966) dalam rencana mereka antara lain tercantum :

- 1) Pasukan-pasukan yang berada di bawah pengaruh PKI Muso ditarik dari medan pertempuran dan dipindahkan ke daerah-daerah yang strategis bagi pihak pemberontak. Dengan demikian jelaslah bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan kekuasaannya sendiri dari pada turut bertanggung jawab atas pertahanan negara terhadap serangan-serangan pihak Belanda.
- 2) Daerah Madiun dijadikan gerilya-gerilya yang kuat untuk melanjutkan perjuangan "*op lang termijn*" (ini adalah istilah kaum pemberontak).
- 3) Daerah Sala dijadikan "*Wild West*" agar perhatian umum selalu tertuju ke sana.
- 3) Di samping tentara "resmi" akan didirikan juga tentara ilegal.
- 5) Diadakan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran yang disusul dengan pemogokan-pemogokan umum, kalau perlu dengan tindakan-tindakan kekerasan.¹⁰⁸

Menurut George Mc Turnan Kahin, PKI – Muso untuk mencapai kekuasaan terlebih dahulu akan menggunakan cara *non revolutioner* sebelum menggunakan taktik revolusioner. Taktik revolusioner itu tentunya tidak akan digunakan sebelum proses integrasi anggota-anggota FDR ke dalam PKI – Muso sempurna dan sebelum disiplin organisasi politiknya sungguh-sungguh baik. Dan menurut penghitungan para pemimpin Republik yang bukan Komunis, puncak pimpinan FDR dan Muso belum siap untuk menggunakan metode revolusioner sebelum bulan Nopember 1948. Bahkan ada pula yang tidak yakin kalau kaum Komunis telah siap untuk menggunakan metode revolusioner sebelum 1 Januari 1949.¹⁰⁹

Dengan maksud untuk menggelorakan semangat rakyat supaya berdiri di belakang PKI – Muso yang sedang menggalang Front Nasional, maka para pucuk pimpinan PKI – Muso (Muso,

Amir Syarifuddin, Wikono dan Haryono) mengadakan perjalanan keliling ke Jawa Timur. Mereka berangkat dari Yogyakarta pada 7 September 1948 untuk berpidato di Surakarta, di Madiun, di Kediri, Jombang dan Purwodadi. Menurut rencana mereka juga akan mengunjungi kota-kota lainnya. Misalnya berpidato di Wonorejo¹¹⁰. Tetapi ketika Muso dan Amir Syarifuddin berada di Purwodadi mereka mendengar kabar bahwa unsur pro PKI (Pesindo dan Divisi IV PKI) telah mengambil inisiatif untuk melancarkan revolusi (pemberontakan). Tanggal 18 September 1948 pagi hari sekelompok rakyat Purwodadi mengibarkan bendera merah dan Muso cs. berangkat ke Madiun dengan dikawal pasukan yang kuat. Malam hari ketika mereka sampai di Rejoagung, di rumah Sumarsono dekat Madiun, mereka menjumpai suatu pernyataan, bahwa organisasi PKI lokal telah mereka menjumpai suatu kenyataan, bahwa organisasi PKI lokal telah melancarkan *Coup d'etat* di kota Madiun dan sekitarnya.

Dengan demikian revolusi Komunis atau pemberontak Komunis sudah dimulai.¹¹¹

Menurut laporan dari seorang koresponden *Murba* di Madiun, yang menyelesaikan fase pertama pengambilalihan kekuasaan di Madiun. FDR memulai gerakannya dengan menguasai desa-desa. Gerakan ini dilindungi oleh empat batalyon teritorial dan satu batalyon mobil, yang hampir seluruhnya diambil dari pasukan-pasukan Jawa Timur. Batalyon-batalyon ini telah menduduki desa-desa. Setelah itu Pesindo dan pasukan-pasukan PKI lainnya merebut kekuasaan kota-kota dan ibu kota Karesidenan Madiun dari tangan Pemerintah Sipil RI daerah, Gerakan operasi militer tersebut secara nyata dimulai pada pukul 03.00 malam 18 September 1948 di Madiun dan dipimpin oleh Sumarsono dan Joko Suyono.¹¹² dengan kesatuan bekas TNI yang tergabung dalam Brigade 29 di bawah pimpinan Letkol Muhammad Dahlan. Memang demikianlah kenyataannya, kota Madiun dapat dengan mudah dikuasai oleh FDR/PKI/Brigade 29 sebagai intinya. Secara praktis pada pukul 07.00 mereka telah dapat merebut dan menduduki markas-markas kemiliteran

di Madiun, seperti markas, Mobile Bregade (di Kletak), Kepolisian Daerah Madiun (di Jalan Raya Madiun). Sub Territorium Militer/31 (di Jalan Raya), SPDT (di Jl. Diponegoro) Corps Polisi Tentara (di Jl. Akhmad Yani) dulu Jl. Wilis. Akibatnya banyak para pewira yang tertangkap dan ditawan di Rejo Agung atau di rumah penjara Kletak atau di desa Kresek (di kaki gunung Wilis bagian lambung barat Kecamatan Wungu, daerah wilayah kerja Pembantu Bupati Kanigoro di Dungus) yang terkenal sebagai pos pemungkas PKI.

Dengan demikian alat-alat pemerintah militer RI di Madiun telah dapat mereka kuasai, tinggalah alat-alat pemerintah sipil yang harus mereka kuasai. Kantor-kantor pemerintah sipil, dinas-dinas dan jawatan-jawatan setelah pukul 08.00 secara praktis seluruhnya telah dikuasai oleh Pasukan Merah/PKI. Karena pada waktu itu Residen Samadikun sedang mengikuti Konferensi Dinas di ibukota Yogyakarta, maka penanggungjawab Pemerintah Karesidenan Madiun berada di tangan wakil Residen Raden Mas Sidharta. Karena itu pada pukul 09.00 sebagai tawanan pasukan Merah, Wakil Residen RM Sidharta dibawa ke kantor Karesidenan untuk bersema-sama aparat pemerintahan sipil atau militer RI lainnya dipaksa menandatangani naskah pengambilalihan kekuasaan sipil dan militer atas Wilayah Karesidenan Madiun. Dengan demikian pada 19 September 1948 pukul 09.00 itu ruang depan Karesidenan Madiun dilaksanakan pengambilan atau penyerahkan kekuasaan secara paksa dari Pemerintah RI Daerah Madiun kepada fihak FDR/PKI.

Dari fihak FDR/PKI yang menandatangani naskah tersebut ialah : Hasanuddin (Ketua SOBSI Madiun), Surodarmojo (Ketua Partai Sosialis Madiun), Singomentolo (Kegua Komisaris Pesindo Daerah Madiun dan Sarekat Rakyat Madiun). Sedangkan dari fihak RI diwakili oleh Letkol. Sumantri (Komandan STM Madiun), RM. Sidharta (Wakil Residen Madiun) dan M. Purbo (Walikota Madiun). Mereka bertiga statusnya sebagai tawanan hasil penculikan.

Sesudah menandatangani naskah pengambilan kekuasaan

itu selesai, maka oleh panitia dikemukakan suatu pengumuman sebagai berikut :

- 1) Nama Pemerintah Baru itu "Pemerintah Front Nasional Indonesia"
- 2) Bendera Nasional "Bendera Merah Bergambar Palu Arit". Sedang Bendera Merah Putih harus diturunkan, dibuang jauh-jauh sebab itu adalah bendera Republik Indonesia Masyumi dan Borjuis.
- 3) Lagu Kebangsaan segera menyusul pengumumannya.
- 4) Residen Madiun, ditetapkan Abdul Muntolib, pemegang kekuasaan Sipil.
- 5) Walikota Madiun, ditetapkan Mas Supardi.

Karena Angkatan Perang yang dipercaya menjamin keamanan Madiun yang berada di tangan batalyon-batalyon Brigade 29 TNI, secara tidak berduga justru membantu pemberontakan PKI.

Sebelum pemberontakan meletus, hampir seluruh kelaskaran Rakyat yang bernaung di dalam panji-panji FDR/PKI. terhimpun dalam satu brigade yakni brigadi 29, masuk lingkup Divisi I Jawa Timur, di bawah pimpinan Letkol. Muh. Dhalan dan bemarkas di Kecamatan Ngadiluwih Kediri. Kecuali sebagai komando kelaskaran rakyat yang belum dimiliterisasi, Brigade 29 ini memiliki enam batalyon yang bersenjata lengkap, termasuk senjata moderen. Namun ketika Komandan SPDT (Staf Pertahanan Jawa Timur) memerintahkan beberapa Batalyon dari Brigade 29 ini untuk bertugas ke daerah *Statusquo*, mereka berangkat meninggalkan Kediri bukan untuk pergi ke daerah perbatasan tetapi ke wilayah Madiun dan bermukim di kota-kota tertentu. Rupanya mereka sudah mempersiapkan suatu operasi yang diatur sebagai berikut :

- 1) Batalyon Mustafa dipersiapkan beroperasi di kota Madiun
- 2) Batalyon Mursit dipersiapkan beroperasi di Saradan.
- 3) Batalhon Darmintoaji dipersiapkan beroperasi di Ngawi

- 4) Batalyon Panjang Jokopiyono dipersiapkan beroperasi di Ponorogo,
- 5) Batalyon Abdul Rahman dipersiapkan beroperasi di sekitar Kota Madiun bagian Timur sebagai batalyon susulan kekuatan sesudah pemberontakan diletuskan
- 6) Batalyon Maladi Yusuf dipersiapkan beroperasi di Sumoroto Ponorogo dan sekitarnya.

Di sektor Barat terdapat pula kesatuan-kesatuan TNI yang pro PKI dari sebagian Divisi IV Jawa Tengah di Cepu dan di Purwodadi di bawah pimpinan Letkol. Suyoto, sepasukan Angkatan Laut di bawah pimpinan Amat Yadahu bermarkas di Pacitan dan sepasukan khusus di bawah Letkol. Laut Sutrisno.

Tanpa setahu pimpinan SPDT Madiun (Letkol Marhadi) muncullah beberapa kesatuan Brigade 29 di Jalan Haji Agus Slaim (sekarang Kantor Perwakilan Kota Madiun Selatan), di sepanjang Jalan Rajawali Madiun dan di rumah dinas pegawai pabrik gula Rejo Agung.^{1 13} Dari markas komando Pembrotakan PKI Rejo Agung inilah perebutan kekuasaan dimulai.

Pada 19 September 1948 pukul 02.00 pagi pasukan Brigade 29 di Gorang-Gareng Magetan telah bergerak untuk mengadakan perebutan kekuasaan setempat, yang kemudian disusul dengan perebutan kekuasaan setempat, yang kemudian disusul dengan perebutan kekuasaan di Kota Madiun. Sekitar pukul 03.30 malam itu, seluruh markas angkatan bersenjata RI serentak diserbu dan senjatanya dilucuti oleh pasukan Pembrotak FDR/PKI.

- 1) Panglima Angkatan Perang Indonesia, ditetapkan Kolonel Joko Suyono.
- 2) Gubernur Militer Madiun, ditetapkan Kolonel Sumarsono.
- 3) Bupati Madiun, ditetapkan Mr. Sugeng, sebelumnya sebagai jaksa Madiun.
- 4) Pejabat eselon di bawah berikutnya, pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Residen Madiun.
- 5) Radio Republik Indonesia Madiun diganti nama Radio

Front Nasional, Pers khusus bernama *Gelora Pemuda*, dibawah asuhan Kolonel Sumarsono.

- 6) Pejabat tinggi mendapat gelar "Tuan".
- 7) Semua Dewan Desa, aktif kembali dan diberi wewenang luas untuk mengatur desanya.
- 8) Yel-yel perjuangan dari pekik "Merdeka" diubah menjadi pekik "menang Perang"

Sesaat pembacaan pengumuman dari Pemerintah Front Nasional selesai, muncullah tokoh-tokoh : Muso, Amir Syarifuddin dan Surpono untuk berjabat tangan dengan para hadirin di ruang Karesidenan itu.¹¹⁴

Semua alat-alat Pemerintah Militer dan Sipil pada waktu itu telah lumpuh, begitu pula "Studio RRI" Madiun telah mereka kuasai, di samping telah mempunyai "Radio Gelora Pemuda" milik BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia).¹¹⁵ Kemudian Kolonel Mersono (ex Ketua Badan Pekerja BKPRI) dengan melalui radio lokal itu mengumumkan, bahwa "Dari Madiun Mulai Kemenangan". Yang dimaksudnya ialah bahwa perebutan kekuasaan antara kaum Komunis dan kaum non Komunis RI dimulai dari Madiun,¹¹⁶ demikianlah pada pukul 10.00 pagi diumumkan melalui radio Gelora Pemuda bahwa kota Madiun telah dikuasai oleh rakyat sendiri, yang telah mendirikan Pemerintahan Front Nasional. Kemudian disusul dengan rapat-rapat yang diadakan di Balai Rakyat Madiun yang dipimpin antara lain oleh : Amir Syarifuddin, Muso dan Joko Suyono. Sedangkan tentara Komunis/Merah dengan tanda merah mondar-mandir di sepanjang jalan.¹¹⁷

Dengan demikian kaum Komunis telah sepenuhnya menguasai kota Madiun semua alat Pemerintahan RI baik Sipil maupun Militer dan partai-partai lawan PKI – Muso tidak berdaya sama sekali. Walaupun demikian di dalam kota Madiun masih ada pula kekuatan militer yang berjuang untuk menegakkan Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Kekuatan militan itu berupa gerakan kaum pelajar dan anti PKI – Muso.

Pada waktu itu di Madiun terdapat organisasi Pelajar yang di sebut Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) yang markasnya di ruang atas Toko Tugu (sekarang Pos Polisi Tugu). IPI ini mempunyai bagian *Commissariat* yang khusus mengurus sekolah-sekolah s sejurusan. Di samping itu terdapat pula organisasi TRIP (Tentang Republik Indonesia pelajar) dan TGP (Tentara Genie Pelajar).

Pada 22 September 1948 (WIB) meletuskan perlawanan para pelajar Madiun terhadap Pemerintahan Front Nasional di Madiun. Perlawanan merupakan satu-satunya aksi yang menyatakan bahwa para pelajar tidak sudi diperintah dan tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sah. Sekitar 10.000 (sepuluh ribu) pelajar baik tingkat menengah pertama maupun tingkat atas, baik putra maupun putri, memenuhi jalan-jalan besar dan jalan utama menuju gedung pemerintah.

Aksi perlawanan tersebut ternyata dimulai dari Markas Detasemen TRIP Jawa Timur yang bersmarkas di Sekolah Menengah Atas Perjuangan jalan Ponorogo (sekarang SMP Negeri II Jalan Kyai Haji Agus Salim) Madiun.¹¹⁸ Hal ini komandannya (Mas Isman), bahwa TRIP Jawa Timur akan selaku berpihak pemerintah yang sah (RI). Apalagi soal itu RI ditusuk dari belakang ketika sedang menghadapi Belanda yang setiap waktu bisa menyerbu RI. Tentara Pelajar remaja yang dalam "*Sturm und Drang*" ini mempunyai satu keyakinan teguh, "*Right or wrong mycountry*". seperti yang pernah diucapkan Cromwell dari Inggris.

22 September 1948 itu pula Asrama TRIP diserbu oleh satu seksi anggota Pesindo dengan maksud melucuti para anggotanya Terjadilah tembak menembak. Seorang pelajar bernama Mulyadi ditembak (ditempat penjagaan markas TRIP) dan kemudian ditusuk dengan sangkur TRIP yang berada di bawah pimpinan Komando Sugito Ambon itu kemudian berhasil dilucuti oleh Tentara Merah dan sembilan orang pemimpinnya ditangkap, Jenazahnya Mulyadi pada hari itu juga dimakamkan dengan upacara kemiliteran di Taman Pahlawan dan diantar sekitar 1000 kaum pelajar.¹¹⁹

Peristiwa tersebut membangkitkan semangat para pelajar Madiun untuk menuntut balas kematian teman seperjuangannya Semenjak itu pula telah menjadi rahasia umum tentang adanya organisasi gerakan di bawah tanah kaum pelajar yang bernama PM (Pelajar Merdeka) dan PAM (Patriot Anti Muso). Organisasi kaum pelajar ini bertujuan untuk merobohkan Pemerintah Muso dan dengan jalan apapun akan menegakkan kembali pemerintahan yang sah, sambil menjaga jangan sampai terjadi pengrusakan-pengrusakan terhadap obyek-obyek vital kaum pembontak PKI.

Dengan maksud untuk mengambil hati para pelajar, pada 27 September 1948, Residen "Merah" Madiun (Abdul Mutalib) menyelenggarakan rapat pelajar di Pendopo Kabupaten madiun Para pelajar yang hadir pada rapat tersebut kurang lebih 6.000 orang. Dalam rapat itu Abdul Mutalib menjanjikan pembebasan pembayaran uang sekolah bagi para murid SR dan SLP, sedangkan para murid yang terputus hubungannya dengan orang tuanya akan dijamin sepenuhnya serta janji-janji lainnya. Kesemuanya itu dijawab oleh para pelajar bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan. Bahkan mereka menuntut : "Mulyadi minta ganti". Rapat menjadi kacau Segala gerak-gerak Abdul Mutalib waktu berpidato ditirukan. Pidato Abdul Mutalib disambut dengan ketawa, siulan dan ejekan riuh rendah. Puncak dari kehebohan para pelajar membawa masuk seorang gila untuk dihadapkan kepada Abdul Mutalib, sehingga ia terpaksa turun dari podium. Akhirnya rapat dibubarkan.¹²⁰ -

Selanjutnya pada 28 September 1948 pukul 16.00 dalam Rangka memperingati tujuh hari gugurnya Pahlawan Mulyadi, seluruh pelajar Madiun berbaris menuju ke Taman Pahlawan Madiun untuk menaburkan bunga di atas pusara Mulyadi. Di sana mereka bersama-sama menyanyikan lagu TRIP "Teman-ku Pahlawan" (sekarang disebut lagu Teringat Ku'kan Padamu) sebagai berikut :

TEMANKU PAHLAWAN

Lagu : Babdul Saleh

Syair : Suwandi

Teringat 'ku 'kan padamu Pahlawan Indonesia,
Waktu kau hendak kembali ke alam yang baka,
Terbayang roman mukamu yang suci dan berseri,
Saat tiba kau menghadap ke hadirat Allah.

Reff. :

Dengan tulus ikhlas kau kurbankan jiwamu,
Kau basahi bumi 'ngan darah K'satriamu,
Tak akan lenyap jasmani dari pada ingatan.
Perjuangan kuteruskan sampai ke akhir zaman.^{1 2 1}

Waktu pulang mereka berdemonstrasi. Setiap mobil berben-
dera merah mereka soraki dan meraka lempari dengan batu.
Mereka berteriak "dum"—"dum", (Artinya bagi ratalah) yang
merupakan suatu sindiran terhadap Pemerintah Front bagi rata-
lah yang merupakan suatu sindiran terhadap Pemerintah Front
Nasional yang telah membagi tanah *bengkok* pamong desa
pendukung RI kepada para petani yang pro komunis. Meraka
(FDR/PKI) tidak berani menghentikan mobilnya. Baru setelah
mendekati markas PKI — muso, pengendara mobil yang memba-
wa pistol itu berteriak minta tolong. Segerombolan PKI mem-
bawa senapan mesin dan senjata berat keluar untuk kemudian
laras-larasnya ditujukan kepada para pelajar yang tengah berde-
monstrasi itu. Kesemuanya tidak dihiraukan oleh para pelajar
bahkan dengan nada mengejek mereka menantang : "Kalau
berani, satu lawan satu". "Boleh tembak, kalau berani". Para
pemberontak tidak dapat berbuat apa-apa.

Sementara itu gerakan di bawah tanah PM dan PAM terus
beraksi Dengan penuh keberanian para pelajar menempelkan
plakat-plakat disetiap pelosok kota, yang bertemakan anti PKI
—Muso. Misalnya :

"Hancurkanlah Kekuasaan Muso". Tetap berdiri di belakang Sukarno-Hatta". "Pelajar Menuntut gantinya Saudara Mulyadi", dan sebagainya. Keadaan makin hari makin meruncing, lebih-lebih ketika usaha kaum pemberontak untuk memaksa TRIP agar mau memihak kepada mereka ditolak dengan tegas, bahkan dengan terang-terangan fihak TRIP menyatakan taat kepada RI. Gerak gerik para pelajar mulai diperhatikan oleh kaum pemberontak. Beberapa pelajar diculik tetapi tindakan kaum pemberontak itu tidak dapat mematahkan semangat kaum pelajar.

Ketika tentara Pemerintah RI (TNI) mulai menyerang kota Madiun, kaum pemberontak berkemas-kemas untuk melarikan diri dan rencana bumi hangus secara besar-besaran telah disiapkan. Tetapi rencana kaum pelajarpun sudah siap untuk mencegahnya. Bersamaan dengan masuknya TNI dalam Kota Madiun, para pelajar bergerak merebut Kota Madiun dari dalam. Mereka menduduki bangunan-bangunan penting dan dengan demikian bahaya bumi hangus dapat dihindarkan.¹²²

Sehari sesudah peristiwa coup d'état di Madiun, 19 September pukul 10.00 Presiden Sukarno berpidato di depan corong radio, yang isinya antara lain menyebutkan, bahwa rakyat disuruh memilih antara dua pilihan: ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Sukarno — Hatta yang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara RI kita ke arah Indonesia Merdeka, tidak dijajah negara apapun juga.¹²³

Satu setengah jam (11.30) kemudian Muso memberikan jawaban yang tajam di depan corong radio, yang antara lain menyatakan, bahwa: "Jika rakyat harus menjawab, mereka akan menjawab Sukarno — Hatta budak-budak Jepang dan Amerika! Pengkhianat-pengkhianat itu harus mati!" Dan rakyat akan berkata "Muso selalu berbakti kepada rakyat Indonesia."¹²⁴

Pengaruh pidato Presiden RI ternyata lebih besar dari pada pidato Muso. Menyadari akan hal itu, maka nada pidato dan pengumuman-pengumuman pihak Komunis yang semula tajam,

sejak 20 September 1948 sore berubah menjadi lebih lunak. Demikianlah analisa George Mc Turnar Kahin.¹²⁵

Untuk kepentingan pertahanan dan penindasan terhadap pemberontak, pada 19 September 1948 itu juga Presiden/Panglima Tertinggi dan Panglima Besar ABRI memaklumkan "Negara Dalam Keadaan Bahaya". Dan melalui corong radio Yogyakarta, diangkatlah Kolonel Sungkono (Panglima Divisi I) sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, dengan tugas menindak pemberontakan dan menggunakan pasukan-pasukan yang taat kepada Pemerintah RI, untuk merebut kembali kota Madiun dari tangan FDR/PKI - Muso dan mengamankan Jawa Timur seluruhnya.¹²⁶

Pada malam itu juga mulailah dilakukan penangkapan serempak di berbagai daerah, termasuk juga di ibu kota Jogjakarta sendiri. Para pemimpin PKI - Muso ditangkap. Beberapa kesatuan yang sejak semula menjadi pengikut Amir Syarifudin dilucuti dan sebagian ada yang menyatakan memihak kepada Pemerintah RI. Dengan demikian maka daerah pemberontakan Madiun dapat dibatasi tidak menjalar kesemua daerah RI. Hanya beberapa daerah yang sudah lama berada di bawah pengaruh FDR/PKI seperti Cepu, Ngawi, Purwodadi, Blora dan kota-kota kecil lainnya (Magetan) memihak RI dan melakukan perebutan kekuasaan.¹²⁷

Dalam pada itu Panglima Besar Jendral Sudirman telah memerintahkan pengepungan terhadap Kota Madiun. Gerakan pasukan Pemerintah RI dimulai pada 21 September 1948 dan diberi nama Gerakan Operasi Militer I (GOM I) Dari jurusan barat (Solo) dipimpin oleh Kolonel Sungkono.¹²⁸

Demikianlah pada 21 September 1948 Brigade 29 di Kediri telah dapat dilucuti, yang berakibat larinya Batalyon Maladi Yusuf. Selanjutnya satu brigade operasi yang dipimpin oleh Mayor RM. Yonosewoyo (dari Brigadi II/Surakhman atau Brigade "S") digerakkan ke Madiun dari sebelah timur dengan batalyon-batalyonnya:

- 1) Batalyon Mujayin dari selatan melalui Trenggalek menyer-

bu ke Ponorogo.

- 2) Batalyon gabungan yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin dari sebelah timur tengah melalui Sawahan ke Dungus – Madiun.
- 3) Batalyon Sudaryadi dari utara melalui Wilangan, Sarangan menyerbu kota Madiun.
- 4) Kompi II dari Batalyon Sudarsono yaitu Kompi Sabirin Mokhtar menyerbu dan mengejar Batalyon Maladi Yusuf, diikuti Kompi Sumasi dari Batalyon Sunandar, yang kemudian menamatkan riwayat Muso di desa Semanding Sumoroto setelah terjadi kejar-kejaran dan duel di atas dokar selama hampir sehari penuh.¹²⁹

Dari sebelah barat Karesidenan Madiun, melalui Tawangmangu, Sragen, Plaosan sebagai imbang, digerakkan Brigade Siliwangi di bawah pimpinan Letkol. Sadikin yang terdiri atas:

- 1) Batalyon Akhmad Wiranatakusuma.
- 2) Batalyon Lucas
- 3) Batalyon Daeng.
- 4) Batalyon Nasuhi
- 5) Batalyon Kusno.
- 6) Kompi Taruna Akademi Militer (SORA Sarangan) pimpinan Letkol Dr. Singgih.¹³⁰
- 7) Sebagian dari Pasukan Siliwangi yang dikepalai oleh Mayor Sentot Iskandar Dinata bergerak melalui jalan raya Solo Madiun, melewati Sragen kemudian menggempur pertahanan PKI – Muso di Ngawi dibantu oleh pasukan-pasukan dari Batalyon Sukowati, pasukan Banteng dan Hisbullah.¹³¹

Gerakan pasukan-pasukan yang taat kepada Pemerintah RI tersebut berjalan dengan lancar, sehingga dalam waktu 12 hari saja Kota Madiun dapat diduduki kembali. Demikianlah pada 30 September 1948 pukul 16.30 pasukan pertama dari Divisi Siliwangi telah masuk Kota Madiun. Tentara yang menyerbu Madiun itu dipimpin oleh Kapten Syafei dari Batalyon Kian Santan dan dibantu oleh Batalyon Sukawati serta kadet-kadet Akademi

Militer.¹³² Kemudian para pemberontak lari dan mengundurkan diri ke Dungus. Malam itu juga Batalyon Sunaryadi dari Brigade Yonosewoyo masuk Kota Madiun.¹³³

Pada 31 Oktober 1948 TNI meneruskan pengejaran ke Dungus. Pertempuran berlangsung tidak lama. Segera kaum pemberontak PKI – Muso diusir ke selatan. Di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari Dungus, yaitu desa Kresek, diketemukan banyak mayat orang yang dibunuh kaum pemberontak dengan cara kejam. Penyembelihan manusia dilakukan di sebuah kamar hingga darah yang melimpah di lantai kamar itu kurang lebih tebalnya sampai 2 cm. Lebih dari 1000 orang yang dibunuh dengan dipotong lehernya, dicincang ataupun ditembak, ketika mereka (PKI) akan melarikan diri. Menurut Gadis Rasyid, wartawan wanita dari *Siasat* yang mengikuti operasi Divisi Siliwangi dari Solo sampai Madiun, pembunuhan seperti di Dungus itu juga terjadi di Magetan, Sumoroto, Ponorogo, Purwodadi dan Kanigoro.¹³⁴

Pengejaran terhadap pemberontak PKI oleh TNI terus dilakukan. Pada 31 Oktober 1948 Kapten Sunandar Priyosudarmo (kemudian menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur) sebagai Komandan Batalyon Brigade "S", dengan bantuan Letnan Sumadi dan pasukan seksi Letnan Dua Mustajab, telah berhasil menembak mati gembong PKI – Muso di desa Semanding (lk. 2 km. dari Sumoroto - Selatan Ponorogo); setelah terjadi duel di atas dokar dan kejar mengejar selama hampir satu hari.¹³⁵ Selanjutnya tokoh-tokoh pemberontak PKI tertangkap satu persatu, antara lain Residen PKI Madiun Abdul Mutalib tertangkap di desa Girimarto dan 5 Nopember itu tertangkap pula Jokosuyono, Maruto Darusman dan Fransisca Fangida di desa Nawangan. Akhirnya Amir Syarifuddin dan Suripno 29 Nopember 1948 di desa Klambu daerah Purwodadi dapat ditangkap oleh TNI.

Ketika masih dalam pengejaran, gerombolan PKI di bawah pimpinan Maladi Yusuf (sumber lain: Amir Syarifuddin) pada 11 Nopember 1948 di desa Bogo, Kedunggalar, Ngawi dapat

menyergap mobil RMTA. Suryo (mantan Gubernur Jawa Timur dan waktu itu menjabat Ketua DPR RI) yang datang dari Jogja mau ke Madiun dan mobil yang ditumpangi oleh Komisaris Besar Polisi M. Duryat dan Komisaris Polisi Suroko yang akan ke Yogya dari arah Madiun. Mereka kemudian dibawa ke hutan Sonde dan dibunuh secara kejam oleh gerombolan sisa-sisa PKI Madiun itu.¹³⁶

Kejadian tersebut menggemparkan orang-orang di Jogja (ibukota RI). Untuk menghormati gugurnya pak Suryo cs. pemerintah memutuskan untuk mengibarkan bendera setengah tiang dan sebagai pengganti pak Suryo diangkatlah pak Sutarjo Kartohadikusumo selaku Ketua Dewan Pertimbangan Agung. (DPA)¹³⁷

Setelah tokoh-tokoh peberontak PKI/Muso tertangkap, mereka kemudian dibawa ke Yogyakarta (pada akhir Nopember) dan selanjutnya pada bulan Desember dipindahkan ke Surakarta. Akhirnya pada 20 Desember 1948 setelah Belanda melancarkan Aksi Militernya II, tawanan-tawanan pemimpin pemberontakan PKI Madiun (Amir cs) itu dihukum militer, di desa Ngalihan, Karanganyar, sebelah timur Surakarta.¹³⁸

4.4.3 *Politik Divide et Impera HJ. Van Mook*

Politik *divide et impera* atau politik memecah belah dan menguasai telah lama dilaksanakan pihak Belanda dalam rangka usaha untuk menguasai wilayah Indonesia. Misalnya, Belanda dapat menguasai Makasar (Ujung Pandang) atas hasil adudombanya antara Sultan Hassanudin dengan Aru Palaka (abad XVII) juga Belanda secara tidak langsung dapat menguasai Mataram atas hasil perselisihan antara Mangkubumi dan Mas Said di satu pihak dengan Pakubuwana (II & III) di pihak lain yang mengakibatkan Mataram pecah menjadi tiga bagian (Surakarta, Yogyakarta dan Mangkunegaran - abad XVIII). Rupanya setelah Perang Dunia II berakhir, Belanda ingin merebut kekuasaan atas daerah Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia dengan cara yang sama, yaitu mengetrapkan politik *divide e impera* kembali. Hal itu nampak bahwa sejak awal perundingan pihak

Belanda dengan perantaraan Letnan Gubernur Jendral Dr. HJ. van Mook pada 10 Pebruari 1946 telah menyatakan garis politiknya yang terdiri atas 6 fasal, yang antara lain menghendaki Indonesia menjadi negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *self government* di dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Dengan adanya bentuk negara federasi berarti di Indonesia akan muncul negara-negara bagian. Menurut tinjauan G.M.T. Kahin politik penciptaan negara-negara bagian oleh Belanda di Indonesia pada waktu itu sebenarnya merupakan politik penguasaan yang tidak langsung (*indirectrule*). Artinya, pada hakekatnya yang berkuasa ialah Belanda, tetapi yang melaksanakannya ialah orang-orang Indonesia sendiri.¹³⁹

Demikianlah pada 15 s/d 25 Juli 1946 van Mook mulai mempropagandakan garis politik pemerintahannya di dalam konperensi Malino (suatu tempat di Sulawesi Selatan) yang dihadiri oleh 36 orang (yang telah menyeberang kepada NICA) sebagai wakil-wakil daerah di luar Jawa – Sumatera. Konperensi Malino diselenggarakan dan dipimpin oleh Van Mook dengan tujuan sebagai langkah pertama untuk mementuk "negara-negara" di daerah yang baru diterima dari Inggris. (daerah Kalimantan dan Timur Besar – Grote Oost 13 Juli 1946; daerah Jawa dan Sumatra – 30 Nopember 1946). Negara-negara itu kelak dijadikan imbalan terhadap RI, untuk memaksa RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh Pemerintah Belanda.

Sebagai tindak lanjut (*follow up*) dari konferensi Malino muncullah negara-negara baru di wilayah Indonesia, dengan memisahkan diri dari Pemerintah RI dan berorientasi kepada Pemerintahan Hindia Belanda, yang biasanya oleh pihak RI disebut Negara Boneka (Belanda). Demikian juga di Jawa Timur pada tahun 1948 muncul dua negara boneka, yaitu Negara Madura (20 – 2 – 1948) dan Negara Jawa Timur (26 – 11 – 1948). Tentang bagaimana munculnya kedua negara Boneka di Jawa Timur, secara garis besarnya dapat dituturkan sebagai berikut.

1) *Negara Madura (20 - 2 - 1948)*

Terbentuknya Negara Madura dapat lebih mudah dilaksanakan oleh Belanda antara lain disebabkan, bahwa kecuali status pulau Madura pada waktu itu secara geografis dan ekonomis telah terpencil dari Republik, tetapi tak dapat pula dilupakan faktor-faktor tradisi-feodalisme juga merupakan bahan yang subur bagi Belanda untuk melancarkan politik *divide et imperanya* di pulau Madura.¹⁴⁰

Pulau Madura adalah suatu daerah yang terkenal sebagai gudang garam dan terkenal akan kekayaan hasil ternaknya, tetapi merupakan daerah *minus* dalam bidang penghasilan pangan dan sandang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya rakyat daerah Madura harus mendatangkan beras dari Besuki dan pakaian dari Surabaya (atau dari Jawa Timur).¹⁴¹ Jadi secara geografis ekonomis daerah Madura sangat erat hubungannya dengan Jawa Timur. Secara politis sebelum Aksi Militer Belanda II, Pulau Madura menjadi Daerah Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur yang berstatus karesidenan. Untuk memutuskan hubungan Pulau Madura dengan Jawa Timur maka Belanda melancarkan politik blokade ekonomi terhadap Madura dengan mengadakan blokade di lautan pantai Besuki, (pelabuhannya Penarukan). Tiap ada kapal atau perahu RI yang membawa makanan untuk Madura terus dicegat dan isinya dirampas. Akhirnya isolasi Pulau Madura dari RI makin ketat dan bagi rakyat Madura yang mentalnya kurang kuat menganggap daerah dianaktirikan oleh RI.

Dalam suasana rakyat Madura menghadapi kesulitan tersebut pecahlah Aksi Militer Belanda I yang membawa akibat jatuhnya Pulau Madura ke tangan Pemerintah *RECOMBA* Belanda (*Regeringscommissi arissen voor Bestuursangelegenheden*) pada bulan Agustus 1947. Sedangkan kedudukan Pemerintah RI Daerah semula pindah ke pegunungan Pengantenan kemudian pindah lagi ke daerah Manding, Kabupaten Sumenep. Pada waktu itu Pemerintah RI Pusat telah mengeluarkan instruksi bahwa siasat diplomasi hanya menjadi hak Pemerintah RI. Pusat.¹⁴²

Dalam keadaan yang serba sulit itu pihak Belanda melancarkan suatu propaganda yang halus tentang bagaimana Madura dan rakyatnya menjadi miskin dan menderita selama "dijajah" dan dianak-tirikan oleh RI. Propaganda tersebut rupanya pada 21 September 1947 dengan alasan sakit meletakkan jabatannya sebagai Residen Madura (RI) dan beberapa bulan kemudian menyatakan bersedia bekerja sama dengan Pemerintah RECOMBA (Belanda). Demikian pada 21 Nopember 1947 terbentuklah Pemerintah RECOMBA daerah Madura dengan RAA. Cakraningrat sebagai Residennya, yang langsung bertanggungjawab kepada RECOMBA Jawa Timur (di bawah pimpinan CH. O. Van Der Plas).¹⁴³

Dalam bulan Desember 1947 di Jakarta terbentuklah "Komite Indonesia Serikat" yang terdiri dari wakil-wakil Negara Bagian (ciptaan Belanda), dengan tujuan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Dalam menanggapi peristiwa tersebut pada 14 Januari 1948 Residen RAA. Cakraningrat membentuk suatu "Komite Penentuan Kedudukan Madura" yang terdiri dari 11 orang (RAA. Cakraningrat sebagai penasehatnya) dengan tugas untuk menentukan status Madura sebagai satuan kenegaraan yang tidak terikat oleh kekuasaan RECOMBA. Namun demikian perlulah diketahui bahwa sebenarnya keinginan membentuk negara Madura itu berasal dari Belanda sendiri, agar negara Indonesia Serikat menjadi kuat.¹⁴⁴

Pada 16 Januari 1948 Komite tersebut ternyata telah menghasilkan sebuah resolusi, yang akan dimintakan "persetujuan" rakyat pada waktu yang ditentukan. Resolusi tersebut kemudian disampaikan kepada rakyat, yang isinya antara lain sebagai berikut :

- a) Perhubungan antara Madura dan RI telah terputus.
- b) Menentukan status Madura dalam tokoh sebuah Negara merdeka sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
- c) Menunjuk RAA. Cakraningrat, Bupati Bangkalan sebagai utusan Madura dalam Dewan dari Pemerintah Peralihan.
- d) Meminta kepada RAA. Cakraningrat untuk memegang

pemerintahan Negara Madura.

- e) Memberikan kekuasaan penuh kepada Wali Negara dan Panitia untuk menetapkan kedudukan Negara supaya :
 - (1) Tokoh pemerintahan ditetapkan dasarnya asas-asas demokrasi dari persetujuan Linggajati.
 - (2) Banyaknya utusan dari Madura di dalam Dewan Pemerintahan Peralihan ditetapkan menjadi tiga orang anggota.
 - (3) Banyaknya panitia untuk menetapkan kedudukan Negara Madura ditambah jika perlu.
- f) Dan meminta kepada Pemerintah Belanda supaya kedudukan Negara Madura diakui sesuai dengan huruf b.¹⁴⁵

Setelah tujuh hari lamanya resolusi tersebut disampaikan kepada rakyat, maka dalam keadaan situasi perang dan pengepungan serta rakyat tertekan pada 23 Januari diadakan pemungutan suara dengan hasil, 199.510 setuju, 9923 menolak dan 10.230 suara blanko. Akhirnya berdasarkan "resolusi" yang dengan tekanan-tekanan telah "disetujui" oleh rakyat Madiun, maka pada 20 Februari 1948 oleh Letnan Gubernur Jendral Dr. HJ. Van Mook diakui status Madura sebagai "Negara" dengan Eks Residen RAA. Cakraningrat sebagai wali negaranya.

Dalam pada itu sejak berdirinya "Negara Madura" dengan susunan pemerintahannya, mulailah terasa adanya tekanan-tekanan dari alat-alat kekuasaannya dengan dibantu orang-orang NEFIS (*Nederlands Forces Intelligence Service*) dan MVD (*Militaire Veiligheids Dienst*) Belanda, terhadap segala apa yang berbau Republik Indonesia. Akibatnya banyak para pejuang yang meninggalkan Pulau Madura untuk meneruskan perjuangannya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Madura secara diam-diam muncul pula pejuang *illegal*, yang dengan sembunyi-sembunyi terus mengembangkan hasrat rakyat untuk mengembalikan Daerah Madura ke dalam lingkungan Republik seperti sediakala.

Demikian pula putra-putra Madura yang berjuang di luar Madura dalam bentuk GERAKAN PERJUANGAN MADURA (se-mula berpusat di Tuban kemudian di Jogjakarta) menolak adanya "Negara Madura" dan menuntut dikembalikannya ke dalam lingkungan RI. Namun demikian tuntutan mereka baru berhasil setelah Presiden RIS mengeluarkan surat keputusan No. 110 9 Maret 1950 yang menetapkan bahwa Daerah Madura menjadi Karesidenan Republik Indonesia.¹⁴⁶

2) *Pembentukan Negara Jawa Timur (26 November 1948)*

Dari uraian di atas nampaklah bahwa dengan perantaraan Dr. Charles vander Plas politik *divide et impera*-nya Van Mook telah ditetapkan di Jawa Timur, dengan menggunakan taktik separatisme (memisahkan Madura dari Negara RI). Hal yang demikian itu sebenarnya oleh Dr. CH. vander plas sebagai Kepala RECOMBA Jawa Timur (Pemerintah Komisioner Belanda = Pemerintah Federal Sementara) telah diusahakan di daerah pendudukan Jawa Timur, namun rakyat Jawa Timur yang sadar betapa bahayanya politik separatisme itu. Memang demikianlah kenyataannya, bahwa pembentukan negara dan satuan-satuan kenegaraan yang memisahkan diri dari RI itu semata-mata dimaksudkan untuk secara politis dan ekonomis mengepung kedudukan RI yang dengan terang-terangan serta terus menerus menentang muslihat Belanda. Baru setelah 10 bulan lamanya usaha tersebut dijalankan 26 Nopember 1948 di Jawa Timur muncul suatu negara yang terdiri dari 3 karesidenan daerah pendudukan (Surabaya, Malang dan Besuki).

Usaha-usaha pertama untuk mendirikan Negara Jawa Timur itu sebenarnya telah dimulai di Surabaya pada 24 Januari 1948 dengan adanya konperensi Jawa Timur di Gedung Nasional Indonesia Surabaya. Namun usaha tersebut dapat digagalkan oleh kaum republikan (yang pro-RI). Karena di Surabaya tidak berhasil, maka daerah operasinya pindah ke Malang. Dengan mendekati kaum ulama di Malang didirikan Dewan Islam Jawa Timur di bawah pimpinan KH. Nuryasin. Namun usahanya

tidak berhasil, karena Dewan tersebut tinggal diam. Kemudian daerah operasinya pindah ke Karesidenan Besuki. Pada 21 Maret 1948 pihak Belanda mengadakan rapat para bupati daerah pendudukan se Jawa Timur di Kota Banyuwangi. Rapat tersebut menghasilkan gerakan baru yang bernama *Persatuan Rakyat Djawa Timur* (PRDT = ejaan baru : Persatuan Rakyat Jawa Timur) di bawah pimpinan Darsosukur. Gerakan baru ini juga bermaksud membentuk "Negara Jawa Timur" yang akan bekerja sama dengan Belanda serta melepaskan diri dari RI. Namun propaganda PRDT disambut dengan dingin oleh rakyat Besuki khususnya dan Jawa Timur umumnya, karena itu usahanya telah gagal. Tetapi pihak Belanda tidak putus asa. Atas usahanya berdirilah badan politik baru di Bondowoso dengan nama *Gerakan Rakyat Djawa Timur* (GRDT; ejaan baru: Gerakan Rakyat Jawa Timur), di bawah pimpinan Moh. Basri, Suryatin, Hutomo dan lain-lainnya. Asas dan tujuan gerakan baru ini sama dengan PRDT, tetapi propaganda gerakan baru ini terutama lewat sarana kesenian dan perekonomian (mendirikan Persatuan Warung Indonesia). Usaha inipun ternyata gagal.

Demikianlah bermacam-macam usaha untuk mendirikan "Negara Jawa Timur" yang diusahakan oleh pihak Belanda selalu mengalami kegagalan. Hal itu suatu pertanda bahwa walaupun mengalami tekanan dan tindasan di daerah pendudukan Belanda, rakyat Jawa Timur tetap tak ingin daerahnya dipindahkan dari RI.¹⁴⁷

Setelah usaha fase pertama, dengan mempengaruhi rakyat Jawa Timur, pihak Belanda berhasil membentuk "Negara Jawa Timur", maka usaha fase kedua dilaksanakan dengan melalui pembentukan "Dewan-dewan Perwakilan Rakyat" di setiap kabupaten (daerah pendudukan) dengan jalan "pemilihan". Demikianlah dengan Ordonansi 13 Agustus 1948 (Staatsblad No. 179) Pemerintah Federal Sementara (RECOMBA) memberi "kesempatan" kepada rakyat di Jawa Timur untuk mengadakan pemilihan umum, untuk memilih wakil-wakilnya di Dewan-Dewan Kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Pada pertengahan bulan September 1948 dilangsungkanlah "pemilihan"

tersebut, yang berakhir dengan lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara di kabupaten dan di 2 kota, dan dilantik mulai pada 11 Oktober 1948.

Berturut-turut pada 11 Oktober 1948 dibentuk DPR Kabupaten Banyuwangi dan Panarukan, pada 14 Oktober di Kabupaten Bondowoso dan Jember, 15 Oktober di Kabupaten Surabaya dan Mojokerto, 16 Oktober di Kabupaten Lumajang dan Kraksaan, tanggal 18 Oktober di Kabupaten Malang dan Probolinggo tanggal 19 Oktober di Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo, tanggal 5 Nopember di Kota Surabaya dan tanggal 8 Noverber 1948 DPR Kota Malang.¹⁴⁸

Menurut keterangan Dr. Charles van der Plas (Komisioner Pemerintah Jawa Timur) pemilihan para wakil DPR tersebut dilakukan secara demokratis sehingga mereka itu sungguh-sungguh merupakan wakil rakyat Jawa Timur. Namun menurut penelitian GMT. Kahin, yang datang di Surabaya pada bulan April 1949 telah mengungkapkan suatu kenyataan bahwa pemilihan umum tersebut merupakan tipu muslihat yang licin (akal politik *Machiavelli*) untuk membentuk DPR yang anggota-anggotanya bersedia mendukung kehendak Pemerintah Belanda untuk membentuk "Negara Indonesia Timur". Akibatnya pihak Belanda berusaha agar para wakil rakyat yang pro Republik (Republiken) dibatasi seminim mungkin. Dengan sendirinya para calon Republiken sebelum pemilihan berlangsung dipaksa untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke daerah pedalaman. Selain dari itu banyak para pemimpin yang pro Republik, dimasukkan penjara, sehingga para calon yang pro Republik tinggal beberapa saja jumlahnya. Apabila hasil pemilihan ternyata jumlah wakil Republiken terlalu banyak, maka Pemerintah Belanda setempat berhak membatalkan. Misalnya di Jember, salah satu Kabupaten yang paling militan kaum Republikennya di antara 12 kabupaten, hasil pemilihannya dibatalkan oleh pembantu residen Belanda dan diperintahkan untuk mengadakan pemilihan yang kedua. Hal itu disebabkan oleh karena tiga perempat wakil kaum Republiken telah terpilih sebagai anggota DPR. Selanjut-

nya sebelum pemilihan umum ulangan dilaksanakan para calon Republiken yang dalam pemilihan pertama terpilih, dimasukkan penjara, sehingga dalam waktu enam sampai delapan minggu sesudah pemilihan umum di Jawa Timur selesai, lima sampai 10 persen jumlah anggota DPR Kabupaten-kabupaten Jawa Timur masuk penjara. Paling sedikit 10 persen dari para anggota dewan yang telah terpilih dimasukkan penjara.¹⁴⁹

Demikianlah sebenarnya pembentukan dewan dewan perwakilan rakyat di Jawa Timur pada waktu itu sebelumnya telah diatur oleh Belanda sedemikian rupa sehingga yang terbanyak menjadi anggotanya ialah orang-orang yang pro pembentukan "Negara Jawa Timur" (orang-orang PRDT dan GRDT). Maka dari itu tidaklah mengherankan setelah pelantikan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat selesai, mereka dengan serentah mengajukan mosi-mosi dan resolusi kepada Pemerintah Federal Sementara (RECOMBA) untuk memberikan status "Negara" kepada Daerah Jawa Timur. Dengan dasar revolusi inilah kemudian Dr. Charles van der Plas (sebagai Komisioner Pemerintah Belanda di Jawa Timur) menyelenggarakan Konperensi Dewan-Dewan Kabupaten pada 16 Nopember sampai 3 Desember 1948 di Bondowoso. Untuk membatasi kehadiran para anggota dewan yang pro Republik, dalam hal ini Dr. Ch. van der Plas tidak mengundang seluruh anggota Dewan-Dewan Kabupaten, tetapi tiap-tiap kabupaten yang terdiri dari 12 kabupaten itu hanya mengirimkan tiga setiap 12 wakil. Dalam keadaan demikian Konperensi tersebut dilaksanakan dengan diketahui oleh RTP. Akhmad Kusumonegoro (bupatei Banyuwangi), dihadiri 75 orang wakil Dewan-Dewan Kabupaten, dengan acara pokok penentuan status Daerah Jawa Timur yang diduduki oleh Belanda.

Dalam Konperensi tersebut telah terjadi blokade suara yang kuat terhadap anggota Dewan yang pro Republik, yang jumlahnya sangat kecil. Sehingga segala kecaman dari pihak oposisi seperti Mr. Indrakusuma, Dr. Drajat, Jaswadi Suprpto, Bah-reisj, Ponco cs, selalu ditolak oleh Konperensi tanpa ampun

(zonder meer). Dengan demikian maka ketika pada 19 November 1948 diadakan pemungutan suara pihak yang setuju pembentukan "Negara Jawa Timur" mendapat 61 suara, 11 suara menolak dan 1 blanko. Dengan demikian Konperensi Bondowoso telah menyetujui berdirinya "Negara Jawa Timur". Sesudah itu Konperensi mengusulkan pula agar para anggota Konperensi tersebut diakui sebagai DPR "Negara Jawa Timur".

Ternyata keputusan Konperensi Bondowoso tersebut dapat disetujui oleh Pemerintah Belanda di Jakarta, sehingga pada 26 Nopember 1948 berdirilah "Negara Jawa Timur" secara resmi dan para anggota Konperensi diakui sebagai anggota DPR Sementara "Negara Jawa Timur". Selanjutnya pada 1 Desember 1948 RTP. Akhmad Kusumonegoro terpilih sebagai Wali Ngaranya. Sedangkan pelantikan wali negara dan Badan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Jawa Timur tersebut dilakukan oleh wakil Tiinggi Mahkota (*Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon*) Belanda Dr. Beel pada 3 Desember 1948, tepat pada upacara penutupan Konperensi Bondowoso.¹⁵⁰

Walaupun dalam Konperensi Bondowoso pihak pendukung Republik mengalami kekalahan, namun tidak putus asa. Mereka berjuang terus mencari kesempatan untuk mengembalikan "Negara Jawa Timur" ke lingkungan RI. Kesempatan itu datang setelah pada 27 Desember 1949 pihak Belanda mengakui kedaulatan Pemerintahan RIS. Mereka bergolak dan mengajukan resolusi-resolusi untuk membubarkan Negara Jawa Timur dan memasukkannya ke lingkungan RI. Akhirnya pada 25 Pebruari 1950 dalam resolusi bersama yang diambil dalam konperensi antara Dewan Perwakilan Rakyat (RI) Jawa Timur dan Pemerintah Negara Jawa Timur di ruang kantor Gubernur di Surabaya telah diputuskan, bahwa hari itu Daerah Negara Jawa Timur dengan resmi dinyatakan menjadi Daerah Republik Indonesia.¹⁵¹

4.5 Perjuangan Masyarakat pada Berbagai Bidang Kegiatan Kehidupan

4.5.1 Tata Pemerintahan

Di muka telah diutarakan, bahwa dalam zaman pendudukan Jepang Pulau Jawa tidak dibagi atas dasar pembagian propinsi tetapi berdasarkan atas pembagian *syuu*. Luas daerah *syuu* sama dengan karesidenan dalam zaman Belanda, tetapi fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residen dahulu merupakan daerah-daerah pembantu gubernur (residen). Sedangkan *syuu* merupakan pemerintahan daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah *Syuucookan* yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur. Pada waktu itu wilayah Jawa Timur terbagi atas 7 *syuu* yaitu : Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura.^{1 5 2} Tetapi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dengan adanya keputusan sidang PPKI 19 Agustus 1945 status *syuu* kembali menjadi karesidenan-karesidenan, yang merupakan daerah bagian administratif dari suatu propinsi. Tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan tiap karesidenan dipimpin oleh seorang residen. Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari baik gubernur maupun residen masing-masing dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Dengan demikian secara teoritis dalam bulan Agustus 1945 itu Daerah Jawa Timur berstatus provinsi, yang mempunyai 7 karesidenan, sesuai dengan apa yang telah berlaku di Jawa Timur, maka setiap karesidenan meliputi kabupaten-kabupaten; setiap kabupaten terdiri dari kawedanan-kawedanan; setiap kawedanan membawahi kecamatan-kecamatan dan setiap kecamatan melingkupi desa-desa.^{1 5 3} Sedangkan kota Surabaya menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur. Tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dengan segera dapat diwujudkan oleh karena pada waktu itu Pemerintahan Militer Jepang masih berkuasa di Jawa Timur. Untuk menjalankan roda pemerintahan di Jawa Timur perlu adanya gerakan perebutan kekuasaan terhadap Jepang. Perebutan kekuasaan tersebut baru seluruhnya tercapai pada

bulan Oktober 1945 setelah Pañglima Divisi Jepang di Jawa Timur Jendreal *Iwabe Shigewa* dan Laksamana *Shibata Yai-chiro* menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah RI yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Sudirman. Dengan demikian tersusunlah Pemerintahan Jawa Timur dengan personalianya sebagai berikut :

- 1) Gubernur Jawa Timur : R.M.T.A. Suryo
- 2) Wakil Gubernur : Sudirman
- 3) Residen Surabaya : Sudirman
- 4) Residen Bojonegoro : Mr. Hendromartono
- 5) Residen Madiun : RMTA. Kusnindar.
- 6) Residen Kediri : Pratalikrama
- 7) Residen Malang : Mr. Singgih (dilaksanakan pejabat Residen RAA. Sam).
- 8) Residen Bekasi : Mr. Budhyarto (kemudian diganti: Mr. Suryadi).

Gubernur RMTA Suryo sebagai pemimpin Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf gubernur yang antara lain terdiri dari : Cak Dul Arwono ketua Komite Nasional Daerah Surabaya = KND. - Sby, Roeslan Abdulgani (penulis KND. Sby) Mr. Dwijosewoyo (wakil ketua II KND. - Sby), Bambang Suparto (wakil ketua I KND. Sby) Subyantoro dan beberapa tokoh lainnya. (Periksa Bab. II. B). Sedangkan KNI Daerah Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk sejak 28 September 1945 dengan Sudirman sebagai ketuanya, Dul Arnowo sebagai wakil ketua I dan Mr. Suryadi menjadi wakil ketua II.

Adapun KNI Daerah Karesidenan Surabaya terbentuk 28 Agustus 1945. terdiri dari 32 anggota, dipimpin oleh Cak Dul Arnowo sebagai ketua, Bambang Suparto dan Mr. Dwijosewoyo sebagai wakil ketua I dan II, dan Roeslan Abdulgani sebagai penulis.^{1 5 4}

Setelah pertempuran 10 November 1945 (di Surabaya) berkobar, maka baik pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur

maupun pemerintahan daerah Karesidenan Surabaya terpaksa pindah ke Mojokerto. Di situ kantor gubernur dan Karesidenan Surabaya disusun kembali dan dibagi menurut keperluan dalam tiga bagian, yakni : di Mojokerto (Pusat), perwakilan di desa Taman, perwakilan di kota (Surabaya, bersama-sama dengan pemerintahan kota).¹⁵⁵ Setelah seminggu lamanya di Mojokerto, 17 November 1945 Pemerintahan RI Daerah Propinsi Jawa Timur pindah lagi ke Kediri sampai bulan Pebruari 1946. Pada bulan Pebruari 1946 Pemerintah RI Daerah Jawa Timur pindah lagi ke Malang. Ketua pemerintahan RI daerah Jawa Timur berada di Malang terjadilah mutasi, karena Gubernur RMTA. Suryo oleh Pemerintah RI Pusat diangkat menjadi anggota (wakil ketua) Dewan Pertimbangan Agung. Sebagai gantinya Pemerintah RI Pusat kemudian mengangkat Dr. Murjani sebagai Gubernur Jawa Timur (Juni 1947).¹⁵⁶

Pada 21 Juli 1947 Aksi Militer Belanda I dihancurkan. Ibu kota Karesidenan Malang, Besuki dan Madura diduduki Belanda. Akibatnya pemerintah RI daerah Provinsi Jawa Timur pindah ke Kota Blitar sampai 21 Desember 1948. Pada 21 Desember 1948 Blitar diduduki Belanda sebagai akibat berkobarnya perang kemerdekaan II (Aksi Militer Belanda II). Pada waktu itu Belanda telah dapat menduduki tempat-tempat yang vital dalam bidang ekonomis dan seluruh ibukota karesidenan di Jawa Timur, sehingga staf pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur melanjutkan pemerintahannya di Gunung Wilis bersama-sama dengan Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono. Tetapi pada 24 Februari 1949 Gubernur Dr. Murjani, Wakil Gubernur Dul Arnowo, dan beberapa pembesar lainnya tertangkap Belanda, kemudian diangkut ke Surabaya.

Setelah Dr. Murjani berada di Surabaya (di Hotel *Sarkies*) dengan melalui seorang kurir secara lisan menyampaikan pesan agar Residen Surabaya Sudirman untuk sementara mewakili jabatan Gubernur Jawa Timur. Tetapi tak lama kemudian pada 9 April 1949, Residen Sudirman meninggal dunia di desa Joges (Kecamatan Plemahan, Kawedanan Papar, Kediri).¹⁵⁷ Karena

itu roda Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Timur dilanjutkan oleh wakil gubernur Samadikun, yang sejak Blitar diduduki Belanda (21 - 12 - 1948) telah mendapat tugas dari Gubernur Militer Sungkono untuk melanjutkan perjuangan di daerah Blitar Selatan (Lodoyo) bersama-sama dengan Bupati Blitar Darmadi (ayah Supriyadi).¹⁵⁸

Kemudian ada data yang menerangkan, bahwa pada 15 Maret 1949 datanglah instruksi dari Pemerintah Darurat RI Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo (yang pada waktu itu berada di desa Nglorok - Pacitan) kepada wakil Gubernur Samadikun untuk mengadakan perjalanan keliling seluruh Jawa Timur. Tugasnya ialah untuk mengadakan hubungan langsung dengan para residen RI Jawa Timur di daerah-daerah yang bersangkutan dengan diberi batas waktu agar selesai dalam tempo dua bulan.

Demikianlah, dengan ditemani Sudarno (dulu, anggota IPPI Jogya) dan Sumardi (dulu anggota IPPI Kediri) Wakil Gubernur Samadikun mengadakan perjalanan dinas "*long - march* keliling Jawa Timur selama dua bulan untuk mendapatkan laporan dari para Residen Jawa Timur. Adapun para Residen yang memberikan laporan pada waktu itu ialah : Residen Malang R Abubakar Kartowinoto (di Desa Sindurejo, Tumpang), Wakil Residen Surabaya M. Sutaji (di Desa Gudo, Jombang), Residen Bojonegoro Mr. Tandiono Manu (di Desa Deling), Residen Madiun Pamuji dan Wakil Residen Madiun Sidarta (di Desa Seran, perkebunan Kandangan), Residen Kediri R. Suwondo Ranuwijoyo dan utusan Residen Besuki R. Sukartono (di Desa Seran).

Hasil perjalanan dinas tersebut kemudian disusun menjadi suatu laporan yang berisi analisa semua keadaan dan peristiwa dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan pemerintahan Jawa Timur yang memberikan kesimpulan penting, bahwa perjuangan bangsa Indonesia bagaimanapun pasti mencapai kemenangan. Laporan tersebut ditulis dengan pensil dan tertanggal "JUNGGRING SALAKA", 22 Mei 1949. Pada 27 Mei 1949 laporan

tersebut diterima oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo, yang pada waktu itu berada di Ddewa Nglorok (Pacitan) markas Pemerintah Darurat RI. Laporan tersebut ternyata semakin mempertebal keyakinan Pemerintah RI, bahwa sekalipun Presiden, Wakil Presiden serta pra pemimpin Negara RI lainnya ditawan oleh Belanda, namun Pemerintah RI tetap berjalan.¹⁵⁹

Data tersebut di atas memberikan petunjuk, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia dengan melalui Aksi Militer II, tidak dapat memusnahkan Pemerintahan Negara RI. Dalam hal ini PBB dengan UNCI-nya (*United Nations Commission on Indonesia*) yang berada di Indonesia, dengan giat mengusahakan jalan keluar dengan penyelesaian secara damai. Akibatnya pada 7 Mei 1949 tercapailah suatu persetujuan "*Rum - Royen Statements (R - R Statements)*". *R - R Statements* ini disusul dengan Konperensi Meja Bundar (KMB, 23 Agustus s/d 2 November 1949) di Den Haag, yang antara lain menghasilkan "Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS, yang harus dilaksanakan sebelum 30 Desember 1949."¹⁶⁰

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan KMB tersebut di Jawa Timur terjadilah pengembalian darah Jawa Timur fihak Belanda kepada Pemerintah RI Daerah Provinsi Jawa Timur pada 27 Desember 1949. Dengan demikian sejarah Pemerintahan RI Daerah Jawa Timur mulai dengan lembaran baru.

4.5.2 Sosial - Ekonomi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, lalu lintas perdagangan di Jawa Timur mulai berkembang dengan pesat karena berbagai rintangan yang diadakan tentara Jepang telah dihapus. Meskipun beberapa peraturan pembatasan pengangkutan barang-barang dari satu daerah ke lain daerah masih dipertahankan (terutama beras), tetapi keleluasaan bagi kaum petani untuk jual-beli hasil tanamannya sangat berpengaruh terhadap jalannya perekonomian.

Barang-barang yang biasanya sukar didapat karena takut disita Pemerintah Militer Jepang mulai keluar dari timbunan. Se-

dang persediaan bahan pakaian yang tertimbun dalam gudang-gudang sejak tahun 1942 mulai dibagi-bagikan kepada rakyat. Pemerintah Republik Indonesia yang mengetahui adanya persediaan tersebut melanjutkan usaha pembagian itu, sehingga buat sementara waktu kesukaran akan bahan pakaian dapat dipecahkan. Bagaimana keadaan pasar di Surabaya pada waktu itu, Mohammad Ali pernah melukiskan sebagai berikut :

Sejak diketahui orang, bahwa peperangan sudah berhenti, maka barang-barang yang dulu ditimbun mulai membanjiri pasar yang kian hari bertambah ramai. Bahan pakaian, yang dulu jarang didapat, sekarang banyak terdapat dijual orang, hingga dipinggir jalan pasar Blauran. Timbunan-timbunan barang Jepang juga mulai dikeluarkan. Tentu saja tidak diberikan cuma-cuma, tetapi dijual. Kebanyakan yang dapat membeli barang-barang dalam jumlah besar dari tangan Jepang ini ialah orang-orang Tionghoa. Hanya satu dua orang saja dari orang Indonesia yang dapat membeli barang-barang timbunan Jepang ini Sejak itu dipasar kita ketemukan lagi barang-barang yang sudah lama tidak kita lihat.¹⁶¹

Lalu lintas perdagangan di Jawa Timur diperlancar dengan adanya alat tranport yang diselenggarakan oleh Jawatan Kereta Api RI (DKA) dan kemurdian juga Jawatan Angkutan Motor RI (DAMRI).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, usaha pengangkutan melalui kereta api tetap dilanjutkan dalam bentuk perusahaan negara dan namanya menjadi Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKA Djawatan Kereta Api RI). Betapa pentingnya kereta api pada waktu itu dapatlah dibayangkan, bahwa alat-alat pengangkutan lainnya seperti bus, prahoto dan lain sebagainya sedikit sekali jumlahnya. Sedangkan kendaraan-kendaraan bermotor yang dapat dipakai, suku cadang dan alat-alat perlengkapannya sulit dicari. Banyak sekali pengangkutan-pengangkutan yang dahulu dapat diselenggarakan dengan kendaraan gerbong-gerbong kereta api terpaksa dimuati melebihi kapasitas yang semestinya. Apalagi jumlah gerbongnya sehingga semakin menambah jumlah penumpang pada setiap perjalanan.

Pada masa perjuangan bersenjata (1945–1946) DKA banyak memberi bantuan kepada tentara, laskar-laskar dan badan-badan perjuangan lainnya dengan menyelenggarakan pengangkutan dari dan ke daerah pertempuran. Keamanan di dalam kereta api pada waktu itu tergantung sedemikian rupa, sehingga terpaksa diadakan Polisi Kereta Api yang bertugas menjaga keamanan. Selain itu pada 25 Nopember 1946 telah lahir Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI), yang bertugas menyelenggarakan angkutan umum dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya. Pekerjaan yang telah diselenggarakan oleh DAMRI selama revolusi antara lain :

- 1) Angkutan di medan pertempuran (*Mobile Colone*)
- 2) Menyelenggarakan angkutan beras untuk India.
- 3) Menyelenggarakan angkutan TNI yang di hijrahkan.
- 4) Menyelenggarakan angkutan kayu untuk DKA.
- 5) Menyelenggarakan angkutan pemudanya di Kaliurang.¹⁶²

Sebenarnya, keadaan ekonomi Indonesia pada akhir pemerintahan pendudukan Jepang dari awal Republik Indonesia sangat kacau. Inflasi yang hebat menimpa negara RI yang baru berumur beberapa hari. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tak terkendalikan. Peredaran mata uang Jepang diperkirakan sejumlah 4 milyar. Sampai pada bulan Agustus 1945 mata uang Jepang itu beredar di Jawa berjumlah 1,6 milyar. Jumlah ini kemudian bertambah ketika pasukan Serikat berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia (termasuk di Jawa Timur), dan segera menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu dikeluarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk membiayai operasi dan menggaji pegawai dalam rangka mengembangkan pemerintahan kolonial Belanda.

Karena itu ekonomi RI bertambah sulit. Pemerintah RI tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki uang untuk penggantinya. Kas Pemerintah kosong. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah adalah mengeluarkan pe-

netapan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI (Maklumat Presiden No. 1 – 10 tanggal 3 – 10 – 1945) itu ditetapkannya tiga macam mata uang yang berlaku sah : Mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pemerintah pendudukan Jepang. Infasi makin menjadi-jadi ketika pihak Serikat, Letnan Jendral Sir. Montagu Stopford, 6 Maret 1946. Uang NICA ini dimaksudkan untuk mengganti uang Jepang yang nilainya telah jauh menurun. Kurs ditentukan 3% yaitu setiap Rp 1, uang Jepang berbanding dengan 3 sen uang NICA.¹⁵⁹ Rupanya persiapan untuk mengedarkan uang NICA di Jawa Timur (Surabaya) telah berlangsung sejak bulan Oktober 1945. Hal itu terbukti dengan telah dimuatnya klise uang NICA di harian *Suara Rakyat* 12 Oktober 1945. Di situ diterangkan bahwa uang NICA tersebut adalah hasil rampasan para pemuda ketika mengadakan penggeledahan di *Oranje Hotel* (sekarang Hotel Majapahit), yang pada waktu itu ditempati oleh orang-orang yang menamakan dirinya dari RAPWI dan *Allied Command*.¹⁶³

Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan Letjen. Sir Montagu Stopford tersebut dan kemudian mengajukan agar penduduk tidak mempergunakan uang NICA sebagai alat pembayaran. Yang paling menderita pada masa inflasi ini adalah para petani, karena pada zaman Jepang mereka adalah satu-satunya penghasil (produsen), karena itu mereka yang paling banyak menyimpan dan memiliki uang Jepang. Untuk mengatasi kesulitan moneter yang semakin kalut ini, Menteri Keuangan Ir. Surakhman (Pemerintah) dengan persetujuan BPKNI melaksanakan pinjaman nasional dengan Undang-Undang No. 4/1946. Besar pinjaman direncanakan akan meliputi Rp. 1.000.000.000,- yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun. Pada bulan Juli seluruh penduduk di Jawa dan Madura diwajibkan menyeter uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian, Pinjaman nasional pada tahap pertama berhasil dikumpulkan sejumlah Rp. 500.000.000,-. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai mencapai

sukses. Sukses yang dicapai oleh Pemerintah RI ini adalah satu ukuran yang menunjukkan bahwa usaha Pemerintah mendapat dukungan dari Rakyat. Tanpa dukungan dan kesadaran Rakyat yang tinggi semacam ini, Pemerintah pasti akan mengalami kebangkrutan. Ditinjau dari segi politik, sukses ini merupakan pertanda adanya kepercayaan Rakyat terhadap Pemerintah dan aparatnya.¹⁶⁴ Tindakan Pemerintah untuk mengatasi inflasi selanjutnya ialah dengan mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia pada bulan Oktober 1946 (berdasarkan UU. No. 17/1946, 1 Oktober 1946 dan UU. No. 19/1946 tertanggal 25 Oktober 1946). Uang kertas RI yang terkenal dengan nama ORI (*Oeang Repoebliek Indonesia*) itu untuk menggantikan mata uang Jepang. Kurs uang pendudukan Jepang dengan ORI adalah satu per lima puluh untuk dalam Jawa dan Madura dan untuk luar Jawa dan Madura satu perseratus. Artinya setiap 50 rupiah Jepang untuk dalam Jawa dan Madura ditukar dengan 1 rupiah ORI dan setiap 100 rupiah Jepang untuk luar Jawa dan Madura ditukar dengan 1 rupiah ORI. Untuk semenara waktu setiap keluarga hanya diperkenankan memiliki Rp 300,— dan bagi mereka yang tidak berkeluarga Rp 100.¹⁶⁵

Di daerah Jawa Timur, pengeluaran mata uang ORI itu menyebabkan lumpuhnya perdagangan buat sementara waktu, terutama perdagangan hasil bumi. Kelompok itu terutama disebabkan tingginya ongkos-ongkos transport melalui kereta api, yang masih tetap menggunakan tarif lama. Jadi tidak dinilai 50,1 seperti halnya dengan uang yang ada di tangan rakyat. Politik pengeluaran mata uang baru yang dijalankan oleh Pemerintah RI itu rupanya tidak dapat menstabilisasi nilai uang, sehingga *tendens* (kecenderungan) inflasi semakin bertambah. Hal ini tentu saja dalam soal perdagangan mengakibatkan spekulasi-spekulasi yang luar biasa dan menimbulkan suatu cara berdagang yang tidak normal, atau yang lebih terkenal dengan nama "*mencatut*". Keadaan perekonomian rakyat makin sulit dengan adanya blokkade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda.¹⁶⁶

Demikianlah kenyataannya, bahwa usaha Belanda untuk *melikwidasi* Republik Indonesia di samping menggunakan pe-

rang, juga menggunakan senjata ekonomi. Sejak bulan November 1945 Belanda telah melaksanakan blokkade ekonomi terhadap daerah RI (terutama blokkade laut). Dengan blokkade itu Belanda yalah mengharapkan keadaan masyarakat sosial menjadi semakin buruk dan kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan. Barang-barang milik RI dihancurkan atau dibumihanguskan. Keadaan inflasi yang keras akan menimbulkan kegelisahan dan ketegangan sosial sehingga menimbulkan kebencian terhadap Pemerintah RI. Perbendaharaan negara RI kosong dan pengeluaran semakin besar. Pihak Belanda mengira bahwa RI secara ekonomi akan segera bangkrut.¹⁶⁷

Akibat blokkade tersebut, barang milik RI seharga Rp. 200.000.000,— tidak dapat diekspor. Maka dari itu dengan berbagai cara Pemerintah RI berusaha menembusnya. Salah satu usaha Pemerintah RI dalam menerobos blokkade laut Belanda ialah dengan pengiriman beras ke India. Atas dasar persetujuan Sutan Syahrir KL. Punjabi (27-7-1946) Pemerintah RI akan mengirimkan 700.000 ton beras/padi ke India, yang antara lain melalui pelabuhan Probolinggo dan Banyuwangi (Jawa Timur). Dalam hal ini pihak Belanda tidak henti-hentinya mengadakan berbagai cara untuk merintanginya. Di antaranya menembaki gudang-gudang beras di Banyuwangi, yang menimbulkan banyak kerusakan. Akibatnya pihak Sekutu (Tentara Inggris) yang berada di Indonesia mengeluarkan perintah kepada seluruh angkatan darat, laut dan udaranya Belanda supaya menjauhkan segala perbuatan yang mungkin menimbulkan kekacauan di dekat pelabuhan-pelabuhan yang dipakai untuk pengangkutan beras ke India.

Upacara penyerahan beras untuk India itu dilakukan pada 20 Agustus 1946 oleh Wakil Presiden Moh. Hatta kepada Wakil India Sheik Abdullah di pelabuhan Probolinggo. Kapal yang pertama memuat beras yalah kapal *Empress Favour* (sumber lain "Empire Favour) meninggalkan pelabuhan Probolinggo pada 4 September 1946 pk. 05.00 pagi dengan memuat 6.300 ton gabah. Kemudian disusul dengan pengiriman beras dari pelabuhan Banyuwangi dengan kapal *Fort Lajore* yang memuat

6000 ton gabah. Sedangkan kapal Empire Stuart dengan muatan 5.000 ton dari banyuwangi dan 12.000 ton dari Probolinggo.

Sementara itu kapal-kapal dari India telah membawa bahan-bahan pertukaran, yang terutama berupa bahan pakaian untuk rakyat. Pada permulaan bulan September 1946 jumlah bahan pakaian yang telah diterima dari India berjumlah 5 juta yard, yang dalam garis besarnya dibagi-bagikan untuk Daerah Jawa Barat 1.390.000 yard, Jawa Tengah 1.745.000 yard dan Jawa Timur 1.865.000 yard. Pembagian tersebut akan dilakukan, seadil-adilnya dan didasarkan atas kebutuhan dan kerelaan para petani dalam menyumbangkan berasnya. Di daerah Probolinggo para petani dapat menukarkan padinya dengan bahan pakaian, yaitu atas dasar tiap kwintal untuk 4 meter bahan pakaian.

Keuntungan lain yang diperoleh Pemerintah RI ialah dapat memperoleh kendaraan-kendaraan bermotor beserta alat-alat perlengkapannya yang pada waktu itu sangat sulit didapat di daerah RI.¹⁶⁸

Jalan lain untuk memperbaiki kehidupan perekonomian rakyat ialah dengan jalan mengaktifkan kembali organisasi koperasi. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, maka *kumiai-kumiai* yang ada pada zaman Jepang terus berdiri dengan nama koperasi. Koperasi-koperasi yang pada waktu itu berjalan baik di Jawa Timur diantaranya ialah :

Malang :

- 1) Pusat Koperasi Tumapel dengan primer-primernya di kota (simpan/pinjam).
- 2) Pusat Koperasi Rakyat Malang yang menjalankan distribusi meliputi Kota Besar Malang.
- 3) Koperasi Rakyat Batu meliputi Kawedanan Batu.
- 4) Koperasi Lumbung Karangsari.

Kediri :

- 1) Pusat Koperasi Rakyat Blitar meliputi Kabupaten Blitar (konsumsi).
- 2) Koperasi Tulangan-yotro di Durenan dalam Kabupaten Tulungagung (simpan/pinjam).

- 3) Koperasi Bakti di Blitar.
- 4) Koperasi Batik "BAKTI" Ponorogo dan beberapa koperasi lumbung.
- 5) Koperasi Kulit dan Sepatu di Magetan dan di Ngawi koperasi-koperasi lumbung dan pertanian.¹⁶⁹

Koperasi-koperasi daerah Malang sesudah Aksi Militer Belanda I terpaksa berhenti dan Pusat Koperasi Rakyat Malang serta Batu, sesudah gedung kantor, gudang bahan makanannya dibumihanguskan, pengurusnya mengungsi ke Blitar.

Setelah Aksi Militer Belanda I berlangsung, karesidenan-karesidenan Surabaya, Malang, Besuki dan Madura diduduki oleh tentara Belanda. Dengan demikian Pemerintah RI tidak dapat mempergunakan pelabuhan-pelabuhan di Tanjung Perak, Probolinggo dan Banyuwangi lagi. Meskipun demikian di daerah Jawa Timur lalu lintas perdagangan tetap berjalan, bahkan timbul semacam dagang "ekspor" yang diselenggarakan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Pada tahun 1947 dan 1948 pelabuhan "ekspor" yang paling besar di seluruh Jawa Timur yang masih dalam kekuasaan RI ialah pelabuhan Tuban. Bahan-bahan seperti kopi, gula, tembakau, kayu dan lain sebagainya mengalir keluar dengan jalan sah ataupun secara gelap. Pihak Belanda setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian berusaha mencegahnya dengan menempatkan sebuah kapal perang di depan pelabuhan Tuban. Pada mulanya barang-barang "ekspor" dari Tuban yang itu disita oleh Belanda, tetapi kemudian ternyata Belanda dapat menarik keuntungan dari kenyataan itu. Mereka kemudian mendirikan semacam Kantor Bea dan Cukai di atas kapal untuk mengatur pierijinan "ekspor" tersebut. Dengan demikian kaum pedagang terus mengeluarkan bermacam-macam bahan dagangan dari daerah RI, yang kemudian pembelannya diatur supaya jatuh ke tangan kaum pedagang Belanda dan Cina dari Kota Surabaya. Dengan demikian Belanda dapat memungut hasil dari daerah RI, sedangkan secara politis mereka dapat mempropagandakan ke luar negeri betapa hebatnya kemakmuran yang sudah dibangun dan dicapai di daerah-daerah yang sudah diduduki Belanda.

Selain itu, untuk menggoncangkan iman orang-orang Indonesia pihak Belanda mulai memasukkan barang-barang mewah ke daerah RI. Hal itu dimungkinkan karena setelah Persetujuan Renville menentukan garis statusquo, kegiatan lalu lintas dagang antara daerah RI dengan daerah Belanda semakin besar.¹⁷⁰ Meskipun lalu-lintas dagang tersebut dalam beberapa hal memang dapat memeringankan penderitaan rakyat, terutama dalam soal bahan pakaian, namun kehidupan rakyat daerah pedalaman (RI) makin lama makin mengalami kesulitan.

Dengan adanya Aksi Militer Belanda I, pihak RI (termasuk Jawa Timur) telah kehilangan daerah-daerah yang subur yang menghasilkan padi. Padahal menurut tinjauan Prof. Sumitro, pada masa Perang Kemerdekaan itu produksi petani merupakan dasar pokok kehidupan ekonomi Indonesia.¹⁷¹ Di samping itu ketentuan Persetujuan Renville mengharuskan beratur-ratus ribu kaum pengungsi dari daerah pendudukan (Belanda) ke daerah pedalaman di antaranya $\pm$ 35.000 tentara dan laskar. Semua itu menambah kesukaran hidup rakyat di daerah pedalaman (RI). Kesukaran bertambah lagi dengan makin lajunya inflasi ORI. Harga beras berangsur-angsur naik, dari harga 50 sen per kilo sampai harga Rp 6,— pada permulaan tahun 1948. Inflasi makin meningkat dengan banyaknya uang kertas palsu yang beredar dalam masyarakat dan hilangnya uang kecil. Uang kertas palsu itu ternyata banyak mengalir dari daerah pendudukan. (Belanda).¹⁷² Kejadian itu rupanya merupakan siasat Belanda untuk menghancurkan RI dari dalam yaitu melalui perekonomian, dengan menghambur-hamburkan uang ratusan ORI palsu dan memberi uang kecil ORI. Dengan demikian maka di daerah RI, terutama di daerah perbatasan, uang kecil ORI hampir tidak di tangan rakyat dan uang ratusan ORI palsu berhamburan. Akibatnya uang ratusan ORI merosot nilainya.

Salah satu usaha Pemerintah untuk mengatasi kekurangan uang kecil ORI, adalah mengeluarkan suatu peraturan yang memberi izin kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan uang kecil atas petunjuk Menteri Keuangan.¹⁷³ Sehubungan dengan itu maka beberapa Pemerintah Daerah Karesidenan di Pro-

pinsi Jawa Timur mengambil inisiatif untuk mengeluarkan uang *coupon* (kupon). Menurut rencana uang *coupon* tersebut merupakan penggantian uang besar yang beredar dan tidak akan menambah jumlah uang dalam peredaran. Tetapi rencana pembatasan tersebut karena beberapa hal banyak yang tidak dapat ditepati. Lagi pula karena pembuatan uang *coupon* itu sangat sederhana, maka banyak uang *coupon palsu* yang tidak dapat atau sukar sekali untuk membedakannya dengan yang bukan palsu.¹⁷⁴

Untuk mengatasi soal uang ratusan ORI palsu Pemerintah RI (Kabinet Hatta) pada bulan September 1948 telah merencanakan akan menarik kembali uang dari sirkulasi (peredaran), yang dijalankan dengan mewajibkan menyimpan uang di bank di atas jumlah yang telah ditentukan. Kemudian menghilangkan uang palsu dari masyarakat.¹⁷⁵ Sebelum rencana tersebut berjalan di Jawa Timur timbul Pemberontakan PKI di Madiun dan disusul dengan Aksi Militer Belanda II. Pada waktu itu kota-kota di Propinsi Jawa Timur diduduki oleh tentara Belanda. Sedangkan rakyat Jawa Timur bersama-sama angkatan bersenjata dan pemerintah menjalankan perang total dengan taktik gerilya.

4.5.3 Pendidikan

Pada 5 September 1945 Kabinet-Presidensial telah terbentuk. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran. Dengan demikian lahirlah Kementerian Pengajaran yang kemudian menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PP & K) dan kantornya berada di Jakarta. Situasi gawat yang meliputi kota Jakarta pada waktu itu, tidak memungkinkan Pemerintah Pusat RI terus bertahan di Jakarta lebih lama lagi. Maka pada permulaan tahun 1946, pemerintah RI dipindahkan ke ibukota yang baru di Yogyakarta. Sedangkan Kementerian PP & K pada waktu itu kantornya pindah ke pura Mangkunegara (Surakarta), walaupun kedudukan menteri berada di Yogyakarta.

Struktur organisasi Kementerian PP & K pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan pembagian yang diadakan *Depar-*

tement van Onderwijs en Eeredienst (O & E) pada zaman Belanda yaitu : bagian A bagian Umum : bagian B – bagian yang mengurus sekolah-sekolah : bagian C – bagian personalia; bagian D – bagian keuangan; dan seterusnya. Bagian B yang dipimpin oleh Mr. Widodo Sastrodiningrat (bekas kepala SMT Surakarta), terdiri atas urusan-urusan yang menyelenggarakan dan mengawasi : Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Guru (SG), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT), Pendidikan Wanita, Sekolah Dagang, Pengajaran Teknik dan Pendidikan Jasmani.^{1 7 6}

Ketika Kementerian PP & K dipimpin oleh Menteri Mr. Suwandi dengan Surat Keputusan No. 60/Brg. Umum, pada 12 Mei 1947 telah mengesahkan anggota Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang terdiri atas 52 orang anggota dan dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara (di Jogjakarta). Atas saran-saran dari Penyelidik Pengajaran RI ini maka Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Keudayaan kemudian menyusun struktur sistem pendidikan di Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa tujuan umum pendidikan di Indonesia setelah merdeka ialah mendidik anak-anak menjadi warganegara yang berguna, yang kelak dapat memberikan pengetahuan kepada negara dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Pendidikan terbagi atas 4 tingkat : pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan rendah kepada anak-anak diajarkan dasar-dasar pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Dengan cara ini mereka dapat mulai memahami persoalan di sekitar mereka. Pendidikan lanjutan atas memberikan pendidikan khusus pada kelas terakhir, guna menyiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Di samping itu ada sekolah-sekolah industri yang mendidik tenaga spesialis dan mempunyai keahlian khusus guna memenuhi kebutuhan pemerintah. Mengenai lama pendidikan dilihat dari tingkatannya sebagai berikut.

- 1) Sekolah Rakyat (Dasar) 6 tahun
- 2) Sekolah Lanjutan 3 hingga 6 tahun

- 3) Sekolah Industri 3 hingga 6 tahun
- 4) Perguruan Tinggi 4 hingga 6 tahun.¹⁷⁷

Ketika musuh (Inggris – Belanda) mulai menduduki kota Surabaya, dengan sendirinya ketenangan untuk belajar bagi anak-anak sekolah sudah tidak dapat dijamin lagi. Beberapa sekolah sudah tidak mungkin dapat berjalan karena terlampaui banyak mengalami gangguan keamanan. Sekolah-sekolah tersebut terpaksa harus diungsikan ke tempat-tempat yang lebih tenang, yaitu ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh RI (daerah pedalaman). Demikianlah, misalnya Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Surabaya dipindahkan ke Malang. Meskipun situasi gawat belum menjadi reda, keinginan masyarakat untuk memajukan pendidikan rupanya besar sekali. Masyarakat merasakan benar, bahwa sekolah-sekolah yang ada dewasa itu, belum cukup memenuhi kebutuhan mereka. Usaha-usaha untuk mendirikan SMT baru yang diselenggarakan baik oleh pemerintah setempat, maupun oleh badan-badan swasta menjelang tahun ajaran 1946/1947 berturut-turut terjadi di kota-kota Madiun, Kediri dan Bojonegoro. Tidak kecil peranan mahasiswa dalam membantu penyelenggaraan sekolah-sekolah tadi. Beberapa mahasiswa dari Klaten bahkan telah diminta untuk mengajar pada SMT di Blora, Bojonegoro dan Madiun.

Selain itu, dalam tahun 1946 SMT kota Malang telah mengadakan ujian akhir dan berhasil menamatkan lulusannya yang pertama sejak revolusi berkobar. Kontak antara sekolah yang satu dengan yang lain dapat dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga ujian akhir pada waktu itu, seperti pada waktu pendudukan Jepang, masih tetap merupakan ujian sekolah. Perlu dicatat, bahwa ijazah yang dikeluarkan pada waktu itu adalah ijazah SMT RI. yang pertama.

Tamatan SMT masih dapat melanjutkan pelajarannya ke beberapa perguruan tinggi yang telah dipindahkan atau telah didirikan di daerah RI.¹⁷⁸ Misalnya, Tuti (Suprpto) seorang bekas pelajar SMT kelas III Surabaya yang menjadi anggota TRIP, ketika berada di Malang sempat menyelesaikan ujian

akhir SMT. Kemudian ia memasuki Perguruan Tinggi Malang Jurusan Kimia.^{179a} Begitu pula Sukanto Sayidiman (Mayjen. Soekanto Sajidiman Bc.Hk.) komandan pasukan "Gembala" (Berani Mati) TRIP telah mendapatkan ijazah SMP dalam ujian umum Pemerintah tahun 1946 di Mojokerto.^{179b}

Mengenai masalah perguruan tinggi pernah dibahas dalam Konferensi Perguruan Tinggi yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dari 25 April sampai 1 Mei 1947, dihadiri oleh 220 orang wakil. Konferensi itu telah mencetuskan dua hal penting tentang azas dan tujuan perguruan tinggi, yaitu :

- 1) mewujudkan pusat budaya dan ilmu-ilmu.
- 2) mendidik orang-orang yang memerlukan pendidikan tinggi guna keperluan masyarakat dan negara.

Konferensi itu juga mengusulkan kepada Pemerintah RI tentang pembagian ilmu-ilmu dalam tiga bagian yaitu : ilmu-ilmu alam (*natuurwetenschappen*) yang melingkupi ilmu teknik, fisika, ilmu pasti, kedokteran, biologi; kedua "ilmu-ilmu kebudian" yang melingkupi sastra, filsafat, agama dan lain-lain; dan ketiga, ilmu-ilmu sosial yang melingkupi ekonomi, hukum dan sebagainya. Selanjutnya atas dasar pembagian itu disusun balai perguruan tinggi atau universitas. Diusulkan pula supaya diberikan gelar kepada mereka yang telah menamatkan ujian sarjana (doktoral) bagian ilmu-ilmu alam dengan SA (Sarjana Ilmu-ilmu Alam), sedangkan bagi dokter gelar itu akan berupa SAD (Sarjana Ilmu Ilmu Alam Dokter), bagi yang telah menamatkan ujian doktoral bagian ilmu-ilmu kebudian akan diberi gelar SB (Sarjana Ilmu-ilmu Kebudian), sedang bagi mereka yang telah menempuh ujian ilmu-ilmu sosial akan bergelar SS (Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial).

Atas dasar usul-usul tersebut, pada 25 September 1946 Departemen PP & K RI mengeluarkan surat keputusan berdirinya Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Kota Malang.¹⁸⁰ Perguruan Tinggi Malang itu dimulai dengan munculnya Perguruan Tinggi Kedokteran pada 3 Juni 1946, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Syaaf (Prof. Dr. Sjaaf). Perguruan Tinggi

Kedokteran itu diusahakan oleh para dokter di Malang atas inisiatif dokter Imam dan diperuntukkan bagi para mahasiswa yang berada di sekitar Malang. Bersama dengan pendirian itu, juga diusahakan berdirinya Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi, yang juga diketuai oleh Prof. Dr. Syaaf. Usaha masyarakat Malang ternyata tidak hanya sampai di situ. Berkat kegiatan para pengusaha, maka pada 17 Agustus 1946 dapat dibuka dengan resmi "Perguruan Tinggi Malang" (Universitas), yang meliputi kedua fakultas tersebut, dan juga Fakultas-fakultas Teknik-Pertanian dan Hukum. Sebagai *Rector Magnificus* dari Perguruan Tinggi Malang itu ditetapkan Prof. Dr. Syaaf. Usaha pendirian ini diselenggarakan oleh sebuah Yayasan. Universitas Malang ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat di sekitarnya maupun dari Pemerintah Pusat. Pada 27 September 1946 PYM. Presiden Sukarno berkenan memberikan "kuliah umum", demikian pula PYM. Wakil Presiden Hatta pada 19 November 1946.

Sayang usaha yang mulia itu tidak dapat dipertahankan, karena dengan meletusnya Aksi Militer Belanda I 21 Juli 1947) Kota Malang diduduki oleh tentara Belanda. Akibatnya, "Perguruan Tinggi Malang" ditutup dan dengan demikian selesailah riwayatnya. Seperti juga para pemimpin pemerintahan, maka para mahaguru dan para mahasiswa banyak yang keluar kota. Ada yang meneruskan pelajarannya ke Balai Perguruan Tinggi RI Klaten (Solo kampusnya di Rumah Sakit Tegalyasa) dan ke Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada Jogjakarta ada pula yang menerjunkan diri dalam lapangan pertahanan. Masa berganti masa. Bangsa Indonesia mengalami pasang surut gelombang perjuangan. Demikian pula perkembangan Perguruan Tinggi di Jawa Timur mengikuti timbul tenggelamnya perjuangan kemerdekaan.¹⁸¹

Ketika Aksi Militer Belanda I meletus, ujian penghabisan SMT tahun 1947 sedang dalam taraf penyelesaian. Meskipun banyak sekali kesulitan yang harus diatasi, tetapi ujian tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik. Namun demikian dengan didudukinya kota Malang oleh tentara Belanda, SMT Malang

terpaksa pindah ke Kota Blitar. Pelajaran di sekolah pada waktu itu dengan sendirinya tidak dapat berjalan dengan lancar, karena tidak sedikit para pelajar SMT bersama dengan pemuda pelajar lainnya, meninggalkan bangku sekolah dan menggabungkan diri ke dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), untuk ikut bertempur mempertahankan negara RI.

Serbuan secara besar-besar kemudian dapat dihentikan, meskipun untuk sementara waktu, setelah diadakan *cease fire* (gencatan senjata); tetapi pertempuran-pertempuran kecil selalu masih terjadi, terutama di daerah-daerah perbatasan. Sehubungan dengan itu maka para anggota TRIP masih tetap siap sedia. Agar pengetahuan mereka tetap terpelihara dan hasrat belajar lagi tetap dijaga, maka dibentuklah suatu badan pada Kantor Menteri PP & K di Jogja yang disertai pembentukan "*mobile corps*" guru-guru. Mereka ditugaskan untuk memberi pelajaran dan ceramah-ceramah kepada anak-anak di belakang garis-garis demarkasi. Dalam perkembangan selanjutnya para pelajar yang ikut berjuang di garis-garis pertempuran secara berangsur-angsur mulai ditarik kembali ke kota-kota RI.

Maka timbullah suatu masalah, bagaimana cara menempatkan mereka itu kembali ke bangku sekolah. Banyaklah diantara mereka yang tidak sanggup lagi mengikuti pelajaran secara normal di sekolah biasa. Dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan ini, maka dalam bulan Mei 1948 di Kota Solo dilaksanakan sebuah pertemuan, yang dihadiri oleh beberapa pejabat Kementerian PP & K. Pertemuan itu membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mendirikan sekolah-sekolah (SMP dan SMA; istilah SMT sejak 1948 diganti SMA) yang khusus disediakan bagi para pelajar pejuang. Maka diputuskan antara lain untuk membuka 3 buah SMA — Peralihan, yaitu masing-masing di Blitar, Surakarta dan Yogyakarta (Agustus 1948). Sekolah-sekolah tersebut ternyata menjadi sekolah yang makin besar, sehingga untuk menghadapi kekurangan tenaga pengajar perlu dikerahkan lagi tenaga mahasiswa.¹⁸² Demikianlah pada waktu itu Kota Blitar merupakan salah satu kota tempat pendidikan para pejuang pelajar Jawa Timur.

Dari Kementarian Pertahan Kami (TRIP Jawa Timur pen.) mendapat-
kan kesanggupan dana-dana sosial welfare yang kami perlukan untuk
pembinaan mental, moral dan pysical fitness teman-teman di daerah
pertempuran, sementara kita mesti mentaati cease-fire ordernya De-
wan Keamanan PBB kembali, menjelang perundingan-perundingan di
atas kapal "Renville".

.....
Kami mendapatkan uang sebesar Rp. 5000.000,— (Lima juta rupiah)
dari serie Bung Karno a 25 rupiah. Kaya, kami, satu staf pendidikan
mempunyai dana taksis yang bebas di waktu itu. Dan langsung kami
berbelanja di Malioboro Yogyakarta, mulai dari toko buku bahasa
asing, semua penertiban, teknik, ilmu pengetahuan, bahasa, sastra, dan
budaya, kami boyong sebagai pelengkap perpustakaan tromol kami di
garis depan, dari toko olah raga, alat-alat sport badminton, pinpong-
set, peluru, lembing, cakram, semua yang ada di ruang olah raga SMA
kami beli, ditambah dengan box handschoen untuk tinju, sebab semua
ini penting bagi mental serta physical fitness tentara remaja ini. Brid-
ge, demino, catur, semua lengkap, memperlengkapi ruang auditorium
kami kamp Gabru, Wlingi, Blitar, di samping pesawat-pesawat rimbu
radio untuk monitoring berita-berita dari dalam dan luar negeri.

Mengurusi tentara yang tidak perang itu sulit sekali, mereka re-
maja, muda, mereka ingin hiburan, di tengah-tengah kebun karet, kopi
dengan penyadap dan pemungutnya, wanita-wanita ini, membawakan
persoalan tersendiri, kesibukan demi kesibukan dilakukan, mulai de-
ngan pelajaran penyegaran yang dilakukan oleh team kami sendiri,
dengan bantuan Mobile Corp Pengajar, disponsori Kementerian PP &
K kita, Engku Darwis, Pak Sutojo Djojopurnomo, itu bekas Daidanco
Kediri, Kolonel di MBAD, teman Pak Gatot Subroto, ditambah pula
dengan Pak Tahir, dari Perguruan Taman Siswa Kediri, hadir dengan
asuhan-asuhan rohaninya. Sekali-kali kami disamping berlatih juga me-
lakukan pemberantasan buta huruf dalam rangka people defence ter-
sebut.

.....
Akh, sudah tidak kami persoalkan lagi, yang jelas sebentar team kese-
belasan sepakbola dan kedua belasan bola keranjang TRIP Jawa Timur
akan terjun dan membintangi lapangan hijau di Blitar, Kediri dan da-
erah lainnya
dan di samping itu gadis-gadis pacar TRIP dari SMA Malang, sedang
mengikuti SMA nya mahasiswa di Blitar, suasana Malang SMA-47 pin-
dah ke daerah Renville ini.¹⁸³

Sekolah-sekolah SMA-Peralihan seperti tersebut ternyata tidak dapat berjalan lama, karena beberapa bulan sesudah pembukaannya, para pelajar sudah harus mengangkat senjata lagi untuk menghadapi Aksi Militer Belanda II (19 Desember 1948). Pada waktu itu kota-kota Blitar, Kediri, Madiun dan Bojonegoro telah diduduki Belanda, sehingga para guru dan para pelajar yang setia kepada Pemerintah RI terpaksa meninggalkan kota-kota tersebut. Akan tetapi, hal itu bukanlah berarti bahwa usaha pendidikan berhenti sama sekali. Atas inisiatif masyarakat desa-desa di pelosok-pelosok, usaha pendidikan tetap dijalankan, meskipun secara darurat sekali. Rumah-rumah penduduk kelurahan, balai desa berubah menjadi sekolah-sekolah, sedangkan guru-guru mengajar secara sukarela.¹⁸⁴ Keadaan yang demikian berlangsung terus sampai saat pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

4.4.4 Sosial Budaya

Menjelang Kongres Pemuda II, Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKPRI) telah melancarkan usaha-usaha yang positif, misalnya dengan mengadakan kursus kader, membuka pemancar "Gelora Pemuda", mengerahkan dan mengorganisasi hiburan-hiburan ke medan (*front*) pertempuran. Pada waktu itu Jamal (Djamal) dan Marna Sulana dari Bagian Penerangan BKPRI telah berhasil menciptakan wayang modern dari karton yang kemudian dikirim ke daerah-daerah¹⁸⁵ Dalam perkembangan selanjutnya Kongres Pemuda II (8-9 Juni 1946 di Jogja) telah memutuskan, bahwa mereka akan mengambil bagian yang aktif dalam penerangan langsung kepada rakyat jelata, yang sebagian besar (90%) masih buta huruf. Dengan adanya penerangan itu diharapkan akan dapat membangkitkan pengertian dan keyakinan rakyat terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu dan seterusnya. Salah satu sarana penerangan yang akan dipakai ialah wayang modern (karton) tersebut yang pada waktu itu disebut Wayang Merdeka.

Pada 10 Maret 1947 diadakanlah demonstrasi Wayang Merdeka yang perama-kali, bertepatan di gedung Balai Kota Madiun. Di samping itu juga diadakan sayembara pemberian nama wayang tersebut. Demonstrasi tersebut dihadiri oleh beberapa wakil dari Kementerian Penerangan Jogjakarta. Demonstrasi tersebut rupanya mendapat sambutan yang lain, sehingga perlombaan pemberian namanya pun telah menghasilkan nama "Wayang Suluh". Dengan demikian, lahirlah nama *Wayang Suluh* di kota Madiun, yang hingga kini tetap dipakainya.

Pada 1 April 1947, waktu Dewan Pimpinan Pemuda seluruh Jawa dan Madura mengadakan konperensi, dibagi-bagikan 52 stel wayang Suluh kepada para wakil Dewan Pimpinan Pemuda (DPP). Masing-masing daerah dan cabang, DPP memainkan wayang suluh tersebut. Ternyata wayang tersebut diterima oleh rakyat jelata, sebagai salah satu alat penerangan dan penghibur yang sederhana tetapi cukup memuaskan serta dapat menambah pengetahuan.

Wayang suluh dimainkan oleh seorang *dalang*, dengan memakai layar (*kelir*) dan diiringi oleh instrumen. Biasanya jikalau keadaan tidak memaksa, Wayang suluh mempergunakan *gamelan selendro* (jadi seperti wayang purwa). Tetapi apabila keadaan memaksa, misalnya dimainkan di daerah *Perdikan* yang disitu rakyat dilarang membunyikan gamelan, Wayang Suluh dapat diiringi oleh terbang *kentrung* atau alat lainnya, seperti musik. Waktu *jejeran* (permulaan pertunjukan) di Jawa Timur biasanya menggunakan gending *joli-joli*, pangkur Surabaya dan sebagainya, apabila memakai iringan gamelan. Tetapi bila dengan musik untuk *jejeran* umpamanya dipakai lagu *Silabintana*, *Pasir Putih* dan sebagainya untuk suasana gembira dipakai lagu-lagu *Mars Pemuda*, *Sorak-Sorak Gembira* dan sebagainya; sedang untuk waktu sedih dipakai lagu-lagu yang sesuai. Sedangkan jalan cerita Wayang Suluh itu (*lakon*) biasanya mengambil cerita sejarah, misalnya Perang Diponegoro, Untung Suropati, Pertempuran Surabaya, Naskah Linggajati, Persetujuan Renville dan sebagainya. Pada suatu waktu *lakon* roman dapat dipakai juga, tetapi garis besarnya berisi penjelasan, keterangan dan urai-

an yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa, misalnya penjelasan soal Pancasila, kewajiban pamong - desa, rukun kampung, petahanan rakyat, persatuan, keamanan negara, hukum, buta huruf, cinta kepada tanah air dan bangsa, dan lain sebagainya. Dengan demikian secara sederhana rakyat jelata mulai dibimbing, dididik dan dituntun untuk hidup bernegara, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan mempertahankan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.¹⁸⁶

Selain seni drama pedalangan, rupanya di Jawa Timur juga berkembang drama sandiwara. Misalnya bagian penerangan dan propaganda TRIP Jawa Timur di bawah pimpinan Abdul Rajab pernah mementaskan satu adegan sendratari patriotik di Gedung Nasional Kediri dengan judul "Karena aku tak sudi lagi menjadi pelajar jajahan". Dan juga pada bulan April 1946 pernah pula mementaskan dua babak di gedung *Concordia* (kini Sarinah) Malang.¹⁸⁷

Rupanya bukanlah hanya seni drama sandirawa saja yang berkembang di kalangan seniman dan seniwati muda Tentara Pelajar, tetapi juga bakat-bakat seni suara dan seni sastra pun mereka kembangkan sehingga terciptalah lagu-lagu serta sajak-sajak patriotik. Misalnya : Mars Pemuda (pencipta Lagu/Syair : Iskak), Mars TRIP Jawa Timur, Mars Gunungsari (Lagu/Syair : Abdul Saleh), Teringat Ku'kan Padamu atau Temanku Pahlawan (Lagu : Abdul Saleh ; Syair Suwandi), Nyiur Tua (Lagu : Abdul Saleh ; Syair Ratna Wilis), Terkenang (Lagu : Abdul Saleh; Syair : Ratna Wilis), Ibuku (Lagu :/Syair : Abdul Saleh), Merah Putih (Lagu : Abdul Saleh; Syair Achmad Wardoyo), dan Ke Surabaya (Lagu : Abdul Saleh; Syair : Achmad Wardoyo).¹⁸⁸

4.4.5 Pers

4.4.5.1 Kantor Berita

Dalam zaman Pendudukan Jepang di Kota Surabaya terdapat Kantor Berita Cabang *Domei*. *Kantor Domei* pada waktu itu berada di Jalan Aloon-Aloon No. 28 (sekarang Jalan

Pahlawan). Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kantor Berita Domei Surabaya dipimpin oleh seorang Jepang yang bernama *Chara*. Sedangkan pemimpin Redaksi Bahasa Indonesia pada waktu itu ialah Raden Mas Bintarti (terkenal dengan sebutan Roro Bintarti), yang antara lain dibantu oleh Sutomo (Bung Tomo) dan Sumaji (Petruk). Selain itu terdapat pula bagian markonis yang pada petugasnya antara lain terdiri dari: Hidayat, Yakub, Yono, Suwardi, Anwar Idris, Sudarmo, Kusnandar dan Sumarsono.¹⁸⁹

Ketika Proklamasi Kemerdekaan telah diumumkan, markonis Yakublah yang pertamakali menerima berita tersebut dari *Domei* Jakarta. Berita tersebut kemudian disampaikan oleh seorang petugas kantor Domei ke Kantor Redaksi *Suara Asia* (*Soeara Asia*). Sehingga pada sore harinya (17 Agustus 1945) *Suara Asia* telah memuatnya.

Seminggu sesudah Proklamasi, para pegawai Domei dilarang bekerja, sehingga semua berita diterima oleh orang-orang Jepang sendiri. Sejak itu para pegawai Domei tidak bekerja lagi. Karena merasa sudah merdeka, sejumlah anggota markonis dan telkom lalu membawa pulang pesawat-pesawat radio, alat penerima (*receiver*) dan juga mesin ketik. Kejadian tersebut semula tidak disetujui oleh Jepang, karena menurut keterangan kepala Domei, Domei dan inventarisnya akan diserahkan kepada Sekutu. Namun atas usaha markonis Yakub (sebagai orang yang paling pandai bahasa Jepang), akhirnya Jepang menyetujuinya. Bahkan bukan hanya mesin ketik, alat penerima, dan pemancar kecil yang diserahkan, tetapi senjatanya juga diserahkan kepada Yakub dan kawan-kawannya. Sebagian besar alat-alat tersebut diserahkan di rumah Yakub di Jedong untuk menangkap berita-berita dari mana saja. Selanjutnya, atas inisiatif beberapa orang bekas pegawai Domei Surabaya yang dibantu oleh para tenaga muda lainnya terbitlah suatu *bulletin Siaran Kilat*, tanpa memakai nama *Domei* lagi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *Domei Surabaya* merupakan kantor cabang yang mula pertama melepaskan diri dari *ikatan Domei Pusat* di Jakarta.¹⁹⁰

Sebagai tindak lanjut dari tindakan tersebut, atas pemrakarsa Sutomo (Bung Tomo) yang dibantu oleh Samsul Arifin dan Aminuddin Lubis pada 1 September 1945 Kantor Berita Domei Cabang Surabaya menyatakan diri bubar dan pada hari itu didirikan pula sebuah Kantor Berita Nasional dengan nama *Indonesia* di Jalan Tunjungan No. 100 Surabaya. Kantor Berita Indonesia ini semula dipimpin oleh Bung Tomo sendiri, tetapi karena kemudian Bung Tomo sibuk dengan urusan BPRI, maka pimpinan Kantor Berita Indonesia diserahkan kepada RM. Bintarti, yang dibantu oleh tenaga-tenaga muda, antara lain: A. Wahab, Mashudi Sosroyudho, Wuwuh Asriningpuri, Lukitaningsih, Pandan, Alimun, Kusnendar, Yakub dan Wiwiek Hidayat. Adapun susunan pengurus lengkapnya sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| Pemimpin Usaha | : RM. Bintarti, Aminuddin Lubis, Syamsul Arief. |
| Redaksi | : Sutomo (Bung Tomo), Wiwiek Hidayat, Fakih Hassan, Sumaji Ajiwongsokusumo (Petruk), Lukitaningsih, Sutoyo, Mashut, Tuti Sukabul, Abdul Wahab (foto) |
| Bahasa Asing | : Gadio Amosantoso, Sujoko, Rakhmad, Kamadi. |
| Telkom | : Hidahat, Sumari, Alimin, Yakub, Sudarmo, Hassan Basri, Sunarsono, Kusnendar, Suwardi dan Amran Idris. |
| Tata Usaha | : Moh. Sin. Sumarjo, Mulyaningsih dan Guno. ¹⁹¹ |

Sejak itu maka Domei Cabang Surabaya dianggap sudah tidak ada lagi meskipun *Domei* di Jakarta masih terus mengeluarkan buletin buletin berbahasa Indonesia dan masih menandai berita-beritanya dengan perkataan *Domei*. Baru pada 3 September 1945 buletin Domei Jakarta tidak lagi terbit dengan memakai namanya, karena sejak tanggal itu semua berita yang disiarkan menggunakan nama *Antara*, meskipun masih menggu-

nakan tahun *Sumera* 2605 (Jepang) Pengumuman mengenai berdirinya kembali Kantor Berita *Antara* diberitakan pada 4 September 1945 yang sekaligus menggunakan tahun Masehi 1945 kembali.¹⁹²

Berita-berita pertama yang disiarkan Antara di Jakarta dan KB (Kantor Berita) *Indonesia* di Surabaya ialah keputusan rakyat yang dengan dekrit Residen Sudirman 3 September 1945 menyatakan daerah Karesidenan Surabaya berdiri di belakang Republik Indonesia. Reaksi Jepang sangat cepat, sejumlah Kempeitai datang menyerbu Tunjungan 100 dan merampas sejumlah bulletin, merobek plakat yang ditempelkan di kaca KB *Indonesia*.

Tunjungan 100 ternyata kemudian menjadi pusat tukar informasi dari segenap gerakan rakyat, khususnya pemudanya. Misalnya, insiden bendera di Hotel Yamato (Oranje Hotel) yang kini disebut Hotel Majapahit, itu telah diabadikan oleh wartawan foto *KB Indonesia* Abdul Wahab, dan beritanya telah disiarkan ke seluruh dunia oleh para wartawan dan markonis *KB Indonesia*.¹⁹³

Dalam perkembangan selanjutnya, atas persetujuan Adam Malik, Bung Tomo dan RM. Bintarti pada 1 Nopember 1945 nama Kantor Berita Indonesia dirubah menjadi Kantor Berita (KB) Antara Cabang Surabaya dan kantornya dipindah dari Jalan Tunjungan 100 ke Jalan Aloon-Aloon 28 (sekarang Jl. Pahlawan).

Ketika pertempuran dengan Sekutu dan Belanda tidak dapat dihindarkan lagi, alat komunikasi mulai diungsikan ke Mojokerto. Wiwiek Hidayat dengan bantuan Bagus Sulaiman Hadi membawa pemancar pertama ke Mojokerto dan disembunyikan di kampung Cakarayam, dengan bantuan ketua pemuda di kampung tersebut. Pada 10 Nopember 1945 pertempuran Surabaya meletus. Di bawah hujan peluru yang dilancarkan dari pelabuhan para operator dan wartawan Antara Cabang Surabaya menyelamatkan alat-alat pemancar dan penerima radio, mesin tulis dan kertas, dari Jalan Aloon-Aloon 28, sebagian ke rumah

RM. Bintarti (Jl. Teratai, dulu *Mulolaan*) dan sebagian lagi ke kampung Jedong (tempat kediaman kepala bagian radio Hidayat). Namun demikian Antara Cabang Surabaya masih kuat bertahan di kota Surabaya sampai 22 Nopember 1945, bahkan sampai saat itu masih sempat mengirimkan berita ke kantor pusat Jakarta antarlain melalui Radio Pemberontakan, yang dipimpin oleh Bung Tomo.

Tepat pada 22 Nopember Antara Surabaya meninggalkan kota tempat operasinya, mengungsi ke Sepanjang. Esok harinya mereka meneruskan perjalanan ke Mojokerto dan di situ Antara menyusun kekuatan kembali di bawah pimpinan Sumaji Aji-wongsokusumo. Seminggu kemudian datang RM. Bintarti dan stafnya, sehingga *Antara* pun mulai berfungsi lagi, meskipun secara darurat. Dalam perkembangannya Antara Mojokerto melayani berita kepada berbagai pihak, termasuk badan-badan dan juga surat kabar *Suara Rakyat* edisi *Mojokerto*. Sedangkan *Suara Rakyat* edisi Kediri dilayani oleh finial Antara Kediri, yang dipimpin oleh Hidayat. Begitu pula *Suara Rakyat* edisi Malang dan harian *Berjuang* (*Berdjoeng*) dilayani oleh Antara Malang yang lambat laun berada langsung di bawah pengawasan Antara Pusat (Yogya) dan merupakan cabang yang berdiri sendiri. Kepalanya adalah Sunaryo Prawirohadinoto, semula bekas koresponden Domei yang menerima sepucuk surat dari Adam Malik untuk mendirikan Antara Malang. Anggota staf Antara Malang tersebut antara lain : Amartiwi, Sugiharto dan Wuwuh Asriningpuri.

Menjelang ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati. Belanda melakukan provokasi dengan menduduki Mojokerto. Pendudukan tadi dilakukan pada hari Minggu. Dalam keadaan yang tegang itu sidang darurat Induk *Antara* Jawa Timur telah memutuskan akan memindahkan kantornya ke tempat yang lebih aman. Demikianlah pada tengah malam menjelang dini hari kantor Antara Jawa Timur yang terletak di Jalan Wates Mojokerto ditinggalkan oleh warganya yang terbagi menjadi dua rombongan. Barang-barang vital dengan iringan mobil seba-

gian dibawa ke Ploso (Jombang) dan anggota beserta keluarga dan segala barang yang bisa diangkut dengan kereta api menuju ke Madiun.

Antara yang di Ploso (Jombang) dipimpin oleh RM. Bintarti, tetapi pada 1 April 1947 pindah lagi ke Bojonegoro sampai tanggal 30 Juni 1948.^{197b} Sedangkan cabang antara Madiun sejak awal tahun 1946 dipimpin oleh Subaron dan dibantu oleh Moh. Isnaeni, Suwardi, Rustamaji dan beberapa tenaga lainnya. Cabang Antara Madiun ini antara lain melayani harian *Api Rakyat* yang terbit di kota itu sejak awal tahun 1946.

Menjelang Aksi Militer Belanda II *Antara* Jawa Timur yang semula berkekuatan lebih kurang 90 orang tinggal lebih kurang 20 orang, tersebar di berbagai kota. Pemimpinnya pada waktu itu ialah Hidayat dan Wiwiek Hidayat, masing-masing untuk bagian teknisnya dan redaksinya. Setelah Aksi Militer Belanda II meletus sebagian dari orang *Antara* di Jawa Timur menyumbangkan tenaganya ke angkatan perang atau ikut serta bergerilya. Sebagian lagi kembali ke kota-kota besar. Hidayat segera bergabung dan bekerjasama dengan angkatan laut, bersama-sama dengan tiga atau empat orang rekan markonis lainnya. Ada juga yang terjun dalam bidang kepolisian (markonis Suwardi), sedangkan markonis Sudarmo ke AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Yang tetap di *Antara* ialah markonis Yakub, sedangkan markonis-markonis Kusnindar dan Sutoyo gugur.¹⁹⁴

4.4.5.2 *Surat Kabar dan Majalah*

Satu-satunya surat kabar yang terbit di Jawa Timur (Surabaya) pada zaman pendudukan Jepang ialah harian Suara Asia (Soeara Asia) dengan Pimpinan Umumnya R. Tukul Surohadinoto dan Pemimpin Redaksinya Mas Abdul Wahab Joyowiriono. Tenaga-tenaga lain yang mendampinginya antara lain: Imam Supardi (almarhum), Mohammad Ali (kemudian menjadi Pemimpin Redaksi *Penyebar Semangat*) Ronggo Danukusumo (pernah memimpin surat kabar Harian Umum), Abdul Aziz (pernah memimpin *Surabaya Post*), *Sie Tjien Gwan* (di Eropa)

dan *Sie Pek Hoo* (kemudian dikenal dengan nama HOS Nuryahya Pemimpin Redaksi *Indonesia Daily News* di Surabaya).¹⁹⁵

Dari dulu surat kabar Surabaya dibaca oleh penduduk di Kalimantan, Timur, Sulawesi, Bali dan Maluku. Sedangkan di Jawa Timur sendiri Suara Asia dibaca oleh seluruh penduduk Jawa Timur, dari segala lapisan, terutama oleh golongan pangreh praja.¹⁹⁶ Sehingga tidak mengherankan apabila jumlah surat kabar yang terbit (oplah) pada waktu itu mencapai sekitar 20.000 sampai 30.000.¹⁹⁷

Peranan Suara Asia dalam penyebar keadaan berita proklamasi sangat besar. Disamping menyebarkan pamflet-pamflet suara Asia juga memuat berita proklamasi tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari. Dalam perkembangannya lebih lanjut, atas prakarsa golongan muda (Abdul Aziz dan Sulaiman Hadi, nama Harian *Suara Asia* diubah dengan nama Suara Rakyat (Soeara Rakyat). Demikianlah pada hari Senin 1 Oktober 1945 surat kabar tersebut untuk pertama kalinya terbit dengan nama *Suara Rakyat*. Isinya jelas membawakan aspirasi rakyat yang ingin mempertahankan kemerdekaan negaranya yang sudah diproklamasikan.

Pada tanggal 10 Nopember 1945 perjuangan mencapai klimaks dengan pecahnya pertempuran antara rakyat dengan pasukan Sekutu/Inggris. Dengan perlawanan yang gigih pasukan Republik Indonesia dapat bertahan selama hampir sebulan di Surabaya. Baru sesudah itu dan sesudah diadakan bumi hangus kota Surabaya ditinggalkan oleh pasukan RI. Sementara itu Belanda yang membonceng kemenangan Inggris lalu menguasai kota tersebut. Justru pada masa pendudukan itulah, di kota Surabaya terbit pula sebuah surat kabar yang sifatnya illegal. Nama surat kabar tersebut *Merah Putih*, dicetak di percetakan "Agil" (Jalan Panggung) dan diselenggarakan oleh Abdul Aziz bersama-sama dengan Sumarno.

Setelah perjuangan dialihkan ke pedalaman staf harian *Suara Rakyat* mundur ke Sidoarjo. Di situ hanya bertahan lima hari, dan stafnya kemudian pecah menjadi dua. Abdul Aziz

dan Ibnu Suyahman (alm) ke Malang, sedangkan Ronggo Danukusumo dan Akhmad Dermawan Lubis cs. ke Mojokerto. Kedua belah pihak menerbitkan *Suara Rakyat*. Pada saat pengungsian besar-besaran dari Surabaya, para karyawan pers Surabaya berhasil mengungsikan ratusan rol kertas, dan disimpan di pabrik gula Krembung, Tulangan.¹⁹⁸

Demikianlah para wartawan yang masih setia kepada RI, meninggalkan Kota Surabaya dan mengungsi ke daerah pedalaman. Bukan sekedar mencari selamat, tetapi untuk meneruskan perjuangan sesuai dengan bakat dan dharmaanya. Kota Malang dewasa itu menjadi pos terdepan dan merupakan salah satu pusat kegiatan persurat-kabaran di Jawa Timur, di samping kota-kota Kediri, Mojokerto dan Madiun.

Pada waktu itu Sunaryo (kemudian Drs. Sunaryo Prawiro Adinoto) menerbitkan sebuah harian yang diberinama *Siaran Daerah* dengan bantuan dari Dewan Pertahanan Pemerintah Daerah setempat. Segala fasilitas resmi disiapkan dan bahkan Menteri Muda Pertahanan Aruji Kartawinata juga turun tangan, karena menginsafi betapa pentingnya daerah Malang. Dengan surat Menteri Pertahanan Sunaryo telah berhasil mengambil huruf-huruf percetakan dari Madiun, yang kemudian ditempatkan di gedung NV. "Martak" sebagai tempat percetakan. Kertasnya dibeli dari pabrik kertas merang di Kepanjen, Gondanglegi, Turen, bahkan sampai ke Lodoyo. Besar surat kabar itu hanya seukuran folio, kertasnya dari merang, oplahnya tidak lebih dari 1.500 lembar. Direktornya: Wakil Ketua Dewan Pertahanan Daerah Ponijo, redaksi diasuh oleh Sunaryo, dibantu oleh staf *Antara*, bergiliran yang berdinasi di Blitar dan yang di Karang-kertas (Malang)¹⁹⁹

Selain itu oleh Sunaryo juga diterbitkan *bulletin* dengan nama *Djiwa Republik* (Jiwa Republik). Penerbitan bulletin itu ternyata bertambah lama bertambah maju dan kemudian dengan bermodalkan uang dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Mr. Sunarko (Residen Malang) dan KNI, diterbitkan surat kabar *Berjoang*, yang dicetak di percetakan Paragon. Pengasuhannya terdiri dari: Mohammad Rokhim sebagai pemimpin umum

dan pemimpin redaksinya Sunaryo Prawiro Adinoto. Sedangkan anggota stafnya: Thomas Gondo, Sujono dan Heru Sukarno. Tetapi Sunaryo sendiri kemudian keluar dari surat kabar *Berjoang* tersebut, kemudian memimpin kantor berita nasional *Antara* cabang Malang.

Divisi VII dewasa itu juga meerbitkan mingguan, dengan nama *Prajurit* (*Pradjurit*). Bagian redaksinya dipimpin oleh Imam Supardi dan Sukarji Ranuprawiro. Mingguan tersebut diterbitkan oleh Staf I pimpinan Mayor Rusman. Kemudian di Kota Malang pada waktu itu kita jumpai pula majalah bulanan *Liberty* yang diterbitkan oleh *Siauw Giok Tjan* (*Siauw Giok Can*) dan majalah *Bok Tok* yang diterbitkan oleh *Pauw Kioe An* (*Pauw Kiu An*). Sedangkan harian *Suara Rakyat* muncul pula di Kota Malang.

Harian *Suara Rakyat* ini diasuh oleh Suyahman sebagai pemimpin umum, Abdul Aziz sebagai pemimpin redaksinya dan stafnya antara lain terdiri dari: Mohammad Ali, Sophian Hadi dan Hargo. Beritanya kebanyakan disadap dari berita radio. Harian ini terkenal dengan sebutan *Suara Rakyat* edisi Malang. Kertasnya diambil dari simpanan kertas di pabrik gula Krembung, Tulangan. Besar surat kabar itu pertama-tama hanya seperempat halaman, kemudian meningkat menjadi dua halaman. Jangkauan penyebarannya hanya di Malang dan sekitarnya.²⁰⁰ Setelah Malang diduduki oleh Belanda pada waktu Aksi Militer Belanda I, para wartawan Indonesia yang masih sempat keluar, lalu mengungsi dengan semangat perjuangan yang tak kunjung padam.

Sebagian besar diantara mereka mundur ke Kediri. Disitu Abdul Aziz memperkuat *Suara Rakyat* edisi Kediri, yang pada waktu itu personalianya terdiri antara lain dari Ronggo Danukusumo Ali, Akhmad Dermawan Lubis dengan dibantu oleh beberapa tenaga lainnya. Kedatangan rombongan *Suara Rakyat* edisi Malang ke Kediri ternyata menyebabkan perpecahan. Ronggo cs

kemudian menerbitkan surat kabar sendiri dengan nama *Harian Warta*. Kantornya di sebelah timur sungai Brantas. Iswoyo dan

Ngadio Atmosantoso ikut *Harian Warta*, sedangkan Abdul Aziz Mohammad Ali, Kencong dan Wiwiek Hidayat tetap di *Suara Rakyat*. Tetapi *Suara Rakyat* itu kemudian *dibreidel* karena oleh pihak Pemerintah Daerah dituduh beritanya melemahkan perjuangan.²⁰¹

Abdul Aziz dan Wiwiek Hidayat selain menerbitkan *Suara Rakyat* juga mengeluarkan tengah bulanan dengan nama *Tinjauan* (Tinjauan) dan sifatnya hiburan. Karena di Kediri sudah tidak ada percetakan maka majalah itu dicetak di Blitar. Selain itu juga Imam Supardi menerbitkan majalah tengah bulanan yang dicetak di Wonogiri (Solo). Namanya *Menara Merdeka* dan sifatnya juga hiburan.

Pada waktu itu di Kediri ada mingguan berbahasa Jawa, namanya Djojobojo (Joyoboyo). Pemimpin Redaksinya: Tajib Ermadi (*Tadjib Ermadi*) bekas guru Taman Siswa. Sampai sekarang (1990) Joyoboyo masih tetap terbit di Surabaya. Stafnya antara lain Suwandhi dan Citrowasito (seorang guru, humanis, idealis dan cendekiawan). Joyoboyo pada masa revolusi dicetak di atas kertas merang, cetak tangan, gambarnya *dlemok cung* (tidak rata). Tetapi isinya *mentes* (berbobot), mengobarkan semangat bangsanya untuk *mengganyang Nica*. Pernah terpaksa menolak langganan karena tidak mampu melayani mereka, disebabkan kurang kertas.

Selain majalah Joyoboyo di daerah Kediri terdapat pula mingguan berbahasa Jawa dengan nama *Obor*. Majalah ini diselenggarakan oleh para pelajar sekolah lanjutan Blitar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Indonesia di Blitar. Nama pemimpinnya: Asrurun (kemudian berhasil mencapai gelar Sarjana). Sedang stafnya ialah sesama teman pelajar sekolah guru dan sekolah menengah. Tujuannya untuk memberi penerangan kepada rakyat yang berdiam di pelosok-pelosok, yang pada umumnya masih belum memahami bahasa Indonesia.

Selain *Obor*, para pelajar Kediri juga menerbitkan majalah tengah bulanan dengan nama *Pelajar Merdeka (Pelajar Merdeka)*. Pemimpin Redaksinya: Murjimin, pelajar Taman Siswa Kediri.

Anggota stafnya: Sanyoto Padmomulyo, Pranata SSP (Sastro Suprpto) *Pelajar Merdeka* ini kemudian digabungkan dengan majalah *Pelajar Pejuang* dengan nama baru *Patria*. Redaksinya dipimpin oleh Sutomo (vifa Sutomo) pelajaar Sekolah Guru Blitar. *Patria* ini kantornya di Mojokerto, dicetak di Kediri. Apabila selesai dicetak di Kediri lalu dikirim dengan kereta api ke Mojokerto, di rumah Mas Isman (komandan TRIP) yang dewasa itu sekaligus menjadi kantor majalah tersebut.

Di Mojokerto selain beredar majalah *Patria* juga terdapat harian *Suara Rakyat* edisi Mojokerto yang diselenggarakan oleh Jaswadi Suprpto, yang setelah Mojokerto diserbu oleh Belanda pindah ke Malang. Juga IPI Jawa Timur yang berpusat di Mojokerto tidak mau ketinggalan menerbitkan *Pelita Zaman* walaupun usianya tidak lama. Redaksinya: Dakhlan dan Suyati dan pemimpin umumnya: Mohammad Icksan (anaknya Tukul Surohadinoto). Sedangkan Iswoyo menerbitkan mingguan *Republik*.

Di Mojokerto KNI yang diketauai oleh Dul Arnowo juga menerbitkan mingguan dengan nama *Bhakti*. Sedang pengarangnya terdiri dari *Roeslan Abdulgani*, Bagus Sulaiman Hadi, Wiwiek Hidayat dan Sujani. Mingguan ini lambat laun ditinggalkan oleh anggota-anggota redaksinya, sehingga hanya tinggal Sujani saja. *Bhakti* kemudian mempergunakan bahasa Daerah (Jawa) sebagai mediana untuk memberikan penerangan. Juga Dewan Pertahanan Rakyat Indonesia yang pada waktu itu berada di Mojokerto menerbitkan majalah, dengan nama *Perjuangan*. Yang menyelenggarakan redaksinya adalah orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang-orang "kiri" (Pesindo), antara lain : Kusnandar, Ilham, Saleh Said dan Pradono.

Seperti telah kita ketahui bahwa menjelang Persetujuan Linggajati tentara Belanda menyerbu Mojokerto. Penyerbuan itu mengakibatkan buyarnya semua penerbitan di Mojokerto, karena para wartawannya mengungsi untuk mencari basis pengkalan baru dalam rangka meneruskan perjuangan di tempat lain. Antara lain ada yang menuju Madiun.

Madiun, sebuah kota yang letaknya tidak terlalu jauh dari pemerintahan pusat Yogyakarta, pada waktu itu juga memiliki penerbitan sendiri kendati tidak sebanyak dan sebesar kota-kota lainnya seperti Malang dan Kediri. Koran yang terbit di Madiun melayani daerah karesidenan Madiun dan sekitarnya. (Madiun kota, Ponorogo, Pacitan, Walikukun dan sekitarnya). Koran yang terbit di Madiun itu antara lain *Api Rakyat* yang dipimpin oleh Mohammad Sofwan Hadi yang selalu memakai nama samaran MR. X dalam pojoknya. Stafnya ialah Subroto, Sutarso, dan Riswandho Sugioputro. Selain itu ada pula majalah hiburan bernama *Suasana* yang dipimpin oleh Samsu Hari Kuswari dengan inisial SS Hk. Setelah Aksi Militer Belanda II pecah, kota Madiun diduduki Belanda, maka para wartawan meninggalkan kota untuk menggabungkan diri dengan pasukan gerilya, sehingga penerbitan persuat kabaran di Madiun menjadi berantakan.²⁰²

4.4.6 Kewanitaan

Dalam sejarah perjuangan menentang penjajah ternyata kaum wanita Indonesia tidak pernah ketinggalan. Sehingga muncullah pahlawan-pahlawan wanita Indonesia seperti: Cut Nyak Dhien (1850 – 1908) Cut Nyak Meutia (1870 – 1910), Raden Ajeng Kartini (1879 – 1904), Martha Kristina Tiahahu (1801 – 1818), Maria Walanda Maramis (1872 – 1924), Nyi Ageng Serang (1752 – 1828) dan H. Rasuna Said (1910 – 1965). Begitu pula dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, para wanita Jawa Timur terjun dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan menegakkan negara Republik Indonesia. Mereka terjun dalam kegiatan dapur umum, Palang Merah Indonesia, wartawan, pasukan *sandi* (dinas rahasia) dan tidak sedikit pula yang mengangkat senjata melawan tentara Belanda.

Salah seorang tokoh wanita pejuang yang namanya tidak asing lagi bagi para pejuang Jawa Timur ialah Bu Sudariyah Su-rodikusumo yang dalam kalangan para pejuang terkenal dengan julukan Bu Darmortir

Demikianlah ketika di Surabaya sedang berlangsung gerakan pengibaran bendera dan gerakan perlucutan senjata Jepang, Bu Darmortir bersama-sama para pemuda telah berhasil membuka gudang X persediaan makanan, pakaian Jepang di Kalimas (Tanjung Perak Surabaya) yang kemudian diangkut dengan 3 truk ke Jalan Surabaya. Sedangkan pada waktu pertempuran tiga hari (tanggal 28 s/d 30 Oktober) berkobar, Bu Darmortir mendirikan dapur umum di kampung Jagalan (Surabaya). Kemudian dipindahkan ke Jalan Ngemplak. Di Ngemplak ini tenaga pimpinan dapur umumnya ditambah dengan Nona Munanggal, Ny. Ngatiwiyono dan Ny. Sumantri. Sedangkan tenaga-tenaga pelaksanaannya diambil dari para sukarelawan wanita. Di sini setiap harinya dimasak makanan untuk 10.000 orang. Kebutuhan adanya dapur umum dengan tenaga kaum wanita rupanya makin meningkat, sehingga muncullah dapur umum dapur umum baru di Surabaya. Misalnya, dapur umum di Jalan Kapasari di bawah pimpinan Nyonya dr. Angka Nitisastro, yang melayani makanan untuk 5.000 orang setiap hari. Dapur umum Nyonya Sugiman di Maospati, dapur umum Bo Joko Sangkolo di *Coenbolevaart* (kini Jl. dr. Sutomo) dan bertahan sampai 28 Nopember 1945. Setelah tanggal tersebut, Bu Darmortir dan para sukarelawan dapur umum umumnya terpaksa mundur ke Sidoarjo dan kemudian ke Mojokerto. Di situ mereka mendirikan dapur umum baru di Jalan Pasar Paing No. 14 Mojokerto. Dengan bantuan para sukarelawan wanita, kebanyakan pengungsi, dapur umum tersebut dapat menyediakan nasi bungkus 15.000 setiap hari. Namun demikian karena tempat dapur umum tersebut terlalu jauh dari medan pertempuran, nasi bungkus yang diterima oleh para pejuang sering sudah basi. Untuk mengatasi keadaan ini Bu Darmortir kemudian mengadakan pembicaraan dengan Pak Prangko, dari Jawatan Perbekalan Markas Pertahanan Surabaya (MPS). Pembicaraan itu menghasilkan berdirinya 51 dapur umum baru di sepanjang garis pertahanan yang melingkari Kota Surabaya, mulai dari Gresik sampai Sidoarjo. Dapur umum pusat di Mojokerto tetap bekerja seperti biasa dan Bu Darmortir ditunjuk

sebagai koordinator Dapur Umum Pertahanan Surabaya. Para pengurus Dapur Umum pada waktu itu antara lain terdiri dari Ny. Sukiyem, Ny. Sumantri, Ny. Sugimin dan Ny. Susi. Pekerja seluruhnya berjumlah 60 orang dan setiap harinya melayani nasi bungkus sebanyak 5.000. Dapur Umum pusat di Mojokerto itu berjalan terus sampai Mojokerto diduduki tentara Belanda (17 Maret 1947).

Setelah Mojokerto diduduki Belanda, atas bantuan Inspektorat Wanita yang dipimpin oleh Nona Sukiyem, Bu Darmortir berhasil mendirikan 4 dapur umum di Jombang (di Markas Resimen, Markas Polisi Tentara Keamanan Rakyat PTKR, di rumah Ny. Angka dan di Biro Perjuangan BP). Bahkan kemudian oleh Letkol Latief Hendraningrat Bu Darmortir diserahkan pekerjaan untuk mengurus dan memperbaiki semua dapur umum di daerah pertahanan sebanyak 64 buah. Dapur umum di Jombang itu berjalan terus sampai Aksi Militer Belanda I dilancarkan.

Ketika Aksi Militer Belanda I berlangsung Jombang diduduki tentara Belanda. Bu Darmortir kemudian mendirikan dapur umum di Kediri, sampai Kediri diduduki Belanda (pada Aksi Militer Belanda II). Setelah Aksi Militer Belanda II berlangsung, Bu Darmortir meninggalkan Kediri untuk bergerilya. Di setiap tempat yang ia kunjungi (desa Mojo, Nletib dll.) selalu diusahakan berdirinya dapur umum. Bahkan ketika di desa Wonorejo ia pernah membantu Dr. Irsan untuk membentuk pos Palang Merah Indonesia (PMI).²⁰³

Selain aktif di bidang dapur umum para wanita Jawa Timur juga aktif dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Misalnya, sebagian anggota-anggota bekas Barisan Pelopor Puteri di bawah pimpinan pemudi Kulitaningsih, yang mula-mula ikut serta mengatur pembagian makanan bagi para pejuang di garis depan, kemudian berjuang di kalangan Palang Merah (Sutartini, Sri Lestari, Sri Haruni, Sri Mantuni dll.)²⁰⁴ Juga Tatet, Sri Kodok, Liek Tien Tukul dan Tuti (Suprpto) adalah para pelajar Sekolah Menengah Tinggi Surabaya yang pernah menjadi anggota

Palang Merah Tentara Pelajar Darmo.²⁰⁵ Bahkan Tuti (Suprpto) ketika Aksi Militer I berlangsung, pernah menjadi pasukan sandi di Malang bersama-sama dengan anggota TRIP lainnya.

"Kami diharuskan berpencar oleh pak Isman, ketika Aksi Militer I pada tahun 1947. Saya sendiri tetap berada di Malang, sebagai penghubung, jika ada berita bahwa Belanda akan menyerang, saya harus menghubungi kawan-kawan kami yang berada di Malang, dititipkan pada rumah penduduk. Setiap rumah menampung dua orang tentara pelajar laki-laki dan seorang wanita. Agar tidak dicurigai Belanda mereka dianggap sebagai anggota keluarga. Melalui merekalah, berita-berita penting akan tersebar dari rumah ke rumah. Yang lucu ialah, pada waktu itu tanpa sengaja saya meminta tolong kepada ibu Widjojo untuk menemani pak Widjojo dan seorang kawannya lagi untuk tinggal bersama dalam satu rumah penduduk. Rupanya perkenalan mereka dimulai pada waktu itu dan kini mereka telah menjadi suami istri."²⁰⁶

Selain Tuti Suprpto, ada pula pelaku wanita yang semula menjadi anggota dapur umum, kemudian menjadi anggota PMI dan akhirnya ikut pergerakan di bawah tanah untuk merebut kembali Surabaya dari pendudukan Belanda. Nama perlaku wanita tersebut ialah Nona Mujinah (Moedjinah Soetojo). Pada suatu malam bulan Januari 1949 ia bersama dengan Ny. Liliek diberi tugas (oleh Bu Darmortir) untuk mengadakan pengamatan kekuatan di Mojokerto dan Surabaya sebelum dilakukan penyerangan. Tetapi mereka tertangkap di Jalan Ngaglik 48 Surabaya. Bersama kawan-kawannya yang ditangkap, gadis yang berumur 23 tahun itu dijabloskan dalam tahanan berikut siksaan-siksaan kerja paksa selama 15 tahun.

Tepatnya 28 Maret 49. Tempatnya di Surabaya juga, tapi ruang sidang pengadilan. Di antara para terdakwa terdapat seorang gadis berusia 23 tahun. Sang gadis, nona *Moejinah*

dijatuhi hukuman dengan kerja paksa selama 15 tahun oleh hakim komisaris urusan politik W.F. Witte, karena menuntut kembalinya Surabaya, dan dituduh membawa surat perintah Bung Tomo. Hadirin kaget, karena dialah satu-satunya wanita yang diadili dalam perkara politik itu, dan jumlah hukumannya yang paling tinggi.²⁰⁷

.....

Selain berjuang di dapur umum, PMI dan gerakan bawah tanah, kaum wanita di Jawa Timur ada pula yang berjuang mengangkat senjata. Misalnya Gerakan Srikandi di daerah Besuki yang dipimpin oleh Ibu Sutopo dan Siti telah dapat membangkitkan kaum wanita untuk turut berjuang di medan laga. Walaupun Ibu Sutopo sendiri kemudian gugur di daerah Jember, namun perjuangannya tidak terputus di tengah jalan.²⁰⁸

Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam jaman Revolusi Pisik di Jawa Timur kaum wanita tidak hanya berpangku tangan saja, tetapi ikut serta terjun dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, membela kehormatan bangsa Indonesia dan menegakkan negara Republik Indonesia.

BAB V KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN

5.1 Masa Menjelang Persetujuan KMB

Usaha Belanda menghancurkan Negara Republik Indonesia mengalami kesukaran. Walaupun pernah dibantu Inggris, sehingga menimbulkan pertempuran Surabaya, Republik Indonesia tetap tegak namun tak pernah berhenti untuk menghancurkannya.

Sebelum Aksi Militer Belanda I, Dr. Van Mook berhasil mendirikan Negara Indonesia Timur dan Negara Kalimantan Barat. Selanjutnya *Van Mook* berusaha mendirikan negara-negara barat didaerah-daerah yang berhasil diduduki. Tujuannya untuk memperkecil Negara Republik Indonesia. Usaha Belanda itu membuahkan negara baru, mula-mula Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura dan Negara Sumatra Selatan. Negara-negara tersebut terbentuk sebenarnya bukan kemauan sebagian besar rakyatnya yang sebenarnya masih setia terhadap negara Republik Indonesia. Pada 2 Januari 1948 di Surabaya, terbentuk sebuah Panitia Pembentukan Negara Jawa Timur. Ketuanya ialah Drs. Karimun mantan Kepala Kehewan-

an Jawa Timur. Konpenrensi yang diadakan untuk merealisasi usahanya bertempat di Gedung Nasional Surabaya. Gedung itu dikenal sebagai peninggalan almarhum Dr. Sutomo, seorang tokoh terkemuka dalam pergerakan Indonesia menentang penjajahan Belanda.¹

Tindakan Drs. Karimun yang menodai perjuangan bangsanya mendapat tantangan dari arek-arek Suroboyo. Semangat persatuan rakyat Jawa Timur yang cinta kemerdekaan menjadi sebab utama kegagalan pertemuan tersebut, sehingga tidak berhasil membentuk suatu negara yaitu Negara Jawa Timur.² Tokoh-tokoh Republikan yang menentang usaha Drs. Karimun, terdiri dari Mr. Indrakusumo, Nyono Prawoto (Malang). Mr. Syaril Hidayat dan Dr. Abdul Manaf (Surabaya).

Dalam Konperensi Mr. Indrakusumo mengemukakan alasan-alasan berdasarkan juridis politis; dan *Staatkundig-geografis*, yang antara lain mengatakan bahwa, Jawa Timur pada waktu itu hanya terdiri dari bagian pendudukan dari Karesidenan Besuki, sebagian besar Karesidenan Malang dan sebagian besar daerah Karesidenan Surabaya karena tidak mungkin dapat didirikan sebagai suatu negara.³ Pendapat itu mendapat sambutan dari para penentang yang lain. Dengan demikian Konperensi itu berhasil menggugurkan niat memecah belah Negara Indonesia.

Menyadari kegagalannya *Vander Plas*, yang sebenarnya otak pendirian Negara Jawa Timur, berusaha mendekati kaum ulama. Menurut jalan pikirannya, kaum ulama mempunyai peranan didalam masyarakat Jawa Timur. *Vander Plas* kemudian mendekati K.H. Nuryasin pimpinan Dewan Islam Jawa Timur yang bertugas memperkokoh persatuan ulama diseluruh daerah Malang, Besuki dan Madura.⁴ Usaha memperlakat kaum agama inipun mengalami kegagalan, karena para ulama di daerah-daerah tersebut menunjukkan kesetiaannya terhadap negara kesatuan. Walaupun ada tantangan pihak Belanda selalu mencari jalan baru untuk memecah Negara Republik Indonesia. Dan apa yang dijalankannya itu tidak lepas dari daerah-daerah yang telah diduduki.

Pada 21 Maret 1948, di Banyuwangi timbul gerakan baru dari para bupati, dibawah pimpinan Darmosukur Murdjonu. Gerakan itu menanamkan diri Persatuan Rakyat Jawa Timur. Tugas utamanya membentuk Negara Jawa Timur dengan kerja sama pemerintah Belanda. Pusat pendirian negara ini terletak didaerah Besuki. Dengan mendapatkan bantuan dari Belanda, propaganda yang dilancarkan belum dapat menarik sebagian besar rakyat, karena itu usaha Darmosukur ini sia-sia belaka.

Di Bondowoso, beberapa orang yang terdiri dari Hutomo dan Suryatin berhasil membentuk gerakan Rakyat Jawa Timur. Tujuan gerakan ini tiada berbeda dengan usaha Darmosukur. Untuk merealisasi cita-citanya, memperlak beberapa perkumpulan kesenian dijadikan alat propagandanya.⁵ Selain juga membentuk persatuan Warung Indonesia yang berada di daerah Bondowoso. Usaha Hutomo dan kawan-kawannya tidak mendapat tanggapan dari rakyat, walaupun mereka berada di daerah pendudukan Belanda, tetap kesetiaannya kepada Republik Indonesia. Karena itu gerakan itu pun mengalami kegagalan.

Menghadapi kenyataannya serupa itu Belanda tidada kendor usaha mendirikan negara Jawa Timur, *Van der Plas*, tokoh yang bersemangat untuk mendirikan negara-negara bagian di Indonesia, berhasil mempengaruhi orang-orang yang setia kepada Belanda. Ia telah dapat mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat di tiap-tiap kabupaten dengan jalan pemilihan umum. Secara demokratis di daerah pendudukan.

Ternyata pelaksanaannya tidak seperti apa yang dituntut oleh cara demokratis. Anggota yang terpilih dalam Dewan Perwakilan Rakyat lebih dahulu diberi instruksi rahasia, kebanyakan orang dari Persatuan Rakyat Jawa Timur dan Gerakan Rakyat Jawa Timur, dan mereka itu pro negara Jawa Timur.⁶ Jelas sekali peristiwa itu tidak lain hanya sandiwara belaka, agar pembentukan negara Jawa Timur pendudukan seperti Banyuwangi, Pasuruan, Bondowoso, Jember, Surabaya, Mojokerto, Lumajang, dan Kraksaan dilantik timbul mosi dan resolusi. Mosi atau resolusi diajukan oleh Partai Rakyat Jawa Timur

kepada pemerintah Federal sementara untuk memberikan status negara kepada daerah Jawa Timur.

Konperensi Bondowoso dihadiri wakil-wakil rakyat dari kabupaten daerah pendudukan, telah mengangkat bupati Banyuwangi R.T.P. Ahmad Kusumonegoro sebagai ketua. Selain itu Konperensi memperlihatkan sikap setuju dengan terbentuknya Negara Jawa Timur. Walaupun Konperensi itu mengambil sikap serupa itu namun didalam sidangnya timbul berdebatan antara yang pro dan yang anti Negara Jawa Timur. Perbandingan suara 16 Nopember 1948 memperlihatkan 611 suara setuju, 11 suara menolak dan 1 suara *blanko* menetapkan status Jawa Timur sebagai suatu Negara.⁷ Kenyataannya Konperensi Bondowoso sudah diatur sebelumnya, sehingga tiada artinya reaksi dari Mr. Indrakusuma dan kawan-kawannya pada 26 Nopember 1948 diakui Jawa Timur sebagai Negara, sedang Konperensi Bondowoso diakui sebagai DPR sementara oleh Pemerintah Belanda.⁸

Pada waktu Konperensi Federal di Bandung, Negara Jawa Timur mengirimkan utusannya. Pada 1 Desember 1948 R.T.P. Achmad Kusumonegoro dipilih sebagai wakil negara, bersamaan pula dengan pelantikan DPR. Sementara oleh Dr. Beel, wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda. Dengan diakuinya Negara Jawa Timur oleh pemerintah Belanda dan yang sebenarnya mempunyai andil besar dalam pembentukannya sebagai ciptaannya yang keempat belas.⁹

5.2 Negara Madura

Komite Indonesia Serikat terbentuk di Jakarta pada bulan Desember 1947, anggotanya terdiri dari negara-negara bagian buatan Belanda. Peristiwa itu mendorong beberapa orang di Madura untuk menentukan bentuk dan status Madura sebagai suatu Negara yang tidak terikat oleh *Recomba*. Di kota Pamekasan dibentuk Komite Penentuan kedudukan Madura yang anggotanya terdiri atas sebelas orang, dengan ketua R. Sukaris Budisuyono. Pertemuan yang diselenggarakan 16 Januari 1948,

dianggap oleh pemerintah Madura sebagai pertemuan wakil rakyat seluruh Madura. Pertemuan tersebut telah berhasil membuat resolusi:

- 1) Perhubungan antara Madura dan Republik telah terputus.
- 2) Menentukan status Madura dalam tokoh sebuah negara merdeka sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
- 3) Menunjuk R.A.M. Sis Cakraningrat, bupati Bangkalan sebagai Utusan Madura dalam Dewan Pemerintah peralihan.
- 4) Meminta kepada R.A.M. Cakraningrat memegang pemerintahan Madura.
- 5) Memberi kekuasaan penuh kepada kepala negara dan panitya untuk mendapatkan kedudukan negara supaya:
 - a) Tokoh pemerintahan ditetapkan dasarnya, azas-azas demokrasi dari persetujuan Linggajati.
 - b) Banyaknya utusan dari Madura didalam Dewan Pemerintah peralihan ditetapkan menjadi tiga orang anggota.
 - c) Banyaknya panitya untuk menetapkan kedudukan negara Madura ditambah jika perlu.
- 6) Meminta kepada Pemerintah Belanda, kedudukan negara Madura diakuinya sesuai dengan fasal 6.¹⁰

Agar penyampaian resolusi sampai kepada rakyat diseluruh Madura yang dua setengah juta, di empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep diadakan panitya pungutan suara.¹¹ Pelaksanaan pemilihan diadakan pada 23 Januari 1948 serentak di tiap desa di seluruh Madura. Didalam pelaksanaannya dilakukan pemilihan diantara mereka menjadi tiga golongan, yaitu setuju, yang melawan dan yang tidak memberikan suara alias blanco.¹²

Demikian cara yang diambil untuk menentukan *Volksstemming* kedudukan Madura merdeka Suatu rencana resolusi yang telah lebih dahulu direncanakan kepada rakyat Madura. Jelas pada hakekatnya adalah suatu sandiwara yang bertopengkan azas-azas demokrasi.¹³ Hal demikian itu terbukti adanya kaum wanita dinyatakan tidak mempunyai hak memilih. Dengan suatu

alasan yang dibuat-buat, bukan kebiasaan di Madura dan lagi pula menurut praktek wanita tidak mempunyai perhatian akan pemilihan.¹⁴ Disamping itu pelaksanaan pemungutan suara berada dibawah tekanan pihak Belanda, bahkan beberapa orang ditangkap oleh Belanda dan ditahan.¹⁵

Melalui tindakan diluar demokrasi, akhirnya hampir seluruh jumlah yang hadir 71,88% dari yang berhak memilih, 90,88% suara setuju Madura merdeka lepas dari Indonesia.¹⁶ Dengan memperoleh suara mutlak, utusan Madura, Sukaris dan Sudirman menghadap Letnan Gubernur Jendral Belanda agar pemerintah Belanda mengakui R.A.A. Cakraningrat sebagai wakil negara.¹⁷ Berdasarkan resolusi tersebut dalam surat keputusannya 20 Februari 1948, van Mook Letnan Gubernur Jendral Belanda, mengakui Madura sebagai suatu negara, dan R.A.A. Cakraningrat menjadi wali negara.

5.3 Sikap Masyarakat dan Pemerintahan Daerah dengan adanya Konferensi Antar Indonesia

Dengan melalui politik *divide et impera* disertai tekanan militer, Belanda berhasil membentuk dua negara di propinsi Jawa Timur. Dua negara itu ialah negara Madura dan negara Jawa Timur. Keberhasilan politik Belanda itu sebenarnya telah ditunjang oleh keinginan orang-orang yang diperalat seperti R.A.A. Cakraningrat, Sukaris, Suryatin, Darmosukur Murjono, dan lain-lain.

Negara yang berhasil mereka bentuk menurut rencana akan disusun, diatur dan diperintah menurut kemauan rakyat melalui keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penentuan nasib negara dan rakyatnya berada di tangan kekuasaan rakyat. Rencana itu hanya untuk memenuhi sendi-sendi kehidupan demokratis, akan tetapi kenyataannya banyak diluar itu bahkan ada dibelakang mereka kekuatan militer Belanda masih tetap berhubungan.

Perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, terlihat adanya tiga pihak yang seolah-olah berdiri sendiri. Ketiga itu

ialah Republik Indonesia, *Bijeenkomst Federal Overleg* (BFO) dan Belanda.¹⁸ BFO merupakan permusyawaratan negara-negara buatan Belanda di Indonesia. Selama mengambil sikap bertentangan politik dengan pemerintah Republik Indonesia, Belanda berhasil membuat negara boneka sebanyak enam belas buah.¹⁹ Berdirinya negara-negara yang memisahkan diri, jelas sekali maksudnya untuk mengurangi dan memperkecil kekuatan Republik Indonesia.

Tetapi situasi yang terjadi telah berkembang jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Belanda. Di berbagai daerah yang diduduki Belanda, setelah berhasil melancarkan agresinya yang kedua, selalu mendapat tekanan dari gerilya TNI. Kecuali itu datangnya ancaman dari Amerika Serikat untuk mencabut Marshall Plan dan memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara kepada pengakuan kedaulatan sesuatu negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia Belanda.²⁰ Bukan hanya itu saja, Dewan Keamanan PBB turut mengambil bagian mendesak kepada Belanda agar mendekati Pemerintah Republik Indonesia.

Pendekatan politis antara Belanda dengan Pemerintah Indonesia diikuti pula oleh BFO. Jelas sekali situasi pada waktu itu telah menunjukkan adanya perubahan politik. Walaupun pertemuan tersebut tidak pernah diumumkan. Pada 13 Februari 1949 Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi mengatakan pendapatnya bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan resolusi PBB.²¹ Apa yang diinginkan Wakil Presiden Moh. Hatta mendapat persetujuan dan dukungan dari BFO. Dengan demikian kontak antara sesama bangsa Indonesia membawa pengaruh yang positif, menyadarkan negara-negara buatan Belanda pentingnya akan persatuan. Proses seterusnya menunjukkan sikap jelas, BFO lebih condong kepada Pemerintah Republik Indonesia dari pada kepada Belanda, walaupun badan itu semula didirikan oleh Belanda sendiri.²²

Menurut pendapat Belanda pada waktu itu para pemimpin pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya dapat diajak untuk berunding. Tujuannya tidak perlu diragukan lagi bahwa Belanda dalam perundingan itu akan: membicarakan Indonesia dan syarat-syarat penyerahan kedaulatan, serta pembentukan Uni Indonesia Belanda.²³ Bersama itu pula utusan Belanda, *Dr. Koets* menemui Presiden Sukarno dan para pembesar lainnya yang sedang ditawan di Bangka. Kedatangannya tidak lain untuk membicarakan masalah KMB di *Den Haag* dan mengundang Presiden Sukarno untuk menghadirinya. Undangan itu kemudian ditolak oleh Presiden Sukarno, kecuali dengan syarat antara lain pengembalian kekuasaan Republik Indonesia adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan.²⁴

Sementara itu pula kontak antara BFO dengan Pemerintah Republik Indonesia telah berjalan dengan baik. Akibat hubungan itu, menyadarkan negara-negara buatan Belanda akan pentingnya bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi di meja perundingan. Pada 3 Maret 1949 dalam suatu pertemuannya dengan wakil BFO Presiden Sukarno menegaskan akan perlunya kedudukan Pemerintahan Republik Indonesia dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.²⁵

Komisi Tiga Negara yang menangani masalah Indonesia – Belanda diganti dengan Panitia PBB untuk Indonesia atau *United Nations Commission for Indonesia* disingkat UNCI. Tujuannya sebagai wakil Dewan Keamanan di Indonesia untuk menjalankan keinginan Dewan Keamanan. Berkat bantuan UNCI tercapai pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Pimpinan delegasi Indonesia Mr. Moh. Rum, sedang Belanda dipimpin oleh *Dr. J.H. Van Royen*. Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai *Rum – Royen Statements*, menentukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengikuti KMB yang akan diadakan di *Den Haag* Negeri Belanda.

Rum – Royen Statements mendapat dukungan yang positif dari partai politik di Indonesia. Partai Masyumi dengan *Dr.*

Sukiman selaku ketua umum, menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh delegasi dengan melihat posisi Republik Indonesia di dunia Internasional dan didalam negeri, apalagi BFO telah menyatakan kerja sama dengan Republik Indonesia. Sedang Mr. Suyono Hadinoto, ketua Umum PNI menyatakan bahwa persetujuan Rum – Royen merupakan suatu langkah kearah tercapainya penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia.²⁶ Berbeda dengan tanggapan kedua partai tersebut, pihak Angkatan Perang menyambutnya dengan perasaan curiga.²⁷ Rasa curiga ini didasarkan atas perundingan-perundingan dengan pihak Belanda selalu merugikan kedudukan Indonesia. Pengalaman itu telah dibuktikan melalui Linggajati, Renville dan lain-lainnya.

Untuk menghadapi KMB telah terjadi persesuaian pendapat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan BFO. Kenyataan itu tidak lain sebagai akibat persetujuan Rum – Royen, sehingga pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan secara formil. Perundingan itu dibawah pengawasan Komisi PBB dan dipimpin oleh *Critchley*, menghasilkan:

- 1) Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta dilaksanakan. Pada tanggal 24 Juni 1949 Karesidenan Jogjakarta dikosongkan oleh Tentara Belanda dan pada 1 Juli 1949 Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jogjakarta setelah T.N.I. menguasai keadaan sepenuhnya didaerah itu.
- 2) Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia di Jogjakarta.
- 3) Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag.²⁸

Sedangkan pusat Pemerintah kembali di Jogjakarta, pelaksanaan perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka di mulai lagi. Konferensi diadakan pada 19 – 22 Juli 1949 dan dikenal dengan Konferensi Antara Indonesia. Hasil konferensi ini adalah persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat, antara lain:

- 1) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokratis dan federalisme.
- 2) RIS akan dikepalai seorang Presiden Konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.
- 3) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara-negara bagian (Senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.²⁹

Disamping itu juga diakui bahwa:

- 1) Bendera Kebangsaan: Merah Putih.
- 2) Lagu Kebangsaan, Indonesia Raya.
- 3) Hari 17 Agustus 1945; adalah hari nasional.³⁰

Sedang di bidang militer telah tercapai persetujuan antara lain:

- 1) Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS. adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI.
- 2) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.³¹

Konperensi Antara Indonesia diteruskan lagi, dengan mengambil tempat di Jakarta pada 30 Juli 1949. Sebagai bahan yang dibahas masalah pelaksanaan dari pada pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Dengan demikian tokoh-tokoh bangsa Indonesia telah berhasil mempertemukan fikiran yang searah. Kenyataan serupa itu amat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Keutuhan tanah air yang sebelumnya dipecah-pecah oleh Belanda, mulai saat itu telah terhapus. Peristiwa kebulatan serupa itu menjadi modal perjuangan dalam satu front menghadapi Belanda, yang tidak lama lagi akan bertemu di meja perundingan. Praktis di KMB. nanti hanya terdapat dua pihak yaitu Republik Indonesia dengan Belanda.

Sementara itu sebagai realisasi reaksi Dewan Keamanan dan Rum - Royen statements, maka 8 Agustus 1948 keluarlah perintah penghentian tembak-menembak. Untuk daerah Jawa gencatan senjata baru berlaku pada 10 Agustus 1949 waktu tengah malam. Karena pentingnya hal itu, maka utusan Pemerintah Pusat, yaitu Jendral Mayor Suharto datang di Nganjuk untuk menjelaskan pelaksanaannya. Karena tersebarnya pasukan-pasukan TNI dan tiadanya kendaraan/alat penghubung yang cepat bagi TNI maka penyampaian perintah dikerjakan oleh pihak Belanda.³² Setelah mendapat penjelasan tersebut, pada 13 Agustus 1949 diadakan pertemuan di Trowulan antara Komandan Divisi I dengan Komandan Komando A Divisi Belanda maksudnya untuk membicarakan pelaksanaan gencatan senjata. Pertemuan dilanjutkan lagi 22 Agustus 1949 di Kediri, pihak Republik Indonesia dipimpin Kolonel Sungkono dan pihak Belanda Jendral Mayoor Baay.

Adanya gencatan senjata akan membawa kehidupan baru di Jawa Timur dalam menyelesaikan masalah yang telah berkembang sebelumnya, terutama negara Jawa Timur dan negara Madura. Pada 25 - 27 Agustus 1949, diadakan rapat kepala jawatan-jawatan sipil seluruh Jawa Timur oleh Gubernur Samadikun, tujuannya untuk mengadakan stabilisasi di segala lapangan, dalam menghadapi masa-masa mendatang. Demikian pula menteri pertahanan datang di Jawa Timur untuk memberikan penjelasan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah pusat untuk mewujudkan kesatuan Indonesia.

5.4 Sikap Masyarakat terhadap cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah Pemerintah Pusat kembali di Jogjakarta di Jawa Timur timbul masalah baru, terutama di daerah-daerah bekas negara boneka Belanda. Di berbagai tempat di daerah di Negara Jawa Timur dan di Negara Madura, sebagian besar rakyat setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. Kesetiaannya diwujudkan dengan menuntut pulihnya negara Republik Indonesia. Adanya negara-negara bagian dipandang tidak sesuai lagi dengan kehendak rakyat Indonesia.

Gelombang tuntutan rakyat untuk membubarkan negara-negara bagian tidak dapat dicegah. Mereka menuntut agar segera menggabungkan dengan negara Republik Indonesia. Kesetiaan rakyat kepada negara Republik Indonesia mendorong negara-negara bagian untuk membubarkan diri. Rakyat tidak dapat dicegah lagi sehingga lenyapnya negara buatan Belanda, yang dalam kenyataannya memang tidak mendapat dukungan sebagian besar rakyat.

Suara-suara dan pernyataan-pernyataan rakyat serta organisasi dan partai-partai di seluruh Jawa Timur jelas menginginkan persatuan dengan negara Republik. Sikap yang tegas telah terwujud dengan membanjirnya resolusi berturut-turut datang dari.³²

- 1) PNI Cabang Surabaya pada 1 Desember 1949.
- 2) Persatuan Kaum Buruh Pasuruan pada 5 Desember 1949.
- 3) Front Pemuda Jember pada 11 Desember 1949.
- 4) Front Pemuda Situbondo pada 11 Desember 1949.
- 5) Serikat Buruh Kereta Api Malang, pada 11 Desember 1949.
- 6) Wakil-wakil Rakyat Malang pada 15 Desember 1949.
- 7) Gerakan Kedaulatan Rakyat Batu tanggal 17 Desember 1949.
- 8) Rukun Wanita Pasuruan pada 18 Desember 1949.
- 9) Konferensi Kilat Front Nasional Pemuda pada 18 Desember 1949.
- 10) Serikat Sekerja Kecamatan Seluruh Distrik Gersik pada 23 Desember 1949.
- 11) Serikat Sekerja Jawatan Pekerjaan Umum Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Panggul, Lumajang, Kraksaan pada 25 Desember 1949.
- 12) Rakyat Karang Ploso pada 28 Desember 1949.
- 13) Rakyat Mojokerto pada 29 Desember 1949.
- 14) Pegawai Kepenghuluan Mojokerto pada 30 Desember 1949.

- 15) Serikat Buruh Kesehatan Indonesia Mojokerto pada 31 Desember 1949.
- 16) Rakyat Sidoarjo pada 3 Januari 1950.
- 17) Rakyat Gunung Kedeng pada 6 Januari 1950.
- 18) Persatuan Penghulu dan Pegawainya pada 7 Januari 1950.
- 19) Persatuan Rakyat Jawa Timur pada 8 Januari 1950.
- 20) Rakyat Pasuruan pada 9 Januari 1950;
- 21) Serikat Sekerja Pamong Projo Banyuwangi pada 20 Januari 1950.
- 22) Rakyat Sidoarjo pada 23 Januari 1950.

Selain mosi dan resolusi tersebut, organisasi, partai dan golongan rakyat lainnya di seluruh Jawa Timur, membulatkan pendapat agar Jawa Timur dibubarkan dan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Tiada sabarnya rakyat acap kali menimbulkan peristiwa-peristiwa yang diluar keinginan seperti di Probolinggo, Sidoarjo, Lawang, Pasuruan dan lain-lainnya. Ditempat-tempat itu secara serempak rakyat, jawatan serta partai memutuskan hubungan dengan Pemerintah Negara Jawa Timur. Kenyataan itu mempunyai arti rakyat tidak mengakui lagi Negara dan Pemerintah Jawa Timur.

Gelombang desakan rakyat bertambah banyak, mulai terasa bahwa negara dan Pemerintah Jawa Timur tidak berarti lagi. Meskipun secara Politis Negara Jawa Timur taat atas kehendak rakyat, sesuai dengan pasal 43,44 dan 187 dari Undang-undang Dasar sementara RIS. Di dalam sidang Kabinet RIS. yang keempat, telah diputuskan untuk mengajukan rencana Undang-undang Federal tentang pembubaran daerah sesuatu negara bagian. Namun keinginan rakyat supaya Negara Jawa Timur selekas mungkin dibubarkan tak dapat ditahan lagi.³⁴

Menyadari adanya reaksi dari rakyat, memaksa Pemerintah Daerah Jawa Timur mengirimkan utusannya ke Pemerintah RIS. Utusan itu terdiri dari R.M.T. Sudarmo, Mr. Indrakusuma dan Mr. Iskak Cakrahadisuryo. Beban yang dipikul utusan itu untuk merundingkan tindakan-tindakan yang diperlukan guna

mempercepat terlaksananya pembebasan Negara Jawa Timur. Pemerintah Pusat mengetahui situasi dan keinginan rakyat, mengenai pembubaran Negara Jawa Timur menanti Undang-undang Federal mengenai perubahan status sesuatu Negara Bagian.

Pemerintah Pusat membentuk suatu panitia terdiri seorang wakil Pemerintah RIS. (Mr. Indrakusuma), Wakil Republik Indonesia (Mr. Manu dan seorang wakil Negara Jawa Timur (R.M.T. Sudarmo). Tugas panitia itu dalam waktu sesingkat-singkatnya meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasionalisasi seluruh pegawai dalam Daerah Bagian Jawa Timur. Panitia itu dibentuk pada 23 Januari 1950 dikenal dengan Komisi Rasionalisasi atau Komisi Tiga.

Pada 19 Januari 1950 Wali Negara Jawa Timur menginsafi akan situasi yang sedang terjadi, akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Pemerintah RIS. Kemudian Pemerintah RIS. mengangkat Samadikun sebagai Komisaris RIS untuk Jawa Timur. Dengan berhentinya Wali Negara, beralih pula seluruh kekuasaannya ketangan Komisaris RIS. Pada waktu menjalankan tugasnya, Samadikun mendapat bantuan dari Komisi Tiga, terutama masalah kepegawaian. Rakyat Jawa Timur melihat masih tetap berdirinya Pemerintahan Jawa Timur, tidak dapat ditahan lagi tuntutan agar selekasnya negara itu dibubarkan dan digabung ke Republik Indonesia. Ternyata gezag pemerintahan Jawa Timur di daerah-daerah yang dikuasai sudah tidak lagi ditaati baik oleh pegawai-pegawai maupun rakyat umumnya.

Keadaan itu menyebabkan Komando Militer Daerah Surabaya mengeluarkan penetapan 16 Februari 1950. No. 4 P.N : 50, yang isinya diadakan penyerahan pemerintahan Karesidenan Surabaya dari penjabat Residen Surabaya Negara Jawa Timur R. Sudiman Raharjo kepada Residen Surabaya Republik Indonesia M. Pamuji.^{3 5}

Dan pada 23 Februari 1950 daerah Negara Jawa Timur dengan resmi dinyatakan menjadi daerah Republik Indonesia. Aksi-aksi rakyat merobohkan kekuasaan Negara Jawa Timur

ternyata mempengaruhi rakyat Madura untuk bangkit meruntuhkan Negara Madura.

5.5. Madura Kembali ke Wilayah Propinsi Jawa Timur

Tiada beda dengan bangkitnya rakyat Jawa Timur, di Madura gelombang tuntutan rakyat tidak dapat dibendung. Putra-putri Madura dengan dipelopori Moh. Tabrani dan R. Moh Rafrawi berjuang bersama rakyat meruntuhkan negara buatan Belanda. Membanjirnya desakan rakyat Madura untuk membubarkan Negara Madura makin lama makin besar. Berbagai mosi dan resolusi datang dari organisasi rakyat, serikat-serikat kerja, golongan-golongan rakyat yang isinya sama yaitu menuntut bubarnya Negara Madura dan kembali ke Republik Indonesia.

Resolusi berasal dari³⁶

- 1) Konperensi kilat Masyumi cabang Sumenep pada 8 Januari 1950.
- 2) Konperensi Masyumi/G.P.I. Cabang Sumenep pada 6, 7 dan 8 Januari 1950.
- 3) Konperensi Pemuda Indonesia seluruh Madura pada 7, 8 Januari 1950, yang dihadiri sekretariat Pemuda Indonesia Front Nasional Pemuda Sumenep. Gerakan Pemuda Indonesia cabang Sampang dan Pamekasan, Persatuan Pemuda Indonesia Bangkalan, Perpindo C.D. dan cabang-cabang seluruh Madura.
- 4) Konperensi Masyumi cabang Pamekasan pada 7 dan 8 Januari 1950.
- 5) Konsulat P.P.D.P. (Persatuan Penghulu dan Pegawainya Jawa Timur) yang mewakili sebagian besar pegawai kepenghulan di Jawa Timur/Madura dalam rapatnya pada 7 Januari 1950 di Surabaya.
- 6) Perkumpulan Pamong projo dan Polisi Negara Madura Cabang Sampang pada 10 Januari 1950.
- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Madura dalam rapat terbuka di Pamekasan pada 10 Januari 1950;

- 8) Persatuan Wanita cabang Bangkalan pada 11 Januari 1950;
- 9) Serikat Buruh Pegaraman Pamekasan pada 11 Januari 1950.
- 10) Chu & Hoa Taung Hui Pamekasan pada 10 Januari 1950;
- 11) Konpeensi Masyumi cabang Sumenep pada 15 Januari 1950.
- 12) Serikat Guru Indonesia Daerah Madura pada 17 Januari 1950;
- 13) Perkumpulan Pamongprojo dan Polisi cabang Sumenep pada 16 Januari 1950;
- 14) Ludjnatut Tarbiyah Pamekasan pada 13 Januari 1950;
- 15) Serikat Buruh Kehakiman Bangkalan pada 18 Januari 1950.

Membanjirnya tuntutan tersebut, jelas menandakan bahwa Negara Madura di mata rakyat Madura tidak ada gunanya dan harus bubar, kemudian bergabung kembali ke Negara Republik Indonesia. Isi tuntutan antara lain:

- 1) Bentuk federasi memerlukan biaya yang lebih besar dari pada bentuk Negara Kesatuan dan akibatnya memperberat beban masyarakat.
- 2) Sumber penghasilan Madura pada kenyataannya tak dapat menutup pembiayaan untuk pelaksanaan dan memenuhi hak-hak kekuasaan dan kewajiban negara.
- 3) Untuk pemeliharaan kepentingan hari depan daerah, dapat dilaksanakan dengan jalan desentralisasi.
- 4) Buat kepentingan keamanan dan ketertiban perlu adanya keseimbangan diantara majunya pergolakan aliran politik dan majunya pembentukan hukum.³⁷

Sebuah panitia dibentuk oleh DPR Madura dengan nama Panitia Pelaksanaan Resolusi DPR Madura. Anggota Panitia diamoil dari anggauta DPR Madura dan dari organisasi rakyat. Mereka itu ialah R. Bagioadi Moncanegara (wakil DPR) sebagai ketua, M. Zainalalim (wakil DPRM) M.E. Tronojoto (DPRM) R. Abdul Gafur (wakil Organisasi Rakyat Masyumi Daerah Madura). Rokhmanullah (wakil Organisasi Rakyat/Sekretaris

Pemuda Indonesia daerah Madura). Tugas panitia untuk membubarkan Negara Madura dan masuk ke negara Republik Indonesia.

Dalam pertemuan antara Panitia dengan Wali Negara Madura 19 Januari 1950 diperoleh kesepakatan untuk membubarkan Negara Madura. Wali Negara Madura tidak akan mengingkari realita bahwa seluruh rakyat tidak menghendaki kelangsungan hidup Negara Madura. Karena itu pada 28 Januari 1950 wali negara telah siap menyerahkan kekuasaannya kepada DPR Madura, tetapi dewan ini tidak mau menerimanya dan menyarankan agar menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Berlarut-larutnya pembubaran negara Madura menimbulkan kekecewaan rakyat. Dewan Pimpinan Gerakan Perjuangan Madura dalam rapatnya di Jogjakarta mengeluarkan keputusan agar Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. segera melaksanakan apa yang diinginkan rakyat Madura. Menteri Dalam Negeri kemudian langsung ke Madura dan berhasil membicarakan Status Negara Madura dengan Wali Negara, Wakil-wakil DPRM dan wakil-wakil organisasi rakyat.³⁸

Hasil pertemuan tersebut belum memuaskan rakyat, sehingga pada 12 Februari 1950, Front Nasional Pemuda Koordinator seluruh Madura mengeluarkan resolusi antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Tata Negara Madura tidak sesuai lagi dengan keinsyafan Hukum rakyat Madura.
- 2) Langsung diserahkannya kekuasaan Wali Negara kepada DPR sebagai S.K. 28 Januari 1950 No.14 adalah suatu usaha untuk memperlambat pembubaran Negara Madura.
- 3) Tentunya Wali Negara memegang kekuasaan berarti timbul kembali dis-harmoni diantara rakyat, Pemeintahan dan DPR Madura.³⁹

Front Pemuda Madura mengambil tindakan yang lebih tegas lagi pada 15 Februari 1950. Peningkatan aktifitasnya diwujudkan dengan demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran

Negara Madura. Yang memegang peranan dalam demonstrasi itu sebenarnya adalah pemuda-pemuda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah.⁴⁰ Situasi politik Madura menjadi panas karena tindakan para pemuda yang sedang menuntut bubarnya Negara Madura. Pada 23 Februari, Bupati R.T.A. Notokusumo melaporkan situasi yang sebenarnya kepada Pemerintah RI di Jogya. Dengan berpengharapan agar pemerintah segera memenuhi kehendak rakyat. Disamping itu pada 4 Maret 1950 anggota DPR. Madura yang terdiri R.A. Abdul Gafur, R. Abd. Salam, R. Moch. Saleh, R.Moch Munir dan R. Ramadan menghadap Gubernur Jawa Timur, mendesak pengakuan daerah Madura masuk dalam Wilayah Republik Indonesia.⁴¹

Akhirnya terlaksana keinginan rakyat Madura, dengan persetujuan Pemerintah Pusat, Gubernur Samadikun memutuskan pada 7 Maret 1950 No.24/A/50 mengangkat R. Sunarto Hadiwijoyo selaku Residen Madura menjalankan pemerintahan Republik Indonesia di seluruh daerah Madura. Selanjutnya dengan S.K. Presiden RIS 19 Maret 1950 No. 110 Daerah Madura ditetapkan sebagai salah satu karesidenan Republik Indonesia⁴² Dengan demikian melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah kaum Unitaris berhasil mempersatukan wilayah Propinsi Jawa Timur.

5.6 Kegiatan Masyarakat pada Berbagai Bidang Kehidupan

5.6.1 Keadaan Sosial

Semenjak 25 Pebruari 1950 semua daerah Propinsi Jawa Timur telah pulih kembali. Samadikun, sebagai gubernur mulai saat itu mempunyai tanggung jawab penuh atas jalannya roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya. Tidak ringan tugas gubernur pada waktu itu, hal ini mengingat daerah Jawa Timur baru saja lepas dari tangan pendudukan Belanda. Kecuali itu kenyataan lain telah menimpa pula seluruh rakyat Jawa Timur. Hal itu merupakan rangkaian peristiwa semenjak masa Hindia Belanda, pendudukan bala tentara Jepang, perang melawan

Inggris (Sekutu), menghadapi perang kemerdekaan kesatu dan kedua ditambah peristiwa Madiun dan lain-lainnya. Kesemuanya seolah-olah diterima oleh rakyat Jawa Timur. Karena itu penderitaan, kemiskinan dan kesulitan hidup selalu menyertai kehidupan rakyat.

Pengangkatan rakyat dari lembah kemelaratan merupakan beban yang cukup berat bagi pemerintah daerah. Tugas pekerjaan sosial mulai saat itu bertambah banyak dan perlu sekali mendapat perhatian. Penanganan ini sudah dimulai oleh pemerintah daerah semenjak berdirinya negara Republik Indonesia.

Keadaan sosial masyarakat tidak dapat terlepas dari situasi yang terjadi pada waktu itu. Kalau pada tahun 1946, pemerintah daerah Jawa Timur membentuk Panitia Pembantu Sosial, yang bertugas sebagai badan penasihat. Maka pada tahun 1948 Panitia Pembantu Sosial, kedudukannya sebagai badan pekerja dengan tugas melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan. Panitia ini dibentuk di tiap-tiap kecamatan, seolah-olah sebagai cabang jawaban sosial. Badan itu dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Anggotanya terdiri dari para wakil organisasi kemasyarakatan di daerah kecamatan, wakil-wakil jawatan dan kepala daerah setempat (camat) sebagai pelindung.

Tugas panitia pada umumnya dapat berjalan hanya masalah yang dihadapi waktu itu sangat sukar. Urbanisasi banyak terjadi dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi juga sebaiknya sewaktu terjadi agresi Belanda yang kedua, tidak sedikit penduduk dari kota yang mengalir ke desa-desa. Keadaan itu menjadi beban penduduk desa, selain penampungan sementara di tiap rumah, tetapi juga masalah ekonomi mereka mendapat perhatian, mereka bersama. Saling membantu atau tolong menolong yang sudah lama dihayati oleh bangsa Indonesia dalam keadaan demikian menjadi besar.

Semasa berakhirnya agresi Belanda kedua, pemerintah daerah Jawa Timur menghadapi bermacam-macam masalah sosial yang harus ditangani. Urbanisasi paling banyak dikota-

kota besar, mereka mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Akhirnya terlantar di kota, meskipun ada diantara mereka yang berhasil. Masalah perumahan dan lapangan pekerjaan merupakan problem bagi mereka. Gangguan keamanan tidak sedikit ditimbulkan dari mereka. Di dalam memberikan pertolongan kepada orang-orang terlantar memperhatikan dua hal yaitu lapangan pekerjaan dan perumahan. Kesemuanya tidak akan mungkin terpenuhi karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah.

5.6.2 *Keadaan Ekonomi.*

Daerah Jawa Timur termasuk daerah yang subur di Indonesia. Hasil pertanian dan perkebunan dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Bahkan hasil perkebunan seperti tembakau sudah sejak lama dapat memenuhi kebutuhan pasar dunia. Sehubungan dengan itu sarana angkutan darat, mendapat perhatian pemerintah, termasuk jalan-jalan dan pelabuhan. Pentingnya angkutan dan jalan serta pelabuhan dirasakan makin bertambah ramai, keadaan itu sangat berguna bagi kepentingan masyarakat.

Sebagai gudang beras, Jawa Timur pernah mengumpulkan beras untuk kepentingan luar negeri (India) pada masa pemerintahan Syahrir. Perluasan tanah pertanian sangat terbatas, hanya intensifikasi termasuk pemupukan dan pembibitan unggul selalu diusahakan oleh Jawatan Pertanian. Kesemuanya untuk memenuhi kehidupan rakyat karena beras merupakan bahan pokok.

Kecuali beras (padi), dan tembakau hutan juga mendapat perhatian pemerintah daerah Karena tembakau dan kayu jati menjadi sumber ekspor sehingga kelestarian hutan jati selalu dijaga.

5.6.3. *Pendidikan*

Pendidikan dan pengajaran di alam kemerdekaan mem-perjelas perbedaan dengan alam penjajahan. Tujuan pendidikan dan pengajaran telah direncanakan oleh Menteri PP dan K yaitu

mendidik menjadi warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat.⁴³

Baik di kota-kota besar maupun kota-kota kabupaten tumbuh sekolah-sekolah rakyat .sekolah menengah pertama, dan atas. Pada mulanya diakui akan sulitnya untuk memperoleh tenaga pengajarannya. Di samping sekolah-sekolah kejuruan mendapat perhatian pula, sekolah guru mempunyai kewajiban memproduksi tenaga-tenaga pengajar. Sekolah tehnik menengah menghasilkan tenaga-tenaga trampil terdidik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang tumbuh pada masa-masa itu. Perguruan tinggi, seperti perguruan Tinggi Malang yang terhenti ketika Agresi Belanda, diusahakan untuk dibuka kembali. Usaha pemerintah daerah Jawa Timur tidak terbatas pada pendidikan tersebut di atas, tetapi juga menyelenggarakan kursus-kursus, seperti KPU kursus pengetahuan umum kursus pemberantasan buta huruf.

Kesukaran yang dirasakan kemudian adalah masalah buku bacaan. Karena buku bacaan tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pemerintah daerah dalam usahanya meningkatkan pendidikan, dengan mendirikan Perpustakaan Rakyat. Perpustakaan semacam itu didirikan di kota-kota besar maupun di kota-kota kabupaten.

5.6.4 *Budaya*

Sudah lama dikenal kalau bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan yang tinggi termasuk di dalamnya kebudayaan yang berkembang di Jawa Timu. Di daerah ini banyak dijumpai peninggalan budaya yang telah lama ada. Peninggalan itu kebanyakan berwujud percandian, patung-patung dan lain-lainnya Sampai saat ini terawat baik untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

Museum merupakan tempat penyimpanan benda-benda berharga, peninggalan masa lalu. Di Jawa Timur ada beberapa

museum yang termasuk besar. Yaitu Museum Empu Tan Tular di Surabaya dan Museum Trowulan di sebelah Barat Mojokerto. Selain itu di kota Malang ada sebuah museum yaitu Museum Brawijaya. Isi dalam museum ini benda-benda peninggalan pada masa perang kemerdekaan di Jawa Timur atau setelah proklamasi.

5.6.5 *Agama*

Perkembangan Agama di daerah Jawa Timur pada umumnya tiada beda dengan agama di daerah lain. Agama yang berkembang telah diakui oleh pemerintah yaitu, agama Islam, Masehi, Konfucianisme Budhaisme dan bagian-bagiannya.⁴⁴

Agama Islam dipeluk oleh hampir sebagian besar penduduk Jawa Timur, Perkembangan agama ini tiada lepas dari pendidikan yang diadakan di tiap-tiap mesjid dan surau. Selain itu juga pendidikan modern mempunyai peranan penting pula seperti sekarang tempat-tempat pendidikan agama Islam, tersebut mempunyai siswa bukan hanya dari daerah sekitarnya atau dari Jawa Timur, tetapi juga datang dari berbagai tempat di luar Jawa Timur.

Tidak sedikit tokoh-tokoh dalam pergerakan Indonesia yang berdasarkan keislaman hasil pendidikan dari tempat yang terkenal di Jawa Timur (Gontor, Tebu Ireng). Kecuali itu sewaktu mengusir penjajah dan menegakkan kemerdekaan Indonesia pasukan yang bermotifasikan Islam mempunyai andil pula.

5.6.6 *Pers*

Perkembangan pers di Jawa Timur tidak lepas dari perkembangan pers nasional. Setelah terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia pada kongresnya di Solo tahun 1946. para wartawan Jawa Timur turut aktif pula. Terutama mereka yang sedang mengungsi di Mojokerto. Akhirnya dibentuk pula persatuan Wartawan cabang Mojokerto dengan ketuanya Bintari.

Sesudah pengakuan kedaulatan para wartawan Surabaya, bertemu lagi dan membentuk cabang Surabaya. Untuk pertama kali

sesudah pengakuan kedaulatan Kongres Wartawan dengan mengambil tempat di kota Surabaya. Kogres ini sangat penting karena berhasil menyusun peraturan Persatuan Wartawan Indonesia.

Dalam tahun 1951 dengan bantuan Kementerian Penerangan dan Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Timur, PWI Surabaya dapat mendirikan Balai Wartawan. Dalam tahun ini pula diadakan pergantian pengurus yaitu : Ketua Azis, wakil ketua W.S. Kotambonan, Sekretaris Wiwik Hidayat, Bendahara dirangkap W.S. Kotambonan.

Pembantu-pembantu Nona Amartiwi dan Sumantoro.⁴⁵ Kesulitan yang dihadapi pada waktu itu untuk mendapatkan kertas. Kertas sangat penting bagi persurat kabaran, akibatnya surat kabar harian hanya terbit tiap tiga hari sekali.

5.6.7. *Kepemudaan*

Pada umumnya para pemuda yang sadar akan bahaya kelangsungan hidup negara dan bangsa, terjun mempertahankan tanah air melawan penjajah. Mereka yang berstatus pelajar, tindakannya tidak terlepas dari statusnya, mereka membentuk organisasi seperti TRIP. (Tentara Republik Indonesia Pelajar). PM (Pelajar Merdeka) PAM (Patriot Anti Muso). Kedua organisasi pelajar terakhir itu muncul di kota Madiun sewaktu menghadapi pembontakan PKI Muso.

Kecuali itu gerakan pemuda berafiliasi agama tidak ketinggalan pula, seperti Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Keduanya mempunyai saham dalam menegakkan kemerdekaan.

Lebih jelas lagi tindakan para pemuda sewaktu menghadapi pemerintah boneka Belanda, seperti negara Madura dan Negara Jawa Timur, mereka telah bersatu, walaupun masih terbatas pada lingkungan tempatnya. Hal seperti itu telah ditunjukkan oleh Front Pemuda Jember, Front Pemuda Situbondo, dan lain-lainnya juga konperensi pemuda seluruh Madura 7 dan 8 Januari 1950 dihadiri oleh sekretariat Pemuda Indonesia, Front Nasio-

nal Pemuda Sumenep. Gerakan Pemuda Cabang Sumenep dan Pamekasan. Dengan demikian tindakan menggalang kekuatan pemuda tidak dapat lepas dari situasi politik yang sedang berkembang pada masa itu.

5.6.8 *Wanita*

Peranan Wanita dalam usahanya turut aktif dalam gelanggang perjuangan tidak dapat dikesampingkan, Bersama-sama dengan pejuang-pejuang yang lain saling bahu membahu melawan kekuatan asing. Kenyataan ini pernah ditunjukkan selama pertempuran Surabaya, maupun dalam perang kemerdekaan ke-satu dan kedua. Meskipun ada beberapa orang turut langsung di front depan, tetapi kebanyakan mereka dikesatuan palang merah atau di dapur umum. Tugas-tugas di bidang tersebut lebih sesuai dengan sifat kewanitannya.

Kegiatan wanita di daerah Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dengan peranan wanita di daerah-daerah lain di Indonesia. Karena mereka selalu mengadakan kontak, lebih-lebih setelah pengakuan kedaulatan. Kegiatannya tidak terbatas pada bidang sosial tetapi juga dalam bidang budaya dan politik. Kenyataan itu seperti dialami, bahwa para wanita turut aktif melikwidasi Negara Jawa Timur dan Negara Madura.

5.6.9 *Bentuk Organisasi Profesional yang Lain*

Organisasi yang lain di daerah Jawa Timur pernah menunjukkan aktifitasnya, ialah organisasi perburuhan. Organisasi buruh mempunyai peranan yang tidak kecil dalam pergaulan di Jawa Timur. Banyak organisasi buruh seperti, Serikat Buruh penggarahan, serikat guru Indonesia seluruh Madura, Serikat buruh Kehakiman Bangkalan. Perkumpulan Pamong Praja dan Polisi Cabang Sampang^{4 6}.

Organisasi buruh tersebut turut aktif menghancurkan negara Madura. Demikian pula rekan seorganisasinya di Jawa Timur, sebelum organisasi buruh di Madura aktif, organisasi buruh di

berbagai tempat di Jawa Timur telah aktif menentang Negara Jawa Timur. Hal ini seperti yang diperlihatkan oleh Serikat Buruh Kereta Api Malang, Serikat Buruh Pekerjaan Umum Bondowoso, Tanggul, Lumajang, Kraksaan, Serikat Sekerja Kecamatan Seluruh Distrik Gresik. Serikat Buruh Kesehatan Indonesia Mojokerto dan Serikat Sekerja Pamong Praja Banyuwangi.⁴⁷

Pada waktu menghadapi KMB Serikat Buruh telah berdiri di belakang Pemerintah. Dengan jalan serupa itu apa yang akan diambil oleh Pemerintah Pusat, akan didukungnya Pula.

5.7 Pelaksanaan Hasil KMB Daerah

Sejak diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda 27 Desember 1945, maka timbul masa peralihan di Indonesia. Masa peralihan peralihan tersebut berupa penyerahan kekuasaan dari tangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Lovink kepada wakil RIS Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta (pukul 17.00), dan penyerahan kedaulatan dari tangan RI, kepada RIS di Yogyakarta (pukul 17.30)⁴⁸

Masa peralihan tersebut kemudian dilanjutkan pula dengan peristiwa perubahan bentuk ketata-negaraan negara serikat menjadi negara kesatuan. Menurut ketentuan KMB, wilayah Negara RIS luasnya sama dengan wilayah Hindia Belanda yang lama. Sedangkan Irian Barat masih dalam persengketaan dan pemecahan akan dilakukan setahun berikutnya. Sesuai dengan namanya Negara RIS memiliki negara-negara yang beliputi tujuan negara bagian, sembilan satuan daerah kecil lainnya.⁴⁹

Dengan adanya negara federal yang kebanyakan didalamnya terdapat negara-negara bagian buatan Belanda, menimbulkan perasaan yang tidak puas bagi sebagian besar rakyat Indonesia, cita-cita negara kesatuan merupakan sasaran utama bagi semua kegiatan dan perjuangan. Karena itu tidak mustahil bila selalu ada pergolakan yang dicetuskan oleh orang-orang di negara-negara bagian seperti di Negara Jawa Timur dan Negara Madura. Mereka menuntut agar negara bagian tersebut melebarkan kedaulatan negara Republik Indonesia yang beribu kota Yogyakarta.

Pergolakan semacam itu mendapat perhatian dari Pemerintah negara bagian maupun Pusat di Yogyakarta. Meskipun dalam ketentuan KMB negara bagian diakui kehadirannya namun kenyataannya rakyat menolak. Adanya tuntutan rakyat untuk membubarkan diri akhirnya nasib kedua negara buatan Belanda itu membubarkan diri dari dan menggabung menjadi daerah Republik Indonesia.

BAB VI. PENUTUP

Dari keseluruhan uraian terdahulu nampak jelas bahwa dalam masa Revolusi Kemerdekaan rakyat Jawa Timur dengan gigih membela kehormatan bangsa Indonesia dan dengan gigih pula berusaha menegakkan Negera Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Usaha rakyat Jawa Timur dalam membela kehormatan bangsa Indonesia telah menimbulkan perang besar yang pertama dalam sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia. yang berupa Peristiwa 10 Nopember 1945 di kota Surabaya. Pada waktu itu Arek-arek Suroboyo, yang terdiri dari kesatu paduan unsur-unsur Pemerintah RI. Militer dan rakyat yang berada di Surabaya dan bantuan pasukan RI dari daerah lain telah berhadapan dengan NICA dan pasukan Sukutu (Inggris) yang akan menghancurkan leburkan kota Surabaya dengan mengerahkan segala kekuatan senjatanya angkatan laut, darat dan udara). Pada waktu itu bangsa Indonesia yang berperang di Surabaya belum mahir dalam strategi perang dan senajatanya hanya terdiri dari bambu runcing (*takeyari*) senjata tajam lainnya dan beberapa senjata api dari hasil rampasan Jepang, namun demikian mereka dengan gagah berani menghadapi pasukan Inggris tentara gemblengan dalam Perang Dunia II, yang di Birma terkenal

dengan julukan ‘*The Fighting Cock*’ (Jago Perang). Walaupun mengetahui bahwa kekuatan senjatanya tidak seimbang, namun bangsa Indonesia pada waktu itu pantang mundur, karena mereka mempunyai modal moral yang kuat, yaitu bahwa mereka berjuang demi kesetiannya untuk membela kemerdekaan nusa dan bangsanya. Hal ini tercermin dalam semboyan perjuangan mereka yang berbunyi : Merdeka atau Mati”. Dengan semangat heroik dan semangat kerukunan para pejuang di Surabaya pada waktu itu tidak gentar melawan musuh yang tidak seimbang itu. Maka dari itu sudah sewajarnya apabila dikemudian hari peristiwa 10 Nopember 1945 tersebut ditetapkan sebagai *Hari Pahlawan*, Yang hingga kini diperingati tiap-tiap tanggal 10 Nopember. Gema peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya itu ternyata tidak hanya mengobarkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan menyelamatkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi juga menarik perhatian dunia politik internasional.

Pada waktu bangsa Indonesia sedang menghadapi agresi tentang penjajah Belanda, di Jawa Timur (Madiun) timbul pemberontakan PKI/Muso terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia (Negara Pancasila) yang sah. Pada waktu itu fihak PKI/Muso ingin membentuk Pemerintah Sovyet dan ingin RI masuk blok Komunis yang pada waktu itu di bawah pimpinan Unit Soviet. Namun demikian berkat kesetiaan rakyat Jawa Timur terhadap negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemberontakan PKI/Muso di Madiun itu hanya berlangsung 12 hari saja. Setelah itu Kota Madiun sebagai pelopor pemerintah *Front Nasional* (PKI/Muso) dapat direbut kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila tetapi menjadi dasar falsafah Indonesia.

Selain dari pada itu di bidang Pemerintahan Daerah Jawa Timur. timbul kegoncangan, sebagai akibat berlakunya *politik divide et impera* yang ditetapkan oleh Van der Plas cs di Jawa Timur. Muncullah Negara Madura dan Negara Jawa Timur yang mendapat tentangan dari kaum Republik di daerah penduduk-

an. Dengan gigih kaum Republikan memperjuangkan kembalinya Negara-negara Boneka buatan Belanda itu kedalam wilayah Republik Indonesia Kesatuan. Hal itu baru tercapai pada tahun 1950, setelah Negara RI Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi negara bagian RIS.

Dengan demikian jelaslah, bahwa sejak permulaan sampai akhir Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur telah berlangsung perjuangan bangsa Indonesia dalam membela kehormatannya, mempertahankan kemerdekaannya dan menegakkan Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

DAFTAR CATATAN

Bab I

1. Joeniarto SH. *Seri Ilmu Hukum Tatanegara "Pemerintah Lokal"*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1967, hl. 52-55.
2. R.A. Sosrokusumo *Desentralisasi dan Hak Otonomi*, Perpustakaan Nasional "Adji", Surabaya 1951, hl. 35
3. Trimarjono SH. *Laporan Singkat Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur*, tanggal 20 Januari 1975, hl. 3.
4. Sartono Kartodirdjo cs., *Sejarah Nasional Indonesia*, VI Balai Pustaka Jakarta 1977, hl. 157.
5. Trimarjono SH. *Loc. cit.*

Bab II

1. Drs. I Nyoman Dekker, *Sedjarah Indonesia Baru 1900 - 1945 (Pergerakan Nasional)*, Lembaga Penerbitan IKIP Malang tahun 1969 hal. 107.
2. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *Tatanegara di Jawa pada waktu pendudukan Jepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942* dimuat di dalam *Berita Ilmu*

Pengetahuan Populer Nomor I Tahun 1952, Jajasan Fonds Universitet Negeri Gajah Mada di Jogjakarta, tahun 1952 hl. 5.

3. *Ibid.*, hal. 9 – 10.
4. Drs. I Njoman Dekker, *op. cit.*, hal. 110.
5. Sartono Kartodirdjo Cs. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta tahun 1977, hal 5.
6. *Ibid.*, hal. 5.
7. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. *Kenang-kenangan sebagai Hakin Selama 40 tahun Mengalami Tiga Zaman*. P.T. Ichtiar Baru, Jakarta tahun 1974 hal. 19.
8. Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta tahun 1969 hal. 155.
9. Departemen Sosial R.I. *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*. Badan Pembina Pahlawan Pusat, Jakarta tahun 1972 hal. 54.
10. Karesidenan Madiun, *Silsilah Sunan Surakarta (Pakubuwono II). tahun 1927 – 1945 M. Madiun, tahun 1979, Lembaran kedua*.
11. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. *op. cit.*, hal. 20.
12. *Ibid.*, hal. 20 – 21.
13. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal 13.
14. *Ibid.*, hal. 13.
15. Data dari Kotamadya Surabaya.
16. Trimarjono S.H. *Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur*, Jln. Pahlawan 18 Surabaya, tahun 1975 hal. 2.
17. Sartono Kartodirdjo Cs. *op. cit.*, hal. 12.
18. *Ibid.*

19. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 17.
20. George Nc. Turman Kahin, *Nationalisme and Revolution in Indonesia*, Cornel University Press, new York, th. 1952 hal. 103.
21. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Drs. Julianto SA, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, th. 1972. hal. 47.
22. Sartono Kartodirdjo Cs. *op. cit.*, hal. 11.
23. G.M.T. Kahin, *op. cit.* hal 110.
24. *Ibid.*, hal. 121 – 126
25. R. Wawardi Perintis Kemerdekaan No. Pol 24/VII/PK. *Mengenang Hari Pahlawan 10 Nopember*. th. 1974 hal. 11 Naskah Khusus.
26. *Ibid.*, Perlu ditambahkan sedeikit mengenai biodata Cak Dul Arnowo antara lain sebagai berikut :
 Lahir pada tanggal 30 Oktober 1904.
 Tahun 1932 – 1933 menjadi Ketua Cabang Partai Indonesia di Surabawa.
 Tahun 1933 bekerja sebagai Pegawai Pos.
 Tahun 1933 mendirikan Percetakan untuk menerbitkan Surat Kabar Berjoang, yang dipimpinnya sendiri
 Tahun 1939 dimasukkan ke dalam Sedembu.
 + Tahun 1942 – 1943 diangkat menjadi Guru Besar *Sin Sangikai* Badan Legislatif = DPR) sekaligus menjadi penasehat walikota Surabaya, akhirnya tahun 1949, sesudah kedaulatan diangkat menjadi walikota Surabaya.
27. Koichi Kishi, Japanese Soerce for Indoensia Historiography dimuat dalam *An Introduction to Indonesia Historiography* (Soedjatmoko dkk), Cornell University Press Ithaca, New York. th. 1946 208.
28. Prof. Dr. Slametmuljana, *op. cit.*, hal 177.
29. *Ibid.*, hal. 178 – 179.

30. *Ibid.*, hal 179 – 180
31. *Ibid.*, hal 180 – 181.
32. Pak Dori, *Surabaya Post* 16 Agustus 1976, hal 4
33. Suparto Broto, *Oh Surabaya*, Roda Pengetahuan Jakarta, th. 1977 hal. 17 – 18.
34. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Julianto SA. *op. cif.* hal 49
35. Prof. Mr. A.G. Pringgogadgo, *op. cif.* hal 12 – 13.
36. *Ibid.*, hal. 18
37. Informasi dari Kantor Agraria Madiun.
38. Prof. Mr. A.G. Pringgogidgo, *op. cit.*, hal 25
39. Prof. Soedjito Sosrodihardjo, SH. MA, *perubahan Struktur Masyarakat di Djawa*, Yogyakarta, th. 1972. 45 – 46.
40. Sartono Kartodiredjo Cs, *op. cit.* hal 50
41. *Ibid.*, hal 150 – 151
42. Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Peta Blitar*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersenjata, hal. 3 – 4.
43. Sartono Kartodiredjo Cs. *op. cit.* hal 151 – 152
44. *Ibid.* hal 144 – 145
45. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur*, Surabaya, th. 1953 hal. 347.
46. Prof. Mr. A.G. Pringgogidgo, *op. cit.* hal 15.
47. Drs. O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasis-me Djepang*, Sinar Djaja, Djakarta, 1962. hal. 112 – 113.
50. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal 86.
51. Prof. Mr. A.G. Pringgogidgo, *op. cit.*, hal. 86
52. Drs. O.D.P. Sihombing *op. cit.*, hal 89

51. Sartono Kartodirdjo, Cs. *op. cit.*, hal. 134.
52. Drs. C.S.T. Kansil dan Drs. Julianto SA, *op. cit.*, 46
53. Sartono Kartodirdjo, Cs. *op. cit.* hal. 186.
54. Informasi dari Bidang Kesenian Kanwil. Dept. P & K Prop.
Jawa Timur.
55. Sartono Kartodirdjo, Cs, *op. cit.* hal. 187.
56. *Ibid.*, hal. 187.
57. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal 88 – 89
58. *Ibid.* hal. 85 – 86
59. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, 45 tahun
Sumpah Pemuda, Yayasan Gedung-Gedung Berseja-
rah Jakarta, 1974. hal 110 – 111.
60. *Ibid.* hal. 111
61. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.* hal. 151.
62. Yayasan Gedung-Gedung Bersenjata Jakarta, *op. cit.* hal. 119
63. Sartono Kartodirdjo, Cs. *op. cit.*, hal. 177
64. *Ibid.*, hal 178
65. *Ibid.*, hal. 177 – 178.
66. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op. cit.* hal. 119
67. Sartono Kartodirdjo, Cs. *op. cit.*, hal. 179
68. *Ibid.*, hal. 179
69. Informasi dari Sdr. Sunar. Madiun.
70. Sartono Kartodirdjo, Cs. *op. cit.*, hal. 161
71. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal 81.
72. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.*, hal. 152
73. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cil.*, hal 82.
74. Prof. Slametmulyana, *op. cil.*, hal 152
75. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 82 – 83.

76. Sartono Kartodirdjo Cs. *op. cit.*, hal 161 – 162.
77. R. Wawardi Perintis Kemerdekaan No. Pol. 24/VII/PK, *op. cit.*, hal. 10.
78. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal 106
79. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.*, hal. 152
80. Drs. O.D.P. Sihombing *op. cit.*, hal. 107 – 108.
81. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.*, hal. 152 – 153.
82. Sartono Kartodirdjo, Cs, *op. cit.*, hal. 163
83. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 181
84. Sartono Karodirdjo Cs. *op. cit.* hal. 15
85. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.* hal 182
86. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.* hal. 153.
87. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, tahun 166.
88. *Ibid.* hal. 167.
89. R. Wawardi Perintis Kemerdekaan No. Pol. 24/VII/PK. *op. cit.* hal. 12
90. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 158
91. *Ibid.* hal. 159
92. Sartono Kartodirdjo, cs. *op. cit.* hal 136.
93. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 160
94. *Ibid.*, hal. 160 – 161.
95. Sartono Kartodirdjo, Cs, *op. cit.*, hal 148
96. Drs. O.D.P. Sihombing *op. cit.*, hal. 161
97. R. Wawardi Perintis Kemerdekaan no. Pol. 24/VII/PK, *op. cit.*, hal. 12.
98. Drs. I. Njoman Dokter, *op. cit.* hal. 113.
99. *Ibid.*, hal. 114
100. Sartono Kartodirdjo, Cs. *op. cit.*, hal 17.
101. *Ibid.*, hal. 17

102. Prof. Dr. Slametmulyana *op. cit.*, hal. 160.
103. *Ibid.* hal 161.
104. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.*, hal 165 – 166.
105. Sartono Kartididjo, *Cs. op. cit.*, hal. 21.
106. Prof. Dr. Slametmulyana *op. cit.*, hal. 166.
107. Sartono Kartodidjo, *Cs. op. cit.* hal. 184.
108. *Ibid.*, hal. 185.
109. *Loc. cit.*
110. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 110
111. *Ibid.*, hal. 110 – 111.
112. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op. cit.*, hal .
112.
113. Sartono Kartidirdjo, *Ces. op. cit.*, hal. 171.
114. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah jakarta, *op. cit.*, hal. 113
115. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 162 – 163.
116. *Ibid.*, hal. 162
117. Nugroho Notosusanto, *The Revelt Against The Japanese of A Peta Battalion in Blitar Februari 14, 1945*. Departement of Defence and Security Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1974. p. 7.
118. Nugroho Notosusanto, *The Peta army in Indonesia 1943 – 1945*. Departement of Defence and Security Centre for Armed Forces History 1971-p. 23.
119. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal., 166 – 167.
120. *Ibid.*, hal. 127.
121. Dinas Sedjarah Kondam VIII Brawijaya, *Majalah Berkala Lembaga Sejarah.*, No. 9 th. 1975. Dinas Sejarah Kodam VII/Brawijaya, hal. 18 – 19.

122. Panitia Peringatan Pemberontakan Peta Bilitar, *Lebih baik mati daripada kehilangan Ibu Pertiwi. Blitar*, th. 1976. hal. 4.
123. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op. cit.* hal. 115.
124. Panitia Peringatan Pemberontakan Peta Blitar, *op. cit.* hal. 5 – 6
125. Nugroho Nötosusanto, *Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata. hal. 9.
126. *loc cit.*
127. *Ibid.*, hal 13 – 14
128. S. Talbi, Peserta No. 56 *Sedjarah Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, hal. 20 – 21.
129. . Drs. O.D.P. Sihombing, *op.cit.*, hal. 144.
130. *Ibid.*, hal. 144–145.
131. *Ibid.*, hal. 147 – 148
132. Prof. Dr. Slametmulyana, *op. cit.*, hal. 156.
133. Titie Said & Lies Said, Jaman Jepang yang begitu mengerikan, *Majalah Wanita Kartini No. 113 tgl. 10 s/ 23 Desember 1979*. hal. 126.
134. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.*, hal. 127.
135. Prof. Dr. Slametmulayana, *op. cit.* hal. 156.
136. Drs. O.D.P. Sihombing, *op. cit.* hal. 127 – 128
137. R. Wawardi, Peranan Wanita Dalam Gerakan Koperasi, di-muat *di dalam 30 Tahun Koperasi*, Surabaya, Juli 1977 hal. 16.
138. Naskah khusus yang diberikan oleh N. S. Mursito/Ahli waris Ibu Sudirman.

Bab III.

- 1.a. Doel Arnowo., Wawancara di Jalan Dempo no. 13, Malang 17 - 2 - 1974.
- 1.b Muhammad Dimyati, Sedharah Perjuangan Indonesia, Widjaya, Djakarta, 1951 hal. 83 - 88.
2. Jusuf Ronodipuro, "Mengisahkan Penyiaran Proklamasi", *Kompas*, 16-8-1975 hal. XIII ; Adam Malik, "Dari Kantor Berita DOMEI Proklamasi 17 Agustus '45 Disiarkan", *Penelitian Sedjarah*, No. I-Th. III Maret 1962, Lembaga Ilmiah untuk Penyelidikan Sejarah, Djakarta hal. 3.
3. Adam Malik, *ibid*.
4. Sartono Kartodihajo, *Mawarti Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto*, Sejarah Nasional Indonesia. jilid VI, Ed. ke-2, Balai Pustaka, 1977, hal. 29.
5. Adam Malik, *op. cit.*, hal. 74.
6. *Ibid.*, hal. 75
7. Dewan harian Nasional Angkatan 45, *Gema Angkatan 45*, No. 21, DHN 45, Jakarta, September 1977, 21-22: Sudiro, Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus, *Yayasan Idayu*, Jakarta, 1972, hal. 26 - 27.
8. DHN Angkatan 45, *Gema Angkatan 45*, No. 20, Agustus 1977, Jakarta hal. 24.
9. Jacub, Wawancara di Gubeng Kaertajaya Vd/7 Surabaya, 9 - 10 - 1979.
10. R. Suwardi, Wawancara di Banyu Urip Kidul V/29 Surabaya, 14-10-1979.
11. R. Suwardi, *lot, cit*.
12. Drs. Dja'far Husin Assegaff, *Bunga Rampai Sejarah Media Massa*, Mecon Press, Jakarta, 1978, hal. 254 - 255.
13. Soebagijo IN., *Lima Windhu "Antara" (Sejarah dan Perjuangannya)*. Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta 1978, hal. 57.

14. Muhammad Ali, Wawancara, di Kantor Penyebar Semangat 1979
15. Soebagijo *IN op, cit.*, hal. 57, Muhammad Ali, *Ibid*.
16. Kempen, Djawatan Radio, RI, Sedjarah Radio di Indonesia, 1953 hal. 99.
17. Pemerintah Kabupeten Daerah Tingkat II Banyuwangi, *Konsep Selayang - Padang Blambangan*. hal. 102.
18. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *100 Hari Di Surabaya, Idayu, Jakarta*, 1975, hal. 10.
19. S. Hardjadinata "Lahirnya Karesidenan Surabaya", *Merdeka, Jakarta*, 10. - 11 - 1974. hal. 4.
20. Prof. H. Muhammad Yamin *6000 Tahun Sang Merah Putih*. Balai Pustaka, Djakarta, 1958, hal. 279.
21. DHN Angkatan 45, *op. cit.* No. 20, Agustus 1977, hal. 24 ; Cindy Adams, *Bung Karno* Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Alih Bahasa, Mayor Abdul Bar Salim, Gunung Agung, Djakarta, 1966 hal. 335.
22. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hal. 11.
23. Osman Raliby, *Documenta Historika*, Bulan Bintang, Djakarta, 1953 hal. 56-57 ; PUSEMAD, *Sedjarah TNI Angkatan Darat*, 1945-1965, Tjet. ke- 2 Pusat Sedjarah Militer Angkatan Berat, 1965 hal. 57-58.
24. S. Hardjadinata, *op. cit.* hal. 4.
25. Kementerian Penerangan RI, *Lukisan Revolusi, Rakyat Indonesia 1945-1949, Jakarta*, Hal. 23.
26. Matu Mona "Arek Suroboyo", *Waspada*, 9 Djakarta, 1950, hal. 8.
27. S. Kasman, *Organisasi Bawah Tanah Yang Saya Kemukakan Sendiri Sebelum Proklamasi RI. Tgl. 1 - 10-1945, naskah yang diserahkan atas dasar Wawancara*, hal. 4
28. SEMDAM VIII/BRAWIDJAJA, *Sam Karya Bhirawa Anogara, Malang*, 1968. hal. 13.

- 29; Oesman Raliby, *op. cit.* hal. 29.
30. Dr. Roeslan Abdulgani, *hal. 11* : S. Hardjadinata. *op. cit.* hal. 5.
31. S. Hardjadinata, *op. cit.*, hal. 5.
32. Bung Tomo, *10 November*, Usaha Penerbitan Balapan, Djakarta, 1951, hal. 5.
33. S. Kasman, *Op. cit.*, hal. 4.
34. Slamet Oetomo, *Pengalaman Saja*, Arsip DHD Angkatan 45 Prop. Jatim,
35. S. Kasman, *op. cit.* hal. 4.
36. Bung Tomo, *op. cit.* hal. 3.
37. Prof. Ewa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indone-sia*, dijilid ke-2. 1966, hal. 71.
38. Panitia setia kawan warga sosialis Surabaya, *In Memoriam Djohan Sjahrensah, September 1968*, hal. 18
39. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hal. 13
40. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH. *op. cit.*, hal. 70.
41. DHD. Angkatan 45 Jatim, *Menyongsong Pembangunan Mu-seum Perjuangan 45 Jawa Timur*, DHD 45 Jatim, 1973, hal. 66.
42. *Ibid.*
43. Bung Tomo, *op. cit.*, hal. 12.
44. DHD Angkatan 45 Jatim *op. cit.* hal. 11.
45. Bung Tomo, *op. cit.*, hal. 14.
46. Slamet Oetomo, *op. cit.*, hal. 1.
47. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.* hal. 11.
48. Osman Raliby, *op. cit.*, hal. 14.
49. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hal. 10 – 11

50. Djapen RI Prop. Djatim, *Republik Indonesia Propinsi Djwa Timur, Surabaya, 1953, hal. 40 – 42.*
51. Team Sedjarah IKIP Malang, *Sejarah Kabupaten Malang.* Naskah dikutip oleh Jerusan Sejarah FKIS. – IKIP Serabaya, Malang, 1971, hal. 57.
52. Panitia Buku Kenang-Kenangan, *10 Tahun Kabupaten Madiun,* hal. 10.
53. Muhammad Ali, *Catatan Peristiwa dan Pengalaman, 25-8-1945 s/d 22-12-1945, Jatim, 1947, diambil dari Soeara Rakyat, 4-10-1945.*
54. Osaman Ralby, *op. cit.,* hal. 15 ; Prof. Mr. H. Muhammad Yasim, *Naskah Perseapan Undang-Undang Dasar 1945, dijlid Pertama, Jajasan Prapantja, 1959, hal. 438 – 453.*
55. Osman Raliby, *op. cit,* hal. 33.
56. *Ibid.,* 23 : Muhammad Ali, *op. cit.,* hal. 4.
57. Djapen RI Prop. Jatim, *op. cit.,* hal. 9.
58. R. Joeniarto SH, *Perkembangan Pemerintah Lokal, Penerbit Alumni, Bandung, Bandung 1976, hal. 67.*
59. Muhammad Ali, *op. cit.,,; Hal. 2. diambil dari Soeara Asia, 28-8-1945.*
60. S. Hardjadinata, *op. cit.,* hal. 4 : Dul Arnowo, *op. cit. Hal. 16.*
61. Muhammad Ali, *op. cit.,* hal. 10. *Diambil dari, Soeara Asia, 4-9-1945*
62. Nugroho Notokusanto, *Tentara Peta, Pt. Gramedia, Jakarta, 1979. hal. 129*
63. *Ibid.*
64. *Ibid.,* hal. 130 – 131.
65. Muhammad Ali, *op. cit.,* hal. 16 *Diambil dari Suara Rakyat 3 – 10 – '45).*

67. *Ibid.*
68. *Ibid.*, hl. 23 Dari *Soeara Rakyat*, 6-10-'45.
69. Djapen RI Prop. Jatim, *op. cit.*, hal. 40-42 ; Moch Syair, *Paper DHD 45 Jatim*, hal. 14.
70. *Ibid*, hal. 40 - 43
71. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hal. 22.
72. Muhammad Ali, *op. cit.*, hal. 19 Diambil dari *Soeara Rakyat* 4-10-'45.
73. Dr. A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I, Disjarah. AD & Angkatan, Bandung, cet. ke 2, 1977 hal. 373 ; David Wedhl, *The Birth of Indonesia*, George Allen & Unwin Ltd., London, 1947, hal. 50.
74. Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Dep. Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971, hal. 26-27.
75. David Weth, *op. cit.*, hal. 51.
76. May JenSoengkono, *Data-Data Peristiwa Revolusi 10 November 1945 Di Kota Surabaya*, Salinaan/Copy Diambil Dari Dokumentasi, 1958, hal. VIII.
77. Bung Tomo, *Ibid*, hal. 22 Dr. H. Roeslan Abdulan, *op. cit.*, Hal. 13.
78. Kempen Djawatan Radio RI, *op. cit.*, hal. 101.
79. S. Kasman *op. cet.*, hal. 8.
80. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hal. 13.
81. Muhammad Ali, *op. cit.*, hal. 16; Dari *Soeara Rakyat*, 3-10-'45.
82. David welt, *op. cit.*, hal. 51.
83. Nugro Notosusanto, *op. cit.*, hal. 139.
84. Dr. Roeslan Abdulgani, *op. Cit.*, hal. 14.
85. May. Jen. Soengkono, *op. cit.*, hal XIII.

86. Muhammad Ali, *op. cit.*, hal. 17 ; Dari Soera Rakyat, 3 – 10 '45.
87. Dr. A. H. Nasution, *op. cit.*, hal. 371–372.
88. Kel. Laut (P) Drs. Askandar, *Perjuangan Pasukan "L"*, Dinas Sejarah TNI–AL, 1977, hal. 5 – 6.
89. Irjen Pol. Mamet Tanumidjaja SH. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Dep. Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI. 1971, hal. 32 – 33.
90. *Ibid.*, hal. 35.
91. Team Sejarah IKIP Malang, *op. cit.*, hal. 57.
92. Dr. A.H. Nasution, *op. cit.*, 1977 hal. 378–379.
93. Irjen Pol. Mamet Tanumidjaja SH. *op. cit.*, hal. 33–34.
94. Drs. Abdulrachman, *Sejarah Madura Selanjang Pendang*, tjet ke II, Automatic The Sun SMP, 1971, hal. 63 – 64.
95. *Ibid.*; Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 141 – 142
96. Iwa Kusumasumantri SH., *op. cit.*, hal. 71.
97. Sodono Jusuf, *op. cit.*, hal 26 – 27.
98. Dinas Sejarah TINI–Al., *Sejarah Tentang Nasional Indoen-sia Angkataran Laut*, 1973, hal. 124; Sudono Jusuf, *op cit hal. 27 ; Kol. Laut (p) Soejono, wawancara.*
99. STNIAL, *ibidl*, hal. 123; SJ *Ibid.*, hal. 30.31.
100. STNIAL, *Ibid.*, hal. 127 - 130; SJ, *ibid.*, 27 - 28.
101. May. Jen Soengkono, *op, cit.*, hal. IV–V.
102. Muhammad Ali., *op. cit.*, hal 27 Soeara Rakyat, 16 - 10 '45. Sinar Apinya Hari Pahlawan Indonesia, *Pradnyap-rimita, Djakarta 1966. hal. 9.*
- 103 *Ibid.*, hal. XIII.
- 104 *Ibid.*, hal. XIV.

105. Muhammad Ali, *op.cit.*, hal. 24. *Dari Soeara Rakyat* 8 - 10- '45.
106. May. Jen. Soengkono, *op. cit.*, hal. 16.
107. SEMDAM VIII/BRAWIDJAJA, *op cit.*, hl. 46.
108. *Ibid.*, hl. 45 - 53.
109. Team Sejarah IKIP Malang, *op. cit.*, hl. 55 - 56.
110. SEMDAM VIII/BRAWIDJAJA, *op cit.*, hl. 57 - 58.
111. *Ibid.*, 69 - 70, Irdjen Pol. Memet Tanuwidjaja, *op. cit.*, hal. 25 - 26.
112. Gatut Kusuma, "Mengenang Hari Pahlawan (1), *Sinar Harapan*, tgl. 7 - 11 - 1973. hal. 5.
113. A. Radjab., *Pelajar Dan Perang Kemerdekaan*, Yayasan Wido-ro, 1977. hl. 36 - 37.
114. Mayjen. Soekanto Sajidiman Bc. Hk., *The Tender Power An Auotobiography*, 1970 hl. 4.
115. A. Radjab *op. cit.*, hl. 39.
116. SEMDAM VIII/BRAWIDJAJA, *op. cit.*, hl. 42.
117. Slamet Oetomo, *op. cit.*, hl. 2; Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hl. 20-21; Dul Arnowo.
118. Mayjen Soengkono, *op. cit.*, hl. VIII.
119. Slamet Oetomo, *op. cit.*, hl. 2.
120. Bung Tomo, *op. cit.*, hl. 60-62. Muhammad Ali. *op. cit.*, 28. *Dari Soeara Rakyat* 13-10-45.
121. *ibid.*, 52-70 (BT).
122. Dr. H. Roeslan Adulgani, *op. cit.*, hl. 21.
123. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *On Heroes Day and The Indone-sia Revolution*, Prapantja, Djakarta, 1964, hl. 104. *Asia Tenggara Dalam*
124. Osman Raliiby, *op. cit.*, 1953. hl. 17-19.
125. David Welth, *op. cit.*, hl. 51.
126. Dr.H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975 hl. 17-19.

127. Osman Raliby, *op. cit.*, 1953. hl. 34-36.
128. Nugroho Notosusanto, *The Battle of Surabaya*, Dep. of Defence & Security Centere for Armed Forces History, Djakarta, 1970. hl. 4.
129. Osman Raliby, *op. cit.*, hl. 43 (Th. 1953).
130. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975 hl.22, Muhammad Ali, *op. cit.*, hl. 42.
131. Dr.H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975 hl. 25.
132. Muhammad Ali, *Op. cit.*, hl. 47. May.Jen. Soengkono, *op. cit.*, hl. XVI.
133. Dr. H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975 hl. 22-27.
134. Bung Tomo. *op. cit.*, hl. 86-87.
135. K'tut Tantri, *Revolusi Di Nusa Damai*, alih bahasa Maj.Abd. Bar Salim, Gunung Agung, Djakarta 1965 (tjet. ke-2). hal. 257.
136. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975, hl. 30-31.
137. Bung Tomo, *op. cit.*, hl. 90.
138. Dr. H.Roeslan Abdulgani *op. cit.*, 1975, hl. 35-39.
139. TD. Kundan, Wawancara di Jl. Tunjungan
140. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975, hl. 59.
141. *Ibid.*, hl. 35.
142. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1964 hl. 29.
143. Bernhard Dahm, *Historuy of Indonesia In The Twentieth Century*, Pall Mall Press, London, 1971, hl. 29.
144. Osman Rabily, *op. cit.*, 1953 hl.5.
145. Dr. H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*; 1975 hl. 64 & 70-71.
146. May. Jen. Soengkono, *op. cit.*, hl. XXVI.
147. *ibid.*, hl. XXX
148. RMTA, Soerjo, "Pelaporan Peristiwa di Surabaya", disiarkan oleh Soemarsono dengan judul, "Sepuluh Nopember

'45 di Surabaya", dalam Majalah: *Penelitian Sedjarah*, Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia untuk Penyelidikan Sedjarah, Djakarta, No. 4 Th. ke.II, Sept. 1961, hl.2.

149. Drs. Arnowo, *op. cit.*;
150. Dr. H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, 1975 hl. 76.
151. Bung Tomo, *op. cit.*, hl. 110.
152. RMTA. Soerjo, *op. cit.*, hl. 3 - 4.
153. SEMDAN VIII/BRAWIDJAJA, *op. cit.*, hl. 32.
154. Dr. H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*
155. Dr. H.Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hl. 79.
156. Drs. Njoman Dekker, *Sedjarah Indonesia Baru, 1945-1949*, IKIP, Malang, 1969, hl. 32.
157. SEMDAM VIII/BRAWIDJAJA, *op. cit.*, hl. 32.
158. Drs. Njoman Dekker, *loc. cit.*
159. Drs. Susanto Tirtoprofjo SH. *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*. PT. Pembangunan, Djakarta, hl. 32.
160. K'tut Tanri, *op. cit.*, hl. 263. Drs. Heru Soekadri, *Percikan Peristiwa-peristiwa Sejarah Surabaya*, Jur. Sejarah FKIS- IKIP Surabaya, 1977, hl. 32-41.
161. Biro Pemuda Dep. P.D. & K. *Sejarah Pemuda Indonesia Balai Pustaka*, Djakarta, 1965, hl. 166.

BAB IV

1. Drs. Heru Soekadri K., *Percikan Peristiwa-Peristiwa Sejarah Surabaya* Jurusan Sejarah FKIS- IKIP Surabaya, 1977, hl. 32-41.
2. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 78
3. Kementerian Penerangan RI, *Detik Dan Peristiwa* (17 Agustus 1945 - 23. Djanuari 1950), Penerbitan Darurat, Jogjakarta, 1950, hl.18 Osman Raliby, *op. cit.*, 370.

4. Kementerian Penerangan RI, *Lukisan Revolusi, Rakyat Indonesia* 1945-1949, Jogjakarta, 1949, hl. 102.; Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya, *Majalah Berkala Lembaga Sejarah*, no. 2 th. 1975, Malang, hl. 40.; Ichsan Kidjo, *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat "Blambangan" (Data-data Sejarah Perjuangan '45 Daerah Kab. Banyuwangi)*. Banyuwangi 1974, hl. 10.
5. Osman Raliby, *op. cit.*, hl. 374; Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, (th. 1950) hl. 18; Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, (th. 1949) hl. 103.
6. Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, (th. 1950), hl. 37; Ichsan Kidjo, *loc. cit.*
8. Kementerian Penerangan RI. *ibid.*, hl. 31.
9. Pusemad *op. cit.*, hl. 25-27; Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 79.
10. Pusemad, *ibid.* hl. 29.
11. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 80.
12. Drs. Susanto Tirtoprodjo SH., *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan, Djakarta, 1963, hl. 14.
13. Osman Raliby, *op. cit.*, hl. 310.
14. Kementerian Penerangan RI. *op. cit.*, (th. 1950), hl. 20.
15. Drs. Susanto Tirtoprodjo SH., *op. cit.*, hl. 24
16. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 89-103.
17. Mr. Dr. C. Smit, *De Dekolonisatie van Indonesia Felten en Beschouwingen*. Tinjauan Buku oleh Sutrisno Kutoyo, Proyek IDKD Dep P dan K, Jakarta, 1979. hal. 6-9.
18. *ibid.*, hl. 8-11; Drs. Susanto Tirtoprodjo SH., *op. cit.*, hl. 24.
19. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 107.
20. Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawidjaja, *Majalah Berkala Lembaga Sejarah*, No. XI th. 1975, Malang hl. 46-48.
21. Team Sejarah IKIP Malang, *Sejarah Kabupaten Malang*, Ku-tipan Jurusan/Sejarah FKIS-IKIP Surabaya, hl. 59.

22. A. Radjab, *Pelajar Dan Perang Kemerdekaan*, Yayasan Widodo, 1977, hal. 161.
23. Dinas Kodam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, no. XI hl. 48.
24. A. Radjab, *op. cit.*, hl. 164.
25. *ibid.*, hl. 166
26. *ibid.*, 162-167; Team Sejarah IKIP Malang, *op. cit.*, hl. 99
27. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 125; M. Sukardi, *Sejarah Perjuangan Batalion IX Anjing Laut*, Naskah 1974, hl. 5 Ichsan Kidjo *op. cit.*, hl. 5.
28. M. Soekardi, *ibid.*, hl. 6
29. Semdam VIII/Brawijaya, *op. cit.*, hl. 122
30. M. Soekardi, *op. cit.*, hl. 5-8
31. Semsam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 124
32. M. Soekardi Paper Perhimpunan Sejarah Masyarakat Kota Bondowoso Dalam Daerah Kabupaten Bondowoso Pada Masa-masa Revolusi 17 Agustus 1945 s/d Klas I dan Ke II sampai pada Penyerahan Kedaulatan, naskah, 1974 hl. 9.
33. M. Soekardi, *Keterangan dalam pengalaman semasa BAPAK KOESWARI Inspektur Polisi Purn. dan Pak TASIK Pegawai Kantor Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bondowoso diwaktu di dalam GERBONG MAUT Pada th. 1947 dari Bondowoso ke Surabaya, naskah, 1974 hl.2 Panitia Peristiwa Korban Gerbong Maut Bondowoso, Sekelumit Sejarah Kepahlawanan Kisah Peristiwa Perjalanan KA. "Gerbang Maut" Bondowoso - Wonokromo, naskah hl.2*
34. Menurut keterangan Koeswari yang sakit dibawa ke Karang Menjangan ada 8 (delapan) orang. Menurut Panitia Peristiwa K.A. Gerbong Maut, *ibid.*, yang sakit 10 orang.
35. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 132.
36. Panitia Peristiwa KA Gerbong Maut Bondowoso, *op. cit.*, hl. 4.

37. Ichsan Kidjo, *op.cit.*, hl. 13
38. Turmidi, *Wawancara* tanggal 15-12-1979 di PUSKESMAS Banyuwangi; Ichsan Kidjo, *ibid.*, hl. 14-16
39. Ichsan Kidjo, *ibid.*, hl. 26 Observasi tgl. 15-12-1979.
40. *Ibid.*, m hl. 16
41. Drs. Abdurrahman, *Sedjarah Madura Selanjang Pandang*. Cetakan II, Automatic The Sun SMP, Sumenep, 1971, hl. 65-66
42. Semdam VIII/Brawidjaja, *op.cit.*, hl. 115
43. Drs. Abdurrachman, *op.cit.*, hl. 67-69
44. *Perahu Segigir*, arsip Museum Brawijaya, Malang.
45. Drs. Abdurachman, *op.cit.*, hl. 70
46. Semdam VIII/Brawijaya, *op.cit.*, hl. 139
47. Drs. I. Njoman Dekker SH., *Sedjarah Indonesia Baru (1945-1945)* tjet ke. II, Lembaga Penerbitan IKIP Malang, 1971, hl. 74
48. Mohammad Roem, *Pentjulikan Proklamasi dan Penilaian Sedjarah*, Hudaya Jakarta Ramadhani Semarang, 1970, hl. 60-61
49. George Mc. Turman Kahin, *op.cit.*, hl. 334-337; Mr Dr.C. Smit, *op.cit.*, hl 13-17
50. Kementerian Penerangan RI, *Djendral Soedirman Pahlawan Sedjati*.
51. Semdam VIII/Brawidjaja, *op.cit.*, hl. 226
52. *ibid.*, 159 - 168
53. Ichsan Kidjo, *op.cit.*, hl. 21
54. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indone-sia*, *djilid* ke-dua, 1966, hl. 201
55. Semdam VIII/Brawidjaja, *op.cit.*, hl. 172-173
56. *ibid.*, hl. 168 - 170

57. *ibid.*, hl. 217 – 255
58. Komando Distrik Militer 0808, Sedjarah Kodim - 0808, naskah hl. 30 - 33
59. *ibid.*, hl. 32-33; A. Radjab, *op. cit.* hl. 178 ; Soekamto Sajidiman Bc. Bk., *The Tender Power An Autobiography*, cet. ke V, PT Garfikaria Utama Sakti, Jakarta 1977 hl. 26.
60. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 209 - 211.
61. *ibid.*, hl. 229.
62. B.K. Nadi. *Sejarah Perjuangan Bersenjata Daerah Kabupaten Tuban*, naskah, 1971, hl. 3 – 4
63. *ibid.*
64. Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, No. 9 th. 1975. hl. 22 Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 124.
65. B.K. Nadi. *loc. cit.*
66. Panitia Penulisan Sejarah Dan Pembangunan Nomunen Perjuangan 45 Bojonegoro, *Memori Perjuangan Pahlawan Letnan Satu Soethitno Koesoemobroto*, & Palagon Temayang, hl. 2; Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya, *op. cit.*, No. 9. hal. 22.
67. Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya, *ibid.*, 24-27; Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 206.
68. Panitia Penulian Sejarah Dan Pembangunan Nomunen Perjuangan 45 Bojonegoro, *op.cit.*: Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawidjaja, *ibid.*, 26-27-36
69. Panitia Penulian Sejarah Dan Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Bojonegoro *lot. cit*
70. Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya, *op. cit.*, hl. 38-41.
71. *ibid.*, hl. 41 – 43.
72. Panitia Penulian Sejarah dan Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Bojonegoro., *hl. 1 - 5*

73. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 246 : RH. Roeslan Wongsokoesoemo, *Waeancara* tanggal 25 - 10 - 1976 di Jl. Ketabang kali 45 Surabaya.
74. Drs. I Njoman Dekker SH, *op. cit.*, (1945-1949), hl. 90-95.
75. George Mc. Turman Kahin, *op. cit.*, hl. 173 - 174
76. Sartono Kartodirdjo c. *op. cit.*, hl. 35
77. Geoge Mb. Turnan Kahin, *op. cit.*, hl. 177 - 178.
78. Mr. Mohammad Roem, *Suka Duka Berunding Dengan Belanda*, Idayu Press, Jakarta, 1977, hl. 15
79. Mohammad Dimyati, *Sejarah Perjuangan Indonesia*, Widjaja, Djakarta, 1951, hl. 125 - 127.
80. Osman Raliby, *op. cit.*, hl. 444
81. Osman Raliby, *op. cit.*, hl. 134 ; Drs. I Njoman Dekker, *op. cit.*, hl. (1945 - 1949) hal. 45
82. Osman Raliby, *op. cit.*, hl. 649- 650 Sartono Kartodirdjo cs, *op. tit.*, hl. 358 - 359.
83. Prof. Dr. Slamet Mulyana, *op. cit.*, hl. 225; Geoge Mc. Turnair Kahin *op. cit.*, hal. 119
84. *ibid.* hal 226 - 227; Osman Raliby. *op. cit.*, hl. 468
85. Osman Raliby, *ibid.*, hl. 652-654; George Mc. Turman Kahin, *op. cit.*, hl. 201
86. Sartono Kartodirdjo cs. *op. cit.*, hl. 44 - 45; Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, th. 1950 (Detik-detik), hl. 22
87. Prof. Dr. Abu Hanifah MD., Remungan Perjuangan Bangsa Penetraa Dulu dan Sekarang, *Yayasan Idayu, Jakarta, 178, hal. 50*
88. George Mc Tuman Kahin *op. cit. hal. 202.*
89. Prof. Dr. Slamet Mulyana *op. cit.*, hl. 228 - 229.
90. *ibid.*, hal. 229 - 230
91. Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, th. 1950 (Detik-detik) h. 24.

92. *ibid* Sartono Kartodiardjo cs. *op. cit.*, hl. 54 George Mc. Turnan Kohin *op.cit.* hal. 259.
93. *Ibid* (hl. 54).
94. Pada : Tanggal 13 - 2 - 1948 Sosialis (sayap Kiri) Amir Syarifuddin. Pada Tgl. 26 - 2 - 1948, pada rapat raksasa di Surakarta, Partai Sosialis Amir Syarifudin.
berkembang menjadi *Front Demokrasi Rakyat* (FDR). Selanjutnya periksalah G.M.c. Kahim, *ibid.*, hl. 258 - 2559.
96. Bernrd Dahm, *History of Indonesia in the Twentieh Century*. Pall Mall Perss, London, 1971, hl. 131
97. Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hl. 47 - 96.
98. Drs. O. Njoman Dekker Sh., *op. cit.*, (1945-9149). hl. 71.
99. G.Mc. T. Kahin, *op. cit.*, hl. 272.
100. Drs. Ariwiadi, *Ichisar Sedjarah Nasional Indonesia* (Awal Sekarang), Departemen Pertahanan-keamanan Pusat Sedjarah ABFI, Djakarta, 1971, hl 111; Mohammad Dimyati, *op. cit.* hl. 174.
101. G.Mc.T. Kahin, *op. cit.*, hl. 276
102. *ibid.*, hl. 273
103. Bernhard Dahm, *op. cit.*, hl. 133
104. Drs. Ariwiadi. *loc. cit.*
105. *Mohammad* Hatta, *op. cit.*, hl. 18
106. *ibid.*, hl. 50.
107. G.Mc.T. Kahin, *op. cit.*, hl. 226 ; Sartono Kartodirdjo cs., *op. cit.*, hl. 56
108. Bernhard Dahm, *op. cit.*, hl. 134.
109. Pusemad, *op. cit.*, hl. 88

110. G.Mc.T. Kahin *op. cit.*, hl. 285.
111. *ibid.*, hl. 286.
112. *ibid.*, hl. 285. Mohamad Dimyati, *op. cit.* hl. 181.
113. *ibid.*, hl. 191.
114. Drs. Arie Soekowinoto dkk., *Kresek Pusat Korban Pemberontakan PKI. Tahun 1948 Sejarah Pemberontakan PKI 18-9-1948 di Madiun*. Panitia Pembangunan Monumen Korban Pemberontakan PKI Tahun 1948. di Kresek Madiun, 1977 (Konsep) hl. 112-114
115. *ibid.* hl. 111-130
116. Kempen Djawatan Radio, *op. cit.*, hl. 104 - 105.
117. G.Mc. T. Hahin *op. cit.*, hl. 291.
118. Prof. Dr. Slamet Mulyana. *op. cit.*, hl. 264
119. Drs. Arief Soekowinoto dkk. *op. cit.*, hl. 144 - 145.
120. Djapen RI Prop. Djatim, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur*, Surabaya, 1953. hl. 72 Drs. Arief Soekowinoto dkk. *op. cit.*, hl. 150 - 151.
121. R. Setyo Achmady, *Sangkur Dan Pena Riwayat Singkat Lahirnya TRIP Bodjonegoro, Usaha Putra Indonesia "Uspi"* Djakarta, 1956 hl. 24 ; Soekamto Sajidiman Bc. Hk. *op. cit.*, hl. 90.
122. Pusemad. *op. cit.*, hl. 88-99; Djapen RI Prop. Djatim *op. cit.* hl. 73. Drs. Arie Soekowinoto dkk *op.cit.*, hl. 152-154.
123. Djapen RI Prop. Djatim, *ibid* hl. 55; G.Mc.T. Kahin *op.cit.*, hl. 292.
124. G.Mc.T. Kahin, *ibid* hl. 293.
125. *ibid.*, hl. 293.
126. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 153.
127. Mohammad Dimyati, *op. cit.*, hl. 182.

128. Drs. I Njoman Dekker SH. *op. cit.*, (1945 - 1949), hl. 71-72
129. Semdam VIII/Brawidjaja. *op. cit.*, hl. 154.
130. Pusemad, *op. cit.*, hl. 90
131. Mohammad Dimyati, *op. cit.*, hl. 184.
132. *Ibid.*
133. Semdam VIII/Brawidjaja, *op. cit.*, hl. 153.
134. Mohammad Dimyati, *op. cit.*, hl. 191
135. Majalah Skets Masa, No. 08 th. 1976 17 Agustus 1976, hl. 17-19.
136. Drs. Sutjialinimah, *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta, 1977 hl. 171, Muhammad Dimnyati, *op. cit.*, hl. 198.
137. Mohammad Dimyati, *ibid.*
138. Prof. Dr. Slamet Mulayana *op. cit.*, hal. 95.
139. G.Mc.T. Kahin, *op. cit.*, hl. 351 - 390. Drs. I Njoman Dekker, *op. cit.* (1945 - 1949), hl. 60.
140. Djapen RI. Prop. Djatim, *op. cit.*, 95
141. M. Sjamsoel Arieffin, Negara Madura, E. Fuhri & Co. Surabaya, 1948 hl. 10 - 11.
142. Djapen RI. Prop. Djatim *op. cit.*, hal. 97.
143. G.Mc. T. Kahin, *op. cit.*, hl. 235
144. Drs. Ariwiadi, *op. cit.*, hl. 70-71 Djapen RI Prop. Djatim, *op. cit.* hl. 98 - 99
145. Djapen RI. Prop. Djatim *ibid.*, hl. 99-100
146. *ibid.*, hl. 108 - 109
147. *ibid.*, 113 - 115
148. *ibid.*, hl. 115
149. G.Mc. T. Khin, *op. cit.*, hl. 378 - 380.

150. *ibid.*, hl. 380 - 381 : Djapen RI Prop. Djatim, *op. cit.*, hal. 166 - 117
151. Djapen Prop. Djatim *ibid.*, hl. 120.
152. Sartono Kartodirdjo cs. *op. cit.*, hl. 157
153. Panitia Buku Kenang Kenangan Kabupaten Madiun, *op. cit.*, hl. 12 - 13.
154. Dr. H. Roeslan Abdulgani *op. cit.*, (1975a), hl. 10
155. Soeman'oro, "Sepuluh Nopember '45 di Surabaya", dalam *Majalah : Penelitian Sedjarah No. 4. th/ke II September 1961, Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia Untuk Penyelidikan Sedjarah, Djakarta, hl. 3.*
156. Djapen RI Prop. Djatim *op. cit.*, hl. 14.
157. *ibid.*, hl. 16
158. *Ibid* hl. 17 RH Roeslan Wongsokoesoemo, *op. cit.*
159. Djapen RI Prop. Djatim *op. cit.*, hl. 20
160. Drs. I Njoman Dekker SH. *op. cit.*, (1945-1949)
161. Muhamad Ali *op. cit.*, hl. 2
162. Djapen RI Prop. Jatim, *op.cit.*, hl. 192-197; Sutopangarso, Wawancara di Perumahan Eks Kantor P & K Banyuwangi tanggal 15 - 12 - 1979.
163. Muhammad Ali, *op. cit.*, hl. 27.
164. Sartono Kartodirdjo cs. *op. cit.*, hl. 220.
165. Osman Raliby, *op. cit.*, 646 - 648.
166. Djapen RI Prop. Djatim *op. cit.*, hal. 443.
167. Sartono Kartidirdjo cs. *op. cit.*, hl. 220 - 221.
168. Djapen RI Prop. Djatim *op. cit.*, hl. 415.
169. *ibid.*, hl. 218 - 219.
170. *ibid.*, hl. 445 - 446.
171. Sartono Kartodirdjo cs. *op. cit.* hl. 220
172. Mohammad Hatta, *loc. cit.*
173. *ibid.* m hl. 41.

174. Djapen RI Prop. Jatim *op. cit.*
175. Muhammad *hatta*, loc. cit.
176. Sugianto, Sedjarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Indonesia, Widjaja, Djakarta, 1971, hl. 34-35.
177. Sartono Kartodirdjo cs. *op. cit.*, hal 265 - 268.
178. Sugianto, *op. cit.*, hl. 35 - 37.
- 179a. Departemen Penerangan RI. *op. cit.*, (30 th) hl. 140
- 179b. Soekanto Sajidiman Bc. HK. *op. cit.*, hl. 12.
180. Sartono Kartodirdjo cs. *op. cit.*, hl. 705-706.
181. Djapen RI Prop. Djatim *op. cit.*, hal. 705 - 706
182. Sugianto, *op. cit.*, hl. 40 - 43.
183. Drs. Ariwiadi, *op. cit.*, hl. 168 - 170.
184. Sugianto, *op. cit.*, 46.
185. Biro Pemuda Dep. PD & K.
186. Djapen RI. Prop. DJatim *op. cit.*, hl. 841 - 849.
187. Drs. Ariwiadi, *op. cit.*, hl. 154 - 156.
188. Soekanto Sajidiman Bc. Hk. *op. cit.*, hl. 87 - 95.
189. Jacob *op. cit.*
190. Jacob, *ibid.*, B. Suwardi. *Op. cit.*, Soebagijo I.N., *op. cit.*, hl. 104.
191. Sobagijo I.N. *ibic.*, hl. 58.
192. *ibid.*, hal. 59.
- 193a. Soebagijo I.N. Sejarah Pers Indonesia, Dewan Pers, 1977, hl. 61 - 62.
- 193b. Soebagijo I.N. *op. cit.*, (1978). hl. 71 - 72.
194. *Ibid.*, hl. 84 - 85.
195. Soebagijo I.N. *op. cit.*, (1977) hl. 60 - 61.
196. Dja'far Husin Assegaff, *op. cit.*, hal. 255.

197. Muhammad Ali, *op. cit.*, (Wawancara).
198. H. Soebagijo I.N. *op. cit.*, (1977). hl. 60 - 63.
199. Soebagijo I.N. *op. cit.*, (1978) hl. 77.
200. Muhammad Ali. *op. cit.*, (wawancara).
201. *Ibid.*
202. H. Soebagijo I.N. *op. cit.*, (1977) hl. 78 - 80.
203. H. Soebagijo I.N. *op. cit.*, (1977) hl. 78 - 80.
203. Sudarijah Surodikusumo, wawancara di Jl. Pacar No. 1 Surabaya (1980).
204. Bung Tomo, *op. cit.*, hl. 100.
205. A. Radjab, *op. cit.*, hl. 106. Departemen Penerangan RI. *op. cit* (30 th), hl. 140.
206. Departemen Penerangan RI. *Ibid.*
207. Majalah Gadis, Jakarta, 16 - 8 - 1978. hl. 20 - 23
208. Ichsan Kidjo, *op. cit.*, hl. 21

Bab V

1. Dr. Sutomo, terkenal sebagai pendiri Budi Utomo, periksa Mr. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. hal. 14.
2. Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, hal. 114
3. *Ibid.*, hal. 144
4. *Ibid.*, hal. 114
5. *Ibid.*, hal. 114
6. *Ibid.*, hal. 115
7. Sejarah daerah Jawa Timur, hal. 317
8. *Ibid.*, hal. 317.
9. Noto Sutardjo, dokumen-dokumen KMB., sebelum sesudah dan pembubarannya, Endang, Jakarta. hal. 51
10. Moh. Samsul Arifin, Negara Madura, hal. 13.

11. *Ibid.*, hal. 14
12. *Ibid.*, hal. 14
13. Republik Indonesia, Japen Prop. Jawa Timur *op. cit.*, hal 100.
14. Moh. Samsul Ariffin, *op. cit.*, hal. 25
15. Abdul Rahman Drs. *op. cit.*, hal. 71
16. Moh. Samsul Ariffin *op. cit.*, hal 22.
17. *Ibid.*, hal. 24.
18. I. Nyoman Dekker Drs. SH. Sejarah Revolusi Nasional atau perang Kemerdekaan (1945 – 1949), Almamater YPTP. IKIP Malang, 1975, hal. 89.
19. Noto Sutarjo, *op. cit.*, hal. 51.
20. Sartono Kartodirjo, *et al*, Sejarah Nasional Indonesia VI, Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hal. 63.
21. *Ibid.*, hal. 64.
22. I. Nyoman Dekker Drs. SH. *op. cit.*, hal. 89.
23. Sartono Kartodirjo, *et al. op. cit.*, hal. 64.
24. *Ibid.*, hal. 64
25. *Ibid.*, hal. 64
26. *Ibid.*, hal. 69
27. *Ibid.*, hal. 69
28. *Ibid.*, hal. 70
29. *Ibid.*, hal. 71
30. I. Nyoman Dekker Drs. SH. *op. cit.*, hal. 90
31. Sartono Kartodirjo *et al. op. cit.*, hal. 71.
32. Samkarya Bhirawa Anoraga, hal. 245
33. Sejarah Daerah Jawa Timur, *op. cit.*, hal. 319
34. *Ibid.*, hal. 320
35. Abdul Rahman Drs. *op. cit.*, hal. 72 - 76

36. Sejarah Daerah Jawa Timur, *op. cit.*, hal. 323
37. *Ibid.*, hal. 323
38. *Ibid.*, hal. 324
39. Abdul Rahman Drs. *op. cit.*, hal. 74
40. *Ibid.*, hal. 74
41. *Ibid.*, hal. 75
42. *Ibid.*, hal. 76
43. Sugarda Purbokewaca Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, hal. 39
44. Republik Indonesia, Japen Prop. Jawa Timur, hal. 799.
45. *Ibid.*, hal. 682
46. *Ibid.*, hal. 103
47. Rep. Indonesia Japen Prop jawa Timur *op. cit.*, hal. 119
48. Pringgodigdo Prof. Mr. A.G. Memperingati Tiga Peristiwa pada 27 Desember 1949 Jurusan Sejarah FKIS – IKIP Surabaya 1969, hal. 5.
49. Schiller, A. Arthur, The formation of federal Indonesia 1945-1949 W. Van. Hoeve. Ltd./the Hague Bandung 1955. hal. 337.
50. Republik Indonesia Japen Prop. Jatim. *op. cit.*, hal. 120

DAFTAR SUMBER

Bacaan

- Abdurachman, Drs., *Sedjarah Madura, Selajang Pandang*, tjet, ke II, Percetakan Automatic The Sun SMP, Sume-nep, 1971.
- Abu Hanifah MD., Prof. Dr., *Renungan Perjuangan Bangsa Indonesia Dulu dan Sekrang*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978.
- Adam Malik, "Dari Kantor Berita Domei Proklamasi 17 Agustus '45 Disarkan", Majalah : Penelitian Sedjarah, No. I th. III, Lembaga Ilmiah Untuk Penjelidikan Sedjarah, Djakarta, Maret 1962.
- Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*. Wijaya, cet. ke-6, Jakarta 1975.
- Adams, Cindy, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*. Alih bahasa : Major Abdul Bar Salim, Gunung Agung, Djakarta, 1966.
- Ali, Mohammad, *Cattan Peristiwa dan Pengalaman*, 25 Agustus s/d 22 Desember 1945, Fotocopy naskah Pribadi.

- Ariwiadi, Drs., *Ichdisar Sedjarah Nasional Indonesia (Awal-Sekarang)*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, Djakarta, 1971.
- Arief Soekowinoto dkk., *Kresék Pusat Korban Pemberontakan PKI Tahun 1948. Sejarah Pemberontakan PKI 18 – 9 – 1948 di Madiun*. Panitia Pembangunan Monumen Korban Pemberontakan PKI Tahun 1948 di Kresék Madiun, 1971 (Konsep).
- Askandar, Kol. Laut (P) Drs. L., *Perjuangan Pasukan "L"*, Dinas Sejarah TNI – AL, 1977.
- Biro Pemuda Dep. PD & K., *Sedjarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1965.
- Bung Tomo, *10 November*. Usaha Penerbitan Balapan, Djakarta 1951.
- Dahn, Bernhard, *History of Indonesia In The Twentieth Century*. Pall Mall Press, London, 1971.
- Darijah Surodikusomo, *Catatan Perjuangan Bu Darmortir*, Arsip DHD 45 Prop. Jatim, 30 – 4 – 1974.
- Departemen Sosial RI, *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*. Badan Pembina Pahlawan Pusat, Jakarta, 1972.
- Departemen Penerangan RI, *30 Tahun Kemerdekaan RI* (Guntingan Pers Ibu Kota). Depdn. RI, 17 Agustus 1975.
- Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Prop. Jatim, *Neyongsong Pembangunan Museum Perjuangan 45 Jawa Timur*. DHD 45 Prop. Jatim, 1973.
- Dewan Harian Nasional Angktan 45, *Gema Angkatan 45*, No. 20 (Agustus 1977) dan No. 21 (September 1977), DHN 45, Jakarta.
- Dinas Sejarah TNI – AL, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*, 1973.
- Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya, *Majalah Berkala Lembaga Sejarah* No. 2 (th. 1975), No. 9 (th. 1975) dan No. 11 (th. 1975).

- Dimiyati, Mohammad, *Sedjarah Perjuangan Indonesia*, Widjaya, Djakarta, 1951.
- Dja'far Husin Assegaff, *Bunga Rampai Sejarah Media Massa*, Mecon Press, Jakarta, 1978.
- Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur*, 1953.
- Djumhur, I., dan Drs. H. Danasuparto, *Sejarah Pendidikan*, Cv. Ilmu, Bandung, 1974.
- Gatut Kusumo, "Mengenang Hari Pahlawan (1)", *Sinar Harapan*, tgl. 7 - 11 - 1973.
- Hardjadinata, S. "Lahirnya Karesidenan Surabaya, *Merdeka*, Jakarta, 10 - 9 - 1974.
- Hatta, Mohammad, *Mendayung Antara Dua Karang*. Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Heru Soekadri K. Drs. *Percikan Peristiwa-Peristiwa Sejarah Surabaya*, Jurusan Sejarah FKIS - IKIP Surabaya, 1977.
- Ichsan Kidjo, *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat "Blambangan"* (Data-data Sejarah Perjuangan '45 Daerah Kab. Banyuwangi. Banyuwangi 1974.
- Iwa Kusuma Sumantri SH, Prof., *Sedjarah Revolusi Indonesia*. djilid ke-2, 1966.
- Joeniarto SH., *Seri Hukum Tatanegara "Pemerintah Lokal"*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1967.
- , *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Kahin, George Mc. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1952.
- Kansil SH, Drs. C.S.T. dan Drs. Julianto SA., *Sedjarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Erlangga, Djakarta, 1972.

Karesidenan Madiun, *Silsilah Sunan Surakarta (Pakubuwono II)*,
th 1927-1945.

Kasman, S., *Organisasi Bawah Tanah Yang Saya Kemudian
Sendiri Sebelum Proklamasi RI*, tgl. 17-8- 945 se-
hingga tgl. 1-10-1945 naskah diserahkan pada waktu
wawancara.

Kementerian Penerangan RI., *Lukisan Revolusi Rakyat Indone-
sia 1945-1949*, Jakarta.

-----, *Detik dan Peristiwa (17 Agustus 1945-23 Desember
1950)* Penerbitan Darurat, Yogyakarta, 1950.

-----, *Djendral Soedirman Pahlawan Sedjati*, Yogyakarta,
1950.

Kempen Djawatan Radio RI, *Sedjarah Radio Indonesia*, 1953.

Koichi Kishi, "Japanese Source for Indonesia Historiography",
An Introduction to Indonesian Historiography,
oleh Soedjatmoko dkk. Cornell University Press, -
Ithaca: New York, 1964.

Komando Distrik Militer 0808, *Sedjarah Kodim 0808*, naskah.
Ketut Tantri, *Revolusi di Nusa Damai*, alih bahasa: Major Ab-
dul Bar Salim, Gunung Agung, Djakarta, 1965.

Majalah Gadis, *Jakarta*, 16-8-1978.

Matu Mona, *Arek Suroboyo*, Waspada, Djakarta, 1950.

Memet Tanumidjaja, SH., Irjen, Pol., *Sedjarah Perkembangan
Angkatan Kepolisian, Dep. Pertahanan Keamanan
Pusat Sejarah ABRI*, 1971

Mukardi, Drs. *Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Pisik
('45-'49)*, PT. Inaltu, 1977

Nadi, BK., *Sejarah Perjuangan Bersenjata Daerah Kabupaten
Tuban, Paper 1971. Arsip DHD '45 Prop. Jatim.*

Nasution, Der. A.H., *Sedjarah Tentara Nasional Di Bidang Ber-
senjata*, Mega Bokstote, Djakarta, 1966.

-----, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I, Diseja-
rah AD Angkatan, Bandung, cet, ke-2, 1977.

- Njoman Dekker, Drs. I., *Sejarah Indonesia Baru 1900-1945* (Pergerakan Nasional), Lembaga Penerbit IKIP Malang, 1969.
- , *Sedjarah Indonesia Baru 1945-1949*, IKIP Malang, 1969.
- Noto Sutardjo, *Dokumen-Dokumen KMB Sebelum, Sesudah dan Perkembangan*, Endang, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, *The Battle of Surabaya, Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History*, Djakarta, 1970 and *Security Cen*
- , *Pemberontakan Peta Blitar*, Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.
- , *The Peta Army in Indonesia 1943-1945*, Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History, 1971.
- , *The Revolt Against The Japanese of Peta Battalion in Blitar*, Februari 1945, Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1974.
- , *Tentara Peta*, Pt. Gramedia, Jakarta, 1979.
- Osman Raliby, *Documenta Historica*, Bulan Bintang, Djakarta, 1953.
- , *Sedjarah Hari Pahlawan*, tjet. ke-3, Bulan Bintang, Djakarta, 1952.
- Panitia Buku Kenang-Kenangan, *10 Tahun Kabupaten Madiun*, Madiun, 1956. Panitya Setiakawan Warga Sosialis Surabaya, Surabaya, *In Memoriam Djohan Sjahtoel-sjah*, September 1968.
- Panitia Peristiwa Korban Gerbong Maut Bondowoso, *Sekelumit Sejarah Kepahlawanan Kisah Peristiwa Perjalanan KA "Gerbong Maut " Bondowoso-Wonokromo*, arsip DHD 45 Prop. Jatim.

Panitia Pembangunan Monumen Memorial Kolonel Anumerta Marhadi di Madiun, *Memori Perjuangan Pahlawan Marhadi*, 1973.

Panitia Penulisan Sejarah dan Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Bojonegoro, *Memori Perjuangan Pahlawan Letnan Satu Soejitno Koesoemobroto & Palagan Temayang*, 1974.

Panitia Peringatan Pemberontakan Peta Blitar, *Lebih Baik Mati Dari Pada Kehilangan Ibu Pertiwi*. Blitar, 1976.

Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, *Konsep Selayang Pandang Blambangan Perahu Segigir*, arsip Museum Brawijaya, Malang.

Pringgodigdo S.H., A.K., *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat*, 1946.

Pringgodigdo, Prof.Mr.A.G., "Tatanegara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang Dari Bulan Maret-Bulan Desember 1942, *Berita Ilmu Pengetahuan Populer Nomor 1 th. 1952*, Jajasan Universiti Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta 1952.

-----, *Perubahan Kabinet Presidensiil Menjadi Kabinet Parlementer*, Jajasan Fonds Universitit Gama, Jogjakarta.

-----, *Memperingati Tiga Peristiwa Pada 27 Desember 1949*, Djurusan Sedjarah FKIS-IKIP Surabaya, 1969.

Pusemad, *Sedjarah TNI Angkatan Darat, 1945-1965*, tjet. ke-2, Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, 1965.

Radjab, A., *Pelajar dan Perang Kemerdekaan*, Yayasan Widoro, 1977.

Roem, Mohamad, *Petjulikan Proklamasi dan Penilaian Sedjarah Hudaja Djakarta Ramadhan* Semarang, 1970.

-----, *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, Idayu Press, Jakarta 1977.

- Roeslan Abdulgani, Dr. H., *Api Revolusi Tetap Berkobar*, Pradnyaparamita, Djakarta, 1953.
- , *Perkembangan Tjita-tjita Sosialisme di Indonesia*, Jurusan Perguruan Tinggi Malang, 1960.
- , *On Heroes Day and The Indonesian Revolution*, Prapantja, Djakarta, 1964.
- , *Asia tenggara Dalam Sinar Apinya Hari Pahlawan Indonesia*, Pradnyaparamita, Djakarta, 1966.
- , *100 Hari di Surabaya, Yang menggemparkan Indonesia*, Idayu Jakarta, 1975.
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoene Posponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, cet. ke-2, Balai Pustaka, 1977.
- Schiler, Arthur, *The Formation of Federal Indonesia, 1945-1949*, W. van Hoeve Ltd/The Hague, Bandung, 1955.
- Semdam VIII/Brawidjaja, *Sam Karja Bhirawa Anoraga, Malang*, 1968.
- Setyo Achmady, R., *Sangkur Dan Pena, Riwayat Singkat Lahirnya TRIP Bojonegoro, Usaha Putra Indonesia "Usapi"*, Sjakarta, 1956.
- Sihombing, Drs. O.P.D., *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang*, Sinar Djaja, Djakarta, 1962.
- Sjamsoel Ariefin, *Negara Madura*, E. Fuhri & Co., Surabaya, 1948.
- Slamet Muljana, Prof. Dr., *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, djilid ke-2, Balai Pustaka, Djakarta, 1969.
- Slamet Oetomo, *Pengalaman Saja*, Paper, arsip DHD 45 Prop. Jatim.
- Soebagijo I.N.H. *Sejarah Pers Indonesia*, Dewan Pers. 1977.

- , *Lima Wandu "Antara"* (Sejarah dan Perjuangannya), Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta 1972.
- Soedjito Sosrodihardjo SH. MA, Press, *Perubahan Struktur Masyarakat Di Jawa*. Jogjakarta, 1972.
- Soegiarin Hadiprodjo, "Pengalaman Saya Menyiarkan Naskah Proklamasi", *Inti Sari*, No. 110, Djakart, September 1972.
- Soekamto Sajidiman Bc.Hk.: *The Tender Power and An Autobiography*, cet. ke-5, Pt. Grafika Utama Sakti, Jakarta, 1977.
- Soemantoro, "Sepuluh Nopember '45 di Surabaya", *Majalah Penelitian Sedjarah*, No.4 th.ke.II. Jajasan Lembaga ilmiah Indonesia. Untuk Penyelidikan Sedjarah, Djakarta, September 1961.
- Sungkono, Mayjen., *Data-Data Peristiwa Revolusi 10 Nopember 1945 di Kota Surabaya* salinan/copy diambil dari Dokumentasi, 1950.
- Sosrokusumo, *Desentralisasi dan hak Otonomi*, Perpustakaan Nasional "Adji" Surabaya, 1951.
- Sukardi, M., *Sejarah Perjuangan Batalion Anjing Laut*, Peper, arsip DHD 45 Prop. Jatim, 1974.
- , *Paper Perhimpunan Sejarah Masyarakat Kota Bondowoso Dalam Daerah Kabupaten Bondowoso pada Revolusi 17 Agustus 1945 s/d Kles ke I dan ke II sampai pada Penyerahan Kedaulatan* arsip DHD 45 Prop. Jatim, 1974.
- , *Keterangan Dalam Pengalaman Semasa BAPAK KOESWARI Inspektur Polisi Purn. dan PAK TASIK Pegawai Kantor Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bondowoso diwaktu di dalam GERBONG MAUT pada th. 1947 dari Bondowoso ke Surabaya*, arsip DHD 45 Prop. Jatim, 1974.

- Smit, Mr. Dr. C., *De Dekolonisatie van Indonesie Feiten en Beschouwingen*, tinjauan buku oleh Sutrisno Kutoyo, Proyek IDKD. Dep. P dan K Jakarta, 1979.
KD Dep. P dan K Jakarta, 1979.
- Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1972.
- Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Dep. Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Sugardo Perbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, 1970.
- Sugianto, *Sedjarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia*, Widjaya, Djakarta 1971.
- Suparto Broto, *Oh Surabaya*, Roda Pengetahuan, Jakarta, 1977.
- Susanto Tirtoprodjo SH. Drs., *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, Pt. Pembangunan, Djakarta.
- Sutjiatiningsih, Dra., *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo*, Dep. P dan K Jakarta, 1977.
- Syahir, Moch., *Sejarah Perjuangan 45 di Bojonegoro*, Paper, Arsip DHD 45 Prop. Jatim.
- Talbi, S., *Sejarah Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, Paper, Arsip DHD 45 Prop. Jatim.
- Team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur, *Sejarah Daerah*, Direktorat Jendral Kebudayaan Dep. P dan K, Surabaya, 1976.
- Team Sejarah IKIP Malang, *Sejarah Kabupaten Malang*, naskah dikutip oleh Jurusan Sejarah FKIS - IKIP Surabaya, 1971.
- Titie Said dan Lies Said, "Jaman Jepang Yang Begitu Mengherikan", *Majalah Wanita Kartini*, No. 133, tgl. 10 s/d 23 Desember 1979.
- Trimartojo SH., *Laporan Singkat Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur*, tanggal 20 Januari 1975.

Wardan B. Palenewan, "Penyiaran Proklamasi Dilakukan Secara Kilat", *Minggu Merdeka*, 19 Oktober 1975.

Wawardi, R., *Mengenang Hari Pahlawan 10 Nopember*, naskah, 1974.

-----, "Peranan Wanita Dalam Gerakan Koperasi, dalam *30 Tahun Koperasi*, Surabaya, 1974.

Wehl, David, *The Birth of Indonesia*, George Allen & Unwin Ltd., London, 1947.

Wirjono Prodjodikoro SH., Prof. Dr. *Kenang-kenangan Sebagai Hakim/Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman*, Pt. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

Yamin, Prof. H. Mohammad, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, Balai Pustaka, Djakarta, 1958.

-----, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, djilid Pertama, Jajasan Prapantja, 1959.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, Jakarta, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1974.
Yuddha Minggu, No. 139, Jakarta, 25 Agustus 1974.

Wawancara

1. Darjiah Surodikusumo, Wawancara tanggal 13 Maret 1980 di Jl. Pacar no. 1 Surabaya.
2. Doel Arnowo, Wawancara tanggal 17-2-1974 di Jl. Dempo No. 13 Malang.
3. Imam Turmudi, Wawancara tanggal 15-12-1979 di PUSKESMAS Banyuwangi.
4. Jacob, Wawancara tanggal 9-10-1979 di Gubeng Kertajaya Vd/7 Surabaya.
5. S. Kasman Kertodirdjo, Wawancara tanggal 20-27-30 Desember 1973 di Jl. Kalibokor Selatan No. 142 Surabaya.
6. Koerneo Moeljosubroto, Wawancara tanggal 8-12-1973 di Kedung Klintar IX/15 Surabaya.

7. T.D. Kundan, Wawancara tanggal 7-11-1973 di Jl. Tunjung-an no. 97 Surabaya.
8. Mohammad Ali, Wawancara tanggal 14-10-1979 di Jl. Butan no. 87 Surabaya.
9. R.M. Roeslan Wongsokoesoemo, Wawancara tanggal 25-10-1976 di Jl. Ketabangkali no. 45 Surabaya.
10. Said Hidayat atau Wiwiek Hidayat, Wawancara tanggal 11-2-1974 di Pahlawan no. 30 Surabaya.
11. Slamet Oetojo, Wawancara tanggal 14-2-1974 di Rangkah VI/109 Surabaya.
12. Kol. Purn. TNI-AL Soejono, Wawancara tanggal 28-10-1979 di Jl. Kutei No. 6 Surabaya.
13. Suleimanhadi, Wawancara tanggal 15-2-1974 di Jl. Kartini No. 3 Malang.
14. Sutopangarso, Wawancara tanggal 15-12-1979 di bekas Perumahan Kantor P dan K Banyuwangi.
15. B. Suwardi, Wawancara tanggal 14-10-1979 di Banyu Urip Kidul V/29 Surabaya.

GLOSARIUM

Abdullah Lelonoputro, salah satu nama samaran Jendral Sudirman dalam jaman Aksi Militer Belanda II.

Arek-arek Suroboyo, bangsa Indonesia dari pelbagai suku yang pada tahun 1945 bertempat tinggal di Surabaya.

AFNEI, Allied Forces Netherlands Indies.

AMPAL, Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut; nama perumahan dari Barisan Sukarela SE 21/24 Butai.

Anjing Laut, nama dari Batalyon IX.

Banteng Belorok, *Satriyo Keriting*, nama meriam penangkis udara RI yang sudah dirubah menjadi meriam lapangan.

Baret Merah, Corps Marinier Brigade Baret Merah; kesatuan pasukan Belanda yang sebagian besar terdiri dari orang Ambon.

BBS, Bewakings Batalyon Surabaya.

BFO, Bijeenkomst voor Federal Overleg, Pertemuan Untuk Permusyawaratan Federal Musyawarah antara negara-negara bagian.

Branjangan, nama Batalyon 20 Brigade II divisi I.

Bumihangus, merusak bangunan-bangunan dan sebagainya (dalam perang).

Bundancoo, komandan regu PETA

Bungkyokyoku, Biro Pendidikan.

Burgermeester, Walikota.

Busyido, semangat kesetiaan Jepang.

Cease Fire Order, Perintah Penghentian tembak menembak, Perintah gencatan senjata.

CP, Comando Pos.

COPP, Comando Pertahanan dan Pertempuran.

Coup d'etat, perebutan kekuasaan.

Dijebloskan ke dalam tahanan, dimasukkan ke dalam tahanan.

Dlemok cung, tidak merata

Dood alle Inlanders, bunuhlah semua bangsa Indonesia

Fighting spirit, semangat juang

Front, medan perang

FDR, Front Demokrasi Rakyat

Fujin Kai, himpunan kewanitaan

Gakutotai, himpunan pelajar sekolah menengah

Gerbong Maut, peristiwa perjalanan kereta api dari Bondowoso ke Surabaya yang membawa korban 46 orang pejuang Indonesia meninggal dan 8 orang sakit parah pada tanggal 23 Nopember 1947.

GL, Gerilya Liar, korps pelajar Bojonegoro di bawah pimpinan Hartono dan Adnan.

Groggy Kumiai, koperasi nelayan

Hakkoo Iciu, kemakmuran bersama Asia Timur Raya.

Hara kiri, bunuh diri.

Hijrah, perpindahan pasukan (tentara)

Heiho, pembantu prajurit

Hookookai, himpunan kebaktian

Hosookyooku, jawatan radio.

HVA, Handels Vereeniging Amsterdam.

Inferno, neraka.

Jejeran, permulaan pertunjukan.

Kantong, *Daerah Kantong*, daerah kekuasaan pasukan RI di dalam daerah pendudukan Belanda

Kawakan, tua sekali, angkatan tua.

Kaigun Seiko Shikikan, Panglima Angkatan Laut.

Kentrung, rebana, terbang

Kogyoo Gakkoo, sekolah negeri

Kempeitai, polisi militer

Keimin Bunka Syidoosoo, pusat kebudayaan.

KL, Koningklijke Leger, Tentara Mahkota Belanda.

KNIL, Koningklijke Nederlands Indische Leger, Tentaga Mahkota Hindia Belanda.

Lakon, jalan cerita.

Mencatut, melakukan pekerjaan pedagang perantara.

Mentes, berbobot

Mokuyu, senapan kayu.

MID, Militaire Inlichtingen Dienst.

MLD, Marine Luchtvaarts Dienst.

MPS, Markas Pertahanan Surabaya.

MVD, Militaire Veiligheids Dienst.

Natuurwetenschappen, ilmu-ilmu alam.

Naimubu, Departemen urusan dalam negeri.

NEFIS, Nederlands Forces Intelligence Service.

Neiseibutyoo, Kepala bagian pemerintahan umum.

NICA, Netherlands Indies Civil Administration.

ORI, *Oeang Repoeblik Indonesia*.

OVW Oorlogs Vrijwilligers, Pasukan Sukarelawan.

Pak De, salah satu nama samaran Jendral Sudirman dalam jaman Aksi Militer Belanda II.

Paleis Rijswijk, gedung Istana Merdeka Jakarta.

PAM, Patriot Anti, Muso, organisasi illegal para pelajar Madiun yang menentang pemerintahan PKI Muso di Madiun.

Pasukan 0032 ALRI, pasukan pelopor TLRI Pangkalan X.

Pedalaman (Daerah . . .), daerah kekuasaan RI.

Pendudukan (daerah . . .), daerah kekuasaan Belanda.

Pemerintah Federal, pemerintah sipil Belanda di daerah pendudukan.

PERA, (Organisasi) Pertahanan Rakyat (di daerah Bojonegoro).

Pos Pamungkas, Pos terakhir (PKI Muso di Madiun untuk mengakhiri nyawa para tawannya).

PRDT, Persatuan Rakyat Djawa Timur.

RAF, Royal Air Force.

RECOMBA, Regeringcommissarissen voor Bestuuraangelegenheden, Pemerintah Komisioner Belanda, Pemerintah Federal Sementara.

RERA, Reorganisasi dan Rasionalisasi (TNI).

Ruwet, kusut, kacau-balau.

Ronggolawe, nama Brigade I dari Dicus I.

Sandi, rahasia, samar, *Polisi sandi*, Polisi rahasia.

Semut Merah, nama Batalyon V.

Sekiyu Haikyu Jimusho Thobu Sisho, Kantor Minyak Daerah Jawa Timur Pemerintah Militer Jepang.

- Senmin Kogyoo Gakkoo*, Sekolah Menengah Tinggi Teknik.
- SPDT*, Staf Pertahanan Djawa Timur.
- SGAP*, Staf Gabungan Angkatan Perang.
- SS Troeps*, Corps Intelligent Brigade I/Ronggolawe.
- Tanah bengkok*, tanah/sawah bagian pamong desa (lurah dsb.), sebagai pengganti gajihnya.
- Takeyari*, bambu runcing.
- Tokubetsu syuu keisatsutai*, Pasukan Polisi Perjuangan (P3).
- Tokubetsu Shi keisatsutai*, Pasukan Polisi Istimewa.
- Taigaihosobu*, (studio) siaran luar negeri.
- TGP*, Tentara Genie Pelajar.
- TP*, Tentara Pelajar.
- TRIP*, Tentara Republik Indonesia Pelajar.
- Truce*, gencatan senjata.
- Tyuu Gakkoo*, Sekolah Menengah Pertama.
- Union Jack*, bendera Inggris.
- Volksfront*, Persatuan Perjuangan.
- Vlaggen Actie*, Gerakan Pengibaran Bendera.
- Wadah*, tempat.
- Wingate Action*, menyebar untuk menyusun kembali kekuatan ditempat tugas (di daerah pendudukan) dengan terlebih dahulu melalui daerah-daerah yang diduduki musuh (Belanda).
- XBI*, Brigade tak ditenal kaum terpelajar.

